

# LAPORAN PEREKONOMIAN

## Provinsi Jawa Timur

Mei 2023





Publikasi ini dapat diakses secara online pada:  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Mei-2023.aspx>

Salinan publikasi ini juga dapat diperoleh dengan menghubungi:  
**Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi**  
**Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur**  
Jl. Pahlawan No.105 Surabaya, 60175 Indonesia  
(Email) KPwJatim-KPKP@bi.go.id



## **VISI** **Bank Indonesia**

“Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.”



## **MISI** **Bank Indonesia**

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah
7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.



## **Nilai - Nilai** **Strategis**

*Trust and Integrity – Professionalism – Excellence – Public Interest – Coordination and Teamwork* yang berdasarkan keluhuran nilai-nilai agama (religi)

# KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan perekonomian triwulanan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi *stakeholders* eksternal maupun internal yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi daerah, pembiayaan daerah dan pengembangan akses UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Timur ke depan.

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2023 melanjutkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh 4,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,76% (yoy). Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur tersebut terutama ditopang oleh lebih tingginya pertumbuhan konsumsi domestik. Kenaikan konsumsi domestik didorong oleh berlangsungnya serangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), persiapan Pemilu tahun 2024, serta kenaikan kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar di Jawa Timur. Sementara itu, lebih tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2023 didukung oleh kenaikan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja transfer daerah. Peningkatan konsumsi domestik tersebut berimplikasi pada lebih tingginya kinerja lapangan usaha (LU) utama, yakni LU Perdagangan serta LU Transportasi dan Pergudangan. Lebih lanjut, panen padi yang berlangsung di sejumlah sentra di Jawa Timur mendorong peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan.

Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 6,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 6,52% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan permintaan yang masih gradual, terkendalinya ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang melambat, penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan tarif Angkutan Udara, serta peningkatan pasokan beberapa komoditas hortikultura seiring dengan pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi.

Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga Jawa Timur pada triwulan I 2023 masih terjaga. Hal ini tercermin dari risiko kredit dan risiko likuiditas yang masih dalam batas aman.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan konsolidasi fiskal domestik. Sementara itu, tingkat inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0±1% (yoy).

Dalam penyusunan laporan ini, Bank Indonesia memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti BPS, perbankan dan instansi di lingkungan pemerintah daerah, BUMN maupun swasta, serta pihak-pihak lainnya. Atas seluruh bantuan dan kerja sama tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin baik selama ini dapat dijaga dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga mengharapkan masukan dan saran untuk lebih meningkatkan kualitas kajian agar dapat memberikan manfaat yang maksimal. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah selalu memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas-tugas kita masing-masing untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Provinsi Jawa Timur, serta bangsa dan negara.

Surabaya, Mei 2023  
Kepala Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi Jawa Timur

ttd.

**Doddy Zulverdi**  
Asisten Gubernur

## DAFTAR ISI

ii	Visi, Misi dan Nilai Strategis Bank Indonesia
iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
vi	Daftar Grafik
xi	Daftar Tabel
xii	Ringkasan Eksekutif
xvii	Tabel Indikator

## BAB I

### Perkembangan Ekonomi Makroregional

1.1.	Kondisi Umum Perekonomian Jawa Timur	2
1.2.	PDRB Sisi Permintaan	3
1.2.1.	Konsumsi	3
1.2.2.	Investasi	6
1.2.3.	Ekspor – Impor	7
1.3.	PDRB Sisi Penawaran	9
1.3.1.	Industri Pengolahan	9
1.3.2.	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10
1.3.3.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12
1.3.4.	Konstruksi	13
1.3.5.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14

## BAB II

### Keuangan Pemerintah

2.1.	Gambaran Umum	28
2.2.	APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	28
2.2.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	28
2.2.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur	30
2.2.3.	Tracking Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2023	32
2.3.	APBD 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	32
2.3.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota	32
2.3.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota	35
2.3.3.	Tracking Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota Triwulan II 2023	37
2.4.	APBN di Jawa Timur Tahun 2023	37
2.4.1.	Anggaran Belanja APBN	37
2.4.2.	Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur	38
2.4.3.	Tracking Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan II 2023	39



BAB  
III**Perkembangan  
Inflasi**

3.1.	Kondisi Umum	42
3.2.	Kinerja Inflasi Jawa Timur	42
3.2.1.	Perkembangan Inflasi Triwulan II 2023	42
3.2.2.	Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang Dan Jasa	43
3.3.	Analisis Inflasi Spasial Jawa Timur	46
3.4.	Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	47
3.5.	Tracking Inflasi Triwulan II 2023	48

BAB  
IV**Pembiayaan Daerah,  
Pengembangan Akses  
Keuangan dan UMKM**

4.1.	Kondisi Umum	60
4.2.	Pembiayaan Daerah di Jawa Timur	60
4.2.1.	Dana Pihak Ketiga	60
4.2.2.	Penyaluran Kredit	61
4.2.3.	Loan to Deposit Ratio (LDR)	62
4.3.	Perkembangan Kinerja Korporasi	63
4.3.1.	Kinerja Umum Korporasi	63
4.3.2.	Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi	64
4.4.	Perkembangan Kinerja Rumah Tangga	66
4.4.1.	Kinerja Umum Rumah Tangga	66
4.4.2.	Eksposur Perbankan pada Rumah Tangga	67
4.5.	Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM	69
4.5.1.	Eksposur Perbankan pada UMKM	69
4.5.2.	Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM	71

BAB  
V**Sistem Pembayaran dan  
Pengelolaan Uang Rupiah**

5.1.	Kondisi Umum	76
5.2.	Perkembangan Sistem Pembayaran di Jawa Timur	76
5.2.1.	Sistem Pembayaran Tunai	76
5.2.2.	Transaksi Sistem Pembayaran	78
5.3.	Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	80
5.3.1.	Penanganan Uang Palsu	80
5.3.2.	Penyediaan Uang Rupiah	81
5.3.3.	Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai	81

BAB  
VI**Ketenagakerjaan  
dan Kesejahteraan**

6.1.	Gambaran Umum	86
6.2.	Ketenagakerjaan	86
6.2.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur	86
6.3.	Kesejahteraan	90
6.4.	Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan	93
6.4.1.	Kesejahteraan Petani	93
6.4.2.	Kesejahteraan Nelayan	95

BAB  
VII**Prospek  
Perekonomian Daerah**

7.1.	Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2023	100
7.1.1.	Sisi Permintaan	100
7.1.2.	Sisi Penawaran	100
7.2.	Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2023	102

**BOKS**

Boks 1.	Dampak Pembukaan Ekonomi Tiongkok terhadap Jalur Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur	16
Boks 2.	Urgensi Mendorong Penguatan Hulu – Hilir Pertanian untuk Menjaga Ketahanan Pangan Jawa Timur dan Nasional	20
Boks 3.	Pemetaan Komoditas Utama Pertanian dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Unggul Jawa Timur	23
Boks 4.	Jawa Timur Sebagai Lumbung Beras Nasional Dihadapkan pada Tantangan Fenomena El Nino	50
Boks 5.	Tantangan Produksi Telur Ayam Ras dalam Pengendalian Inflasi di Jawa Timur	52
Boks 6.	Pengaruh Harga Komoditas Bahan Pangan Strategis Terhadap Inflasi Jawa Timur	55

# Grafik



Grafik 1.1	Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional	2	Grafik 1.18	Pertumbuhan Muat Barang Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak	8
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa	2	Grafik 1.19	Kondisi Ekonomi Saat Ini Wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan KTI	8
Grafik 1.3	Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT Jawa Timur	4	Grafik 1.20	Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	9
Grafik 1.4	Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, Indeks Penghasilan RT di Jawa Timur	4	Grafik 1.21	Pertumbuhan Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan	9
Grafik 1.5	Sumber Pembiayaan Konsumsi Rumah Tangga	4	Grafik 1.22	Perkembangan Komoditas Utama Ekspor LN di Jawa Timur	10
Grafik 1.6	Pangsa DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023	5	Grafik 1.23	<i>Manufacturing Purchasing Managers' Index</i> Amerika, Swiss, dan Malaysia	10
Grafik 1.7	Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023	5	Grafik 1.24	Kredit LU Industri Pengolahan	10
Grafik 1.8	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Timur	5	Grafik 1.25	Kredit Sub Sektor Industri	10
Grafik 1.9	Perkembangan Realisasi Belanja APBD Total Kab/Kota Jawa Timur	5	Grafik 1.26	Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil	11
Grafik 1.10	Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur	6	Grafik 1.27	Perkembangan Bongkar Muat Bandara Juanda	11
Grafik 1.11	Pertumbuhan Investasi Jawa Timur	6	Grafik 1.28	Perkembangan Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Perak	11
Grafik 1.12	Perkembangan Kondisi Investasi Dunia Usaha dan Realisasi Belanja Modal	6	Grafik 1.29	Kredit Korporasi LU Perdagangan	11
Grafik 1.13	Pertumbuhan PMA dan PMDN Jawa Timur	7	Grafik 1.30	Pertumbuhan Nilai Ekspor LN Jawa Timur berdasarkan Lapangan Usaha Utama	12
Grafik 1.14	Nominal PMA dan PMDN Jawa Timur	7	Grafik 1.31	Realisasi Kegiatan Usaha LU Pertanian	12
Grafik 1.15	Neraca Perdagangan Jawa Timur	7	Grafik 1.32	Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Padi Jawa Timur	12
Grafik 1.16	Pertumbuhan Nilai Ekspor LN Jawa Timur berdasarkan Lapangan Usaha Utama	8	Grafik 1.33	Kabupaten/Kota Produksi Padi Jawa Timur	13
Grafik 1.17	Pertumbuhan Ekspor LN Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama	8	Grafik 1.34	Pertumbuhan Produksi Gula Tebu	13
			Grafik 1.35	Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi	13
			Grafik 1.36	Impor Material Konstruksi	13
			Grafik 1.37	Pertumbuhan Konsumsi Semen	14



# Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2023

Grafik 1.38	Investasi Penanaman Modal Asing Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	14	Grafik 2.9	Perkembangan APBD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2023	32
Grafik 1.39	Mobilitas ke Ritel & Rekreasi dan Penjualan Eceran Makanan Minuman	15	Grafik 2.10	Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2023	33
Grafik 1.40	Rata – rata Lama Menginap dan Pertumbuhan TPK Hotel Berbintang	15	Grafik 2.11	Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021-2023 (berdasarkan anggaran)	33
Grafik 1.41	Pertumbuhan Jumlah Kedatangan Wisman dan Internasional Penumpang Bandara Juanda	15	Grafik 2.12	Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	33
Grafik 1.42	Kredit LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15	Grafik 2.13	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sampai dengan Triwulan I 2023	35
Grafik 2.1	Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2023	28	Grafik 2.14	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2023	36
Grafik 2.2	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi Jawa Timur	28	Grafik 2.15	Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2022-2023	36
Grafik 2.3	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)	29	Grafik 2.16	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023	36
Grafik 2.4	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)	29	Grafik 2.17	Persentase Realisasi Belanja Daerah APBD Kab/Kota Jawa Timur s.d Triwulan I 2023	37
Grafik 2.5	Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)	31	Grafik 2.18	Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)	37
Grafik 2.6	Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)	31	Grafik 2.19	Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)	37
Grafik 2.7	Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)	32	Grafik 2.20	Pangsa Anggaran Belanja APBN Jawa Timur Menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2023	38
Grafik 2.8	Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)	32	Grafik 2.21	Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)	38
			Grafik 2.22	Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2022 dan 2023 di Jawa Timur	39
			Grafik 2.23	Proyeksi Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)	39

# Grafik

Grafik 3.1	Perkembangan Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur dan Nasional (yoy)	42	Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum	61
Grafik 3.2	Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Jawa Triwulan I 20223 (yoy)	42	Grafik 4.4	Perkembangan Rasio CASA Bank Umum	61
Grafik 3.3	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	43	Grafik 4.5	Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek	62
Grafik 3.4	Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi	43	Grafik 4.6	Perkembangan Rasio NPL Bank Umum	63
Grafik 3.5	Perkembangan Harga Avtur dan Tingkat Inflasi Komoditas Angkutan Udara	43	Grafik 4.7	Perkembangan <i>Loan at Risk</i> (LAR) Bank Umum	63
Grafik 3.6	Perkembangan Harga Bahan Bakar Khusus (BBK)/ Nonsubsidi TMT	44	Grafik 4.8	Perkembangan <i>Loan to Deposit</i> (LDR) Bank Umum	63
Grafik 3.7	Perkembangan Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	44	Grafik 4.9	Perkembangan BI7DRR dan Suku Bunga Bank Tertimbang	63
Grafik 3.8	Perkembangan Harga <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) Dunia	44	Grafik 4.10	Kenaikan BI7DRR dan Suku Bunga Bank Tertimbang	63
Grafik 3.9	Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	45	Grafik 4.11	Perkembangan SBT Kegiatan Usaha	64
Grafik 3.10	Perkembangan Harga Emas Dunia	45	Grafik 4.12	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	64
Grafik 3.11	Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	46	Grafik 4.13	Perkembangan Kondisi Rentabilitas Korporasi	64
Grafik 3.12	Perkembangan Harga Tomat	46	Grafik 4.14	Perkembangan Kondisi Likuiditas Korporasi	64
Grafik 3.13	Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya	46	Grafik 4.15	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis	64
Grafik 3.14	Model Prediksi ENSO	49	Grafik 4.16	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur	65
Grafik 4.1	Perkembangan Aset Perbankan	61	Grafik 4.17	Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi	65
Grafik 4.2	Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset Perbankan	61	Grafik 4.18	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi	65
			Grafik 4.19	Perkembangan Rasio NPL Kredit Modal Kerja Korporasi	65
			Grafik 4.20	Perkembangan Pertumbuhan Kredit Investasi Korporasi	66



# Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2023

Grafik 4.21	Perkembangan Rasio NPL Kredit Investasi Korporasi	66	Grafik 4.38	Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur	70
Grafik 4.22	Pertumbuhan DPK Korporasi	66	Grafik 4.39	Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur	71
Grafik 4.23	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi	66	Grafik 5.1	Rasio UTLE terhadap Inflow Jawa Timur	77
Grafik 4.24	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	67	Grafik 5.2	Statistik Uang Palsu yang Ditemukan	78
Grafik 4.25	Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Penghasilan	67	Grafik 5.3	Pangsa Temuan Uang Palsu berdasarkan Wilayah Kerja Bank Indonesia	78
Grafik 4.26	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga	67	Grafik 5.4	Temuan Uang Palsu Per Pecahan	78
Grafik 4.27	Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit	67	Grafik 5.5	Perkembangan Kliring Jawa Timur	79
Grafik 4.28	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR-KPA	68	Grafik 5.6	Transaksi Kliring Spasial Jawa	79
Grafik 4.29	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB	68	Grafik 5.7	Perkembangan RTGS Provinsi Jawa Timur	79
Grafik 4.30	Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna	69	Grafik 5.8	Perkembangan RTGS Spasial	79
Grafik 4.31	Perkembangan Pertumbuhan DPK RT	69	Grafik 5.9	Perkembangan Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	80
Grafik 4.32	Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT	69	Grafik 5.10	Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	80
Grafik 4.33	Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur	70	Grafik 5.11	Penggunaan Kartu ATM/Debit	80
Grafik 4.34	Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur	70	Grafik 5.12	Penggunaan Kartu Kredit	80
Grafik 4.35	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	70	Grafik 5.13	Transaksi dan Jumlah Uang Elektronik	80
Grafik 4.36	Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral	70	Grafik 5.14	Nominal Transaksi Kas Keliling	80
Grafik 4.37	Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM	70	Grafik 5.15	Nominal Transaksi Penukaran	80
			Grafik 5.16	Aktivitas Kas Titipan Jawa Timur	80
			Grafik 5.17	Perkembangan <i>Merchant</i> QRIS per Skala Usaha	82
			Grafik 5.18	Pangsa Jumlah <i>Merchant</i> QRIS per Kabupaten/Kota	82
			Grafik 5.19	Perkembangan Volume dan Nominal Transaksi QRIS	82

# Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Mei 2023



Grafik 6.1	Jumlah Tenaga Kerja LU Utama	87	Grafik 6.17	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota	93
Grafik 6.2	Pangsa Tenaga Kerja Sektoral	87	Grafik 6.18	Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa	94
Grafik 6.3	Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal	88	Grafik 6.19	NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)	94
Grafik 6.4	Komposisi Tenaga Kerja Formal-Informal	88	Grafik 6.20	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	95
Grafik 6.5	Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal secara sektor (berdasarkan Persentase)	88	Grafik 6.21	Inflasi Pedesaan Jawa Timur	95
Grafik 6.6	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	89	Grafik 6.22	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa	95
Grafik 6.7	Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	89	Grafik 6.23	NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur	95
Grafik 6.8	Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	89	Grafik 7.1	Proyeksi Indeks Nino	103
Grafik 6.9	Keyakinan Konsumen, Penghasilan RT, dan Lapangan Usaha Saat Ini	90	Grafik 7.2	Proyeksi Indeks <i>Indian Ocean Dipole</i> (IOD)	103
Grafik 6.10	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	91			
Grafik 6.11	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa	91			
Grafik 6.12	Perubahan Pendapatan Bulanan Masyarakat di Jawa Timur pada September 2022 dan Oktober 2022	91			
Grafik 6.13	Persentase Penurunan Pengeluaran Masyarakat di Jawa Timur Berdasarkan Kelompok Pengeluaran, Oktober 2022 dibandingkan September 2022	91			
Grafik 6.14	Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	92			
Grafik 6.15	Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota	92			
Grafik 6.16	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan	93			

# Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Permintaan	2	Tabel 3.4	Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan I 2023 (%yoy)	47
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Penawaran	3	Tabel 4.1	Pertumbuhan DPK Perbankan Jawa Timur berdasarkan Kelompok Nilai	61
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023	29	Tabel 5.1	Perkembangan <i>Inflow – Outflow</i> Jawa Timur (miliar rupiah)	77
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023	30	Tabel 6.1	Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)	87
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023	33	Tabel 6.2	Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha	90
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023	35	Tabel 6.3	Rasio Gini Jawa Timur	93
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023	38	Tabel 6.4	NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur	94
Tabel 3.1	Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Triwulan I 2023 (yoy)	42	Tabel 7.1	Prospek Perekonomian Dunia – <i>World Economic Outlook</i>	101
Tabel 3.2	Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Triwulan I 2023 (yoy)	43	Tabel 7.2	Perkiraan Arah Pertumbuhan PDRB Sisi Penawaran (LU Utama) Tahun 2023 (%yoy)	102
Tabel 3.3	Capaian Inflasi 8 Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)	47	Tabel 7.3	Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur Tahun 2023	104

# Ringkasan Eksekutif

**Ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh 4,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 (4,76%, yoy).**

**Dari sisi permintaan, perbaikan kinerja ekonomi ditopang oleh konsumsi Rumah Tangga (RT), LNPRT, dan pemerintah. Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja didorong oleh LU Utama, yakni LU Perdagangan, LU Pertanian, serta LU Transportasi dan Pergudangan.**

**Pada tahun 2023, anggaran belanja Pemerintah secara agregat di wilayah Jawa Timur tercatat sebesar Rp262,30 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.**

**Kinerja realisasi belanja Pemerintah di wilayah Jawa Timur tercatat meningkat ditopang oleh membaiknya realisasi belanja APBD.**

## Asesmen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

**Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 melanjutkan perbaikan.** Pada triwulan laporan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,95% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 4,76% (yoy). Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 terutama ditopang oleh lebih tingginya pertumbuhan konsumsi domestik, yakni konsumsi rumah tangga (RT), Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintah. Kenaikan konsumsi RT dan LNPRT didorong oleh berlangsungnya serangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), persiapan Pemilu tahun 2024, serta peningkatan kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar di Jawa Timur. Sementara itu, lebih tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2023 didukung oleh kenaikan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja transfer daerah. Peningkatan konsumsi domestik tersebut berimplikasi pada lebih tingginya kinerja LU utama, yakni LU Perdagangan serta LU Transportasi dan Pergudangan. Lebih lanjut, panen padi yang berlangsung di sejumlah sentra di Jawa Timur mendorong peningkatan kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan.

**Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan pertumbuhan investasi serta ekspor barang dan jasa.** Masih tingginya ketidakpastian global yang disebabkan oleh masih berlangsungnya konflik geopolitik, masih tingginya inflasi global, serta gejolak perbankan di Amerika Serikat dan Eropa berdampak pada perlambatan kinerja ekonomi dunia sehingga menekan kinerja ekspor luar negeri (LN) Jawa Timur. Lebih lanjut, masih tingginya ketidakpastian global tersebut turut berdampak pada kecenderungan para investor dan pelaku bisnis bersikap *wait and see* untuk merealisasikan investasi dan ekspansi industri pada triwulan laporan. Di samping itu, kendala pembebasan lahan, peningkatan harga bahan baku, dan pola realisasi anggaran konstruksi yang masih rendah pada awal tahun berdampak pada lebih rendahnya kinerja investasi bangunan pada triwulan I 2023. Lebih rendahnya kinerja investasi serta ekspor barang dan jasa tersebut berimplikasi pada perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi di Jawa Timur pada triwulan I 2023.

## Asesmen Keuangan Pemerintah Daerah

**Pada tahun 2023, anggaran belanja Pemerintah secara agregat di wilayah Jawa Timur meningkat.** Pagu anggaran tersebut tercatat sebesar Rp262,30 triliun, meningkat 2,34% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp256,30 triliun. Komposisi anggaran belanja Pemerintah masih didominasi oleh anggaran Kementerian/Lembaga vertikal (APBN) sebesar Rp121,99 triliun (pangsa 46,51%), kemudian diikuti oleh anggaran gabungan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (APBD Kabupaten/Kota) sebesar Rp109,19 triliun (pangsa 41,63%) dan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur (APBD Provinsi) sebesar Rp31,12 triliun (pangsa 11,86%). Adapun peningkatan pagu anggaran belanja Pemerintah sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menjaga resiliensi ekonomi pascapandemi COVID-19.

**Kinerja realisasi belanja Pemerintah di wilayah Jawa Timur tercatat meningkat.** Sampai dengan triwulan I 2023, realisasi total belanja Pemerintah di wilayah Jawa Timur mencapai Rp41,59 triliun atau meningkat 4,97% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp39,62 triliun. Peningkatan terutama didorong oleh realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi yang masing-masing meningkat 25,76% (yoy) dan 0,10% (yoy). Perkembangan tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja realisasi pendapatan di tengah peningkatan aktivitas ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, kinerja realisasi belanja APBN Provinsi tercatat menurun 1,95% (yoy) di tengah masih berlangsungnya proses untuk melengkapi pemenuhan persyaratan administratif oleh Pemerintah Daerah untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*).

## Asesmen Inflasi Daerah

**Tekanan inflasi gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur pada triwulan I 2023 menurun dibandingkan triwulan IV 2022.** Inflasi gabungan Kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Jawa Timur tercatat sebesar 6,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian triwulan IV 2022 sebesar 6,52% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan permintaan yang masih gradual, terkendalinya ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang melambat, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan tarif Angkutan Udara, serta peningkatan pasokan beberapa komoditas hortikultura seiring dengan pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi. Berdasarkan kelompok, melandainya inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur terutama disebabkan oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (RT); serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

**Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023, namun masih berada di atas kisaran target inflasi 3,0±1,0% (yoy).** Semakin terkendalinya tingkat inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 diperkirakan terutama terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh meningkatnya pasokan bahan pangan sejalan dengan masih berlangsungnya masa panen komoditas beras dan hortikultura. Lebih lanjut, intensifikasi kegiatan forum pengendalian inflasi daerah, serta implementasi sinergi TPIP-TPID dengan program strategis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diperkirakan turut menjadi faktor penahan tekanan inflasi pada triwulan II 2023. Meskipun demikian, inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 diperkirakan masih berada di atas kisaran target inflasi 3,0±1,0% (yoy) terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras sejalan dengan pemenuhan program bantuan sosial. Di samping itu, gangguan cuaca El Nino yang diperkirakan mulai terjadi pada Juni berisiko turut mengganggu produksi tanaman pangan.

## Pembiayaan Daerah dan Pengembangan UMKM

**Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, kendati mengalami perlambatan khususnya pada sektor korporasi.** Hal ini terindikasi sejalan dengan perkembangan suku bunga kredit sebagai dampak adanya transmisi suku bunga kebijakan moneter. Kinerja penyaluran kredit RT masih tercatat tumbuh kuat ditopang oleh perbaikan daya beli masyarakat dan peningkatan optimisme RT terhadap kondisi perekonomian saat ini. Sektor RT juga mencatatkan peningkatan DPK yang diindikasikan sebagai respon dari eskalasi ketidakpastian global dan masih relatif tingginya tingkat inflasi. Lebih lanjut, peningkatan DPK RT juga sejalan dengan kebijakan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia yang telah ditransmisikan dengan baik. Di sisi lain, kinerja penghimpunan DPK dan penyaluran kredit kepada korporasi tercatat menurun pada triwulan I 2023 sejalan dengan deselerasi kinerja beberapa LU utama Jawa Timur di tengah perlambatan permintaan global.

**Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, terindikasi dari risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2023 yang masih berada dalam batas aman.** Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,41%, masih berada dalam batas aman meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27%. Lebih lanjut, risiko likuiditas terpantau cenderung rendah yang tercermin dari rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 90,77% atau masih dalam kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

**Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat 6,13% (yoy), menurun dibandingkan triwulan IV 2022 (6,52%; yoy).**

**Pada triwulan II 2023, inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur diperkirakan lebih rendah dari realisasi triwulan I 2023.**

**Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, kendati mengalami perlambatan khususnya pada sektor korporasi.**

**Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga, tercermin dari risiko kredit dan risiko likuiditas yang masih dalam batas aman**

Pada triwulan I 2023 pergerakan *outflow* (uang keluar) dan *inflow* (uang masuk) di Jawa Timur dalam posisi *net-inflow*.

Transaksi tunai di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia, baik nilai besar maupun ritel, pada triwulan I 2023 tercatat menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut.

## Asesmen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Pada triwulan I 2023, transaksi pembayaran baik tunai maupun non tunai mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN Natal dan Tahun Baru serta periode libur sekolah pada akhir tahun. Transaksi tunai di Jawa Timur pada triwulan I 2023 mencatatkan *net-inflow* yang terkonfirmasi dengan kenaikan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga (RT), Giro, dan Deposito pada triwulan laporan. Aktivitas belanja pemerintah di triwulan I 2023 juga lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022, dimana pada periode akhir tahun pemerintah cenderung mengoptimalkan realisasi belanja pada tahun anggaran tersebut. Demikian pula dengan transaksi non-tunai SKNBI, RTGS, APMK, dan Uang Elektronik yang juga mengalami penurunan transaksi. Adapun penurunan instrumen pembayaran ritel melalui APMK dan Uang Elektronik sejalan dengan bertambahnya instrumen pembayaran lainnya, baik melalui QRIS maupun BI-FAST, yang menawarkan kemudahan transaksi lintas operator.

Transaksi tunai di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023, KPw Jawa Timur mencatatkan *net-inflow* sebesar Rp 9,82 triliun, setelah sebelumnya mengalami *net-outflow* pada triwulan IV 2022 sebesar Rp8,78 triliun. Peningkatan *inflow* dan penurunan *outflow* sebagaimana pola historisnya dipengaruhi oleh penurunan konsumsi masyarakat pasca HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah pada akhir tahun. Masyarakat cenderung untuk menyimpan uangnya di bank, yang terkonfirmasi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga (RT) yang mengalami peningkatan dari 0,92% (yoy) menjadi 1,92% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan terutama pada komponen Giro yang meningkat dari 4,26% (yoy) menjadi 6,54% (yoy) pada triwulan laporan, serta komponen Deposito yang meningkat dari -2,23% (yoy) menjadi 4,66% (yoy) pada triwulan laporan.

Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia pada triwulan I 2023 tercatat menurun. Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada triwulan I 2023 tercatat menurun masing-masing sebesar 13,47% (qtq) dan 12,01% (qtq) dipengaruhi oleh penurunan kebutuhan untuk bertransaksi dalam jumlah besar. Sementara itu, transaksi nontunai ritel juga terpantau menurun. Hal tersebut tercermin dari penurunan nominal transaksi melalui APMK dan Uang Elektronik yang masing-masing turun sebesar 1,81% (qtq) dan 13,20% (qtq). Kondisi ini sejalan dengan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat pasca peningkatan aktivitas ekonomi di periode Natal dan Tahun Baru.

Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut. Jumlah *merchant* QRIS pada triwulan I 2023 di Jawa Timur telah mencapai 2,82 juta, diiringi oleh peningkatan jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 4,53 juta. Peningkatan tersebut mendorong nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang tercatat meningkat 16,85% (qtq) pada triwulan I 2023.

## Asesmen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022. Lebih tingginya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2022 tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode terkait. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh adanya musim tanam tanaman pangan dan terkonfirmasi oleh adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada sektor tersebut. Peningkatan tenaga kerja pertanian juga terlihat dari meningkatnya tenaga kerja informal, maupun tenaga kerja tidak

terampil seperti meningkatnya pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga/tidak dibayar, maupun tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Namun demikian, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut relatif minim terjadi pada tenaga kerja formal dan terampil yang terindikasi dari menurunnya penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan dan konstruksi seiring dengan melambatnya investasi dan kinerja industri pengolahan. Minimnya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas tersebut menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat juga relatif terbatas.

**Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau lebih baik dibandingkan September 2021, kendati sedikit menurun dibandingkan Maret 2022.** Hal tersebut tercermin dari lebih rendahnya jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang ditopang oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 mendorong semakin tingginya penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit menurun dibandingkan Maret 2022. Perlambatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang berdampak pada peningkatan tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi sehingga menekan pendapatan dan pengeluaran sekelompok masyarakat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022.

**Kesejahteraan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan pada triwulan I 2023, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat menurun.** Kenaikan NTP didorong oleh peningkatan penerimaan petani di sektor tanaman pangan dan tanaman hortikultura sejalan dengan peningkatan harga komoditas beras, jagung, aneka cabai, dan aneka buah/sayuran. Sementara itu, kesejahteraan kelompok nelayan terpantau menurun pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan konsumsi dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penerimaan nelayan, terutama untuk perikanan laut.

## Prospek Ekonomi dan Inflasi Tahun 2023

**Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022 disebabkan oleh faktor global dan domestik.** Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan berada di kisaran 4,6% - 5,4% (yoy), cenderung bias bawah, termoderasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,3%(yoy). Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh estimasi kinerja ekonomi global pada tahun 2023 yang diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat konflik geopolitik Rusia – Ukraina dan Tiongkok – Taiwan yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Hal tersebut diprakirakan menahan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2023. Meskipun demikian, pembukaan ekonomi Tiongkok, salah satu mitra dagang luar negeri utama Jawa Timur, pada Januari 2023 diprakirakan menahan risiko penurunan ekspor LN Jawa Timur lebih dalam. Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diprakirakan turut dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal pemerintah sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Sejalan dengan perbaikan ekonomi yang

**Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022 tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diiringi dengan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode terkait.**

**Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit menurun dibandingkan Maret 2022, namun lebih baik dibandingkan September 2021, tercermin dari dinamika jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur.**

**Kinerja ekonomi Jawa Timur 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif, namun termoderasi dibandingkan tahun 2022.**

terjadi, pemerintah berupaya mengembalikan kebijakan anggaran untuk tidak lebih dari 3%. Konsolidasi fiskal tersebut diperkirakan berdampak pada pengurangan sejumlah insentif fiskal serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal tersebut diperkirakan menahan laju pertumbuhan konsumsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih tinggi pada tahun 2023 dan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

**Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).**

**Inflasi gabungan Kota IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).** Tingginya tekanan inflasi dari sisi penawaran pada tahun 2022 terutama akibat peningkatan harga hortikultura serta penyesuaian harga energi berdampak pada tingkat inflasi IHK di Jawa Timur pada tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan batas atas sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Pada tahun 2023, tekanan inflasi dari sisi penawaran diperkirakan mereda sejalan dengan upaya mitigasi hama antraknosa yang menyerang tanaman hortikultura dan vaksinasi Penyakit Mulut Kuku (PMK) pada sapi. Di samping itu, harga komoditas energi global yang melandai dibandingkan tahun 2022 diperkirakan turut berimplikasi pada lebih rendahnya tekanan inflasi dari sisi penawaran. Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID beserta GNPIP diperkirakan turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).

# Tabel Indikator Ekonomi

## A. PDRB

INDIKATOR	2022					2023
	I	II	III	IV	TOTAL	I
<b>PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Milliar)</b>						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.261	47.020	48.708	36.650	173.638	41.887
Pertambangan dan Penggalian	17.972	17.909	17.814	18.138	71.834	18.057
Industri Pengolahan	132.609	132.793	134.599	136.541	536.543	137.999
Pengadaan Listrik dan Gas	1.223	1.256	1.280	1.306	5.065	1.460
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	436	450	459	456	1.801	457
Konstruksi	38.289	38.622	41.706	43.401	162.019	40.546
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	81.268	82.009	84.578	85.740	333.595	86.573
Transportasi dan Pergudangan	12.505	13.237	13.512	13.968	53.223	13.973
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.492	23.156	23.728	24.777	94.152	24.613
Informasi dan Komunikasi	29.205	29.753	29.761	30.394	119.114	30.934
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.697	11.034	10.601	10.764	43.096	10.813
Real Estate	7.752	7.914	7.970	7.982	31.619	8.012
Jasa Perusahaan	3.214	3.259	3.263	3.376	13.113	3.415
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.409	8.731	8.637	9.261	35.039	8.529
Jasa Pendidikan	11.488	11.465	11.492	12.134	46.579	12.098
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.248	3.283	3.354	3.258	13.143	3.358
Jasa lainnya	5.722	6.156	6.118	6.254	24.250	6.227
<b>PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Milliar)</b>						
Konsumsi RT	254.460	263.988	261.849	269.574	1.049.872	268.098
Konsumsi LNPRT	4.282	4.526	4.578	4.628	18.014	4.687
Konsumsi Pemerintah	14.390	17.261	18.946	21.119	71.717	14.668
Pembentukan Modal Tetap Bruto	111.363	111.688	118.039	121.222	462.312	117.053
Ekspor Barang dan Jasa	73.617	63.406	63.817	59.605	260.446	245.401
Impor Barang dan Jasa	75.656	83.132	87.685	84.659	331.132	203.711
Net Ekspor	41.697	56.279	64.001	50.165	212.142	41.690

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

INDIKATOR	2022					2023
	I	II	III	IV	TOTAL	I
<b>PDRB Penawaran - (%; yoy)</b>						
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,77	1,28	1,63	0,48	1,79	1,52
Pertambangan dan Penggalian	(8,04)	(9,99)	(6,61)	(3,28)	(7,04)	0,47
Industri Pengolahan	7,00	8,05	5,46	4,71	6,28	4,06
Pengadaan Listrik dan Gas	7,26	9,58	7,36	5,98	7,52	19,39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,39	3,13	3,25	1,26	2,26	4,71
Konstruksi	3,92	8,03	6,20	7,04	6,30	5,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,59	6,99	8,10	5,83	6,87	6,53
Transportasi dan Pergudangan	18,74	22,17	28,02	10,63	19,47	11,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,99	8,57	13,14	9,68	9,34	9,43
Informasi dan Komunikasi	6,63	5,01	2,28	4,32	4,53	5,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	4,85	0,60	1,57	2,32	1,09
Real Estate	2,89	4,90	5,30	5,12	4,55	3,36
Jasa Perusahaan	4,51	5,37	5,15	5,69	5,18	6,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,74	(5,84)	1,66	4,85	0,26	1,42
Jasa Pendidikan	0,06	(0,12)	1,93	1,53	0,85	5,32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,27	5,53	(0,58)	0,33	2,30	3,38
Jasa lainnya	5,32	13,07	19,43	12,35	12,44	8,82
<b>PDRB Permintaan - (%; yoy)</b>						
Konsumsi RT	5,31	6,69	7,16	5,00	6,03	5,36
Konsumsi LNPRT	4,11	8,19	8,82	7,80	7,25	9,47
Konsumsi Pemerintah	3,83	(4,05)	(0,06)	1,40	0,11	1,93
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,88	7,14	4,57	6,10	5,41	5,11
Ekspor Barang dan Jasa	29,20	0,03	10,21	(0,94)	9,23	0,88
Impor Barang dan Jasa	15,28	15,51	27,04	5,64	15,47	0,05
Net Ekspor	(6,91)	24,58	23,82	11,55	13,67	5,12
Pertumbuhan PDRB (%; yoy)	5,24	5,76	5,59	4,76	5,34	4,95

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

## B. INFLASI

INDIKATOR	2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK)</b>									
JAWA TIMUR	105,37	105,62	105,96	107,26	108,57	110,82	113,17	114,25	115,23
- Kota Surabaya	105,54	105,81	106,27	107,60	108,88	110,98	113,61	114,69	115,74
- Kota Malang	104,16	104,49	104,61	105,85	107,26	110,03	112,02	112,68	113,42
- Kota Kediri	105,77	106,13	105,86	107,10	108,23	110,41	112,52	113,27	114,03
- Kab. Jember	106,36	106,46	106,35	107,69	109,41	112,35	114,11	115,65	116,50
- Kab. Sumenep	105,65	105,09	106,19	108,15	109,42	112,17	113,13	114,98	112,86
- Kota Probolinggo	105,07	105,15	105,17	106,38	107,44	109,92	110,85	112,18	113,32
- Kota Madiun	105,26	106,03	105,32	106,44	107,77	110,16	111,79	112,61	116,46
- Kab. Banyuwangi	104,64	104,63	104,62	105,69	106,93	109,25	110,33	112,09	113,04
<b>LAJU INFLASI TAHUNAN (% , yoy)</b>									
JAWA TIMUR	1,28	1,19	1,92	2,45	3,04	4,92	6,80	6,52	6,13
- Kota Surabaya	1,23	1,16	2,13	2,71	3,16	4,89	6,91	6,59	6,30
- Kota Malang	1,26	0,99	1,15	1,75	2,98	5,30	7,08	6,45	5,74
- Kota Kediri	1,30	1,51	1,14	1,64	2,33	4,03	6,29	5,76	5,36
- Kab. Jember	1,67	1,62	1,63	2,09	2,87	5,53	7,30	7,39	6,48
- Kab. Sumenep	1,47	1,81	2,18	2,57	3,57	5,79	5,40	6,32	5,04
- Kota Probolinggo	1,55	1,32	1,65	1,76	2,26	4,60	6,14	5,45	5,15
- Kota Madiun	1,81	1,68	1,93	2,00	2,38	4,76	6,54	5,80	6,43
- Kab. Banyuwangi	1,44	1,10	1,27	1,59	2,19	4,42	5,46	6,06	5,71

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

## C. SISTEM PEMBAYARAN

INDIKATOR	2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<i>Inflow</i> (Rp. Triliun)	27,66	23,30	12,68	12,52	19,92	24,70	16,89	16,05	24,71
<i>Outflow</i> (Rp. Triliun)	11,31	25,89	13,08	19,47	12,62	23,91	15,96	24,83	14,89
Volume Kliring (Juta Lembar)	1,21	1,22	1,18	1,34	1,12	1,07	0,85	0,85	0,74
Nominal Kliring (Rp. Triliun)	69,56	69,84	69,19	80,58	69,00	65,10	62,97	65,64	56,79
Volume RTGS	140,99	142,66	140,97	164,23	137,83	131,66	132,57	138,70	116,58
Nominal RTGS (Rp. Triliun)	314,28	360,33	365,10	605,42	560,13	502,75	389,89	445,83	392,29

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

D. PERBANKAN  
D.1. Bank Umum

INDIKATOR	2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>Kinerja (Miliar Rp)</b>									
Total Asset	769.303	797.047	816.652	817.466	828.785	843.976	846.797	854.144	837.333
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	296.383	305.429	314.950	317.802	317.384	322.652	331.983	340.289	331.365
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	111.266	119.798	125.533	124.990	131.960	137.582	125.789	123.717	114.858
- Bank Umum Swasta Nasional	344.418	355.590	360.273	359.847	363.591	367.653	370.551	371.267	372.510
- Bank Asing	17.236	16.231	15.896	14.827	15.851	16.088	18.473	18.870	18.600
Dana Pihak Ketiga	640.995	660.206	678.276	683.276	681.570	690.114	700.319	707.827	699.739
- Giro	120.134	121.410	131.764	130.312	135.796	140.352	143.790	145.428	135.136
- Tabungan	270.888	286.941	295.136	307.552	303.623	309.308	312.141	317.856	306.309
- Deposito	249.973	251.855	251.376	245.413	242.151	240.454	244.388	244.543	258.295
Kredit Lokasi Bank (LB)	445.042	451.985	482.272	491.054	494.792	508.297	514.238	520.475	522.926
- Kredit Modal Kerja	242.435	260.172	263.026	269.306	270.042	280.080	282.069	283.584	281.799
- Kredit Investasi	67.537	75.987	76.097	76.128	78.582	81.387	82.263	83.667	85.689
- Kredit Konsumsi	135.070	143.031	143.149	145.620	146.167	146.831	149.906	153.225	155.438
Kredit Lokasi Proyek (LP)	546.659	554.791	536.692	581.346	588.787	615.997	622.968	630.454	635.176
- Kredit Modal Kerja	286.746	292.674	282.863	307.538	308.440	328.484	331.725	332.755	329.115
- Kredit Investasi	101.288	99.852	98.391	109.024	112.231	117.863	117.789	119.507	125.057
- Kredit Konsumsi	158.624	162.264	155.438	164.784	168.116	169.650	173.454	178.192	181.004
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	237.403	255.884	258.544	265.902	270.156	280.300	281.733	285.342	286.340
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	91.477	99.151	99.686	105.878	105.005	109.741	109.064	112.144	111.397
- Kredit Sektor Perdagangan	122.799	130.205	130.960	130.706	133.793	136.797	137.087	137.601	138.772
- Kredit Sektor Pertanian	23.128	26.528	27.898	29.318	31.358	33.762	35.582	35.597	36.171
<b>Pertumbuhan (% , yoy)</b>									
Total Asset	8,87	10,66	9,53	7,97	7,73	5,89	3,69	4,49	1,03
- Bank Umum Milik Negara (BUMN)	5,63	7,19	7,42	8,03	7,09	5,64	5,41	7,08	4,41
- Bank Pemerintah Daerah (BPD)	29,35	24,51	19,37	22,55	18,60	14,85	0,20	(1,02)	(12,96)
- Bank Umum Swasta Nasional	7,49	11,27	10,24	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
- Bank Asing	(12,15)	(16,91)	(22,32)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)	(14,03)
Dana Pihak Ketiga	8,41	8,94	8,52	8,01	6,33	4,53	3,25	3,59	2,67
- Giro	16,64	11,99	21,33	19,41	13,04	15,60	9,13	11,60	-0,49
- Tabungan	9,10	13,32	11,94	11,46	12,08	7,80	5,76	3,35	0,88
- Deposito	4,17	3,05	-0,55	-0,85	-3,13	-4,53	-2,78	-0,35	6,67
Kredit Lokasi Bank (LB)	-7,18	-4,21	2,14	2,88	11,18	12,46	6,63	5,99	5,69
- Kredit Modal Kerja	-5,94	2,36	3,39	5,12	11,39	7,65	7,24	5,30	4,35
- Kredit Investasi	-16,35	-3,59	-2,85	-5,25	16,35	7,11	8,10	9,90	9,04
- Kredit Konsumsi	-4,20	2,99	2,67	3,44	8,22	2,66	4,72	5,22	6,34
Kredit Lokasi Proyek (LP)	-4,59	-1,21	-4,59	5,29	7,71	11,03	16,08	8,45	7,88
- Kredit Modal Kerja	-5,98	-1,95	-5,56	6,94	7,57	12,24	17,27	8,20	6,70
- Kredit Investasi	-5,36	-4,60	-6,12	2,96	10,80	18,04	19,72	9,62	11,43
- Kredit Konsumsi	-1,46	2,44	-1,73	3,85	5,98	4,55	11,59	8,14	7,67

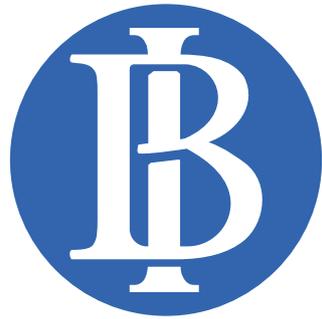
INDIKATOR	2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Kredit LB ke Sektor Ekonomi Utama	-8,33	0,87	-19,68	3,57	13,80	9,54	8,97	7,31	5,99
- Kredit Sektor Industri Pengolahan	-18,79	-9,22	-33,06	0,73	14,79	10,68	9,41	5,92	6,09
- Kredit Sektor Perdagangan	-2,48	5,99	-9,18	3,17	8,95	5,06	4,68	5,28	3,72
- Kredit Sektor Pertanian	13,31	22,83	-3,07	17,56	35,59	27,27	27,54	21,42	15,35
Rasio Keuangan (%)									
NPL Lokasi Bank	3,68	3,85	4,05	3,55	3,65	3,84	3,85	3,34	3,43
- NPL Kredit Modal Kerja	4,93	5,02	5,47	4,70	4,83	4,89	4,95	4,34	4,50
- NPL Kredit Investasi	2,68	2,70	2,83	2,74	2,84	3,54	3,45	2,73	2,54
- NPL Kredit Konsumsi	1,92	2,03	2,08	1,86	1,89	2,01	1,99	1,82	1,97
NPL Lokasi Proyek	4,01	4,20	4,41	3,89	3,82	3,92	3,89	3,27	3,41
LDR Lokasi Bank	69,43	68,46	71,10	71,87	72,60	73,65	73,43	73,53	74,73
LDR Lokasi Proyek	85,28	84,03	79,13	85,08	86,39	89,26	88,95	89,07	90,77

Sumber : Laporan Bank (diolah)

D.2. Bank Umum Syariah

INDIKATOR	2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>Kinerja (Miliar Rp)</b>									
Total Asset	44.995	46.858	44.029	44.947	46.364	46.410	47.501	49.186	48.646
Dana Pihak Ketiga	36.779	38.225	35.720	39.850	40.458	40.257	40.815	42.411	43.633
- Giro	4.167	3.294	3.820	4.427	4.515	4.026	4.369	4.093	4.526
- Tabungan	16.127	17.257	17.580	18.543	18.919	20.193	21.116	21.875	22.071
- Deposito	16.486	17.674	14.321	16.880	17.024	16.038	15.330	16.443	17.037
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	29.220	30.070	31.665	30.169	30.803	31.909	33.062	34.097	34.554
- Modal Kerja	10.463	11.390	11.093	9.435	9.556	9.751	9.762	9.884	9.462
- Investasi	3.960	4.707	4.780	4.466	4.871	5.227	5.523	5.752	6.121
- Konsumsi	14.797	15.915	15.792	16.268	16.376	16.931	17.777	18.460	18.971
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	36.611	37.817	37.413	36.272	36.792	40.025	41.437	43.713	34.554
- Modal Kerja	12.091	12.645	12.184	10.939	10.725	12.319	13.452	13.749	9.462
- Investasi	8.371	8.498	8.462	8.054	8.665	9.799	9.160	10.456	6.121
- Konsumsi	16.148	16.674	16.767	17.279	17.403	17.907	18.825	19.508	18.971
Pembiayaan LB ke Sektor Ekonomi Utama	8.661	9.371	9.390	8.154	8.468	8.849	9.119	9.567	9.594
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	3.628	3.462	3.372	2.608	2.625	2.801	3.007	3.359	3.631
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	4.556	5.217	5.365	4.931	5.215	5.386	5.445	5.508	5.097
- Pembiayaan Sektor Pertanian	477	692	653	615	628	662	667	700	866
<b>Pertumbuhan (% , yoy)</b>									
Total Asset	12,44	19,17	5,74	6,14	3,04	-0,96	7,89	9,43	4,92
Dana Pihak Ketiga	16,44	24,99	6,73	11,48	10,00	5,32	14,26	6,43	7,85
- Giro	51,50	17,72	11,10	29,52	8,36	22,23	14,39	-7,54	0,24
- Tabungan	11,76	17,81	13,65	13,09	17,31	17,01	20,12	17,97	16,66
- Deposito	14,43	34,54	-1,66	5,96	3,26	-9,26	7,05	-2,59	0,08
Pembiayaan Lokasi Bank (LB)	0,48	4,72	7,46	1,37	5,42	6,12	4,41	13,02	12,18
- Modal Kerja	-4,15	7,17	3,99	-11,69	-8,67	-14,39	-12,00	4,76	-0,98
- Investasi	-13,92	4,14	4,82	6,84	23,02	11,05	15,55	28,80	25,66
- Konsumsi	9,09	17,31	10,92	9,20	10,67	6,38	12,57	13,47	15,85
Pembiayaan Lokasi Proyek (LP)	1,24	6,26	4,68	0,41	0,50	5,84	10,76	20,51	-6,08
- Modal Kerja	-9,18	0,13	1,15	-9,97	-11,30	-2,58	10,40	25,69	-11,78
- Investasi	1,47	0,36	-1,72	-2,07	3,51	15,31	8,25	29,82	-29,36
- Konsumsi	10,61	15,05	11,15	9,71	7,77	7,39	12,28	12,90	9,01
Pembiayaan ke Sektor Ekonomi Utama	-3,21	9,55	8,78	-6,18	-2,23	-5,57	-2,89	17,33	13,30
- Pembiayaan Sektor Industri Pengolahan	-9,03	-3,31	-10,92	-32,54	-27,65	-19,08	-10,82	28,80	38,32
- Pembiayaan Sektor Perdagangan	2,60	17,85	23,25	12,66	14,47	3,24	1,49	11,70	-2,26
- Pembiayaan Sektor Pertanian	-8,27	26,50	32,28	37,28	31,63	-4,33	2,07	13,82	37,90
<b>Rasio Keuangan (%)</b>									
NPL Lokasi Bank	3,81	3,80	4,75	3,41	3,37	3,55	3,88	3,41	3,43
- Modal Kerja	6,06	5,68	8,66	5,89	5,62	6,12	7,59	6,96	4,50
- Investasi	2,63	3,17	2,83	1,88	2,09	1,81	1,98	1,64	2,54
- Konsumsi	2,54	2,70	2,58	2,40	2,44	2,61	2,44	2,07	1,97
NPL Lokasi Proyek	4,30	4,24	4,94	3,95	3,98	3,90	4,05	3,59	3,59
LDR Lokasi Bank	79,45	78,66	88,65	75,71	76,14	79,26	81,00	80,40	79,19
LDR Lokasi Proyek	99,54	98,93	104,74	91,02	90,94	99,42	101,52	103,07	103,62

Sumber : Laporan Bank (diolah)





Bab I

# Perkembangan Ekonomi Makroregional



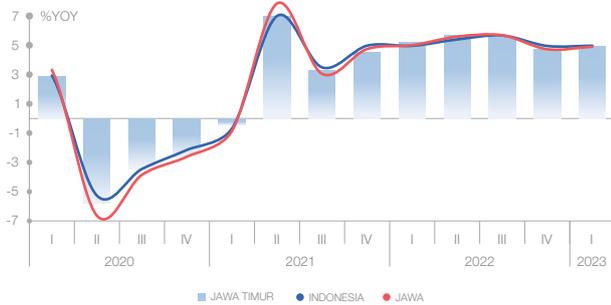
## 1.1. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN JAWA TIMUR

Kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan kinerja dari sisi permintaan ditopang oleh lebih tingginya pertumbuhan konsumsi swasta dan pemerintah. Dari sisi penawaran, percepatan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan LU Perdagangan, LU Pertanian, serta LU Transportasi dan Pergudangan. Peningkatan lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja investasi dan ekspor dari sisi permintaan, serta perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi dari sisi penawaran.

### Kinerja Perekonomian Triwulan I 2023

Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, kinerja ekonomi Jawa Timur tumbuh 4,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,76% (yoy) (Grafik 1.1).<sup>1</sup> Dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, Jawa Timur menempati peringkat keempat setelah DIY (5,31%, yoy), Jawa Tengah (5,04%, yoy), dan Jawa Barat (5,00%, yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terpantau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa dan nasional yang masing-masing tercatat sebesar 4,96% (yoy), dan 5,03% (yoy) (Grafik 1.2).

Grafik 1.1 Perekonomian Jawa Timur, Jawa, Nasional

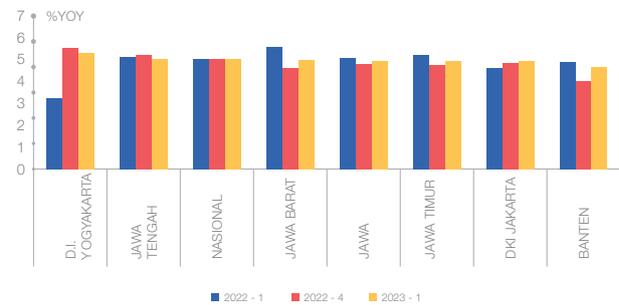


Sumber : BPS (diolah)

Peningkatan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 terutama ditopang oleh lebih tingginya pertumbuhan konsumsi RT, LNPRT, dan pemerintah pada periode laporan. Pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2023, dan rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti Imlek, Nyepi, Ramadhan, dan persiapan Idul Fitri 2023 mendorong kuatnya permintaan domestik Jawa Timur. Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan kinerja konsumsi RT pada periode laporan. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi LNPRT pada triwulan I 2023 terutama ditopang oleh dimulainya persiapan Pemilu tahun 2024 serta kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan besar di Jawa Timur. Sementara itu, lebih tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2023 didukung oleh kenaikan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja transfer, serta berlanjutnya subsidi, bantuan penanggulangan kenaikan BBM, dan operasi pasar untuk persiapan Ramadhan.

Peningkatan permintaan domestik mendorong lebih tingginya kinerja LU utama di Jawa Timur, yaitu LU Perdagangan dan LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan I 2023. Peningkatan permintaan domestik tercermin dari lebih tingginya pertumbuhan konsumsi RT pada triwulan laporan dibandingkan triwulan

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Jawa



Sumber : BPS (diolah)

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Permintaan (%yoy)

KOMPONEN	2022				2023
	I	II	III	IV	I
Konsumsi Rumah Tangga	5,31	6,69	7,16	5,00	5,36
Konsumsi Lnprrt	4,11	8,19	8,82	7,80	9,47
Konsumsi Pemerintah	3,83	-4,05	-0,06	1,40	1,93
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,88	7,14	4,57	6,10	5,11
Perubahan Inventori	2,93	8,25	39,01	-11,56	-24,28
Ekspor Luar Negeri	29,20	0,03	10,21	-0,94	0,88
Impor Luar Negeri	15,28	15,51	27,04	5,64	0,05
<b>PDRB PROVINSI MENURUT PENGGUNAAN</b>	<b>5,24</b>	<b>5,76</b>	<b>5,59</b>	<b>4,76</b>	<b>4,95</b>

Sumber : BPS (diolah)

Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↑  
 Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↓  
 Sama dengan triwulan sebelumnya ↔

1. Pada Rilis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 6 Februari 2023, BPS Provinsi Jawa Timur mengoreksi angka pertumbuhan PDRB Jawa Timur pada triwulan III 2022 dari 5,58% (yoy) (pada rilis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 7 November 2022) menjadi 5,59% (yoy).

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB Jawa Timur – Sisi Penawaran (%yoy)

LAPANGAN USAHA	2022				2023
	I	II	III	IV	I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,77 ↓	1,28 ↓	1,63 ↑	0,48 ↓	1,52 ↑
Pertambangan dan Penggalian	-8,04 ↑	-9,99 ↓	-6,61 ↑	-3,28 ↑	0,47 ↑
Industri Pengolahan	7,00 ↑	8,05 ↑	5,46 ↓	4,71 ↓	4,06 ↓
Pengadaan Listrik dan Gas	7,26 ↓	9,58 ↑	7,36 ↓	5,98 ↓	19,39 ↑
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,39 ↓	3,13 ↑	3,25 ↑	1,26 ↓	4,71 ↑
Konstruksi	3,92 ↓	8,03 ↑	6,20 ↓	7,04 ↑	5,89 ↓
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,59 ↓	6,99 ↑	8,10 ↑	5,83 ↓	6,53 ↑
Transportasi dan Pergudangan	18,74 ↑	22,17 ↑	28,02 ↑	10,63 ↓	11,74 ↑
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,99 ↑	8,57 ↑	13,14 ↑	9,68 ↓	9,43 ↓
Informasi dan Komunikasi	6,63 ↑	5,01 ↓	2,28 ↓	4,32 ↑	5,92 ↑
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28 ↑	4,85 ↑	0,60 ↓	1,57 ↑	1,09 ↓
Real Estate	2,89 ↑	4,90 ↑	5,30 ↑	5,12 ↓	3,36 ↓
Jasa Perusahaan	4,51 ↓	5,37 ↑	5,15 ↓	5,69 ↑	6,25 ↑
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,74 ↑	-5,84 ↓	1,66 ↑	4,85 ↑	1,42 ↓
Jasa Pendidikan	0,06 ↑	-0,12 ↓	1,93 ↑	1,53 ↓	5,32 ↑
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,27 ↑	5,53 ↑	-0,58 ↓	0,33 ↑	3,38 ↑
Jasa lainnya	5,32 ↑	13,07 ↑	19,43 ↑	12,35 ↓	8,82 ↓
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>5,24 ↑</b>	<b>5,76 ↑</b>	<b>5,59 ↓</b>	<b>4,76 ↓</b>	<b>4,95 ↑</b>

Sumber : BPS (dolah)

Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↑  
 Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ↓  
 Sama dengan triwulan sebelumnya →

sebelumnya. Hal tersebut menopang lebih tingginya kinerja LU Perdagangan pada triwulan laporan. Lebih lanjut, pencabutan kebijakan PPKM dan momen libur Imlek dan Nyepi turut mendorong mobilitas masyarakat yang berimplikasi pada perbaikan kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada triwulan laporan (Tabel 1.2).

**Berlangsungnya panen padi dan jagung mendukung peningkatan kinerja LU Pertanian di Jawa Timur pada triwulan laporan.** Perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023 turut ditopang oleh panen padi yang berlangsung di daerah sentra, yakni di Kab. Tuban, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Banyuwangi, Kab. Jombang, Kab. Ponorogo, dan Kab. Madiun. Lebih lanjut, berlangsungnya panen jagung di Jawa Timur terutama di Kab. Tuban, Kab. Sumenep dan Kab. Jember turut mendorong kenaikan LU Pertanian di Jawa Timur pada triwulan laporan.

**Percepatan kinerja ekonomi Jawa Timur yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan pertumbuhan investasi serta ekspor barang dan jasa.** Konflik geopolitik Rusia – Ukraina dan Tiongkok – Taiwan yang masih berlanjut dan masih tingginya tekanan inflasi global berdampak pada disrupsi rantai pasokan global serta berimplikasi pada kebijakan proteksionisme global. Lebih lanjut, gejolak perbankan global di Amerika Serikat dan Eropa pada akhir triwulan I 2023 turut berdampak pada peningkatan ketidakpastian global yang berimplikasi pada perlambatan kinerja ekonomi global. Hal tersebut menyebabkan penurunan perdagangan global, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, sehingga turut menekan kinerja ekspor Jawa Timur pada periode laporan. Peningkatan ketidakpastian global tersebut berdampak pada kecenderungan para investor dan

pelaku bisnis untuk bersikap *wait and see* dalam merealisasikan investasi dan ekspansi industri pada triwulan laporan. Di samping itu, kendala pembebasan lahan, peningkatan harga bahan baku, dan pola realisasi anggaran konstruksi yang masih rendah pada awal tahun turut berdampak pada lebih rendahnya kinerja investasi bangunan pada triwulan laporan. Lebih rendahnya kinerja investasi serta ekspor barang dan jasa tersebut berimplikasi pada perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi di Jawa Timur pada triwulan I 2023.

## 1.2. PDRB SISI PERMINTAAN

**Perekonomian Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh lebih tinggi terutama didorong oleh percepatan kinerja konsumsi Rumah Tangga (RT), konsumsi LNPRT, dan konsumsi pemerintah. Peningkatan lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja investasi serta ekspor barang dan jasa.**

### 1.2.1. Konsumsi

Kinerja konsumsi pada triwulan I 2023 meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 didukung oleh peningkatan konsumsi swasta dan konsumsi pemerintah. Lebih tingginya kinerja konsumsi swasta pada triwulan laporan ditopang oleh peningkatan permintaan masyarakat seiring pencabutan kebijakan PPKM, kenaikan UMK, dan momen rangkaian HBKN. Sementara itu, peningkatan kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan laporan terutama didorong oleh pertumbuhan realisasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja transfer.

### 1.2.1.1. Konsumsi Swasta (Rumah Tangga & LNPRT)<sup>2</sup>

#### Kinerja Konsumsi Swasta Triwulan I 2023

**Konsumsi swasta meningkat pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya.** Hal ini tercermin pada lebih tingginya pertumbuhan konsumsi swasta dari 5,05% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi sebesar 5,43% (yoy) pada periode laporan. Lebih tingginya konsumsi swasta Jawa Timur ditopang oleh kinerja kedua komponennya yaitu konsumsi RT dan LNPRT (Grafik 1.3).<sup>3</sup> Pencabutan kebijakan PPKM, kenaikan UMK tahun 2023, rangkaian HBKN (Imlek, Nyepi, Ramadhan, dan persiapan Idul Fitri 2023), serta peningkatan aktivitas organisasi kemasyarakatan mendukung peningkatan laju konsumsi swasta pada triwulan I 2023.

**Lebih tingginya permintaan masyarakat sejalan dengan perluasan pembukaan sektor ekonomi dan kenaikan mobilitas masyarakat mendorong peningkatan kinerja konsumsi swasta Jawa Timur pada triwulan laporan.** Sejalan dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan berlanjutnya vaksinasi COVID-19, Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan PPKM pada 30 Desember 2023.<sup>4</sup> Pencabutan kebijakan PPKM mendorong semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif dan peningkatan mobilitas masyarakat sehingga berimplikasi pada peningkatan konsumsi masyarakat. Lebih lanjut, peningkatan konsumsi turut ditopang oleh momen libur HBKN Imlek dan Nyepi serta Ramadhan.

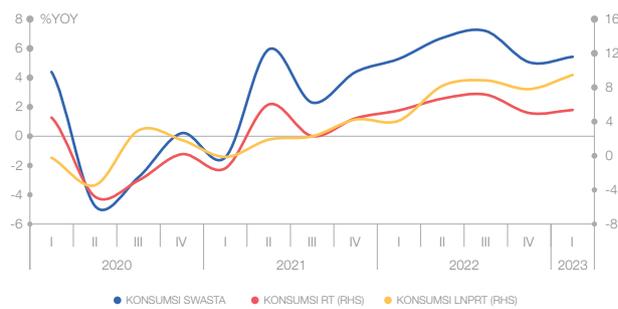
**Perbaikan kinerja konsumsi swasta Jawa Timur turut ditopang oleh peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat pada triwulan laporan.** Percabutan kebijakan PPKM mendorong semakin luasnya penciptaan lapangan kerja yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Lebih lanjut, momen Ramadhan turut mendukung kenaikan lapangan kerja informal musiman yang turut berdampak pada kenaikan penghasilan masyarakat. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja di Jawa Timur tercermin dari Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dari 113,88 pada triwulan IV 2022 menjadi 116,57 pada triwulan laporan. Sementara itu, peningkatan pendapatan masyarakat ini tercermin dari Indeks Penghasilan Saat Ini – Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur yang meningkat dari 126,67 pada triwulan IV 2022 menjadi 134,07 pada triwulan I 2023 (Grafik 1.4).

#### Peningkatan konsumsi terjadi di sektor ritel dan barang tahan lama.

Kenaikan kinerja konsumsi ritel tercermin dari peningkatan Indeks Penjualan Riil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur dari 4,53% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi

2. Konsumsi swasta merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi LNPRT.  
3. Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 5,36% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,00% (yoy). Sementara itu, kinerja konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 9,47% (yoy) pada triwulan I 2023, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 7,80% (yoy).  
4. - Kasus Covid-19 di Jawa Timur pada triwulan I 2023 turun sebanyak 29.978 kasus dibandingkan triwulan IV 2022.  
- Realisasi vaksinasi Covid-19 dosis 2 di Jawa Timur pada triwulan I 2023 telah mencapai 74,70% dari target sasaran (35.339.869 dosis)  
- Pemerintah resmi melakukan pencabutan kebijakan PPKM pada Jumat, 30 Desember 2022 yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.

Grafik 1.3 Pertumbuhan Konsumsi Swasta, Rumah Tangga dan LNPRT



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.4 Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja di Jawa Timur



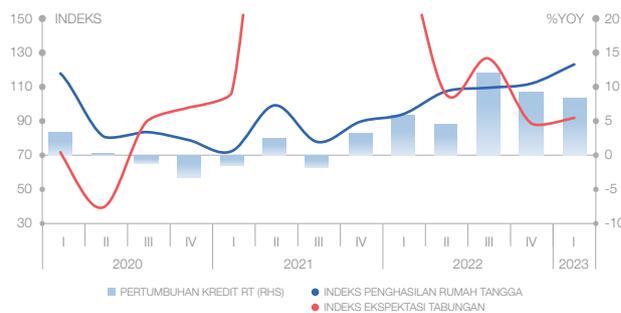
Sumber : SK Bank Indonesia (diolah)

5,31% (yoy) pada periode laporan. Lebih lanjut, konsumsi barang tahan lama pada triwulan I 2023 turut mengalami perbaikan, tercermin dari Indeks Pembelian Barang Tahan Lama Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia Jawa Timur dari 110,89 di triwulan IV 2022 meningkat menjadi 121,80 pada triwulan I 2023.

#### Perbaikan konsumsi pada triwulan laporan turut didukung oleh Kredit Rumah Tangga (RT).

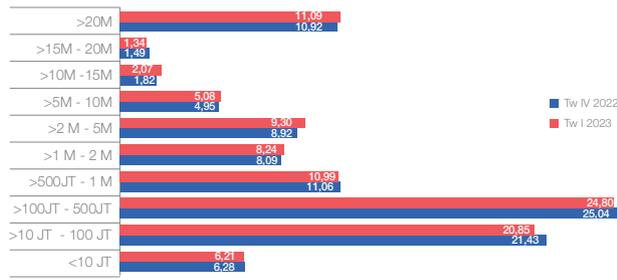
Kredit RT mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,13% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik 1.5). Pertumbuhan positif kredit RT didorong oleh pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang masing – masing tercatat tumbuh 6,27% dan 10,51% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022

Grafik 1.5 Sumber Pembiayaan Konsumsi Rumah Tangga



Sumber : SK Bank Indonesia dan Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 1.6 Pangsa DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

yang masing-masing tumbuh 5,97% dan 9,57% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan kenaikan konsumsi pada triwulan laporan turut ditopang oleh Kredit Rumah Tangga.

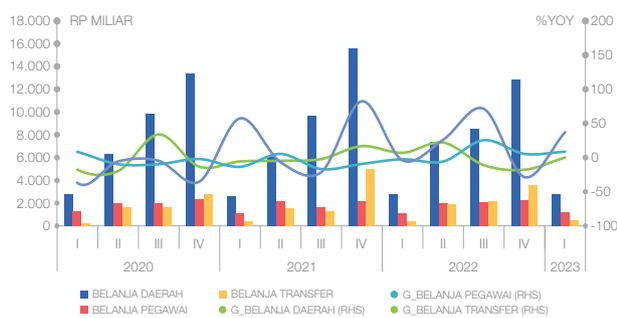
**DPK sektor rumah tangga tumbuh lebih tinggi di tengah peningkatan konsumsi RT pada triwulan laporan mengindikasikan potensi tren perbaikan konsumsi swasta ke depan.** DPK sektor rumah tangga di perbankan Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh 1,92% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh 0,92% (yoy). Peningkatan DPK sektor rumah tangga di tengah peningkatan konsumsi swasta pada triwulan laporan mengindikasikan masyarakat cenderung tetap menyisihkan pendapatan. Hal tersebut seiring peningkatan pendapatan masyarakat pada periode tersebut. (Grafik 1.6 – 1.7).

### 1.2.1.2. Konsumsi Pemerintah

#### Kinerja Konsumsi Pemerintah Triwulan I 2023

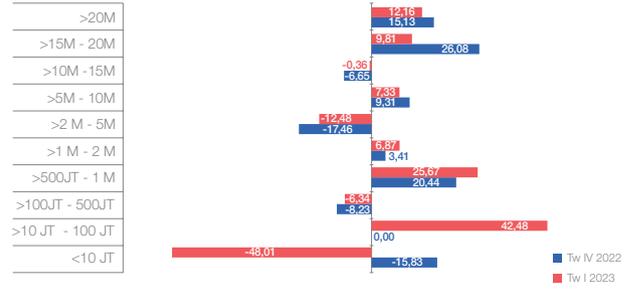
**Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2023 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan I 2023, konsumsi pemerintah tumbuh 1,93% (yoy). Pencapaian ini membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,40% (yoy). Hal tersebut terutama ditopang oleh perbaikan pertumbuhan Belanja Pegawai dan Belanja Transfer APBD Jawa Timur, Belanja Operasi dan Belanja Transfer APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur, serta Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bansos APBN di Jawa Timur.

Grafik 1.8 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.7 Pertumbuhan DPK Perbankan Sektor Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Nilai, Triwulan IV 2022 – Triwulan I 2023

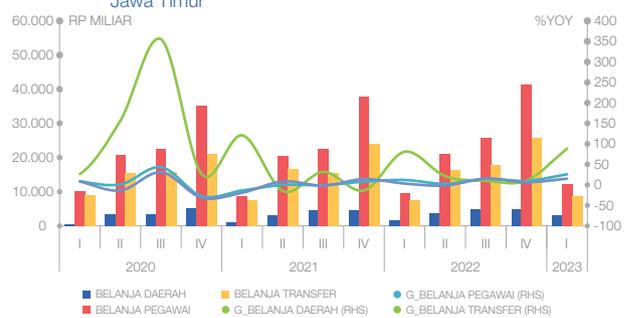


Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

**Peningkatan pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Timur menopang perbaikan Konsumsi Pemerintah pada triwulan laporan.** Belanja Pegawai pada APBD Provinsi Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh 8,57% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 (5,43%, yoy). Peningkatan realisasi Belanja Pegawai didorong oleh pembayaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai daerah. Lebih lanjut, Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Timur meningkat dari terkontraksi 28,62% (yoy) di triwulan IV 2022 menjadi tumbuh 37,19% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan kinerja Belanja Transfer ditopang oleh peningkatan Belanja Bagi Hasil dan untuk menyalurkan bantuan dan subsidi, seperti penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, subsidi penanggulangan kenaikan BBM, dan operasi pasar Ramadhan (Grafik 1.8).

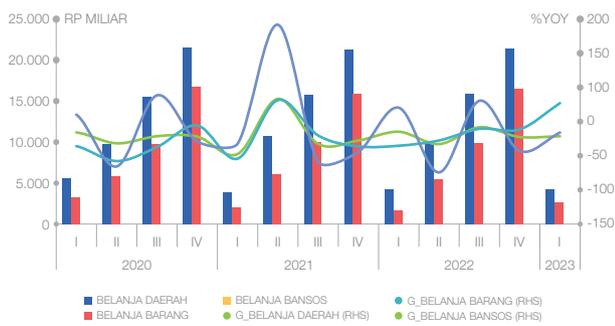
**Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Transfer APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur yang lebih tinggi turut mendorong peningkatan pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Jawa Timur pada triwulan laporan.** Belanja Operasi APBD total 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh 15,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 6,42% (yoy) (Grafik 1.9). Kenaikan realisasi Belanja Operasi terutama ditopang oleh peningkatan Belanja Pegawai. Lebih lanjut, Belanja Transfer APBD total 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur meningkat dari

Grafik 1.9 Perkembangan Realisasi Belanja APBD Total Kab/Kota Jawa Timur



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.10 Perkembangan Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur



Sumber : Dijen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

10,36% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 88,46% (yoy) pada triwulan laporan. Hal tersebut terutama didorong oleh pemerataan bagi hasil dan peningkatan kemampuan keuangan wilayah pedesaan di Jawa Timur.

Lebih tingginya pertumbuhan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bansos, serta Dana Desa APBN di Jawa Timur turut memengaruhi peningkatan Konsumsi Pemerintah pada triwulan I 2023. Realisasi Belanja Pegawai APBN di Jawa Timur terkontraksi 0,06% (yoy) pada triwulan I 2023, membaik dari triwulan IV 2022 yang terkontraksi 1,25% (yoy). Peningkatan realisasi Belanja Pegawai didorong oleh realisasi pembayaran gaji dan tunjangan penghasilan ASN. Realisasi Belanja Barang APBN di Jawa Timur tumbuh sebesar 56,56% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat 11,69% (yoy). Peningkatan Belanja Barang APBN di Jawa Timur didorong oleh peningkatan belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas serta kemudahan *e-catalogue* barang dan lelang. Sementara itu, realisasi Belanja Bansos APBN di Jawa Timur pada triwulan I 2023 meningkat dari 25,01% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 6,31% (yoy) seiring dengan percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PKH dan Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi (Grafik 1.10).

### 1.2.2. Investasi

Kinerja investasi pada triwulan I 2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV 2022 dipengaruhi oleh lebih rendahnya investasi bangunan dan nonbangunan. Kendala pembebasan lahan, peningkatan harga bahan baku, dan pola realisasi anggaran konstruksi yang masih rendah pada awal tahun berdampak pada lebih rendahnya kinerja investasi bangunan. Sementara itu, eskalasi ketidakpastian global berdampak pada perlambatan investasi nonbangunan pada triwulan laporan.

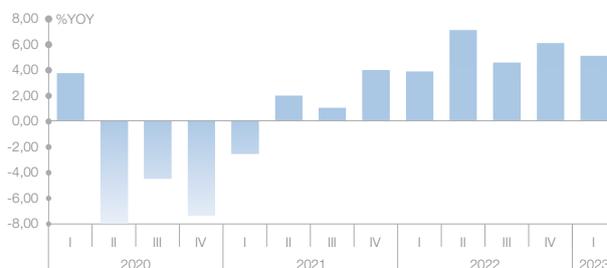
#### Kinerja Investasi Triwulan I 2023

Kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2023 melambat dibandingkan triwulan IV 2022. Realisasi kinerja investasi Jawa Timur pada triwulan I 2023 tumbuh 5,11% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 6,10% (yoy) (Grafik 1.11). Perlambatan investasi juga tercermin dari penurunan kondisi investasi (SBT) dunia usaha Survei Kondisi Dunia Usaha

(SKDU) Bank Indonesia di Jawa Timur dari 15,74% pada triwulan IV 2022 menjadi 9,04% pada triwulan I 2023.

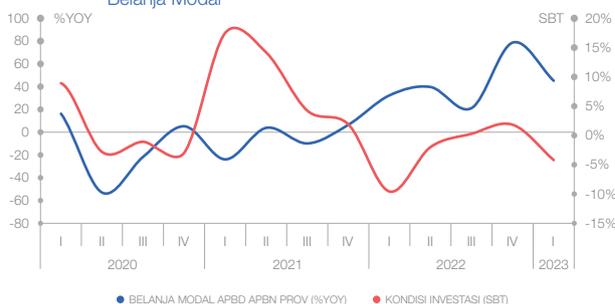
Perlambatan investasi terjadi pada investasi bangunan dan nonbangunan. Lebih rendahnya kinerja investasi bangunan tercermin dari perlambatan LU Konstruksi pada triwulan laporan. LU Konstruksi pada triwulan I 2023 tumbuh 5,89% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 7,04% (yoy). Hal tersebut dipengaruhi oleh tertahannya konstruksi beberapa proyek infrastruktur pemerintah akibat kendala pembebasan lahan, peningkatan harga bahan baku, dan pola realisasi anggaran konstruksi yang masih rendah pada awal tahun<sup>5</sup>. Perlambatan investasi bangunan turut tercermin dari penurunan impor bahan bangunan. Impor bangunan yakni Bahan Kapur, Semen, dan Bahan Konstruksi serta Bahan Konstruksi Tanah Liat dan Tahan Api mengalami penurunan dari masing – masing dari 14,68% dan -6,87% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 8,06% (yoy) dan -16,02% (yoy). Sementara itu lebih rendahnya kinerja investasi nonbangunan tercermin dari lebih rendahnya investasi nonbangunan terindikasi dari perlambatan LS investasi LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan dari masing-masing LS 0,68 dan LS 0,83 pada triwulan IV 2022 masing-masing menjadi LS 0,70 dan LS 0,89 pada triwulan I 2023. Perlambatan kinerja investasi nonbangunan terutama dipengaruhi oleh deselerasi permintaan eksternal yang tercermin dari penurunan ekspor barang dan jasa

Grafik 1.11 Pertumbuhan Investasi Jawa Timur



Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.12 Perkembangan Kondisi Investasi Dunia Usaha dan Realisasi Belanja Modal



Sumber : SKDU BI, BPKAD, DJPb Jawa Timur (diolah)

5. Proyeksi infrastruktur yang tertahan terutama: (i) Tol Probolinggo – Banyuwangi; (ii) Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar; dan (iii) Tol Gresik – Lamongan – Tuban.

Grafik 1.13 Pertumbuhan PMA dan PMDN Jawa Timur



Sumber : BKPM (diolah)

Jawa Timur akibat eskalasi ketidakpastian global<sup>6</sup>. Lebih lanjut, peningkatan ketidakpastian global awal tahun berimplikasi pada investor yang bersikap *wait and see* sehingga berdampak pada tertahannya kinerja investasi pada triwulan laporan.

**Perlambatan kinerja investasi turut dipengaruhi oleh penurunan pembiayaan proyek oleh pemerintah.** Pembiayaan atau pembayaran proyek pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan tercermin dari pertumbuhan realisasi Belanja Modal APBD Jawa Timur dan APBN di Jawa Timur pada triwulan I 2023 sebesar -28,04% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh 3,88% (yoy) (Grafik 1.12). Perlambatan tersebut sejalan dengan pembiayaan proyek pemerintah daerah pada awal tahun yang masih belum gencar.

**Perlambatan kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jawa Timur di beberapa sektor dan daerah turut memengaruhi tertahannya kinerja investasi di Jawa Timur pada periode laporan.** Kinerja PMA dan PMDN di Jawa Timur turut menunjukkan perlambatan di beberapa sektor dan daerah. Perlambatan PMA terjadi di sub sektor Industri Makanan dan Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran yang masing – masing tumbuh dari 145,91% dan 353,90% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi -14,53% dan -76,65% (yoy) pada triwulan laporan. Sementara itu, deselerasi PMDN terutama terjadi di sub sektor Industri Makanan serta Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar -8,87% dan 1,52% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 430,81% dan 327,41% (yoy). Secara spasial, perlambatan realisasi investasi penanaman modal terjadi di Kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan. Pada triwulan I 2023, pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal di Kota Surabaya dan Kabupaten Pasuruan masing-masing tercatat -14,74%(yoy) dan 40,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar -9,03%(yoy) dan 283,44% (yoy) (Grafik 1.13 dan Grafik 1.14).

### 1.2.3. Ekspor – Impor

Kinerja net ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2023 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, dipengaruhi oleh perlambatan impor yang lebih dalam dibandingkan perlambatan ekspor.

Grafik 1.14 Nominal PMA dan PMDN Jawa Timur



Sumber : BKPM (diolah)

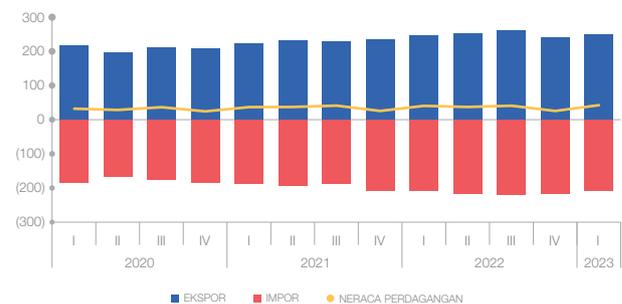
Perlambatan ekspor dipengaruhi oleh lebih rendahnya kinerja ekonomi global akibat masih berlanjutnya konflik geopolitik dan gejolak sektor perbankan global di Amerika Serikat dan Eropa pada triwulan I 2023. Lebih rendahnya permintaan eksternal pada triwulan laporan serta eskalasi ketidakpastian global menyebabkan investor bersikap *wait and see* sehingga berdampak pada perlambatan impor pada triwulan laporan.

### Kinerja Ekspor Impor Antardaerah Triwulan I 2023

**Neraca perdagangan Jawa Timur pada triwulan I 2023 mengalami posisi net ekspor yang lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022.** Pada triwulan I 2023, neraca perdagangan Jawa Timur mencatat net ekspor sebesar Rp41,69 triliun (ADHK 2010). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022 yang mencatatkan net ekspor sebesar Rp25,11 triliun (ADHK 2010). Hal ini dipengaruhi oleh impor yang mengalami perlambatan lebih dalam dibandingkan perlambatan ekspor Jawa Timur pada triwulan laporan.

Ekspor Jawa Timur melambat dari tumbuh 3,21% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi tumbuh 0,88% (yoy) pada triwulan laporan (Tabel 1.1). Perlambatan kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama yang disebabkan oleh masih berlanjutnya konflik geopolitik (Rusia-Ukraina dan Tiongkok-Taiwan) dan gejolak sektor perbankan di Amerika Serikat dan Eropa.

Grafik 1.15 Neraca Perdagangan Jawa Timur



Sumber : BPS (diolah)

6. Ekspor barang dan jasa menurun dari tumbuh 3,21% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 0,88% (yoy) pada triwulan I 2023.

Sementara itu, kinerja impor Jawa Timur tumbuh sebesar 0,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 3,55% (yoy). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan impor bahan baku seiring lebih rendahnya permintaan eksternal dan tertahannya investasi akibat investor yang masih bersikap *wait and see* akibat eskalasi ketidakpastian global pada akhir triwulan I 2023<sup>7</sup>.

### Kinerja Ekspor Triwulan I 2023

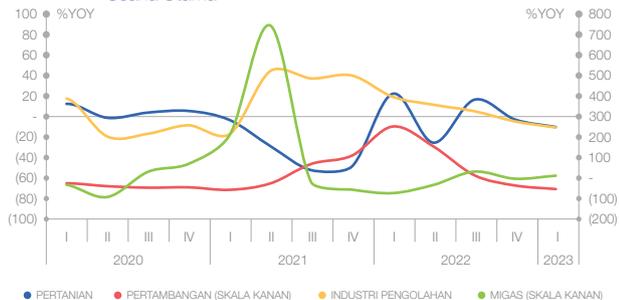
**Kinerja ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2023 terdeselerasi dibandingkan triwulan IV 2022.** Ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2023 mencapai Rp245,40 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh 0,88% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 3,21% (yoy). Deselerasi kinerja ekspor Jawa Timur terutama dipengaruhi oleh penurunan ekspor LN, khususnya terjadi pada ekspor non migas<sup>9</sup>. Secara nominal, nilai ekspor LN (FOB) Jawa Timur pada triwulan I 2023 mencapai USD5,29 miliar atau berkontraksi 10,46% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh positif sebesar 7,19% (yoy)<sup>10</sup>.

**Penurunan kinerja ekspor LN Jawa Timur terutama terjadi pada komoditas ekspor utama.** Perlambatan pertumbuhan ekspor terjadi

pada komoditas ekspor utama Jawa Timur, yakni komoditas lemak dan minyak hewan/nabati; perhiasan/permata; bahan kimia organik; ikan, krustasea, moluska; olahan daging dan ikan; serta furnitur (Grafik 1.17). Ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati yang lebih rendah terutama terjadi pada negara tujuan Amerika Serikat dan Malaysia sejalan dengan perlambatan kinerja ekonomi di negara tersebut<sup>11</sup>. Disamping itu, adanya peningkatan tarif pungutan ekspor (PE) sebesar 7,17% pada awal tahun 2023 turut menyebabkan ekspor lemak dan minyak hewan/nabati melambat. Ekspor perhiasan/permata juga mengalami perlambatan, khususnya ke Swiss seiring perlambatan kinerja manufaktur di Swiss pada periode laporan<sup>12</sup>. Perlambatan ekspor ikan, krustasea, moluska, serta olahan daging dan ikan pada triwulan laporan disebabkan oleh perlambatan kinerja industri makanan seiring penurunan permintaan negara mitra, khususnya Amerika Serikat dan Jepang.

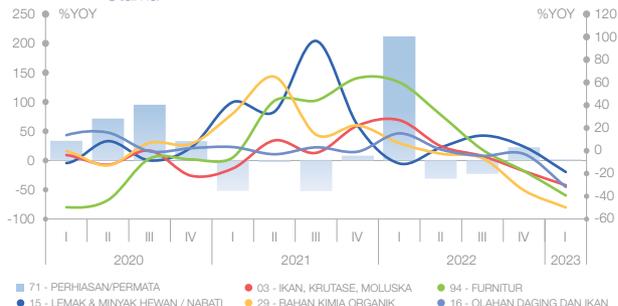
**Peningkatan kinerja ekspor dalam negeri (DN) menahan penurunan kinerja ekspor Jawa Timur yang lebih dalam pada triwulan laporan.** Perbaikan kinerja ekspor DN Jawa Timur tercermin dari kenaikan pertumbuhan muat barang di Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak dari masing-masing tumbuh -9,87% (yoy) dan -26,57% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi masing-masing

Grafik 1.16 Pertumbuhan Nilai Ekspor Jawa Timur berdasarkan Lapangan Usaha Utama



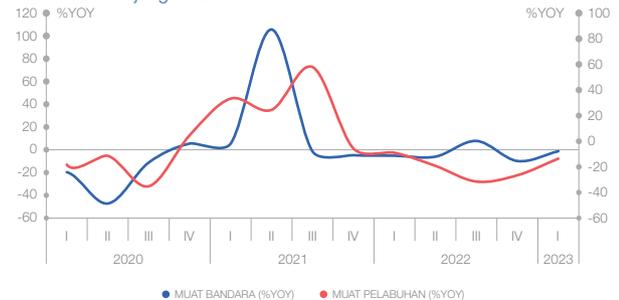
Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.17 Pertumbuhan Ekspor Jawa Timur berdasarkan Komoditas Utama



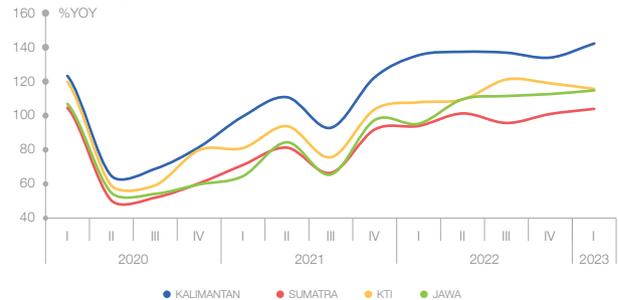
Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.18 Pertumbuhan Barang Muat Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak



Sumber : BPS, Angka Pura I (diolah)

Grafik 1.19 Kondisi Ekonomi Saat Ini Wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan KTI



Sumber : SK Bank Indonesia (diolah)

7. Pada rilis PDRB Jawa Timur pada 5 Mei 2023, BPS Provinsi Jawa Timur melakukan penyesuaian publikasi komponen PDRB pengeluaran di Jawa Timur. Komponen ekspor luar negeri (LN), impor luar negeri (LN), dan net ekspor dalam negeri (DN) tidak lagi dipublikasikan. Komponen tersebut disesuaikan menjadi komponen ekspor barang dan jasa serta komponen impor barang dan jasa.  
8. Pangsa ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2023 sebesar 47,63% terhadap total PDRB Jawa Timur.  
9. Berdasarkan rilis BPS, ekspor LN migas mengalami peningkatan, yakni dari tumbuh 7,19% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 21,57% (yoy) di triwulan I 2023. Sementara ekspor LN non migas mengalami perlambatan dari -4,57% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi -10,46% (yoy) di triwulan I 2023.

10. Nilai ekspor (FOB) menggunakan sumber BPS Jawa Timur.  
11. Berdasarkan Tradingeconomics, PMI Manufacturing Amerika dan Malaysia pada triwulan I 2023 masing-masing sebesar 47,8 dan 47,9 lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 (48,10 dan 48,13).  
12. Berdasarkan Tradingeconomics, PMI Manufacturing Swiss pada triwulan I 2023 sebesar 48,4 lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 (54,3).

tumbuh -1,26% (yoy) dan -13,55% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik 1.18). Momen Ramadan dan panen padi yang berlangsung pada triwulan I 2023 mendorong peningkatan permintaan mitra dagang domestik Jawa Timur. Hal tersebut tercermin dari kenaikan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) – Survei Konsumen Bank Indonesia di Jawa Timur wilayah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera dari masing-masing sebesar 134,13; 112,80; dan 101,06 pada triwulan IV 2022 menjadi masing-masing sebesar 142,40; 114,90; dan 104,06 pada triwulan I 2023 (Grafik 1.19).

### Kinerja Impor Triwulan I 2023

Impor Jawa Timur pada triwulan I 2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor pada PDRB Jawa Timur sebesar Rp203,71 triliun (ADHK 2010) atau tumbuh 0,05% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh 3,55% (yoy) (Tabel 1.1). Perlambatan kinerja impor Jawa Timur terutama dipengaruhi oleh penurunan impor LN pada kelompok migas dan non migas yang masing – masing tercatat sebesar -34,67% dan 4,98% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang masing-masing tercatat sebesar -18,75% dan 1,23% (yoy).

Perlambatan impor LN non migas pada triwulan I 2023 dipengaruhi oleh lebih rendahnya impor kelompok bahan baku. Berdasarkan penggunaannya, impor bahan baku pada triwulan I 2023 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan IV 2022. Perlambatan permintaan eksternal berdampak pada deselerasi kinerja LU Industri Pengolahan, khususnya pada industri yang orientasi ekspor, sehingga berdampak pada lebih rendahnya impor bahan baku pada periode laporan. Di tengah peningkatan konsumsi swasta Jawa Timur pada triwulan laporan, perlambatan impor bahan baku juga dipengaruhi oleh pemenuhan bahan baku industri yang masih bersumber dari inventori (stok). Lebih lanjut, eskalasi ketidakpastian global pada akhir triwulan I 2023 berimplikasi pada perilaku investor yang bersikap *wait and see* dalam pengembangan usahanya sehingga turut berdampak pada tertahannya permintaan impor (Grafik 1.20 – 1.21).

Kinerja impor DN yang turut melambat pada triwulan laporan berimplikasi pada penurunan kinerja impor lebih dalam. Lebih rendahnya kinerja impor DN Jawa Timur tercermin dari penurunan

pertumbuhan muat barang di Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak dari masing-masing tumbuh -15,81% (yoy) dan 11,50% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi masing-masing tumbuh -16,24% (yoy) dan 1,45% (yoy) pada triwulan I 2023. Masih terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri berorientasi domestik dari Jawa Timur serta perlambatan permintaan eksternal berdampak pada perlambatan impor DN pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya.

## 1.3. PDRB SISI PENAWARAN

Peningkatan kinerja LU utama, yakni LU Perdagangan, LU Pertanian, serta LU Transportasi dan Pergudangan mendorong perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2023. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi.

### 1.3.1. Industri Pengolahan

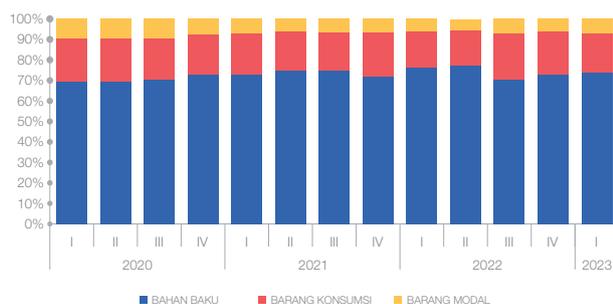
Kinerja Industri Pengolahan pada triwulan I 2023 melambat dibandingkan triwulan IV 2022 terutama dipengaruhi penurunan permintaan eksternal pada triwulan laporan serta penggunaan stok untuk memenuhi peningkatan konsumsi domestik. Di samping itu, eskalasi ketidakpastian global pada akhir triwulan I 2023 berimplikasi pada tertahannya kepercayaan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi industri.

### Kinerja LU Industri Pengolahan Triwulan I 2023

Pada triwulan I 2023, kinerja LU Industri Pengolahan tercatat mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2023 tumbuh 4,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,71% (yoy) (Tabel 1.2). Perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan turut dipengaruhi oleh lebih rendahnya investasi di LU tersebut. Hal ini terkonfirmasi dari perlambatan tingkat investasi LU Industri Pengolahan – SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur dari 5,49% pada triwulan IV 2022 menjadi 2,24% pada triwulan I 2023.

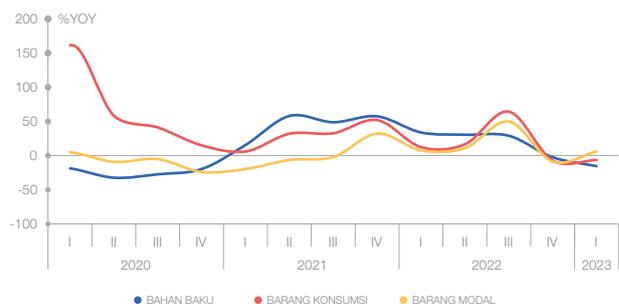
Lebih rendahnya kinerja LU Industri Pengolahan dipengaruhi oleh perlambatan permintaan eksternal dan tertahannya kepercayaan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi akibat peningkatan

Grafik 1.20 Pangsa Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan



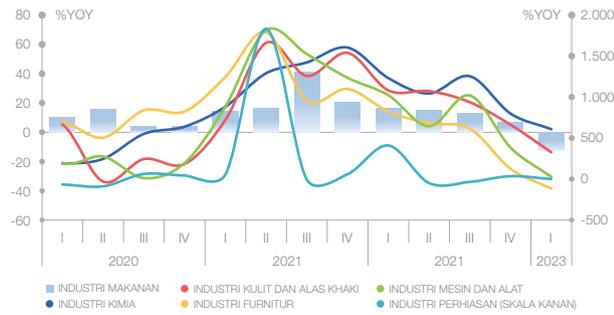
Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.21 Pertumbuhan Komoditas Impor Berdasarkan Jenis Penggunaan



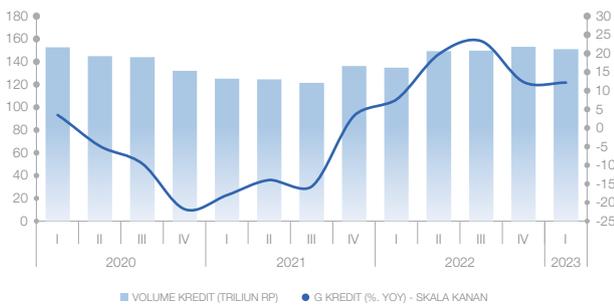
Sumber : BPS (diolah)

Grafik 1.22 Perkembangan Komoditas Utama Ekspor LN di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.24 Kredit LU Industri Pengolahan

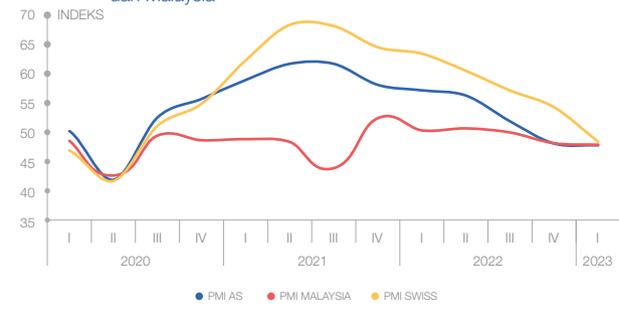


Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

**ketidakpastian global.** Penurunan permintaan eksternal yang tercermin dari lebih rendahnya ekspor LN berdampak pada tertahannya kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan. Pada triwulan I 2023, ekspor LN produk Industri Pengolahan terkontraksi 10,32% (yoy), mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan triwulan IV 2022 yang terkontraksi 4,57% (yoy). Penurunan permintaan eksternal tersebut disebabkan oleh eskalasi ketidakpastian global akibat masih berlangsungnya konflik geopolitik, tekanan inflasi global yang masih tinggi, dan potensi krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa. Penurunan ekspor LN terjadi di Industri Makanan, Industri Perhiasan, Industri Kimia, Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Furnitur, dan Industri Mesin dan Peralatan (Grafik 1.22). Penurunan permintaan eksternal terutama terjadi di negara mitra dagang utama Jawa Timur, yakni Amerika Serikat, Swiss, dan Malaysia sejalan dengan perlambatan *Manufacturing Purchasing Managers' Index* di negara tersebut (Grafik 1.23)<sup>13</sup>. Lebih lanjut, eskalasi ketidakpastian global terutama akibat potensi krisis keuangan di Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan investor bersikap *wait and see* dalam melakukan ekspansi usaha, termasuk di LU Industri Pengolahan.

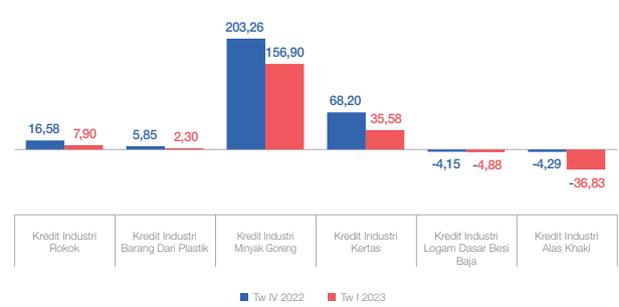
Di tengah perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan, peningkatan konsumsi RT pada triwulan laporan dipenuhi oleh penggunaan inventori. Konsumsi RT pada triwulan I 2023 tumbuh 5,36% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang sebesar 5,00% (yoy). Kenaikan konsumsi RT di tengah perlambatan kinerja LU Industri dipenuhi oleh inventori. Hal ini tercermin dari

Grafik 1.23 *Manufacturing Purchasing Managers' Index* Amerika, Swiss, dan Malaysia



Sumber : Trading Economics (diolah)

Grafik 1.25 Kredit Sub Sektor Industri



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

penurunan perubahan inventori dari tumbuh -11,56% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi -24,28% (yoy).

**Pembiayaan perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2023 terpantau terjaga meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan.** Kredit perbankan ke LU Industri Pengolahan pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 12,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2022 yang sebesar 12,32% (yoy) (Grafik 1.24). Perlambatan kredit terjadi di subsektor Industri Rokok, Industri Barang dari Plastik, Industri Minyak Goreng, Industri Kertas, Industri Logam Dasar Besi dan Baja, serta Industri Alas Kaki (Grafik 1.25).

### 1.3.2. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

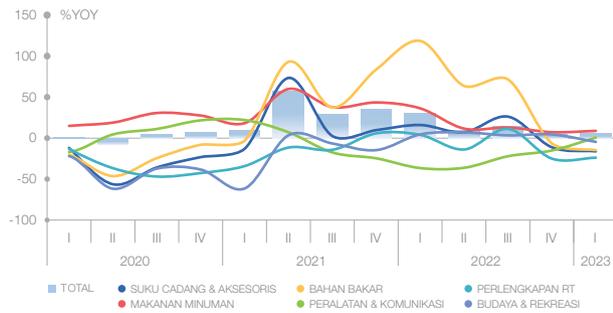
**Peningkatan konsumsi swasta pada triwulan I 2023 menopang kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Jawa Timur lebih tinggi pada triwulan laporan.**

#### Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Triwulan I 2023

Pada triwulan I 2023, kinerja LU Perdagangan terpantau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh 6,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 5,83% (yoy) (Tabel 1.2). Peningkatan kinerja LU Perdagangan di

13. *Manufacturing Purchasing Managers' Index* Amerika Serikat, Swiss, dan Malaysia pada triwulan I 2023 tercatat masing-masing sebesar 47,8; 48,4; dan 47,9 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat 48,1; 54,3; dan 48,13.

Grafik 1.26 Pertumbuhan Indeks Penjualan Ritel



Sumber: SPE Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

Jawa Timur pada periode laporan terutama ditopang oleh peningkatan permintaan masyarakat Jawa Timur dan mitra dagang domestik Jawa Timur. Hal ini tercermin dari kenaikan konsumsi swasta yang tumbuh 5,43% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 5,58% (yoy) pada triwulan I 2023. Sementara lebih tingginya permintaan mitra dagang domestik Jawa Timur tercermin dari peningkatan pertumbuhan muat di Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak.

**Peningkatan kinerja LU Perdagangan terjadi pada perdagangan ritel.** Lebih tingginya kinerja perdagangan ritel di Jawa Timur tercermin dari lebih tingginya penjualan eceran riil pada triwulan laporan. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia di Jawa Timur, perbaikan kinerja perdagangan ritel pada periode laporan terutama terjadi pada kategori penjualan eceran makanan minuman, peralatan dan komunikasi, serta perlengkapan RT yang masing – masing tumbuh dari 7,15% (yoy), -14,50% (yoy), dan -24,13% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 8,69% (yoy), 0,75% (yoy), dan -23,04% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.26).

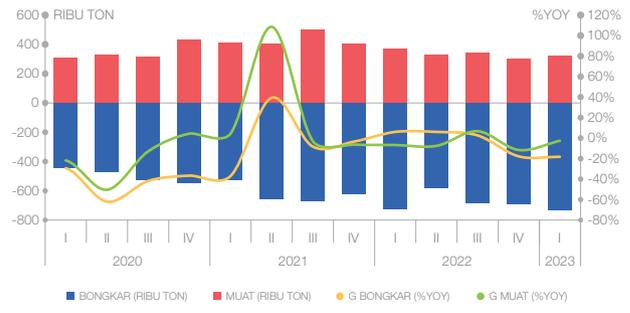
**Perbaikan kinerja LU Perdagangan turut ditopang oleh kenaikan permintaan mitra dagang domestik.** Perbaikan permintaan mitra dagang Jawa Timur tercermin dari kenaikan pertumbuhan bongkar muat di Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak dari masing-masing tercatat -9,87% (yoy) dan -26,57% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi masing-masing sebesar -1,26% (yoy) dan -13,55% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik 1.27 dan 1.28). Peningkatan permintaan mitra dagang domestik terutama terjadi di wilayah

Grafik 1.27 Perkembangan Bongkar Muat Bandara Juanda



Sumber : Angka Pura I (diolah)

Grafik 1.28 Perkembangan Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Perak



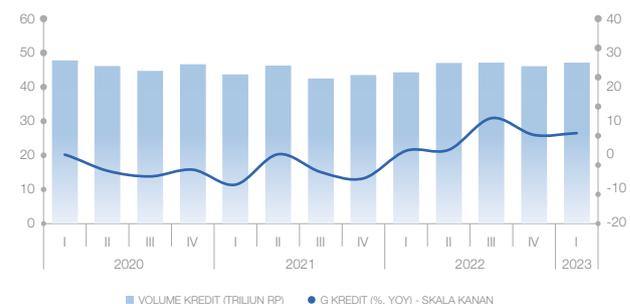
Sumber : BPS (diolah)

Kalimantan dan Sumatera tercermin dari perbaikan IKE – Survei Konsumen Bank Indonesia di Jawa Timur tersebut pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya<sup>14</sup>. Serangkaian HBKN dan persiapannya serta panen padi yang berlangsung pada triwulan I 2023 di tengah kasus COVID-19 yang semakin terkendali menopang permintaan mitra dagang domestik Jawa Timur.

**Perbaikan penyaluran pembiayaan perbankan turut mendukung percepatan kinerja LU Perdagangan pada triwulan I 2023.** Kinerja kredit korporasi LU Perdagangan pada triwulan I 2023 tumbuh 6,50% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh 5,97% (yoy) (Grafik 1.29). Peningkatan kinerja kredit terutama terjadi di sub sektor perdagangan eceran bahan bakar dan minyak, perdagangan perlengkapan RT, perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, perdagangan eceran beraneka ragam yang didominasi makanan minuman, serta perdagangan bahan baku dalam negeri yang tercatat masing – masing dari 1,03% (yoy); -8,99% (yoy); 6,91% (yoy); -62,47% (yoy); dan 15,12% (yoy) pada triwulan IV 2022 meningkat menjadi 2,10% (yoy); -0,51% (yoy); 7,12% (yoy); 26,77% (yoy); dan 21,43% (yoy) pada periode laporan.

**Peningkatan kinerja LU Perdagangan yang lebih tinggi tertahan oleh perlambatan perdagangan eksternal pada triwulan laporan.** Lebih rendahnya kinerja perdagangan eksternal tercermin dari pertumbuhan ekspor LN Jawa Timur. Berdasarkan BPS Provinsi Jawa Timur, nilai ekspor LN (FOB) Jawa Timur pada triwulan I 2023 mencapai USD5,29 miliar atau terkontraksi 10,46% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan

Grafik 1.29 Kredit Korporasi LU Perdagangan



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

14. Kenaikan IKE – Survei Konsumen Bank Indonesia di Jawa Timur wilayah Kalimantan dan Sumatera dari masing-masing sebesar 134,13 dan 101,06 pada triwulan I 2023 menjadi masing-masing sebesar 142,40 dan 104,06 pada triwulan I 2023.

Grafik 1.30 Pertumbuhan Nilai Ekspor LN Jawa Timur berdasarkan Lapangan Usaha Utama



Sumber: SPE Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

sebelumnya yang tercatat tumbuh positif sebesar 7,19% (yoy). Penurunan kinerja ekspor LN terjadi pada kelompok nonmigas di LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, dan LU Pertambangan (Grafik 1.30). Penurunan kinerja ekonomi global, termasuk mitra dagang eksternal utama Jawa Timur, terutama Amerika Serikat dan Eropa, berdampak pada lebih rendahnya ekspor LN Jawa Timur pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

### 1.3.3. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

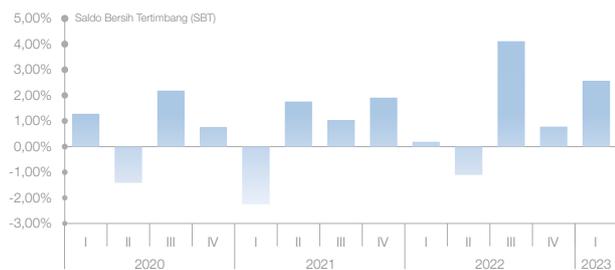
Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan I 2023 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut ditopang oleh berlangsungnya panen raya padi dan peningkatan produksi jagung pada triwulan laporan.

#### Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Triwulan I 2023

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meningkat pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 1,52% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh 0,48% (yoy) (Tabel 1.2). Perbaikan kinerja LU Pertanian terutama didorong oleh berlangsungnya panen raya padi dan jagung pada triwulan laporan. Lebih lanjut, peningkatan produksi hasil perkebunan tebu pada triwulan I 2023 turut berimplikasi pada peningkatan kinerja LU ini pada triwulan laporan.

Peningkatan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turut tercermin dari lebih tingginya realisasi kegiatan usaha LU Pertanian

Grafik 1.31 Realisasi Kegiatan Usaha LU Pertanian



Sumber: SKDU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

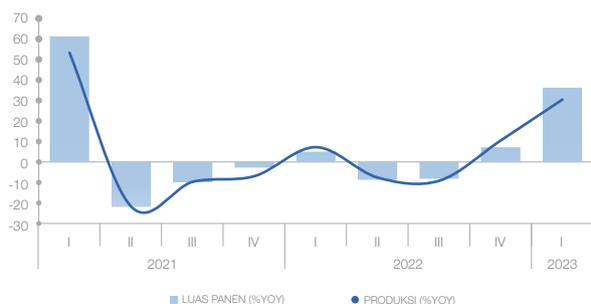
Jawa Timur pada triwulan laporan. Berdasarkan SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, SBT realisasi kegiatan usaha LU Pertanian Jawa Timur mengalami peningkatan, dari SBT 0,77% pada triwulan IV 2022 menjadi SBT 2,52% pada triwulan I 2023 (Grafik 1.31). Peningkatan kegiatan usaha utamanya terjadi pada sub sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan yang masing – masing tercatat dari SBT 0,27%, -0,30%, dan 0,68% di triwulan IV 2022 meningkat menjadi SBT 0,80%, 0,00%, dan 1,26% pada periode laporan.

Lebih tingginya kinerja LU Pertanian pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya ditopang oleh peningkatan produksi padi gabah kering giling (GKG) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Produksi GKG di beberapa wilayah sentra produksi padi di Jawa Timur yakni di Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Madiun mengalami peningkatan pertumbuhan, dari masing-masing sebesar -5,25% (yoy), -3,21% (yoy), -6,03% (yoy), -1,11% (yoy), 44,75% (yoy), 19,24% (yoy), dan -5,58% (yoy) pada triwulan IV 2022 tumbuh menjadi 18,42% (yoy), 60,35% (yoy), 244,79% (yoy), 54,56% (yoy), 141,73% (yoy), 69,50% (yoy), dan 29,08% (yoy) pada periode laporan (Grafik 1.32 dan Grafik 1.33). Hal tersebut sejalan dengan berlangsungnya masa panen padi di Jawa Timur pada periode Februari – Maret 2023.

Adanya peningkatan produksi hasil perkebunan tebu pada triwulan laporan turut meningkatkan kinerja LU Pertanian pada sub LU Perkebunan. Berdasarkan data Posko Satgas Pangan Provinsi Jawa Timur, produksi gula tebu di Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat sebanyak 629.989 ton atau tumbuh sebesar 87,71% (yoy). Pencapaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022 yang mengalami pertumbuhan 8,59% (yoy) (Grafik 1.34).

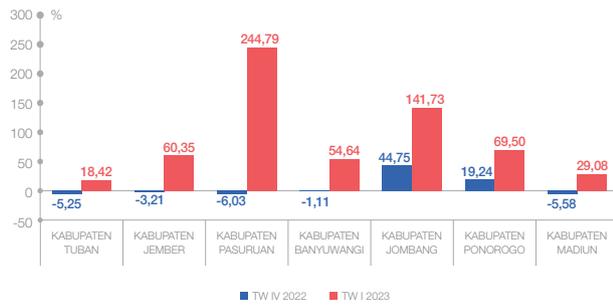
Program pemulihan perekonomian di bidang Pertanian turut menopang perbaikan kinerja LU Pertanian yang lebih tinggi pada triwulan I 2023. Beberapa program pemulihan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah sepanjang tahun 2022 dan berlanjut pada tahun 2023 antara lain penguatan *Cooperative Farming* (CF) – kerja sama dengan korporasi, Indeks Pertanian (IP) 400, pertanian berbasis korporasi, pengembangan kualitas dan mutu produk melalui sistem Good

Grafik 1.32 Pertumbuhan Luas Panen dan Produksi Padi Jawa Timur



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.33 Kabupaten/Kota Produksi Padi Jawa Timur



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (diolah)

*Agricultural Practices* (GAP), pengembangan *food estate*, fasilitasi sertifikasi ekspor dan pasar ekspor, pengembangan kawasan agropolitan, pengolahan hortikultura terpadu, program petik olah kemas jual, program pengembangan produk pangan berbasis agro, serta program asuransi petani, nelayan, dan ternak sapi, serta program Pemerintah yang diantaranya meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), akselerasi ekspor melalui Gerakan Tiga Kali Ekspor (Geratieks) dan Merdeka Ekspor, pencanangan *One Village One Product*, kebijakan intervensi Pemerintah lainnya untuk sisi hulu sampai dengan hilir, dan Program Makmur Pupuk Indonesia.

### 1.3.4. Konstruksi

LU Konstruksi pada triwulan I 2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya terutama dipengaruhi oleh kendala pembebasan lahan, peningkatan harga bahan baku, dan pola realisasi anggaran konstruksi yang masih rendah pada awal tahun. Lebih lanjut, peningkatan ketidakpastian global turut berdampak pada tertahannya realisasi di LU Konstruksi sejalan dengan investor yang masih bersikap *wait and see*.

#### Kinerja LU Konstruksi Triwulan I 2023

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2023 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. LU Konstruksi tumbuh 5,89% (yoy) pada periode laporan, melambat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat tumbuh 7,04% (yoy) (Tabel 1.2). Penurunan kinerja LU Konstruksi turut terkonfirmasi dari lebih rendahnya realisasi kegiatan usaha LU Konstruksi –SKDU Bank Indonesia di

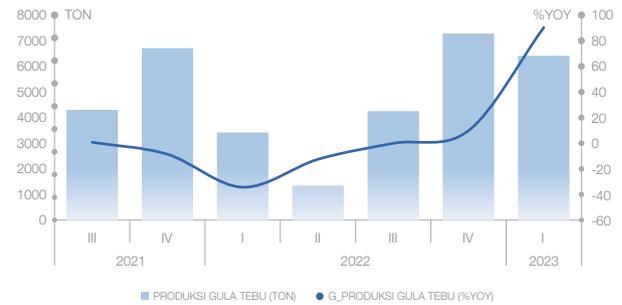
Grafik 1.35 Realisasi Kegiatan Usaha LU Konstruksi



Sumber: SKDU Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur (diolah)

15. Tertahannya proyek konstruksi strategis terutama terjadi di sektor jalan tol, yakni Tol Probolinggo – Banyuwangi, Tol Krian – Legundi – Bunder – Manyar, dan Tol Gresik – Lamongan – Tuban, terutama akibat kendala pembebasan lahan.

Grafik 1.34 Pertumbuhan Produksi Gula Tebu



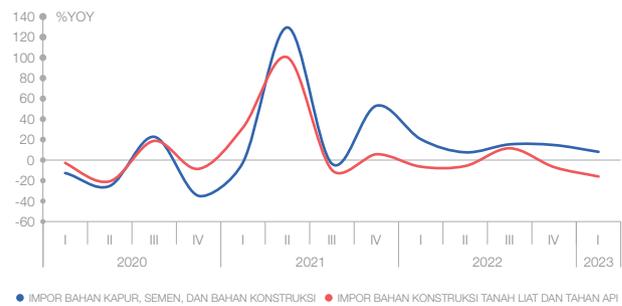
Sumber: Posko Satgas Pangan Jawa Timur (diolah)

Jawa Timur pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 1,46% (SBT), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (4,23%, SBT) (Grafik 1.35).

**Faktor domestik dan global memengaruhi lebih rendahnya kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.** Tertahannya konstruksi beberapa proyek infrastruktur pemerintah akibat kendala pembebasan lahan, peningkatan harga bahan baku, dan pola realisasi anggaran konstruksi yang masih rendah pada awal tahun berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Konstruksi pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya<sup>15</sup>. Di samping itu, eskalasi ketidakpastian global awal tahun berimplikasi pada investor yang bersikap *wait and see* yang berdampak pada tertahannya kinerja konstruksi swasta pada triwulan laporan.

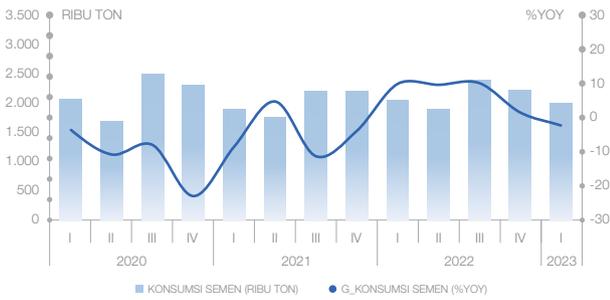
**Perlambatan kinerja LU Konstruksi tercermin dari penurunan impor bahan material konstruksi dan konsumsi semen domestik pada triwulan laporan.** Perlambatan impor material konstruksi meliputi impor bahan kapur, semen (SITC 661) dan impor bahan konstruksi tanah liat dan tahan api (SITC 662) yang masing – masing tercatat tumbuh 14,68% dan -6,87% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi masing-masing tumbuh 8,06% dan -16,02% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik 1.36). Lebih lanjut, konsumsi semen domestik di Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat 1.942 ribu ton atau berkontraksi sebesar 2,98% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan konsumsi semen pada triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 0,75% (yoy) (Grafik 1.37).

Grafik 1.36 Impor Material Konstruksi



Sumber: Laporan Bea Cukai (diolah)

Grafik 1.37 Pertumbuhan Konsumsi Semen



Sumber: Asosiasi Semen (diolah)

Perlambatan realisasi investasi asing sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran turut memengaruhi lebih rendahnya kinerja LU Konstruksi pada periode laporan. Pertumbuhan realisasi investasi asing sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran di Jawa Timur pada triwulan I 2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada triwulan I 2023, realisasi investasi asing sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran sebesar Rp27.736 juta atau terkontraksi sebesar 76,65% (yoy). Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 yang tercatat sebesar Rp63.083 juta atau tumbuh sebesar 353,90% (yoy) (Grafik 1.38).

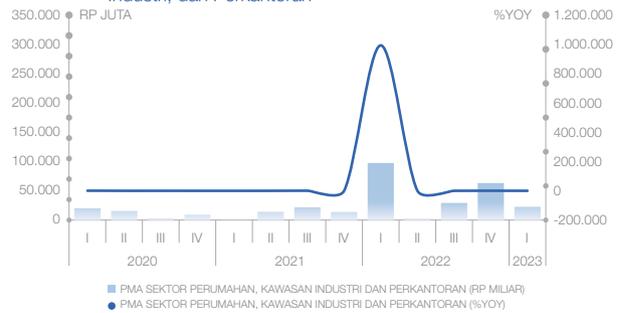
Perlambatan kinerja LU Konstruksi yang lebih dalam tertahan oleh berlanjutnya pembangunan PSN, Perpres No. 80 tahun 2019, dan proyek swasta strategis. Percepatan penyelesaian PSN di Jawa Timur sepanjang triwulan I 2023 terutama meliputi sektor jalan dan jembatan, sektor bandara, dan sektor bendungan<sup>16</sup>. Pada triwulan I 2023, pembangunan Bandara Kediri terus berlanjut dengan progres pekerjaan mencapai 72,4% dan diperkirakan beroperasi pada akhir tahun 2023. Lebih lanjut, berlanjutnya pembangunan proyek strategis swasta di Jawa Timur seperti pembangunan pabrik peleburan (*smelter*) tembaga di Gresik dengan nilai investasi mencapai 3 miliar dolar Amerika Serikat terus berlanjut. Hingga triwulan I 2023, progres konstruksi proyek tersebut mencapai 57%. Pencapaian tersebut meningkat dibandingkan progres konstruksi hingga Desember 2022 yang mencapai 55%.

### 1.3.5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Jawa Timur pada triwulan I 2023 mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh normalisasi pasca libur HBKN Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.

16. Peraturan Presiden (Perpres) No.80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan. Perpres No. 80 Tahun 2019 berisi percepatan pembangunan di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Willis dan Lintas Selatan. Total terdapat 218 proyek dengan total investasi sebesar Rp294,34 triliun dengan pembiayaan yang direncanakan bersumber dari APBD, APBN, BUMD, BUMN, KPBU, dan swasta.

Grafik 1.38 Investasi Penanaman Modal Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran



Sumber: BKPM (diolah)

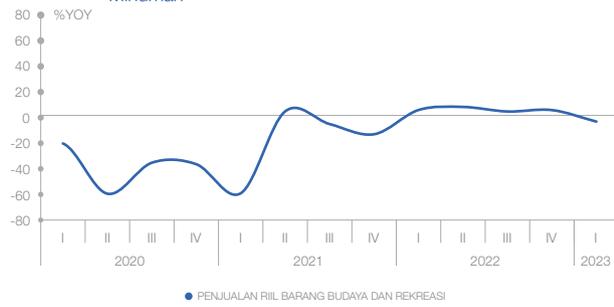
### Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Triwulan I 2023

Kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan I 2023 tertahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2023, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,43% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh 9,68% (yoy) (Tabel 1.2). Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi kegiatan rekreasi dan pariwisata masyarakat pasca momen libur panjang dan HBKN Natal dan Tahun Baru pada triwulan IV 2022.

Perlambatan permintaan pada sektor rekreasi dan pariwisata berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan. Perlambatan kinerja penjualan barang budaya dan rekreasi di Jawa Timur tercermin dari Indeks Riil Penjualan Eceran (IRPE) kelompok barang budaya dan rekreasi. Indikator tersebut pada triwulan I 2023 tercatat kontraksi sebesar -4,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2022 (4,51%, yoy) (Grafik 1.39).

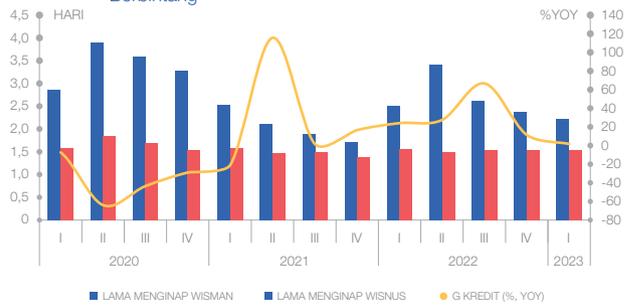
Permintaan akomodasi yang lebih rendah turut berdampak pada perlambatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari perlambatan pertumbuhan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara (wisman). TPK hotel di Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh 1,72% (yoy), melambat signifikan dibandingkan triwulan IV 2022 yang tumbuh sebesar 11,48% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan telah berakhirnya libur sekolah dan nataru. Sementara itu, rata-rata lama menginap wisman di hotel di Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat 2,22 atau rata-rata sekitar 2 hari. Kondisi tersebut sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 2,37 hari atau 2–2,5 hari (Grafik 1.40). Walaupun demikian, secara struktural, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih tumbuh cukup kuat yang terlihat dari pertumbuhan triwulan I 2023 yang lebih tinggi dari triwulan I 2022 yang tumbuh sebesar 5,99% (yoy).

Grafik 1.39 Mobilitas ke Ritel & Rekreasi dan Penjualan Eceran Makanan Minuman



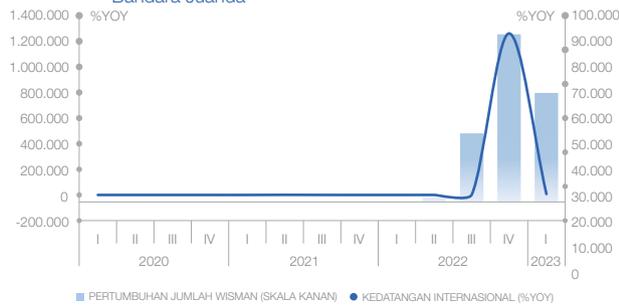
Sumber: SPE Bank Indonesia Jawa Timur (diolah)

Grafik 1.40 Rata – rata Lama Menginap dan Pertumbuhan TPK Hotel Berbintang



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.41 Pertumbuhan Jumlah Kedatangan Domestik Penumpang Bandara Juanda



Sumber: BPS (diolah)

Grafik 1.42 Kredit LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



Sumber: LBU (diolah)

Perlamatan kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum turut disebabkan oleh lebih rendahnya pertumbuhan jumlah kedatangan wisman dan penumpang internasional ke Jawa Timur, serta perlambatan pembiayaan kredit di LU Akomodasi dan Makan Minum. Pertumbuhan jumlah kedatangan wisman dan penumpang internasional ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda melambat signifikan dari masing – masing tumbuh 89.962% dan 1.260.578% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi sebesar 58.479% dan

7.356% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik 1.41). Perlamatan tersebut terjadi seiring *base effect* relaksasi mobilitas triwulan I 2022 yang lebih baik dibandingkan triwulan IV 2021, serta berakhirnya periode libur panjang dan HBKN Nataru 2023. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, kredit yang disalurkan ke LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat lebih rendah dari 4,63% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi -0,08% (yoy) pada triwulan I 2023 (Grafik 1.42).

**BOKS 1**

**Dampak Pembukaan Ekonomi Tiongkok terhadap Jalur Perdagangan Luar Negeri Jawa Timur**

Pembukaan kembali ekonomi Tiongkok pada awal tahun 2023 diperkirakan berdampak positif terhadap ekonomi global. Sejak tahun 2020, Tiongkok mengimplementasikan *zero-covid policy* dengan tingkat keketatan yang mempertimbangkan perkembangan kasus COVID-19 secara spasial di Tiongkok. Kebijakan *zero-covid policy* terutama mengatur terkait: (i) kewajiban tes PCR rutin; (ii) pembatasan mobilitas dalam negeri, termasuk jam operasional kegiatan usaha; dan (iii) pembatasan mobilitas travel internasional. Pada tahun 2021, Tiongkok melakukan relaksasi kebijakan *zero-covid policy* sejalan dengan penurunan kasus COVID-19 sebelum kembali melakukan pengetatan pada awal semester II 2022 hingga akhir tahun 2022. Pada 8 Januari 2023, pemerintah Tiongkok secara formal mencabut kebijakan *zero-covid policy*. Mempertimbangkan peran Tiongkok yang signifikan dalam perekonomian dunia, yakni sebagai kontributor ekonomi terbesar kedua di dunia, eksportir tertinggi di dunia, dan importir terbesar kedua di dunia, berbagai lembaga ekonomi dunia (antara lain IMF, World Bank, dan Fitch) memprakirakan pembukaan kembali ekonomi Tiongkok pada awal tahun 2023, terutama travel internasional, berdampak positif terhadap ekonomi global. Berbagai lembaga ekonomi dunia menyatakan bahwa transmisi dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok terhadap ekonomi global diperkirakan melalui tiga jalur utama, yakni: (i) jalur perdagangan; (ii) jalur pariwisata; dan (iii) jalur investasi.

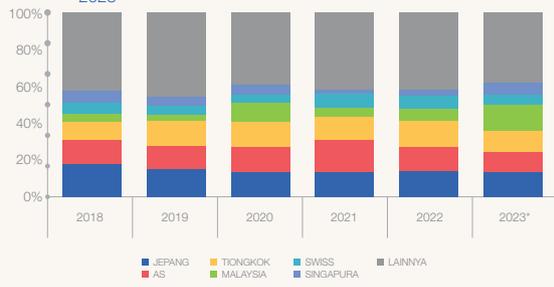
**Impor Tiongkok akan komoditas tambang diestimasi meningkat sejalan dengan pembukaan kembali ekonomi Tiongkok.** Seiring dengan peningkatan kinerja industri Tiongkok pasca pencabutan *zero-covid policy* di Tiongkok, permintaan batu bara untuk mendukung kenaikan kinerja industri di Tiongkok mengalami peningkatan signifikan.

Negara-negara eksportir batu bara, di antaranya Indonesia (khususnya wilayah Kalimantan dan Sulampua) dan Australia, diperkirakan mengalami peningkatan permintaan batu bara yang tinggi dari Tiongkok.

**Ekspor komoditas Tiongkok untuk produk padat karya diperkirakan mengalami peningkatan pasca pembukaan kembali ekonomi Tiongkok.** Komoditas ekspor utama Tiongkok ke dunia terutama berupa elektronik dan komponennya, baja, serta order tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan negara tujuan ekspor utama Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Eropa. Berdasarkan FGD yang dilakukan dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), pengetatan *zero-covid policy* di Tiongkok sepanjang semester II 2022 berdampak pada pengalihan order TPT dari Tiongkok ke beberapa negara, terutama Indonesia dan Vietnam. Pembukaan ekonomi Tiongkok pada awal tahun 2023 diperkirakan berimplikasi pada kembalinya permintaan TPT ke Tiongkok sehingga ekspor LN Tiongkok mengalami peningkatan tinggi. Ekspor Tiongkok ke dunia untuk komoditas ekspor utama lainnya, yakni elektronik dan komponennya serta baja diperkirakan turut meningkat sejalan dengan biaya produksi Tiongkok yang lebih efisien relatif terhadap mayoritas negara-negara lain di dunia.

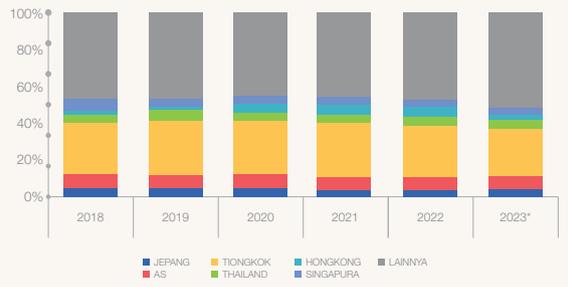
**Tiongkok berperan penting dalam perdagangan luar negeri (LN) Jawa Timur.** Setidaknya dalam jangka waktu lima tahun terakhir (2017 – triwulan I 2023), Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor LN tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Jepang dan Amerika Serikat dengan rata-rata kontribusi sebesar 11,15% terhadap total ekspor Jawa Timur (Grafik 1). Komoditas ekspor utama Jawa Timur ke Tiongkok meliputi: (i) lemak dan minyak hewani/nabati; (ii) berbagai produk kimia dan bahan kimia organik; (iii) kayu dan barang dari kayu; dan

Grafik 1. Negara Tujuan Ekspor LN Utama di Jawa Timur, 2018 - Triwulan I 2023



Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

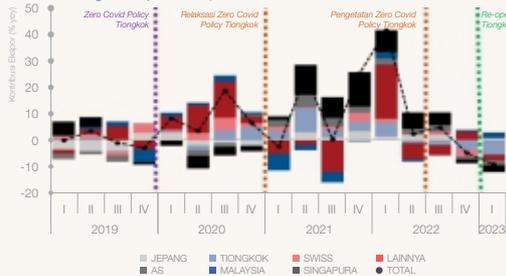
Grafik 2. Negara Asal Impor LN Utama di Jawa Timur, 2017-Triwulan I 2023



Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

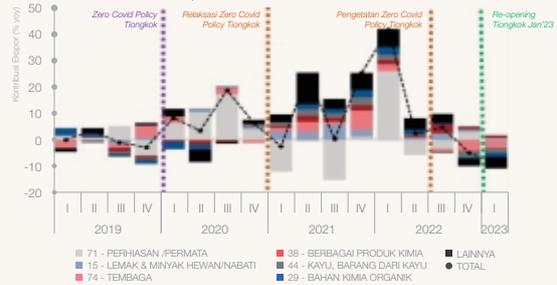
**BOKS 1**

**Grafik 3. Pertumbuhan Ekspor LN Jawa Timur Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor LN Utama**



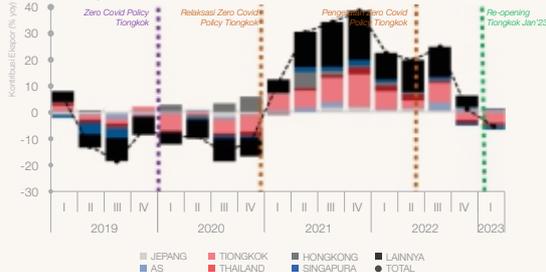
Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

**Grafik 4. Pertumbuhan Ekspor LN Jawa Timur Berdasarkan Komoditas Ekspor LN Utama**



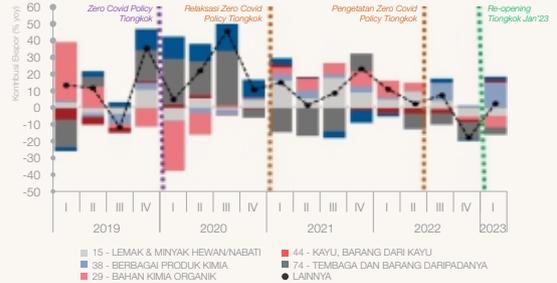
Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

**Grafik 6. Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur Berdasarkan Negara Asal Impor LN Utama**



Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

**Grafik 5. rtumbuhan Ekspor LN Jawa Timur ke Tiongkok Berdasarkan Komoditas Ekspor LN Utama**



Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

(iv) tembaga. Sementara itu, Tiongkok menjadi negara asal impor LN terbesar di Jawa Timur dengan rata-rata kontribusi sebesar 28,43% terhadap total impor LN Jawa Timur dalam jangka waktu lima tahun terakhir (2017 – triwulan I 2023) (Grafik 2). Komoditas impor LN Jawa Timur yang berasal dari Tiongkok terutama didominasi oleh barang antara.

**Kinerja ekspor LN Jawa Timur pada periode pandemi COVID-19 terpantau tetap tumbuh positif, termasuk ke Tiongkok.** Pada periode 2020 – 2022, kinerja ekspor LN Jawa Timur terpantau tetap kuat. Hal ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2020-2022 sebesar 10,60% (yoy) ditopang oleh tetap kuatnya ekspor LN komoditas utama, terutama perhiasan/permata (Grafik 3 dan Grafik 4). Rata-rata pertumbuhan ekspor LN Jawa Timur ke Tiongkok pada periode yang sama terpantau sebesar 11,22% (yoy), lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan total ekspor LN Jawa Timur. Tetap positifnya kinerja ekspor LN Jawa Timur ke Tiongkok terutama ditopang oleh komoditas lemak/minyak nabati, berbagai produk kimia, dan tembaga (Grafik 5).

**Pada era pandemi COVID-19, pola impor LN dari Tiongkok oleh Jawa Timur sejalan dengan pola impor negara asal impor utama lainnya.** Impor LN Jawa Timur sepanjang triwulan I 2020 hingga triwulan IV 2020 konsisten mengalami kontraksi sejalan dengan penurunan permintaan domestik akibat pembatasan aktivitas ekonomi untuk menekan laju penyebaran COVID-19<sup>17</sup>. Pola pertumbuhan impor LN tersebut terjadi di seluruh negara asal impor utama, termasuk Tiongkok (Grafik 6). Impor LN Jawa Timur, termasuk dari Tiongkok, mengalami tren peningkatan pada periode 2021 – 2022 sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan eksternal yang dipengaruhi oleh penurunan kasus COVID-19. Rata-rata pertumbuhan total impor LN dan impor LN asal Tiongkok oleh Jawa Timur pada periode 2021 – 2022 masing-masing sebesar 21,93% (yoy) dan 20,34% (yoy). Peningkatan impor terutama didominasi oleh barang antara sebagai bahan baku industri domestik (Grafik 7 dan Grafik 8).

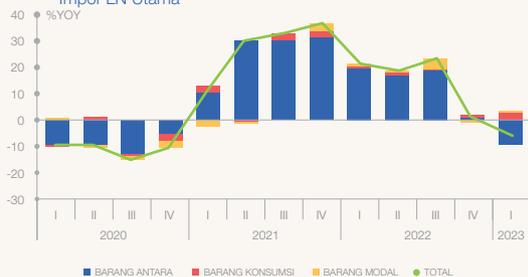
17. Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Bea Cukai, pertumbuhan impor LN Jawa Timur sepanjang triwulan I 2020 hingga triwulan IV 2020 masing-masing sebesar: (i) -9,18% (yoy); (ii) -8,91% (yoy); (iii) -14,90% (yoy); dan (iv) -10,6% (yoy).

**BOKS 1**

**Profil perdagangan Jawa Timur dan Tiongkok terindikasi memiliki kesamaan yang terbatas sehingga persaingan di pasar global relatif terbatas.** Pembukaan ekonomi Tiongkok pada awal tahun 2023 dikhawatirkan berdampak pada pengalihan order sejumlah komoditas ekspor LN Jawa Timur ke Tiongkok. Namun, realisasi risiko ini diprakirakan terbatas. Hal ini terindikasi dari pemetaan daya saing komoditas ekspor LN Jawa Timur dengan Tiongkok. Berdasarkan pemetaan daya saing ekspor LN dengan pendekatan *product mapping*, komoditas unggulan ekspor LN Jawa Timur dengan Tiongkok (komoditas *leading sectors*) terpantau berbeda. Komoditas ekspor unggulan Jawa Timur terutama meliputi perhiasan/permata, lemak/minyak hewani/nabati, dan berbagai produk kimia. Sementara komoditas ekspor LN utama Tiongkok terutama meliputi TPT dan komponen elektronik (Grafik 9 dan Grafik 10)<sup>18</sup>. Lebih lanjut, berdasarkan pendekatan *export similiary index* (ESI), profil ekspor LN Jawa Timur – Tiongkok memiliki tingkat kesamaan yang terbatas. Hal ini tercermin dari nilai ESI yang sebesar 0,30, lebih rendah dibandingkan ESI Indonesia – Tiongkok dan Jawa-Tiongkok yang masing-masing sebesar 0,37 dan 0,50 (Grafik 11)<sup>19</sup>.

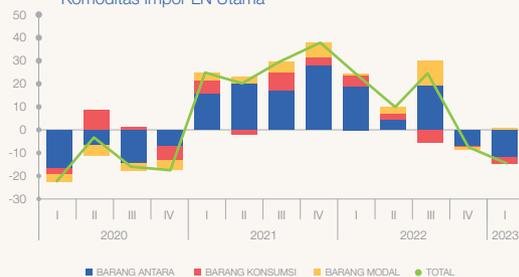
Dampak pembukaan ekonomi Tiongkok terhadap ekonomi Jawa Timur melalui jalur perdagangan diprakirakan terbatas. Pembukaan ekonomi Tiongkok diprakirakan berdampak langsung dan tidak langsung terhadap ekonomi Jawa Timur. Dampak langsung pembukaan ekonomi Tiongkok terutama bersumber dari jalur ekspor-impor dimana komoditas ekspor LN utama Jawa Timur ke Tiongkok serta impor LN Jawa Timur asal Tiongkok diprakirakan meningkat. Meskipun demikian, mempertimbangkan pola perdagangan LN Jawa Timur pada periode 2020 – 2022 (*zero-covid policy*) yang tetap tumbuh positif dan sejalan dengan pola perdagangan negara mitra dagang utama lainnya, dampak pembukaan ekonomi Tiongkok ke Jawa Timur melalui jalur perdagangan LN diprakirakan terbatas. Sementara itu, di jalur perdagangan, dampak tidak langsung pembukaan ekonomi Tiongkok bersumber dari jalur: (i) *spillover* kinerja ekonomi global yang lebih tinggi; (ii) *spillover* kinerja ekonomi mitra dagang domestik (khususnya Kalimantan dan Sulampua akibat potensi peningkatan ekspor LN batu bara ke Tiongkok) yang lebih tinggi. Melihat potensi perlambatan ekonomi global lebih dalam hingga pertengahan triwulan II

Grafik 7. Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur Berdasarkan Komoditas Impor LN Utama



Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

Grafik 8. Pertumbuhan Impor LN Jawa Timur ke Tiongkok Berdasarkan Komoditas Impor LN Utama



Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah (2023)

18. Pendekatan *product mapping* dengan mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Lafay (1992), Dalam et al (1998), Laursen (1998), dan Widodo (2008), dimana:

- $RSCA_{ij}$  merepresentasikan keunggulan komparatif dari negara  $j$  untuk kelompok komoditas  $j$  dengan rentang nilai antara -1 hingga 1 ( $-1 \leq RSCA_{ij} \leq 1$ ). Nilai indeks  $RSCA_{ij}$  dengan nilai lebih dari 0 menunjukkan bahwa komoditas negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dibandingkan rata-rata global. Sementara itu nilai indeks  $RSCA_{ij}$  dengan nilai kurang dari 0 menunjukkan bahwa komoditas negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif dibandingkan rata-rata global.
- $TBI_{ij}$  merepresentasikan indeks neraca perdagangan dari negara  $i$  untuk komoditas  $j$ ;  $x_{ij}$  dan  $m_{ij}$  masing-masing merepresentasikan ekspor dan impor dari negara  $i$  untuk komoditas  $j$ . Nilai  $TBI_{ij}$  berada di rentang -1 sampai dengan +1 ( $-1 \leq TBI_{ij} \leq 1$ ).  $TBI_{ij}$  yang bernilai -1 menunjukkan bahwa negara  $i$  hanya melakukan impor untuk komoditas  $j$ .  $TBI_{ij}$  yang bernilai +1 menunjukkan bahwa negara  $i$  hanya melakukan ekspor untuk komoditas  $j$ . Nilai  $TBI_{ij}$  yang berada pada rentang -1 dan +1 mengimplikasikan bahwa negara  $j$  melakukan impor untuk komoditas  $i$ . Negara  $j$  dikatakan *net-exporter* untuk komoditas  $i$  jika  $TBI_{ij}$  bernilai positif.

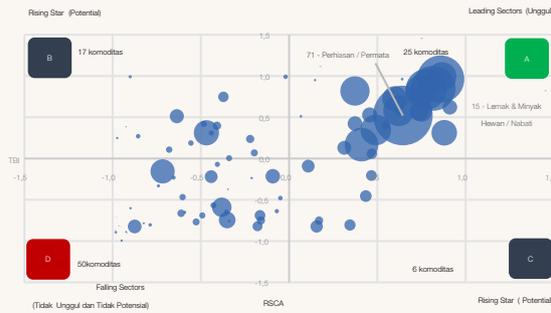
Perhitungan *product mapping* menggunakan tahun 2021 karena data ekspor total dunia dan Tiongkok tahun 2022 yang belum dipublikasikan.

19. Pendekatan *export similiary index* (ESI) dengan mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Plummer et al (2010), dimana  $0 \leq ESI \leq 1$ :

- 0: profil ekspor kedua negara/wilayah tidak sama (*complete dissimilarity*), sama sekali tidak bersaing
- 1: profil ekspor kedua negara/wilayah sepenuhnya sama (*identical export composition*), saling bersaing

**BOKS 1**

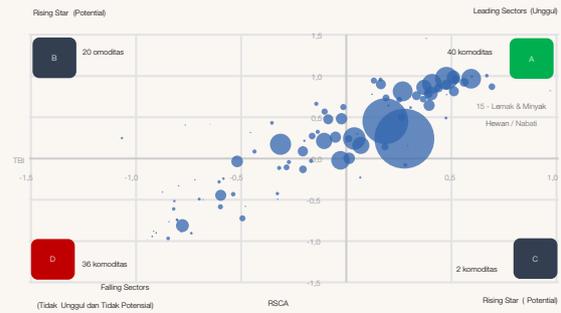
Grafik 9. *Product Mapping Jawa Timur, 2021*



Sumber: WITS (2023), Laporan Bea Cukai (2023), diolah

2023 akibat masih berlangsungnya konflik geopolitik dan potensi krisis perbankan di Amerika Serikat dan Eropa, permintaan global akan komoditas Tiongkok diperkirakan terbatas. Mempertimbangkan hal ini, dampak pembukaan ekonomi Tiongkok terhadap ekonomi dunia juga diperkirakan terbatas. Implikasinya, dampak spillover ekonomi dunia terhadap perdagangan LN Jawa Timur diestimasikan turut terbatas. Secara keseluruhan, dampak pembukaan ekonomi Tiongkok terhadap ekonomi Jawa Timur diperkirakan positif namun terbatas. Dinamika global menjadi faktor yang krusial karena diperkirakan berdampak pada ekonomi Tiongkok.

Grafik 10. *Product Mapping Tiongkok, 2021*



Sumber: WITS (2023), Laporan Bea Cukai (2023), diolah

Grafik 11. *Export Similarity Index, 2021*



Sumber: WITS (2023), Laporan Bea Cukai (2023), diolah

**BOKS 2**

**Urgensi Mendorong Penguatan Hulu – Hilir Pertanian untuk Menjaga Ketahanan Pangan Jawa Timur dan Nasional**

**Urgensi Menjaga Ketahanan Pangan Domestik**

Tantangan *food security* mendorong urgensi menjaga ketahanan pangan domestik. Konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung sejak tahun 2022 berdampak pada gangguan rantai pasok yang berimplikasi pada kebijakan proteksionisme global. Hal tersebut turut terjadi di sektor pangan. Berbagai negara di dunia memfokuskan pemenuhan pangan domestik dibandingkan melakukan ekspor ke negara lainnya. Akibatnya, negara-negara yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara domestik menjadi terganggu dalam pemenuhan pangan di wilayahnya. Oleh sebab itu, upaya menjaga ketahanan pangan domestik menjadi sangat krusial.

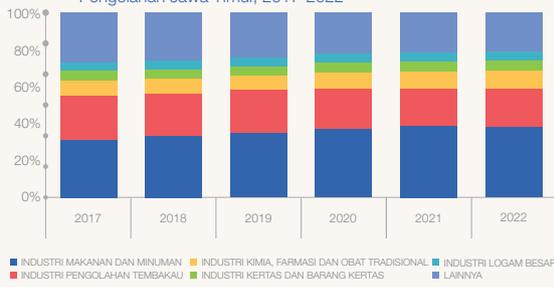
Perluasan pemanfaatan produk pertanian di tengah peningkatan konsumsi pangan turut mendorong pentingnya menjaga ketahanan pangan domestik. Berdasarkan *Food and Agriculture Organization/FAO* (2022), dalam dua dekade terakhir terjadi perluasan pemanfaatan komoditas pertanian. Komoditas hasil pertanian tidak hanya digunakan sebagai bahan baku produk pangan, namun juga non-pangan, seperti kosmetik, tekstil, dan energi. Di sisi lain, FAO (2021) mencatat tren peningkatan konsumsi pangan global dari 2.655 Kcal/hari pada periode 1984-1986 menjadi 2.970 Kcal/hari pada tahun 2015 dan diestimasikan menjadi 3.050 Kcal/hari pada tahun 2030. Tren peningkatan konsumsi pangan di tengah semakin luasnya pemanfaatan produk pertanian mendorong pentingnya menjaga ketahanan pangan global, termasuk Indonesia.

Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nusantara memiliki tanggung jawab lebih untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Jawa Timur memegang peran penting dalam sektor pertanian nasional. Dalam satu dekade terakhir,

kontribusi LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jawa Timur terhadap nasional mencapai 14,06%, paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kontribusi sub LU Peternakan, sub LU Tanaman Pangan, dan sub LU Perikanan Jawa Timur terhadap nasional pada periode yang sama masing-masing mencapai 23,67%, 17,25%, dan 12,34%. Lebih lanjut, setidaknya dalam satu dekade terakhir, Jawa Timur selalu menjadi lima besar produsen pangan strategis nasional, yakni: (i) beras (posisi 1); (ii) jagung (posisi 1); (iii) bawang merah (posisi 1); (iv) cabai merah (posisi 5); (v) cabai rawit (posisi 1); (vi) daging sapi (posisi 1); (vii) daging ayam ras (posisi 3); dan (viii) telur ayam ras (posisi 1). Jawa Timur juga menjadi eksportir antardaerah komoditas pangan di Indonesia, baik di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, maupun Sulawesi.

Pengembangan sektor Pertanian di Jawa Timur menjadi semakin penting mempertimbangkan kontribusi Industri Makanan-Minuman yang tinggi dalam ekonomi Jawa Timur. LU Industri Pengolahan menjadi penopang utama ekonomi Jawa Timur. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata kontribusi LU Industri Pengolahan terhadap ekonomi Jawa Timur mencapai 29,71%. Sub sektor LU Industri Makanan-Minuman menjadi kontributor utama dengan pangsa mencapai 32,80% terhadap LU Industri Pengolahan Jawa Timur dalam periode yang sama (Grafik 1). Lebih lanjut, Industri Makanan-Minuman juga menjadi kontributor tertinggi untuk ekspor luar negeri Jawa Timur dengan rata-rata pangsa sebesar 20,08% terhadap total ekspor LN Jawa Timur dalam sepuluh tahun terakhir (Grafik 2). Hal tersebut mendorong pentingnya peran LU Pertanian sebagai bahan baku utama sub Industri Makanan – Minuman.

Grafik 1. Kontribusi Industri Makanan-Minuman dalam Industri Pengolahan Jawa Timur, 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Grafik 2. Pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jawa Timur dan Nasional, 2012 – 2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

**BOKS 2**

**Tantangan Sektor Pertanian di Jawa Timur**

**Penurunan produksi dan produktivitas LU Pertanian menjadi tantangan utama pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur di tengah upaya menjaga ketahanan pangan.** LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turut menjadi penopang ekonomi Jawa Timur. Dalam 10 tahun terakhir, pangsa LU Pertanian, Kehutanan, dan Pertanian terhadap ekonomi Jawa Timur mencapai 11,28%. Hal tersebut menempatkan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai kontributor terbesar ketiga bagi ekonomi Jawa Timur setelah LU Industri Pengolahan (29,71%) dan LU Perdagangan (18,43%). Meskipun demikian, dalam satu dekade terakhir, terjadi tren penurunan produksi dan produktivitas LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Jawa Timur terutama dipengaruhi oleh adanya alih fungsi lahan dan penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas<sup>20</sup>. Hal tersebut tercermin dari penurunan tren pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jawa Timur. Pertumbuhan sektor ini di Jawa Timur terpantau lebih

rendah dibandingkan nasional. Bahkan dalam enam tahun terakhir, pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu di bawah 2% (yoy). Hal tersebut menjadikan sumbangan LU tersebut pada ekonomi Jawa Timur cenderung terbatas (Grafik 3).

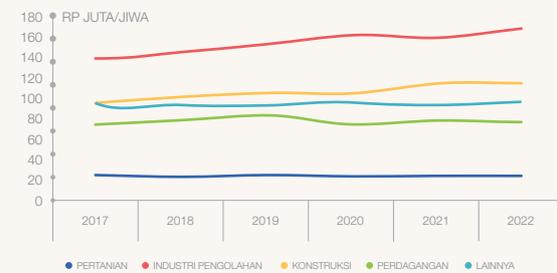
**Insentif dan nilai tambah di LU Pertanian yang masih rendah berdampak pada rendahnya pengembangan di sektor ini.** LU Pertanian, termasuk di Jawa Timur terpantau masih memiliki insentif yang rendah, tercermin dari pendapatan per kapita sektor Pertanian yang paling rendah dibandingkan sektor lain. Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata pendapatan per kapita di LU Pertanian berada di kisaran Rp25 juta per orang per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan LU Industri Pengolahan yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dengan Rp166 juta per orang per tahun (Grafik 4). Tantangan lain dari sektor Pertanian di Jawa Timur adalah nilai tambah yang masih rendah, tercermin dari masih tingginya ekspor

Grafik 3. Kontribusi Ekspor LN Industri Makan dan Minum Provinsi Jawa Timur



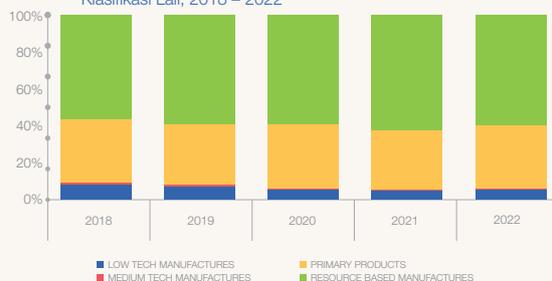
Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah

Grafik 4. Perkembangan Pendapatan Perkapita Sektor Pertanian



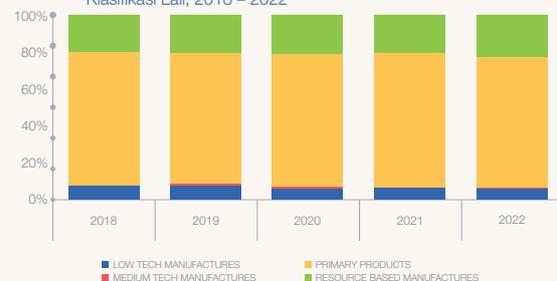
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Grafik 5. Komposisi Ekspor LN Komoditas Pertanian di Jawa Timur, Klasifikasi Lall, 2018 – 2022



Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah

Grafik 6. Komposisi Impor LN Komoditas Pertanian di Jawa Timur, Klasifikasi Lall, 2018 – 2022



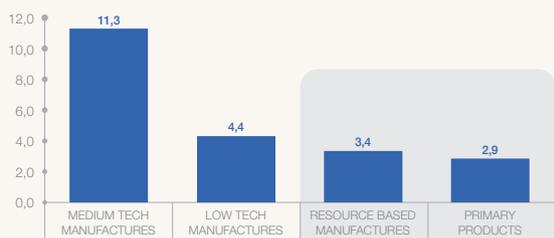
Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah

20. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (2019), hingga tahun 2019, tercatat 9.597 ha lahan pertanian (0,87% dari total lahan pertanian di Jawa Timur sejumlah 1,1 juta ha) mengalami alih fungsi menjadi menjadi kawasan pergudangan, industri, dan properti.

## BOKS 2

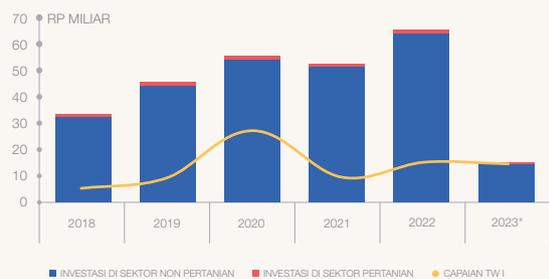
dalam bentuk *primary product* dan *resourced manufactured*. Lebih lanjut, impor komoditas pertanian, baik yang berbentuk *primary product* maupun *resourced based manufacture* masih tinggi, terutama olahan daging dan *diary product* (Grafik 5 – Grafik 7). Hal tersebut berdampak pada insentif di sektor Pertanian yang rendah. Rendahnya daya tarik di LU Pertanian tersebut menyebabkan rendahnya minat investasi di sektor Pertanian Jatim. Rata-rata PMDN dan PMA sektor Pertanian di Jawa Timur masing-masing sebesar 0,7% dan 1,5% dari total investasi (rata-rata 2015 – triwulan I 2023) (Grafik 8 dan Grafik 9).

Grafik 7. Rata-Rata Harga Produk Pertanian, Klasifikasi Lall, 2018 – 2022



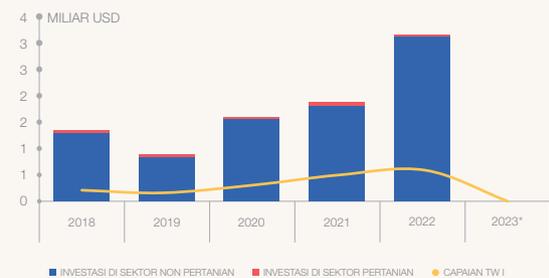
Sumber: Laporan Bea Cukai, diolah

Grafik 8. PMDN di LU Pertanian, 2015 – Triwulan I 2023



Sumber: BKPM, diolah

Grafik 9. PMDN di LU Pertanian, 2015 – Triwulan I 2023



Sumber: BKPM, diolah

**Berbagai tantangan di LU Pertanian tersebut di atas turut berdampak pada tingginya persistensi inflasi pangan di Jawa Timur.** Dalam lima tahun terakhir, terdapat enam komoditas utama yang persisten menyumbang inflasi pangan yaitu beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Hal tersebut mengindikasikan masih tingginya ruang pengembangan sektor Pertanian sisi hulu – hilir di Jawa Timur.

### Rekomendasi Kebijakan

Mempertimbangkan urgensi dan tantangan di sektor Pertanian Jawa Timur, terdapat rekomendasi yang dapat kita diskusikan bersama, yakni:

- 1) Penguatan produksi dan produktivitas sisi hulu, terutama melalui penguatan teknologi pra-panen;
- 2) Penguatan teknologi pasca panen (*handling, storage, pengolahan untuk konsumsi*);
- 3) Mendorong hilirisasi menuju nilai tambah tinggi;
- 4) Peningkatan ekspor dan substitusi impor produk pertanian yang dapat diproduksi domestik;
- 5) Mendorong investasi/akses pembiayaan bagi seluruh pemain di rantai hulu sampai dengan hilir sektor pertanian; dan
- 6) Peningkatan promosi dan branding produk pertanian.

**BOKS 3**

**Pemetaan Komoditas Utama Pertanian dan Optimalisasi Pengembangan Komoditas Unggul Jawa Timur**

Lapangan Usaha (LU) pertanian, kehutanan, dan perikanan provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap PDB LU Pertanian secara nasional. Dalam periode 2015-2022, kontribusi terbesar disumbang oleh sub LU Peternakan (23,67%), diikuti oleh sub LU Tanaman Pangan (17,25%), dan sub LU perikanan dengan pangsa sebesar 12,34% dari PDB nasional, menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai kontributor utama pertanian dan sebagai lumbung pangan nasional dengan pangsa mencapai 12,5% dari total PDB LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Indonesia (Grafik 1).

Jawa Timur berperan penting dalam produksi pangan nasional. Pada periode 2015-2022, data 95 komoditas menunjukkan bahwa produksi dari Jawa Timur menempati peringkat pertama untuk 29 komoditas, peringkat kedua untuk 14 komoditas, dan peringkat ke 3 untuk 22 komoditas. Secara total, terdapat 82 komoditas (86% komoditas) hasil produksi dari Jawa Timur yang menempati peringkat 5 besar nasional (Gambar 1). Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan komoditas utama pada tiga subsektor yaitu subsektor LU Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian, subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subsektor Perikanan.

Hasil monetisasi menunjukkan bahwa hanya beberapa komoditas menjadi penyumbang utama nilai tambah pertanian pada masing-masing sub LU. Pada sub LU Tanaman Pangan, komoditas padi, jagung dan ubi Kayu membentuk hingga 90% pangsa sub LU Tanaman Pangan. Demikian pula pada sub LU Peternakan dengan komoditas telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi dan susu segar menguasai hingga 90% pangsa sub LU tersebut (Gambar 2).

Dilihat dari potensi nilai tambah yang dapat dihasilkan, sub LU hortikultura berpotensi memperoleh nilai tambah yang sangat besar seiring dengan besarnya nilai produksi yang dihasilkan. Namun demikian, tingginya fluktuasi harga dan besarnya loss produksi paska panen menjadikan nilai tambah efektif yang dapat dihasilkan berkurang signifikan. Masih minimnya hilirisasi di sektor ini menjadikan manfaat ekonomi atas produksi yang dilakukan menjadi sangat terbatas.

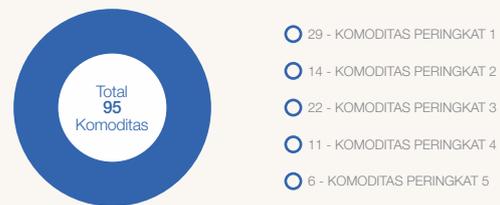
Terdapat 12 komoditas utama yang menopang LU Pertanian di Jawa Timur. Berdasarkan pemetaan komoditas utama di setiap sub-LU, terdapat 12 komoditas pertanian utama yang menyumbang hingga 50% dari total nilai produksi pertanian di Jawa Timur. Keduabelas komoditas tersebut adalah padi,

Grafik 1. Kontribusi Sub LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Jawa Timur terhadap PDB Nasional



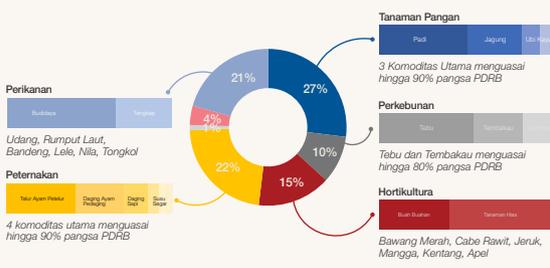
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Gambar 2. Peringkat Komoditas Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jawa Timur



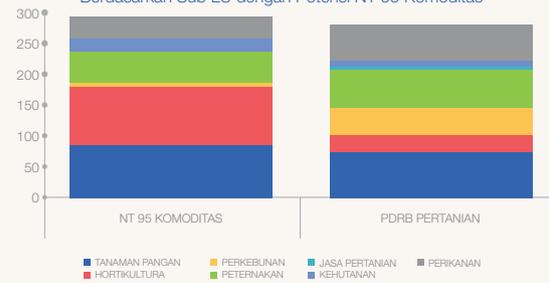
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Gambar 1. Taksonomi Pertanian Jawa Timur per Subsektor Berdasarkan Kontribusi PDRB



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

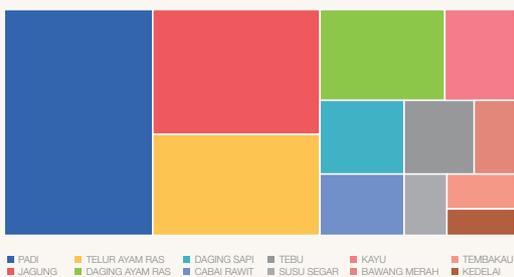
Grafik 2. Perbandingan Sumbangan PDRB Sektor Pertanian Berdasarkan Sub LU dengan Potensi NT 95 Komoditas



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

**BOKS 3**

Gambar 3. Pemetaan 12 Komoditas Utama Pertanian Provinsi Jatim



Sumber: BPS, diolah

jagung, telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, cabai rawit, ubi kayu, tebu, susu segar, bawang merah, tembakau, dan kedelai (Gambar 3).

Terdapat tiga komoditas pertanian di Indonesia dan satu komoditas pertanian di Jawa Timur yang relatif belum swasembada. Data neraca produksi dan konsumsi komoditas di Indonesia menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga komoditas yang relatif belum swasembada, antara lain komoditas daging sapi, susu segar dan gula. Jawa

Tabel 1. Neraca Produksi dan Konsumsi Nasional

NASIONAL	Konsumsi	Produksi	Prod-Kons	Ekspor	Impor	Selisih
Bawang Merah	1.224.342	2.004.590	780.248	4.119	107.527	883.656
Cabai Rawit	492.840	1.386.447	893.607	128	0	893.479
Daging Ayam Ras	3.557.122	3.765.573	208.451	-	-	208.451
Daging Sapi	771.295	498.923	-272.371	5.324	284.438	6.743
Jagung	16.901.881	19.612.435	2.710.554	2.528	996.001	3.704.027
Padi	52.154.259	54.748.977	2.594.718	3.278	410.473	3.001.914
Susu Segar	4.454.726	968.980	-3.485.746	48.840	3.514.053	-20.533
Telur Ayam Ras	4.304.136	5.566.339	1.262.203	52	2.642	1.264.793
Ubi Kayu	2.707.882	21.801.415	19.093.533	6.598	0	19.086.935
Udang	1.084.248	1.159.363	75.115	370.033	16.535	-278.383
Kedelai	4.189.140	6.515.807	2.326.667	-	-	2.326.667
Gula	7.581.522	2.405.538	-5.175.984	-	-	-5.175.984

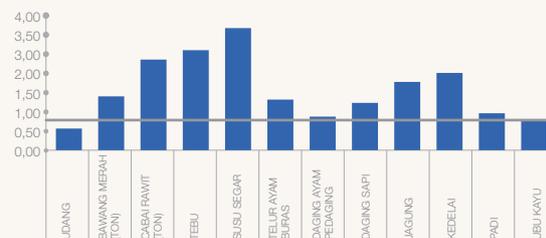
Sumber: BPS, diolah

Tabel 2. Neraca Produksi dan Konsumsi Jawa Timur

NASIONAL	Konsumsi	Produksi	Prod-Kons	Ekspor	Impor	Selisih
Bawang Merah	177.704	500.992	323.288	4.119	107.527	426.696
Cabai Rawit	71.532	578.883	507.351	128	0	507.223
Daging Ayam Ras	516.289	586.703	70.414	-	-	70.414
Daging Sapi	111.948	110.991	-956	5.324	284.438	278.156
Jagung	2.453.190	6.131.163	3.677.983	2.528	996.001	4.671.456
Padi	7.569.796	9.526.516	1.956.720	3.278	410.473	2.363.915
Susu Segar	646.570	543.687	-102.883	48.840	3.514.053	303.192
Telur Ayam Ras	624.713	1.314.115	689.402	52	2.642	691.992
Ubi Kayu	393.029	3.161.573	2.768.544	6.598	0	2.761.947
Udang	157.370	117.933	-39.437	370.033	16.535	-392.935
Kedelai	608.022	2.333.866	1.725.844	-	-	1.725.844
Gula	1.100.401	1.192.812	92.411	-	-	92.411

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3. Analisis LQ Komoditas Unggulan Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah

Timor sebagai pemasok gula utama Indonesia menunjukkan produksi gula mengalami surplus, namun justru defisit pada komoditas udang, seiring dengan banyaknya industri olahan udang di Jawa Timur. Data neraca menunjukkan surplus yang besar seperti surplus produksi bawang merah hingga 21% dari total kebutuhan bawah merah nasional, begitu juga dengan komoditas cabai rawit, ubi kayu, jagung, telur ayam ras, dan kedelai. Hal ini menunjukkan potensi perdagangan antar daerah yang sangat besar seiring dengan surplus produksi yang ada (Tabel 1 dan Tabel 2).

Jawa Timur memiliki keunggulan kompetitif di bidang pertanian yang lebih tinggi dibandingkan nasional. Hal ini terindikasi dari data *Location Quotient* (LQ) yang menunjukkan hasil rata-rata lebih dari 1<sup>21</sup>. Nilai LQ tertinggi pada budidaya komoditas susu segar dengan nilai LQ hingga 3,67 yang berarti aktivitas bisnis budidaya susu segar di Jawa Timur hampir 4 kali lebih tinggi dari budidaya sejenis di provinsi lain. Pengusahaan tebu, cabai rawit, kedelai dan jagung juga menunjukkan nilai LQ lebih dari 2 kali di atas rata-rata daerah lain. Hanya komoditas udang dan ubi kayu yang memiliki nilai LQ kurang dari 1 yang menunjukkan rata-rata aktivitas usaha pada 2 komoditas tersebut relatif lebih rendah dibanding pengusahaan komoditas yang sama di wilayah lainnya.

20. *Location Quotient* (LQ) adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif sumbangan nilai tambah sebuah komoditas di suatu daerah (provinsi) terhadap sumbangan nilai tambah komoditas yang bersangkutan dalam skala nasional sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat keunggulan relatif dan menentukan komoditas basis di suatu provinsi.

Angka LQ berkisar dari 0 sampai dengan positif tak terhingga.

- LQ<1 menunjukkan bahwa komoditas yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan relatif.

- LQ=1 mengindikasikan bahwa komoditas yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang sama dengan rata-rata semua daerah.

- LQ>1 memiliki makna bahwa komoditas yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata dan memiliki potensi ekspor (Tim Statistik Sektor Rill Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter, 2006).

## BOKS 3

Dalam proses optimalisasi pengembangan komoditas utama pertanian yang telah dipetakan, terdapat beberapa peluang dan tantangan yang perlu dipertimbangkan untuk masing-masing komoditas (Tabel 3). Sebagian besar komoditas unggulan di provinsi Jawa Timur memiliki diversifikasi produk turunan yang beragam sehingga berpotensi cukup besar pada perkembangan industri pengolahan. Adapun tantangan yang dihadapi cenderung bervariasi dan memang menjadi permasalahan struktural di sektor pertanian seperti tingkat impor yang tinggi pada komoditas tertentu, perubahan iklim yang tidak menentu,

hilirisasi rendah, keterbatasan lahan, fluktuasi harga, dan penyakit atau hama yang menjangkiti baik tanaman maupun hewan ternak. Untuk itu, diperlukan sinergi kebijakan yang intensif antara pemerintah, petani, lembaga riset, sektor swasta, dan masyarakat terkait. Mempertimbangkan hal tersebut, pemahaman akan komoditas utama penyumbang pertanian di Provinsi Jawa Timur penting untuk dilakukan guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Fokus pada penanganan permasalahan utama akan mempercepat pengembangan komoditas pertanian utama yang lebih berdaya saing ke depan.

Tabel 3. Peluang dan Tantangan 12 Komoditas Unggulan di Jawa Timur

Jenis Komoditas	Peluang (+)	Tantangan (-)
BERAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri turunan besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat yang subsisten (kebiasaan menyimpan padi dalam lumbung)</li> <li>Penggunaan teknologi modern yang masih belum merata</li> </ul>
JAGUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi produk turunan beragam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan tanam jagung biasanya merupakan lahan substitusi tanaman pangan lainnya</li> </ul>
KEDELAI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi produk turunan beragam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impor tinggi</li> <li>Harga internasional rendah</li> </ul>
DAGING AYAM RAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harga stabil</li> <li>Pabrik pakan terkonsentrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oligopoli</li> <li>Cold storage kurang</li> </ul>
TELUR AYAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peternak mandiri banyak</li> <li>Daya saing tinggi</li> <li>Industri makanan dan minuman beragam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fluktuasi tinggi</li> </ul>
DAGING SAPI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Populasi sapi di Jawa Timur lebih banyak dibanding nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serangan virus yang menyebabkan penyakit mulut dan kulit (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD)</li> </ul>
TEBU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pabrik pengolahan tebu (gula) dekat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gula refinasi lebih murah</li> </ul>
UDANG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pabrik industri pengolahan besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rentan Penyakit</li> <li>Kurang terhilirisasi</li> </ul>
SUSU SEGAR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversifikasi produk luas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketergantungan pada impor</li> <li>Konsumsi per kapita rendah</li> <li>Kualitas dan ketersediaan pangan rendah</li> </ul>
BAWANG MERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi produksi berdekatan (aglomerasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rawan terdampak oleh iklim</li> <li>Hilirisasi rendah</li> </ul>
CABE RAWIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Share PDRB nasional ringgi</li> <li>Agglomerasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komoditas rentan rusak</li> <li>Rawan terdampak iklim</li> <li>Hilirisasi rendah</li> </ul>
UBI KAYU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berpotensi pada industri pengolahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilirisasi dan harga rendah</li> </ul>



Bab II

# Keuangan Pemerintah

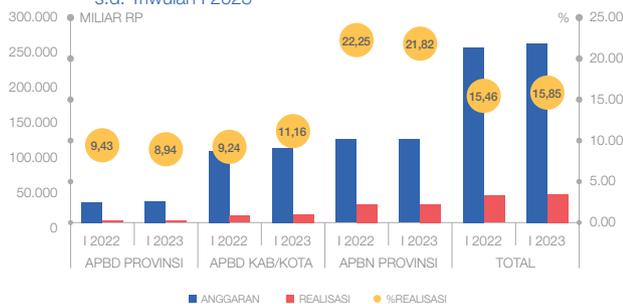


## 2.1. GAMBARAN UMUM

Pada tahun 2023, anggaran belanja Pemerintah secara agregat di wilayah Jawa Timur mengalami peningkatan. Anggaran belanja Pemerintah tercatat sebesar Rp262,30 triliun, meningkat 2,34% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp256,30 triliun (Grafik 2.1). Komposisi anggaran belanja Pemerintah masih didominasi oleh anggaran Kementerian/Lembaga vertikal (APBN) sebesar Rp121,99 triliun (pangsa 46,51%), kemudian diikuti oleh anggaran gabungan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (APBD Kabupaten/Kota) sebesar Rp109,19 triliun (pangsa 41,63%) dan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur (APBD Provinsi) sebesar Rp31,12 triliun (pangsa 11,86%). Adapun peningkatan pagu anggaran belanja Pemerintah sejalan dengan upaya Pemerintah dalam menjaga resiliensi ekonomi pasca pandemi COVID-19.

**Kinerja realisasi belanja Pemerintah di wilayah Jawa Timur tercatat meningkat.** Sampai dengan triwulan I 2023, realisasi total belanja Pemerintah di wilayah Jawa Timur mencapai Rp41,59 triliun atau meningkat 4,97% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp39,62 triliun. Peningkatan terutama didorong oleh realisasi anggaran APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi yang tercatat masing-masing meningkat 25,76% (yoy) dan 0,10% (yoy). Pada triwulan I 2023, APBD Kabupaten/Kota tercatat telah merealisasikan 11,16% dari pagu anggaran atau sebesar Rp12,18 triliun, sedangkan APBD Provinsi tercatat telah merealisasikan 8,94% atau sebesar Rp2,78 triliun. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari membaiknya kinerja realisasi pendapatan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi yang terus berlanjut. Di sisi lain, kinerja realisasi belanja APBN Provinsi tercatat menurun 1,95% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp27,15 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp26,62 triliun pada tahun laporan. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) seiring masih berlangsungnya proses untuk melengkapi pemenuhan persyaratan administratif oleh Pemerintah Daerah untuk penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked), sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Grafik 2.1 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2023



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur, Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

## 2.2. APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

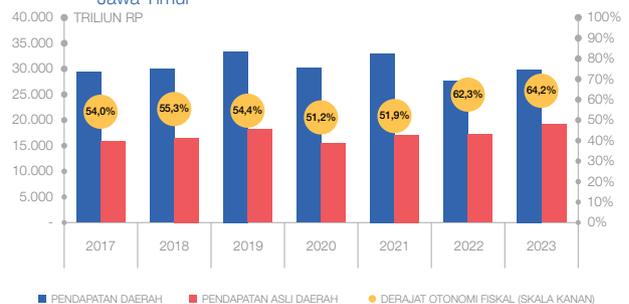
APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur terdiri dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp29,85 triliun atau meningkat 7,98% (yoy) dari tahun sebelumnya, serta anggaran belanja sebesar Rp31,12 triliun yang juga terpantau meningkat 5,66% (yoy). Melalui perkembangan tersebut, secara keseluruhan tahun APBD Pemerintah Provinsi Jawa diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp1,27 triliun. Penetapan pagu APBD yang defisit tersebut mencerminkan strategi kebijakan fiskal ekspansif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung peningkatan investasi dan konsumsi, sehingga diharapkan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam upaya menjaga resiliensi ekonomi pascapandemi COVID-19. Adapun defisit anggaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur direncanakan akan diimbangi oleh pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

### 2.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.1.1. Anggaran Pendapatan Daerah

Pada tahun 2023, pagu anggaran pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditetapkan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.1). Peningkatan pagu anggaran terjadi pada seluruh pos pendapatan, terutama pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan meningkat hingga Rp1,93 triliun (tumbuh 11,18%, yoy), yaitu dari Rp17,24 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp19,17 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut sejalan dengan ekspektasi berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat yang diharapkan berdampak positif pada peningkatan pendapatan terutama pada pos pajak dan retribusi daerah. Peningkatan pagu anggaran juga terjadi pada pos Pendapatan Transfer sebesar Rp0,27 triliun atau tumbuh 2,59% (yoy) seiring dengan berlanjutnya upaya menjaga resiliensi ekonomi dari Pemerintah Pusat. Lebih lanjut, pagu anggaran pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 61,46% (yoy) meskipun dari segi nominal terpantau relatif rendah, yaitu dari yang sebelumnya sebesar

Grafik 2.2 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi Jawa Timur



Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023

URAIAN	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi I 2023 (%YOY)
	2022	2023		Realisasi I 2022		Realisasi I 2023		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
<b>Pendapatan Daerah</b>	29.564,65	29.848,71	7,98	5.584,26	20,20	5.781,39	19,37	3,53
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	18.122,85	19.167,29	11,18	3.784,19	21,95	4.389,08	22,90	15,98
Pajak Daerah	15.046,05	16.029,90	12,60	3.228,49	22,68	3.678,14	22,95	13,93
Retribusi Daerah	103,56	86,69	(14,50)	21,01	20,72	19,96	23,03	(4,99)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	441,68	458,15	3,22	8,86	2,00	-	-	(100,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2.531,55	2.592,55	5,45	525,82	21,39	690,98	26,65	31,41
<b>Pendapatan Transfer</b>	11.397,95	10.654,29	2,59	1.791,43	17,25	1.383,70	12,99	(22,76)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.397,95	10.654,29	2,59	1.791,43	17,25	1.383,70	12,99	(22,76)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	43,85	27,13	61,46	8,64	51,43	8,61	31,72	(0,42)
Pendapatan Hibah	43,85	27,13	61,46	5,72	34,04	0,03	0,10	(99,52)
Dana Darurat	-	0	-	0,00	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	2,92	-	8,58	-	193,50

Sumber: BPKAD Jawa Timur

Rp16,80 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp27,13 miliar pada tahun 2023.

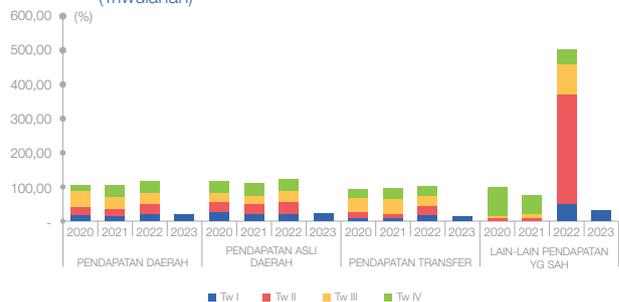
**Meningkatnya target PAD pada APBD Provinsi Jawa Timur mendorong peningkatan Derajat Otonomi Fiskal (DOF)<sup>22</sup> APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023.** DOF tahun 2023 diperkirakan mencapai 64,21% atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 62,37% (Grafik 2.2). Peningkatan target PAD ditopang oleh ekspektasi peningkatan pendapatan Pajak Daerah dengan pangsa mencapai 83,63% dari total PAD, yang terutama disumbang oleh komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain itu, peningkatan target PAD juga ditopang oleh membaiknya kinerja penerimaan Lain-Lain Pendapatan PAD yang Sah dengan pangsa sebesar 13,53% terhadap total PAD. Adapun peningkatan pada komponen ini ditopang oleh penerimaan manfaat dari penempatan uang Pemerintah Daerah di perbankan, baik berupa bunga maupun jasa giro.

### 2.2.1.2. Realisasi Pendapatan Daerah

**Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2023 mencatat perbaikan.** Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp5,78 triliun atau 19,37% dari pagu anggaran (Tabel 2.1). Secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,58 triliun. Namun demikian, secara persentase, capaian realisasi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I 2022 (20,20%) seiring peningkatan pagu anggaran pendapatan pada tahun 2023. Peningkatan realisasi pendapatan pada triwulan laporan ditopang oleh membaiknya kinerja PAD yang terealisasi sebesar Rp4,39 triliun atau 22,90% dari pagu anggaran, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar

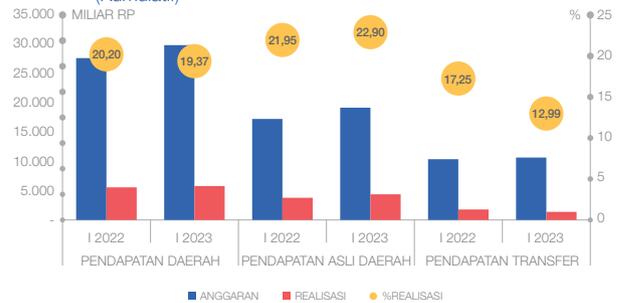
Rp3,78 triliun (20,88% dari pagu 2022). Capaian ini ditopang oleh realisasi komponen Pajak Daerah yang terpantau tumbuh 15,98% (yoy). Adapun realisasi komponen Pajak Daerah yang tinggi terutama didukung oleh realisasi pada komponen PKB sebesar Rp1,77 triliun (pangsa 40,38% dari total PAD) dan BBNKB sebesar Rp1,10 triliun (pangsa 25,13% dari total PAD). Lebih lanjut,

Grafik 2.3 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.4 Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

22. DOF: Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan.

peningkatan realisasi PAD juga didukung oleh meningkatnya realisasi komponen Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp690,98 miliar (26,65% dari pagu) yang terutama bersumber dari penerimaan manfaat dari penempatan uang Pemerintah Daerah di rekening giro perbankan (jasa giro) dan hasil penyewaan Barang Milik Daerah (BMD).

**Pemerintah Provinsi telah menempuh langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).** Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten melaksanakan pelayanan Samsat Keliling terjadwal sebagai upaya “jemput bola” kepada wajib pajak. Selain itu, implementasi elektronifikasi Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi proses pembayaran juga terus diperluas, seperti pembayaran pajak dan retribusi secara digital.

**Di sisi lain, realisasi pos Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tercatat menurun.** Pada triwulan I 2023, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1,38 triliun atau 12,99% dari pagu anggaran, menurun dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1,79 triliun (17,25% dari pagu 2022). Sementara itu, realisasi pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah juga tercatat menurun dari Rp 8,64 miliar (51,43% dari pagu 2022) pada triwulan I 2022 menjadi Rp8,61 miliar (31,72% dari pagu 2023) pada triwulan laporan. Adapun salah satu faktor lebih rendahnya kinerja Pendapatan Transfer adalah tidak adanya alokasi anggaran program PEN dan pengendalian COVID-19 di awal tahun seperti

tahun sebelumnya seiring dengan kondisi perekonomian yang sudah membaik dan pandemi COVID-19 yang semakin terkendali.

## 2.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Provinsi Jawa Timur

### 2.2.2.1. Anggaran Belanja Daerah

**Anggaran belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.2).** Peningkatan pagu anggaran belanja terutama didorong oleh peningkatan pada pos Belanja Transfer yang ditetapkan sebesar Rp7,77 triliun atau tumbuh 50,86% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp5,15 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan optimisme Pemerintah Provinsi terhadap kinerja pendapatan yang juga ditargetkan meningkat sehingga mampu untuk melakukan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan yang lebih besar kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Desa. Peningkatan pagu anggaran juga terjadi pada pos Belanja Modal yang tercatat tumbuh 1,47% (yoy), yaitu dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,31 triliun menjadi Rp2,34 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut merupakan cerminan komitmen Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembangunan daerah. Adapun alokasi terbesar anggaran Belanja Modal pada tahun 2023 diperuntukkan untuk pembelian gedung dan bangunan (pangsa 50,99%), serta pembelian peralatan dan mesin (pangsa 30,60%).

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023

URAIAN	Pagu APBD Prov. Jawa Timur		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi IV 2022 (%YOY)
	2021	2022		Realisasi I 2021		Realisasi I 2023		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja Daerah	29.455	31.121	5,66	2.778	9,43	2.781	8,94	0,10
Belanja Operasi	21.040	20.063	(4,64)	2.305	10,96	2.243	11,18	(2,70)
Belanja Pegawai	8.478	8.559	0,96	1.056	12,46	1.147	13,40	8,57
Belanja Barang Dan Jasa	7.097	7.977	12,40	945	13,31	956	11,99	1,22
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	25	19	(26,00)	3	12,00	-	-	(100,00)
Belanja Hibah	5.318	3.365	(36,72)	276	5,18	110	3,28	(59,96)
Belanja Bantuan Sosial	122	143	17,09	25	20,82	29	20,47	15,14
Belanja Modal	2.309	2.343	1,47	34	1,46	14	0,60	(58,30)
Belanja Modal Tanah	11	209	1.724,32	0	0,00	0	0,01	4.693,87
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	729	717	(1,70)	32	4,41	14	1,92	(57,11)
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1.231	1.194	(3,01)	1	0,04	0	0,01	(70,96)
Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	219	127	(41,92)	0	0,09	0	0,04	(73,84)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113	91	(19,41)	1	0,70	0	0,02	(97,43)
Belanja Modal Aset Lainnya	5	4	(12,28)	-	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	954	943	(1,15)	85	8,93	38	4,03	(55,40)
Belanja Transfer	5.152	7.771	50,86	355	6,88	486	6,26	37,19
Belanja Bagi Hasil	4.546	7.228	58,99	355	7,80	412	5,69	16,06
Belanja Bantuan Keuangan	605	543	(10,26)	-	-	75	13,79	-

Sumber: BPKAD Jawa Timur

Di sisi lain, anggaran Belanja Operasi dan Belanja Tak Terduga tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pagu anggaran Belanja Operasi pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp20,06 triliun atau turun 4,64% dibandingkan pagu tahun sebelumnya yang sebesar Rp21,04 triliun. Hal ini seiring dengan penurunan target Belanja Hibah dan Belanja Subsidi yang masing-masing turun sebesar 36,72% (yoy) dan 26,00% (yoy) sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian dan aktivitas usaha. Penurunan pagu anggaran Belanja Operasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan target Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Bantuan Sosial, yang masing-masing tumbuh 0,96% (yoy), 12,40% (yoy) dan 17,09% (yoy). Peningkatan target Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa seiring dengan peningkatan aktivitas perkantoran pascapencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir tahun 2022. Sementara itu, peningkatan target Belanja Bantuan Sosial sejalan dengan upaya menjaga resiliensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pemberian subsidi penanggulangan dampak inflasi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Lebih lanjut, pagu anggaran Belanja Tak Terduga juga terpantau turun 1,15% (yoy), yaitu dari Rp0,95 triliun menjadi Rp0,94 triliun seiring kondisi yang sudah relatif stabil di tengah peralihan dari pandemi COVID-19 menuju endemi COVID-19.

### 2.2.2.2. Realisasi Belanja Daerah

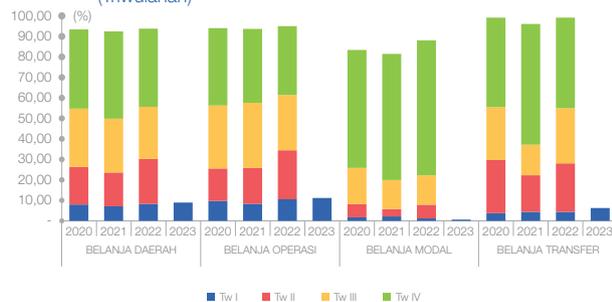
Realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp2,781 triliun atau 8,94% dari pagu anggaran (Tabel 2.2). Secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,778 triliun. Namun demikian, secara persentase tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (9,43%) seiring peningkatan pagu anggaran belanja pada tahun 2023. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Transfer di tengah penurunan pos belanja lainnya. Pada triwulan I 2023, Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp0,49 triliun (6,26% dari pagu), lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp0,36 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp0,41 triliun (5,69% dari pagu) sejalan dengan peningkatan kinerja pendapatan

Pajak Daerah yang kemudian dibagikan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka mengurangi ketimpangan di daerah. Di sisi lain, realisasi nominal Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

**Realisasi Belanja Operasi sampai dengan triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp2,23 triliun (11,18% dari pagu).** Nominal realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan capaian triwulan I 2022 yang sebesar Rp2,31 triliun (10,96% dari pagu 2022). Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya realisasi pada komponen Belanja Hibah sebesar 59,96% (yoy), yaitu dari Rp276 miliar menjadi Rp110 miliar pada periode laporan. Selain itu, penurunan juga disebabkan oleh belum terealisasinya komponen Belanja Subsidi. Kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, belanja Subsidi telah terealisasi sebesar Rp3 miliar (12% dari pagu 2022) pada triwulan I. Adapun realisasi pada triwulan I 2022 diperuntukkan untuk penanganan wabah COVID-19 dan dukungan program vaksinasi, serta pemberian subsidi angkutan laut perintis kepulauan yang sudah tidak dianggarkan pada tahun 2023. Di sisi lain, penurunan realisasi Belanja Operasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan realisasi komponen Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa yang masing-masing tumbuh 8,57% (yoy) dan 1,233% (yoy), seiring dengan peningkatan aktivitas perkantoran paska pencabutan kebijakan PPKM pada akhir tahun 2022. Lebih lanjut, peningkatan realisasi komponen Belanja Bantuan Sosial yang tumbuh 15,14% (yoy) juga turut berkontribusi dalam menahan penurunan realisasi Belanja Operasi secara keseluruhan. Adapun realisasi komponen Belanja Bantuan Sosial diperuntukkan untuk mendukung implementasi 3 (tiga) dari 7 (tujuh) program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yaitu (1) peningkatan pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya siang ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan; (2) peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta (3) peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.

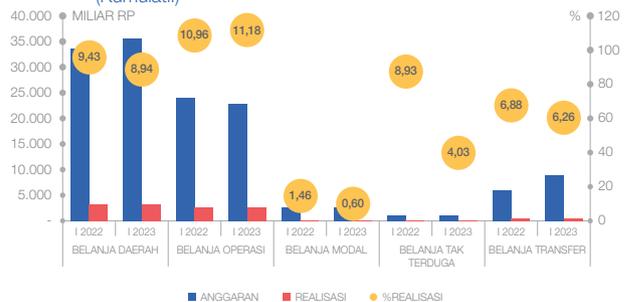
**Realisasi Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga mengalami penurunan.** Penurunan masing-masing komponen belanja tersebut sebesar 58,30% (yoy) dan 55,40% (yoy). Sampai dengan triwulan I 2023, realisasi Belanja Modal tercatat sebesar

Grafik 2.5 Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Triwulanan)



Sumber : BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.6 Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur (Kumulatif)



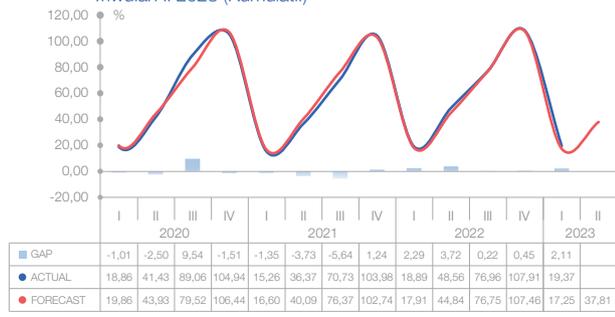
Sumber : BPKAD Jawa Timur

Rp14 miliar (0,60% dari pagu 2023), lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp34 miliar (1,46% dari pagu 2022). Penurunan tersebut seiring dengan penurunan realisasi untuk seluruh komponen, kecuali komponen Belanja Modal Tanah. Hal tersebut seiring dengan pola pengadaan barang modal yang umumnya masih melakukan proses tender di awal tahun. Lebih lanjut, realisasi Belanja Tak Terduga juga tercatat menurun dari Rp85 miliar (8,93% dari pagu 2022) pada triwulan I 2022 menjadi Rp38 miliar (4,03% dari pagu 2023) pada triwulan laporan. Penurunan pada komponen Biaya Tak Terduga sejalan dengan tidak adanya realisasi penanganan COVID-19 seperti pada tahun sebelumnya, yang mencakup biaya posko COVID-19, pengadaan bahan medis dan alat kesehatan, serta kegiatan kuratif, promotif, preventif, dan social safety net, sejalan dengan peralihan dari pandemi COVID-19 menuju endemi COVID-19. Biaya Tak Terduga sampai dengan triwulan I 2023 direalisasikan untuk penanganan bencana alam, pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku, serta restitusi.

### 2.2.3. Tracking Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2023

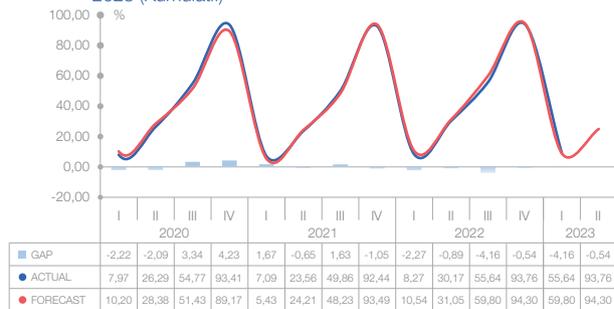
Realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan II tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Persentase realisasi pendapatan daerah pada triwulan II 2023 diperkirakan sebesar 37,81%, lebih rendah dibandingkan persentase realisasi pada triwulan II 2022 yang mencapai 48,56% (Grafik 2.7). Prakiraan tersebut terutama disebabkan oleh pagu anggaran yang meningkat serta sudah tidak adanya transfer dari Pemerintah Pusat untuk penanganan COVID-19 di awal tahun sebagaimana pada tahun sebelumnya. Namun demikian, kinerja pendapatan triwulan II 2023 diperkirakan tetap terjaga seiring dengan pemberlakuan kembali kebijakan pemutihan pajak PKB dan BBNKB dihitung mulai tanggal 14 April sampai dengan 14 Juli 2023 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/176/KPTS/013/2023 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat mendorong peningkatan pendapatan Pajak Daerah. Lebih lanjut, sejalan dengan prakiraan pendapatan daerah, presentase realisasi belanja daerah pada triwulan II 2023 juga diperkirakan menurun, dari 31,05% pada triwulan II 2022 menjadi 24,90% pada triwulan II 2023 (Grafik 2.8).

Grafik 2.7 Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)



Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.8 Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)

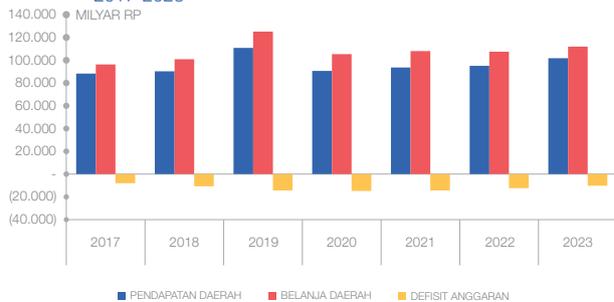


Sumber : BPKAD Jawa Timur, diolah

## 2.3. APBD 38 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2023

Pagu anggaran APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2023<sup>23</sup> lebih tinggi dibandingkan tahun 2022, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Pendapatan APBD Kabupaten/Kota tahun 2023 ditargetkan mencapai Rp99,25 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp92,73 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, target anggaran belanja APBD Kabupaten/Kota juga tercatat meningkat dari Rp104,81 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp109,19 triliun pada tahun laporan. Perkembangan tersebut mendorong adanya penurunan total defisit anggaran APBD Kabupaten/Kota dari yang sebelumnya sebesar Rp12,08 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp9,94 triliun pada tahun 2023. Secara spasial, kebijakan defisit anggaran tercatat pada hampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur, kecuali Kabupaten Lamongan yang menargetkan adanya surplus anggaran.

Grafik 2.9 Perkembangan APBD Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2017-2023



Sumber : BPKAD Jawa Timur

### 2.3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Kabupaten/Kota

#### 2.3.1.1. Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran total pendapatan daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat meningkat. Anggaran total sebesar Rp99,25 triliun, meningkat 7,03% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 2.3). Peningkatan terutama bersumber dari kenaikan anggaran pos PAD sebesar 11,64% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan target PAD sejalan dengan

23. APBD Kabupaten/Kota pada Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur ini menggunakan anggaran posisi awal tahun 2023 yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur

adanya kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui efisiensi pelayanan publik di daerah sebagaimana amanat dalam UU HKPD dan merupakan wujud dari optimisme Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur terhadap prospek pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tetap positif. Prospek tersebut didukung oleh pemulihan kinerja berbagai LU dan penghapusan kebijakan PPKM yang diperkirakan akan menopang peningkatan pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang perpajakan (pajak hotel, restoran, hiburan, dsb), serta retribusi daerah. Peningkatan anggaran pendapatan juga ditopang oleh pos Pendapatan Transfer yang ditargetkan meningkat 7,02% (yoy) seiring arahan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya kesehatan dan pendidikan sebagai layanan yang didesentralisasikan<sup>24</sup>. Di sisi lain, target pos Lain-lain PAD yang Sah dianggarkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp1,67 triliun pada tahun 2022 menjadi hanya Rp0,78 triliun pada tahun laporan atau menurun 53,36% (yoy).

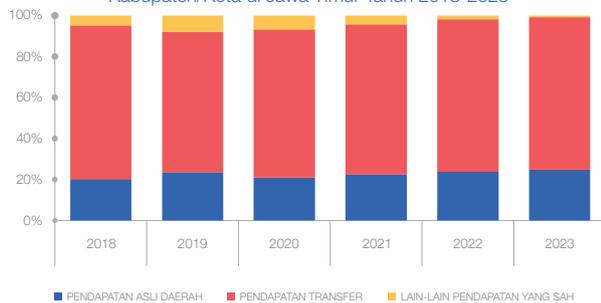
Anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Grafik 2.10). Pada tahun 2023, pangsa Pendapatan Transfer dalam anggaran pendapatan total Kabupaten/Kota di Jawa Timur tercatat sebesar 74,44%, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya pangsa Pendapatan Transfer sejalan dengan perubahan aturan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam UU HKPD, yaitu adanya kenaikan persentase alokasi DBH yang diberikan ke daerah penghasil dan juga daerah pengolah dan daerah non-penghasilan yang berbatasan langsung. Misalnya, porsi DBH dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dinaikkan dari 2% menjadi 3%. Adapun perinciannya 1,2% diberikan ke kabupaten/kota penghasil, 0,8% ke provinsi dan 1% ke daerah sekitarnya. Sementara itu, pangsa PAD terhadap anggaran pendapatan total Kabupaten/Kota di Jawa Timur terpantau meningkat dari 23,75% pada tahun 2022 menjadi 24,78% pada tahun 2023, sedangkan pangsa pos Lain-lain Pendapatan yang Sah menurun dari 1,80% menjadi 0,79%. Peningkatan pangsa PAD

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023

URAIAN	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi I 2023 (%YOY)
	2022	2022		Realisasi I 2022		Realisasi I 2023		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
PENDAPATAN DAERAH	92.728	99.246	7,03	16.842	18,16	17.279	17,41	0,03
Pendapatan Asli Daerah	22.026	24.590	11,64	3.249	14,75	3.838	15,61	0,18
Pendapatan Transfer	69.030	73.875	7,02	13.569	19,66	13.408	18,15	-0,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.672	780	-53,36	24	1,41	32	4,15	0,37

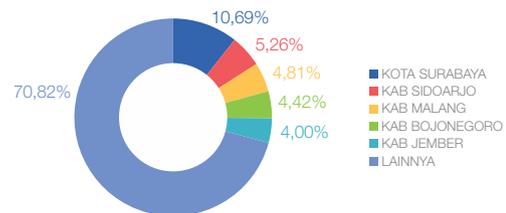
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.10 Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2023



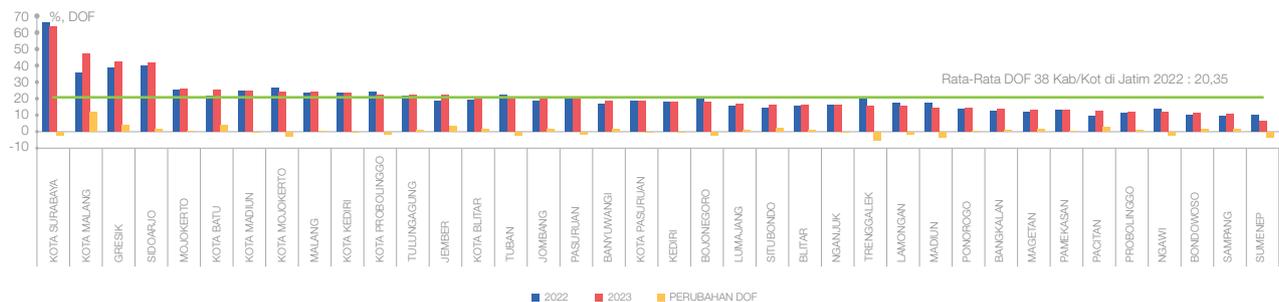
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.12 Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.11 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021-2023 (berdasarkan anggaran)



Sumber: BPKAD Jawa Timur

24. Sumber: [https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/T\\_ransfer-ke-Daerah-Rp800-triliun](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/T_ransfer-ke-Daerah-Rp800-triliun)

turut mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah yang tercermin pada membaiknya Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

**Secara rata-rata, DOF seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat mengalami peningkatan.** DOF seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 20,35%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 19,92% (Grafik 2.11). Namun demikian, hanya terdapat 9 Kabupaten/Kota yang memiliki DOF lebih tinggi dari rata-rata, diantaranya Kota Surabaya (62,20%), Kota Malang (46,02%), Kabupaten Gresik (41,57%), dan Kabupaten Sidoarjo (40,54%) yang merupakan daerah padat industri dan pariwisata. Di sisi lain, Kabupaten Sumenep mencatatkan target DOF terendah pada tahun 2023, yaitu hanya sebesar 6,47%. Kondisi tersebut disebabkan tingkat ketergantungan terhadap dana Pemerintah Pusat yang sangat tinggi, yaitu 92,96%<sup>25</sup>, sehingga potensi untuk peningkatan PAD dalam rangka mendorong kapasitas fiskal menjadi terbatas. Lebih lanjut, berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, 22 Kabupaten/Kota ditargetkan untuk mencatatkan peningkatan DOF melalui pemberdayaan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Secara spasial, target anggaran pendapatan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya. Pada tahun 2023, Kota Surabaya menargetkan total anggaran pendapatan sebesar Rp10,60 triliun atau sebesar 10,69% dari total anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya merupakan pusat bisnis dan Pemerintahan dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sehingga mampu mendorong penghasilan pajak daerah yang relatif lebih besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Kota Surabaya juga memiliki tingkat kemandirian fiskal terbaik di Jawa Timur, tercermin dari DOF yang ditargetkan mencapai 62,20% pada tahun 2023. Target tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% kebutuhan belanja dan pembiayaan Kota Surabaya akan memanfaatkan PAD. Di sisi lain, target pendapatan terendah pada tahun 2023 dimiliki oleh Kabupaten Blitar sebesar Rp0,91 triliun atau hanya sebesar 0,91% dari total anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### 2.3.1.2. Realisasi Pendapatan Daerah

**Pendapatan daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2023 meningkat secara nominal meski secara persentase lebih rendah.** Realisasi pendapatan daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sebesar Rp17,28 triliun atau 17,41% dari pagu anggaran (Tabel 2.3). Secara nominal realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2022 sebesar Rp16,84 triliun. Namun demikian, secara persentase tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (18,16%) seiring peningkatan pagu anggaran pendapatan pada tahun 2023. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan realisasi pos PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang tercatat masing-masing

tumbuh sebesar 0,18% (yoy) dan 0,37% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah serta penerapan beberapa kebijakan spasial untuk mendorong kinerja pendapatan Pajak Daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan insentif penghapusan denda pajak daerah sampai dengan Maret 2023, yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air dan Tanah, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan non-PLN. Penerapan tersebut tercatat mampu meningkatkan kinerja penghimpunan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo pada triwulan I 2023 sebesar 26,05% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya<sup>26</sup>. Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah yang lebih tinggi tertahan oleh kinerja Pendapatan Transfer yang sedikit menurun dari Rp13,57 triliun pada triwulan I 2022 menjadi Rp13,41 triliun pada triwulan laporan atau menurun 0,01% (yoy).

**Kabupaten Jombang tercatat sebagai daerah dengan persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi.** Sampai dengan triwulan I 2023, Kabupaten Jombang mampu merealisasikan sebesar 24,34% dari anggaran pendapatan atau sebesar Rp0,67 triliun. Capaian tersebut terutama didorong oleh realisasi pos Pendapatan Transfer sebesar Rp0,53 triliun yang memberikan kontribusi mencapai 78,95% dari total realisasi pendapatan. Adapun komposisi realisasi terbesar pada pos Pendapatan Transfer berasal dari komponen Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp0,52 triliun dan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp13,02 miliar. Lebih lanjut, tingginya persentase realisasi pendapatan Kabupaten Jombang juga ditopang oleh pos PAD yang terealisasi sebesar Rp0,14 triliun atau sebesar 21,05% dari total realisasi pendapatan, dengan komposisi realisasi terbesar pada komponen Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp96,37 miliar, diikuti oleh komponen Pajak Daerah sebesar Rp39,64 miliar dan komponen Retribusi Daerah sebesar Rp4,88 miliar. Kondisi ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah<sup>27</sup>, diantaranya melalui:

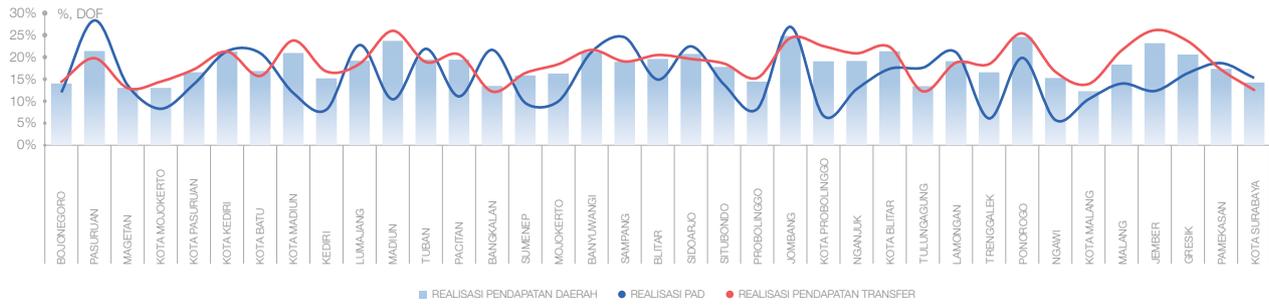
- Pemasangan alat perekam transaksi usaha (e-fiskus) pada Wajib Pajak, khususnya Hotel dan Restoran, yang diikuti dengan intensifikasi *monitoring* sistem perekaman transaksi. Program ini merupakan implementasi dari Perbup 83/2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah.
- Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke seluruh kecamatan di bawah wewenang Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendorong percepatan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Penyelenggaraan sosialisasi secara rutin terkait kewajiban pelunasan Pajak Daerah.

25. Dihitung dengan melihat pangsa Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan.

26. Selama triwulan I 2022 tidak ada kebijakan serupa yang diterapkan.

27. sumber: <https://bapenda.jombangkab.go.id/web/>

Grafik 2.13 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sampai dengan Triwulan I 2023



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Sementara itu, Kabupaten Bondowoso mencatatkan persentase realisasi pendapatan daerah terendah pada triwulan laporan. Sampai dengan triwulan I 2023, Kabupaten Bondowoso tercatat mampu merealisasikan sebesar 8,23% dari total anggaran pendapatan atau sebesar Rp0,16 triliun. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada triwulan sebelumnya yang mampu merealisasikan sebesar Rp0,28 triliun atau sebesar 14,64%. Kondisi ini disebabkan oleh turunnya realisasi pendapatan pajak dan tertahannya realisasi retribusi daerah yang mengakibatkan tidak optimalnya realisasi PAD. Kinerja penghimpunan Pajak Darah tercatat mengalami penurunan hingga 70,47% (yoy) dari Rp6,82 miliar menjadi Rp2,01 miliar, sedangkan Retribusi Daerah tercatat menurun 18,53% (yoy) dari Rp2,94 miliar menjadi Rp2,40 miliar. Lebih lanjut, realisasi pada pos Pendapatan Transfer juga tercatat menurun 41,49% (yoy), terutama disebabkan oleh menurunnya realisasi komponen Transfer Pemerintah Pusat.

### 2.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota

#### 2.3.2.1. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran total belanja daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp109,19 triliun, meningkat 4,18% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 2.4). Peningkatan terutama bersumber dari meningkatnya anggaran pos Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer yang masing-masing tercatat tumbuh 3,08% (yoy), 13,61% (yoy), dan 3,85% (yoy). Adapun peningkatan anggaran pada pos Belanja Operasi didorong oleh peningkatan aktivitas perkantoran pasca pencabutan kebijakan PPKM pada akhir 2022, sementara

peningkatan anggaran pada pos Belanja Modal merupakan cerminan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pembangunan di daerah masing-masing. Lebih lanjut, peningkatan anggaran pada pos Belanja Transfer terpantau sejalan dengan peningkatan anggaran pada pos Belanja Transfer di tingkat Provinsi untuk keperluan pembangunan desa. Di sisi lain, anggaran Belanja Tak Terduga tercatat menurun 43,25% (yoy), yaitu dari Rp1,33 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp0,76 pada tahun laporan. Perkembangan ini sebagai respon dari kondisi perekonomian yang sudah relatif stabil di tengah peralihan dari pandemi COVID-19 menuju endemi COVID-19.

Anggaran belanja Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih didominasi oleh Belanja Operasi (Grafik 2.14). Pada tahun 2023, pangsa Belanja Operasi dalam anggaran belanja total Kabupaten/Kota di Jawa Timur tercatat sebesar 69,68%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 69,27%. Sejalan dengan hal tersebut, pangsa pos belanja lainnya terpantau menurun, termasuk pangsa pos Belanja Modal yang tercatat menurun dari 17,70% menjadi 16,43%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peruntukkan belanja di daerah masih lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Ke depan, melalui kehadiran UU HKPD, diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penggunaan dana transfer pusat ke daerah untuk belanja produktif yang dapat tercermin pada alokasi anggaran belanja modal.

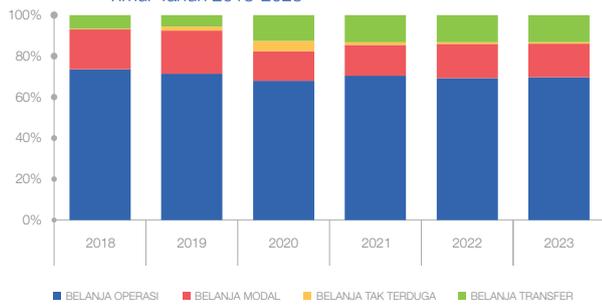
Penurunan pangsa Belanja Modal terhadap anggaran belanja daerah terjadi di mayoritas Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Grafik 2.15). Pada tahun 2023, 25 Kabupaten/Kota tercatat mengalami

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur s.d Triwulan I 2022 dan 2023

URAIAN	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi Jawa Timur				Pertumbuhan Realisasi I 2023 (%YOY)
	2022	2023		Realisasi I 2022		Realisasi I 2023		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
BELANJA DAERAH	104.806	109.189	4,18	9.688	9,24	12.183	11,16	25,76%
Belanja Operasi	73.811	76.087	3,08	7.619	10,32	8.767	11,52	15,07%
Belanja Modal	15.788	17.936	13,61	336	2,13	154	0,86	-54,27%
Belanja Tak Terduga	1.332	756	-43,25	29	2,21	53	6,96	78,86%
Belanja Transfer	13.876	14.410	3,85	1.703	12,27	3.209	22,27	88,46%

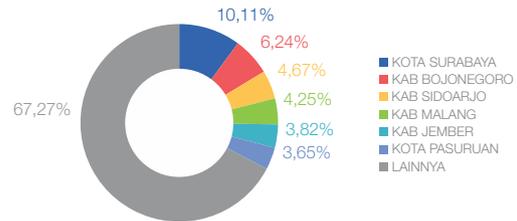
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.14 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018-2023



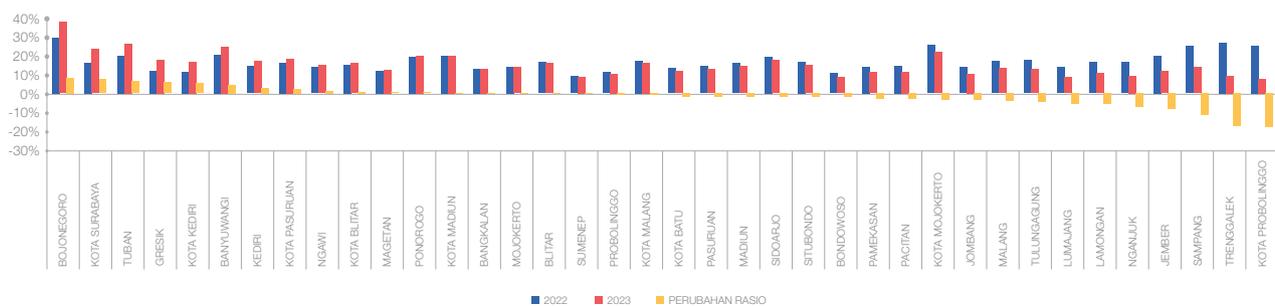
Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.16 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Grafik 2.15 Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2022-2023



Sumber: BPKAD Jawa Timur

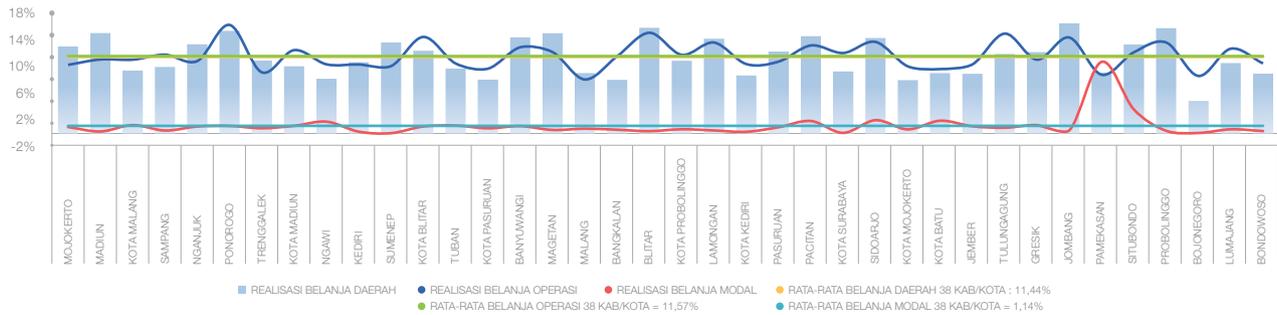
penurunan pangsa belanja modal, sedangkan 13 Kabupaten/Kota lainnya mencatatkan peningkatan. Secara spasial, Kabupaten Bojonegoro mencatatkan peningkatan rasio Belanja Modal tertinggi, yaitu dari sebelumnya sebesar 28,98% pada tahun 2022 menjadi 36,83% pada tahun laporan, seiring dengan peningkatan alokasi untuk revitalisasi serta pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Di sisi lain, Kota Probolinggo mencatatkan penurunan rasio Belanja Modal yang cukup signifikan, yaitu dari 24,71% menjadi 7,37%. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh sudah dilaksanakannya pembelian aset berupa bangunan dan gedung di tahun sebelumnya yang sudah tidak dianggarkan lagi pada tahun 2023.

**Secara spasial, target anggaran belanja tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya (Grafik 2.16).** Pada tahun 2023, Kota Surabaya menargetkan total anggaran belanja sebesar Rp11,30 triliun atau sebesar 10,11% dari total anggaran belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun alokasi anggaran belanja Kota Surabaya terutama dialokasikan untuk Belanja Operasi (pangsa 76,74%) dan Belanja Modal (pangsa 22,93%). Tingginya anggaran belanja Kota Surabaya tidak terlepas dari perannya sebagai pusat Pemerintahan dan pusat bisnis. Di sisi lain, target belanja terendah pada tahun 2023 dimiliki oleh Kota Batu sebesar Rp1,02 triliun atau hanya sebesar 1,07% dari total anggaran belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### 2.3.2.2. Realisasi Belanja Daerah

**Realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sampai dengan triwulan I tahun 2023 meningkat.** Belanja daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur sebesar Rp12,18 triliun atau 11,16% dari pagu anggaran (Tabel 2.4). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada triwulan sebelumnya sebesar Rp9,69 triliun atau 9,24% dari pagu anggaran. Peningkatan realisasi belanja daerah terutama ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Operasi, Belanja Transfer, dan Belanja Tak Terduga. Pada triwulan I 2023, Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp8,77 triliun (10,32% dari pagu 2023), lebih tinggi dibandingkan realisasi pada triwulan I 2022 sebesar Rp7,62 triliun seiring dengan peningkatan aktivitas perkantoran paska pencabutan PPKM, seperti kegiatan rapat tatap muka dan perjalanan dinas. Selain itu realisasi Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga juga tercatat masing-masing tumbuh 88,46% (yoy) dan 78,86% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, diindikasikan sejalan dengan akselerasi penyaluran dana pusat ke desa dan berlanjutnya dukungan biaya distribusi bahan pangan ke daerah. Di sisi lain, realisasi Belanja Modal tercatat masih relatif rendah yaitu sebesar Rp0,15 triliun (0,86% dari pagu 2023), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,34 triliun (2,13% dari pagu 2022). Masih rendahnya realisasi Belanja Modal sejalan dengan pola historis pengadaan barang modal yang umumnya masih melakukan proses tender pada awal tahun.

Grafik 2.17 Persentase Realisasi Belanja Daerah APBD Kab/Kota Jawa Timur s.d Triwulan I 2023



Sumber: BPKAD Jawa Timur

Secara spasial, daerah dengan capaian persentase belanja tertinggi pada triwulan I 2023 adalah Kabupaten Jombang. Sejalan dengan kinerja realisasi pendapatan, Kabupaten Jombang tercatat mampu merealisasikan belanja daerah sebesar 16,48% dari total anggaran belanja atau sebesar Rp0,48 triliun. Capaian tersebut terutama didorong oleh realisasi Belanja Operasi sebesar Rp0,30 triliun yang memberikan kontribusi mencapai 61,46% dari total realisasi belanja. Adapun komposisi realisasi terbesar pada pos Belanja Operasi berasal dari komponen Belanja Pegawai sebesar Rp0,15 triliun serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,11 triliun. Lebih lanjut, tingginya persentase realisasi belanja Kabupaten Jombang juga ditopang oleh pos Belanja Transfer yang terealisasi sebesar Rp0,19 triliun atau sebesar 38,27% dari total realisasi belanja. Di sisi lain, Kabupaten Bojonegoro mencatatkan persentase realisasi belanja terkecil pada triwulan I 2023 yaitu hanya sebesar 4,87%. Rendahnya capaian serapan realisasi belanja di Kabupaten Bojonegoro ini sejalan dengan serapan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang relatif kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya, yaitu masing-masing hanya sebesar 8,60% dan 0,07% dari pagu anggaran.

### 2.3.3. Tracking Realisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah APBD Kabupaten/Kota Triwulan II 2023

Realisasi pendapatan dan belanja daerah 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sampai dengan triwulan II 2023 diprakirakan lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Persentase

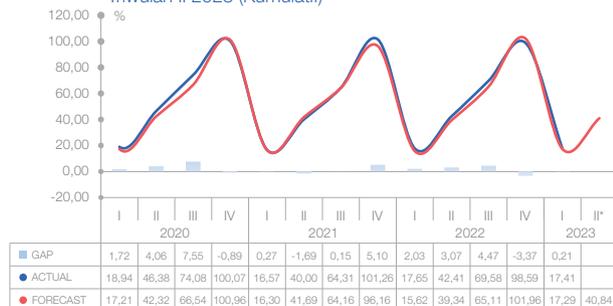
realisasi pendapatan daerah pada triwulan II 2023 diprakirakan sebesar 40,84%, lebih rendah dibandingkan persentase realisasi pada triwulan II 2022 yang mencapai 42,41% (Grafik 2.18). Sementara itu, realisasi belanja daerah juga diprakirakan menurun, dari 27,55% pada triwulan II 2022 menjadi 27,24% pada triwulan II 2023 (Grafik 2.19). Adapun termoderasinya prakiraan realisasi pada triwulan II 2023 terutama sejalan dengan peningkatan pagu pendapatan dan belanja daerah.

## 2.4. APBN DI JAWA TIMUR TAHUN 2023

### 2.4.1. Anggaran Belanja APBN

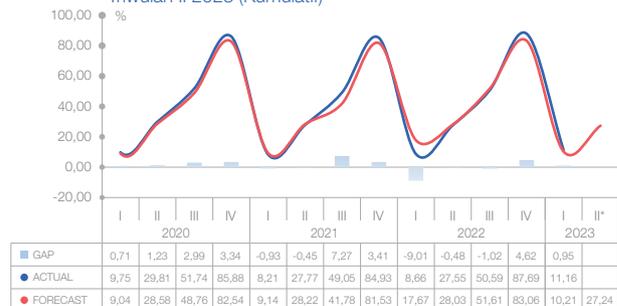
Anggaran belanja APBN di Jawa Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan. Anggaran belanja APBN tercatat sebesar Rp121,99 triliun, menurun 0,04% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp122,04 triliun (Tabel 2.5). Berdasarkan peruntukannya, penurunan anggaran belanja APBN disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja Kementerian/Lembaga di Jawa Timur sebesar 4,50% (yoy), yaitu dari Rp46,32 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp44,23 triliun pada tahun laporan. Perkembangan tersebut seiring dengan penurunan anggaran komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang masing-masing tercatat turun 1,12% (yoy), 5,74% (yoy) dan 11,69% (yoy). Sementara itu, anggaran Belanja Bantuan Sosial terpantau meningkat 18,22% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun anggaran Belanja Pegawai masih mendominasi total anggaran belanja Kementerian/Lembaga di Jawa Timur (Grafik 2.20).

Grafik 2.18 Proyeksi Realisasi Pendapatan Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Grafik 2.19 Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)



Sumber: BPKAD Jawa Timur, diolah

Di sisi lain, penurunan anggaran belanja APBN yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (Tabel 2.5). Pada tahun 2023, anggaran TKDD ditargetkan meningkat 2,69% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp75,72 triliun menjadi Rp77,76 triliun pada tahun laporan. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya peningkatan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas, serta arah kebijakan umum Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2023 antara lain untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, program perlindungan sosial dan kemiskinan, pemberian bantuan permodalan kepada BUMDES, dana operasional pemerintah desa, serta dukungan sektor prioritas desa termasuk penanganan *stunting* dan mendukung ketahanan pangan. Adapun untuk mendukung arah kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut, 66,03% dari anggaran APBN tahun 2023 dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum yang diikuti oleh fungsi pendidikan (9,21%), pertahanan (8,81%), serta ketertiban dan keamanan (6,25%) (Grafik 2.21).

### 2.4.2. Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur

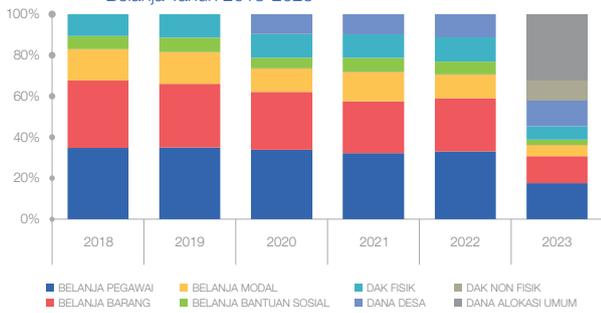
Realisasi belanja APBN di Jawa Timur sampai dengan triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp26,62 triliun atau 21,82% dari pagu anggaran (Tabel 2.5). Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp27,15 triliun (22,25% dari pagu anggaran 2022). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kinerja TKDD yang terpantau menurun 6,16% (yoy), terutama pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Dana Insentif Daerah (DID). Lebih lanjut, komponen DAK Fisik tercatat belum memiliki realisasi, sama seperti kondisi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan Petunjuk Teknis DAK Fisik baru diterbitkan pada pertengahan triwulan I 2023, yaitu pada tanggal 20 Februari 2023 melalui Perpres No.15 Tahun 2023. Adapun peningkatan realisasi belanja komponen DBH sebesar 56,64% (yoy) dan Dana Desa sebesar 20,84% (yoy) menahan penurunan realisasi TKDD yang lebih dalam. Di sisi lain, realisasi belanja Kementerian/Lembaga tercatat meningkat 10,78% (yoy) ditopang oleh peningkatan seluruh

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan I 2022 dan 2023

JENIS BELANJA	Pagu APBN		% Perubahan	Realisasi APBN				Pertumbuhan Realisasi I 2023 (%YOY)
	2022	2023		Realisasi I 2022		Realisasi I 2023		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
BERDASARKAN JENIS BELANJA								
Belanja K/L	46.316	44.233	(4,50)	6.742	14,56	7.469	16,89	10,78
Belanja Pegawai	21.654	21.412	(1,12)	4.178	19,29	4.180	19,52	0,04
Belanja Barang	17.045	16.067	(5,74)	1.690	9,92	2.647	16,47	56,57
Belanja Modal	7.526	6.647	(11,69)	837	11,12	604	9,08	(27,90)
Belanja Bantuan Sosial	91	107	18,22	37	40,44	39	36,37	6,31
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	75.722	77.756	2,69	20.410	26,95	19.153	24,63	(6,16)
Dana Bagi Hasil	9.828	11.781	19,87	1.288	13,10	2.017	17,12	56,64
Dana Alokasi Umum	37.478	38.973	3,99	12.428	33,16	10.670	27,38	(14,14)
DAK Fisik	4.079	3.110	(23,74)	-	-	-	-	-
DAK Non Fisik	15.832	15.477	(2,25)	4.413	27,88	3.737	24,14	(15,33)
Dana Insentif Daerah	745	443	(40,56)	59	7,90	44	9,87	(25,78)
Dana Desa	7.760	7.972	2,73	2.222	28,64	2.686	33,69	20,84
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)	122.038	121.989	(0,04)	27.152	22,25	26.622	21,82	(1,95)

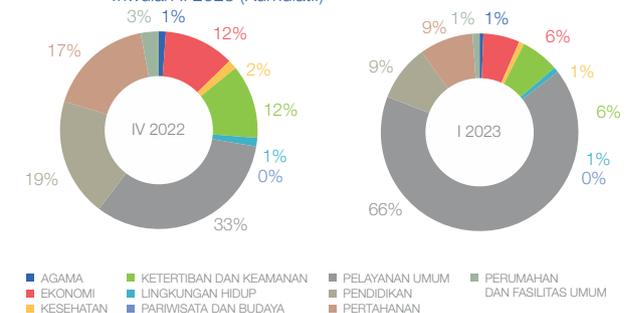
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur

Grafik 2.20 Pangsa Anggaran Belanja APBN Jawa Timur Menurut Jenis Belanja Tahun 2018-2023



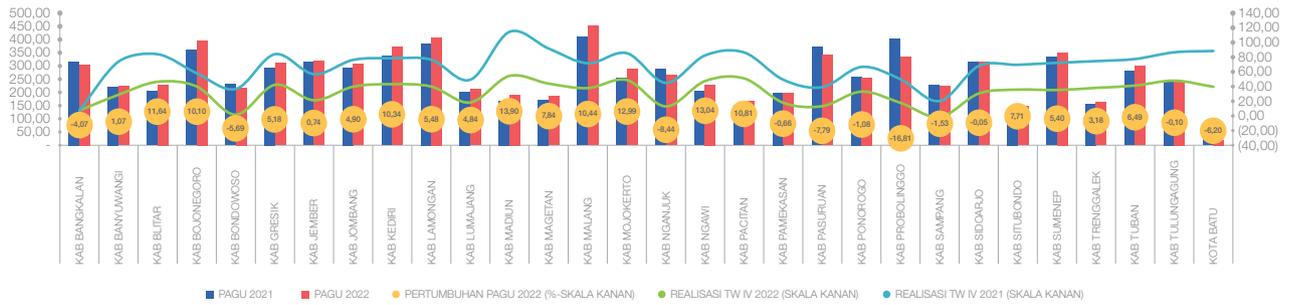
Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur

Grafik 2.21 Proyeksi Realisasi Belanja Daerah Kab/Kota di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)



Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur

Grifik 2.22 Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2022 dan 2023 di Jawa Timur

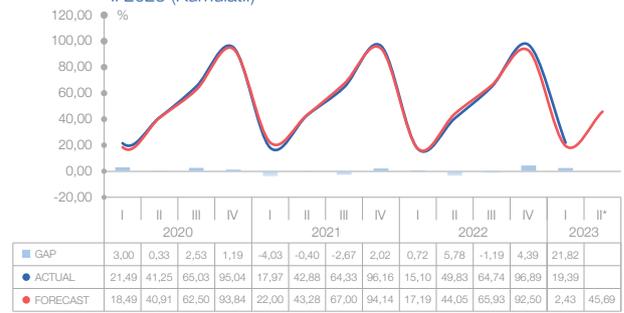


Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

komponen, kecuali komponen Belanja Modal yang terpantau mengalami penurunan sebesar 27,30% (yoy).

**Realisasi Dana Desa sampai dengan triwulan I 2023 meningkat.** Penyaluran dana desa tercatat sudah mencapai Rp2,69 triliun atau 33,69% dari pagu anggaran tahun 2023. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,22 triliun (28,64% dari pagu 2022). Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya komitmen Pusat dan Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan desa dalam mendorong kesejahteraan dan perekonomian daerah. Lebih lanjut, peningkatan juga seiring dengan upaya percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya berbagai tantangan perekonomian. Adapun BLT-DD akan diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Kartu Pra Kerja.

Grifik 2.23 Proyeksi Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan II 2023 (Kumulatif)



Sumber: Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur (diolah)

### 2.4.3. Tracking Realisasi Belanja APBN di Jawa Timur Triwulan II 2023

**Realisasi belanja APBN di Jawa Timur pada triwulan II 2023 diperkirakan meningkat.** Belanja APBN di Jawa Timur pada periode tersebut sebesar 45,69% dari pagu anggaran (Grifik 2.23). Prakiraan realisasi ini lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja APBN pada triwulan II 2022 yang sebesar 40,58%. Realisasi yang lebih tinggi sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mendorong realisasi belanja di tiap triwulan sesuai dengan program kerja yang telah ditargetkan sebelumnya, dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur.



Bab III

# Perkembangan Inflasi



### 3.1. KONDISI UMUM

Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya. Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada periode laporan tercatat sebesar 6,13% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 6,52% (yoy). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan permintaan yang masih gradual, terkendalnya ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang menurun, kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan tarif Angkutan Udara, serta peningkatan pasokan beberapa komoditas hortikultura berkenaan dengan pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi. Berdasarkan kelompok, inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur terutama disebabkan oleh semakin terkendalnya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (RT); serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan II 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023, namun masih berada di atas kisaran target inflasi 3,0±1,0%. Semakin terkendalnya tingkat inflasi pada triwulan II 2023 diprakirakan terutama terjadi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau didorong oleh meningkatnya pasokan bahan pangan berkenaan dengan masih berlangsungnya masa panen komoditas beras dan hortikultura, serta kondisi cuaca yang lebih mendukung. Lebih lanjut, intensifikasi kegiatan forum pengendalian inflasi daerah, serta sinergi TPID dengan program strategis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diprakirakan turut menjadi faktor penahan tekanan inflasi pada triwulan II 2023.

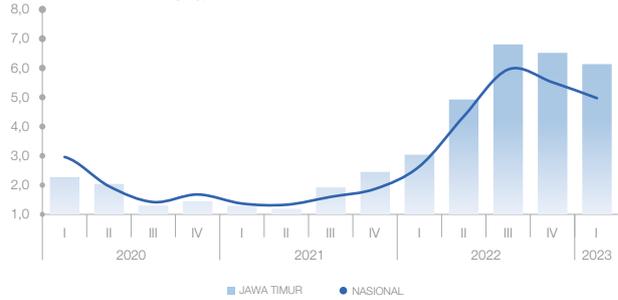
### 3.2. KINERJA INFLASI JAWA TIMUR

#### 3.2.1. Perkembangan Inflasi Triwulan I 2023

Inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat menurun. Realisasi inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur tercatat sebesar 6,13% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 6,52% (yoy) (Grafik 3.1). Melandainya tingkat inflasi pada triwulan laporan sejalan dengan kenaikan permintaan yang masih gradual, terkendalnya ekspektasi inflasi, harga komoditas global yang menurun, serta kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi<sup>28</sup> dan tarif Angkutan Udara selama triwulan I 2023. Meredanya tekanan inflasi pada triwulan laporan juga ditopang oleh peningkatan pasokan beberapa komoditas hortikultura sejalan dengan pelaksanaan panen raya di beberapa sentra produksi. Lebih lanjut, BPS mencatat melandainya tekanan inflasi tahunan pada triwulan I 2023 terutama disumbang oleh deflasi pada komoditas Sekolah Menengah Atas (deflasi 2,85%, yoy), cabai merah (deflasi 11,38%, yoy), bayam (deflasi 9,73%, yoy), tomat (deflasi 10,88%, yoy), tongkol diawetkan (deflasi 5,05%, yoy), dan daging ayam ras (deflasi 0,94%). Di sisi lain, penurunan tekanan inflasi tahunan yang lebih dalam tertahan oleh masih tingginya tingkat inflasi pada beberapa komoditas, terutama bensin (inflasi 32,22%, yoy) dan beras (inflasi 14,53, yoy) (Tabel 3.1 dan Tabel 3.2).

Sementara itu, secara spasial, inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di wilayah Jawa pada triwulan I 2023. Capaian tersebut juga tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 4,97% (yoy) (Grafik 3.2).

Grafik 3.1 Perkembangan Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur dan Nasional (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2 Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Jawa Triwulan I 2023 (yoy)



Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.1 Komoditas Penyumbang Utama Inflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Triwulan I 2023 (yoy)

Jenis Komoditi/Barang	Gabungan 8 Kota	
	Persentase Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi
Bensin	32,22	1,43
Beras	14,53	0,58
Akademi/Perguruan Tinggi	7,00	0,19
Rokok Kretek Filter	14,06	0,18
Sekolah Dasar	13,06	0,16
Angkutan Udara	10,43	0,13
Telur Ayam Ras	19,48	0,11
Tarif Air Minum PAM	11,14	0,11
Kontrak Rumah	2,14	0,10
Mobil	3,69	0,08

Sumber: BPS, diolah

44. Pada 1 Maret 2023, PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak nonsubsidi sebagai berikut:  
 - Harga Pertamina Turbo menurun dari Rp15.200/liter (posisi Desember 2022) menjadi Rp15.100/liter atau turun 0,66%.  
 - Harga Dexite menurun dari Rp18.300/liter (posisi Desember 2022) menjadi Rp14.950/liter atau turun 18,31%.  
 - Harga Pertamina Dex menurun dari Rp18.800/liter (posisi Desember 2022) menjadi Rp15.850/liter atau turun 15,69%.  
 Sumber: <https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-1-desember-2022-Zona-3> (posisi Des 2022) dan <https://www.pertamina.com/id/news-room/announcement/daftar-harga-bbk-tmt-1-maret-2023-Zona-3> (posisi Maret 2023).

Tabel 3.2 Komoditas Penyumbang Utama Deflasi Gabungan Kota IHK Jawa Timur Triwulan I 2023 (yoy)

Gabungan 8 Kota		
Jenis Komoditi/Barang	Persentase Perubahan Harga	Sumbangan Deflasi
Sekolah Menengah Atas	-2,85	-0,03
Cabai Merah	-11,38	-0,02
Bayam	-9,73	-0,01
Tomat	-10,88	-0,01
Tongkol Diawetkan	-5,05	-0,01
Daging Ayam Ras	-0,94	-0,01
Telepon Seluler	-1,28	-0,01
Jagung Manis	-10,51	-0,01
Anggur	-5,25	-0,01
Kangkung	-6,72	-0,01

Sumber: BPS, diolah

### 3.2.2. Analisis Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa

Pada triwulan I 2023, melandainya tekanan inflasi tahunan terutama didorong oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (RT); serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Meredanya tekanan inflasi juga terpantau pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran; Rekreasi,

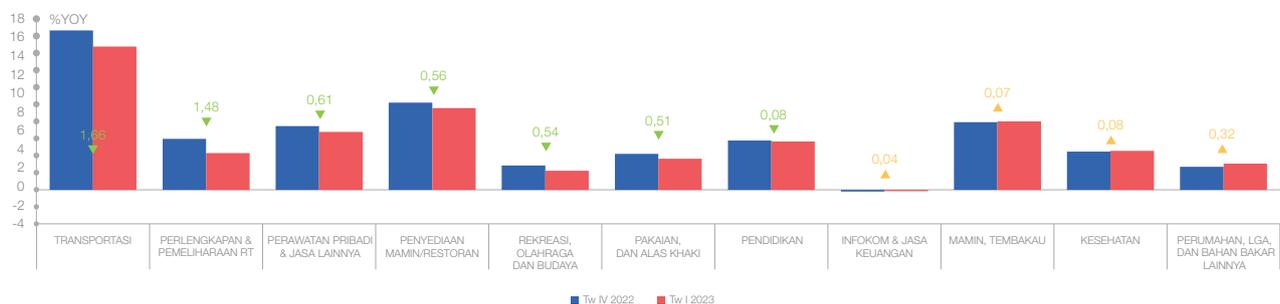
Olahraga, dan Budaya; Pakaian dan Alas Kaki; serta Pendidikan. Namun, penurunan tekanan inflasi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi pada beberapa kelompok, yaitu kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kesehatan; serta Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) (Grafik 3.3).

#### 3.2.2.1 Kelompok Penyumbang Penurunan Tekanan Inflasi

##### Kelompok Transportasi

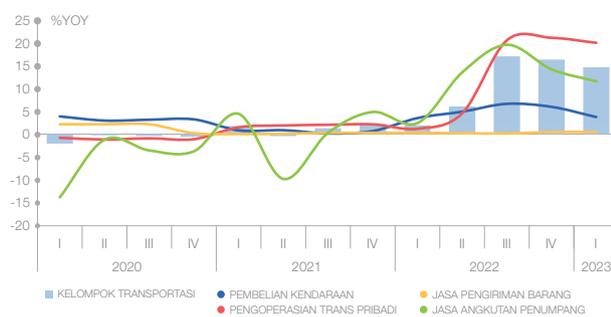
Kelompok Transportasi terpantau masih mengalami tingkat inflasi yang tinggi pada triwulan I 2023, namun mereda dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.4). Kelompok Transportasi mencatatkan inflasi sebesar 14,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 16,43% (yoy). Melandainya inflasi kelompok Transportasi didorong oleh semakin terkendalinya tingkat inflasi seluruh subkelompok, kecuali subkelompok Jasa Pengiriman Barang yang terpantau stabil. Tekanan inflasi subkelompok Pembelian Kendaraan dan Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi masing-masing tercatat sebesar 3,76% (yoy) dan 20,14% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,01% (yoy) dan 21,25% (yoy). Lebih lanjut, penurunan tekanan inflasi juga terjadi pada subkelompok Jasa Angkutan Udara, yaitu dari 14,29% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 11,64% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 3.3 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.4 Perkembangan Inflasi Kelompok Transportasi



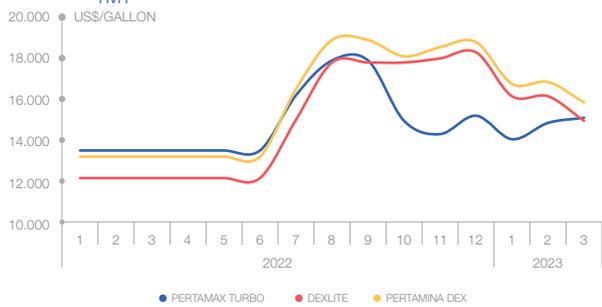
Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.5 Perkembangan Harga Avtur dan Tingkat Inflasi Komoditas Angkutan Udara



Sumber: indexmundi.com, diolah

Grafik 3.6 Perkembangan Harga Bahan Bakar Khusus (BBK)/Nonsubsidi TMT



Sumber: Pertamina, diolah

**Tekanan inflasi subkelompok Jasa Angkutan Penumpang melandai ditopang oleh semakin terkendalinya tarif angkutan udara.** Pada triwulan I 2023, BPS mencatatkan tarif angkutan udara mengalami inflasi sebesar 10,42% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi lebih tinggi sebesar 15,67% (yoy). Perkembangan tersebut seiring dengan melandainya harga Avtur yang menurunkan beban biaya operasional sehingga mendorong penurunan tarif, khususnya maskapai *Low Cost Carrier* (LCC), guna menjaga daya saing di pasaran (Grafik 3.5). Penyesuaian tarif juga dilakukan sebagai respons maskapai terhadap jumlah penumpang dan armada maskapai yang kembali turun seiring dengan periode *low season* untuk industri penerbangan (pasca Tahun Baru dan sebelum HBKN Idul Fitri). Lebih lanjut, penurunan tekanan inflasi pada subkelompok Jasa Angkutan Penumpang juga didorong oleh semakin terkendalinya tarif kereta api sejalan dengan pemberian promo diskon harga tiket oleh KAI DAOP VII Madiun hingga 20% pada bulan Maret 2023<sup>29</sup>. Kondisi tersebut tercermin pada penurunan tekanan inflasi tarif kereta api dari 14,12% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 11,38% (yoy) pada triwulan laporan.

**Penurunan inflasi juga didorong oleh melandainya tekanan inflasi subkelompok Pengoperasian Peralatan Transportasi Pribadi, terutama pada komoditas bensin.** Pada triwulan I 2023, BPS mencatat adanya penurunan tekanan inflasi pada komoditas bensin, yaitu dari 33,76% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 32,21% (yoy) pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari penyesuaian harga BBM non-subsidi selama triwulan I 2023 (Grafik 3.6). Meskipun melandai, komoditas bensin masih menjadi penyumbang inflasi utama Jawa Timur pada triwulan I 2023. Lebih lanjut, meredanya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi juga dipengaruhi oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada subkelompok Pembelian Kendaraan, terutama didorong oleh tekanan inflasi mobil yang melandai dari 7,46% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 3,69% (yoy) pada triwulan laporan.

29. Promo diskon diberikan untuk perjalanan kereta api pada tanggal 14 – 16 Maret dan 28 – 30 Maret 2023 untuk seluruh kereta api komersial dengan keberangkatan dan kedatangan dari/ke stasiun di bawah wilayah DAOP VII Madiun (Walikukun, Ngawi, Magetan, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Papan, Kediri, Tulungagung, Ngunut, dan Blitar).

30. Insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 tahun 2022 (PMK 5/2022). Insentif PPnBM DTP diberikan untuk kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau (*lower cost green car/LOGC*) dari masa pajak Januari 2022 hingga September 2022. Diskon PPnBM untuk kendaraan *low cost green car (LOGC)* sebesar 33,33%.

Penurunan tersebut diindikasikan tidak terlepas dari penurunan permintaan kendaraan pasca berakhirnya insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)-Ditanggung Pemerintah (DTP)<sup>30</sup> pada September 2022.

## Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

**Inflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (RT) pada triwulan I 2023 terpantau kembali melandai (Grafik 3.7).** Capaian inflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT tercatat sebesar 3,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,26% (yoy). Melandainya inflasi pada kelompok ini didorong oleh semakin terkendalinya tekanan inflasi pada seluruh subkelompok, kecuali subkelompok Barang Pecah Belah dan Peralatan Makan Minum yang terpantau meningkat. Adapun penurunan tekanan inflasi terdalam pada kelompok ini terjadi pada subkelompok Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan RT Rutin yang tercatat sebesar 4,29% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,49% (yoy).

**Terkendalinya subkelompok Barang dan Layanan untuk Pemeliharaan RT Rutin sejalan dengan perkembangan harga Crude Palm Oil (CPO).** Lebih terkendalinya harga CPO dunia yang merupakan salah satu bahan baku utama dalam pembuatan sabun diindikasikan berpengaruh pada penurunan biaya produksi sabun dan harga jual sabun secara keseluruhan. Pada triwulan I 2023,

Grafik 3.7 Perkembangan Inflasi Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.8 Perkembangan Harga Crude Palm Oil (CPO) Dunia



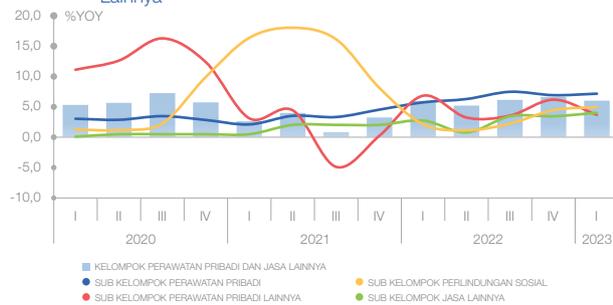
Sumber: Bloomberg, diolah

pertumbuhan harga CPO dunia tercatat turun 37,99% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 30,34% (yoy) (Gambar 3.8). Perkembangan ini kemudian tercermin pada tekanan inflasi pada komoditas sabun yang tercatat menurun signifikan, khususnya pada komoditas sabun cair/cuci piring dan sabun detergen bubuk/cair, yaitu dari sebelumnya masing-masing mengalami inflasi sebesar 7,19% (yoy) dan 10,09% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 1,12% (yoy) dan 4,65% (yoy) pada triwulan laporan.

### Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

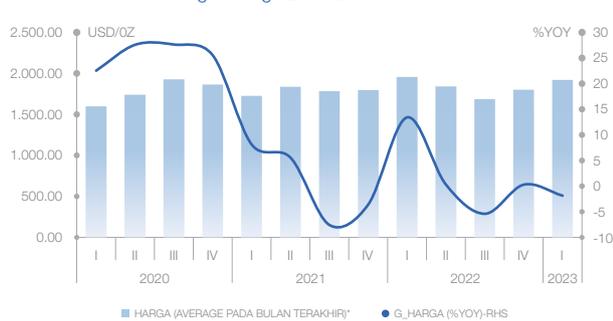
**Tekanan inflasi kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mereda pada triwulan laporan.** Tekanan inflasi kelompok tersebut tercatat sebesar 6,57% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 5,96% (yoy) (Grafik 3.9) pada triwulan I 2023. Melandainya tekanan inflasi pada kelompok ini didorong oleh semakin terkendalinya tingkat inflasi subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya di tengah peningkatan subkelompok lainnya. Pada triwulan I 2023, subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya tercatat mengalami inflasi sebesar 3,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,51% (yoy). Perkembangan ini sejalan dengan harga komoditas emas global yang turun 1,88% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami peningkatan 0,26% (yoy).

Grafik 3.9 Perkembangan Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.10 Perkembangan Harga Emas Dunia



Sumber: Bloomberg, diolah

31. Jawa Pos Radar Banyuwangi : <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/ekonomi-bisnis/23/03/2023/green-bean-langka-pedagang-naikkan-harga-kopi/>

### 3.2.2 Kelompok Penahan Penurunan Tekanan Inflasi

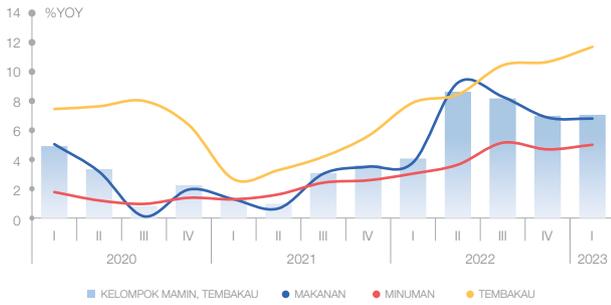
#### Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

**Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memiliki andil inflasi terbesar kedua di Jawa Timur terpantau mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan I 2023.** Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat meningkat dari 6,99% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 7,05% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 3.4). Perkembangan tersebut didorong oleh subkelompok Tembakau dan Minuman yang masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 11,69% (yoy) dan 5,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,67% (yoy) dan 4,69% (yoy). Di sisi lain, peningkatan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok ini tertahan oleh semakin terkendalinya subkelompok Makanan, yaitu dari sebelumnya mengalami inflasi sebesar 6,87% (yoy), menjadi 6,80% (yoy) pada triwulan I 2023.

**Peningkatan tekanan inflasi subkelompok Tembakau dan Minuman terutama didorong oleh peningkatan tekanan inflasi pada komoditas rokok kretek filter dan kopi bubuk.** Inflasi komoditas rokok kretek filter meningkat seiring dengan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Perkembangan tersebut mendorong produsen rokok untuk mentransmisikan kenaikan tarif cukai seiring dengan perkembangan penjualan rokok di sejumlah outlet retail pada awal tahun 2023 yang juga tumbuh positif pascapelonggaran mobilitas. Pada triwulan I 2023, BPS mencatat komoditas rokok kretek filter mengalami inflasi sebesar 14,06% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,01% (yoy). Lebih lanjut, komoditas kopi bubuk yang menjadi salah satu pendorong peningkatan tekanan inflasi subkelompok Minuman terpantau mengalami peningkatan inflasi seiring penurunan pasokan green bean di pasaran. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan hasil panen akibat cuaca buruk pada awal tahun. Penurunan hasil panen juga dialami oleh Brazil sebagai produsen utama kopi global yang kemudian meningkatkan permintaan ekspor dari negara lain, termasuk Indonesia, sehingga berdampak pada pengurangan pasokan domestik. Harga green bean jenis arabika dan robusta di wilayah Banyuwangi tercatat mengalami peningkatan masing-masing sekitar 100% (dari Rp90.000/kg menjadi Rp180.000/kg) dan 30% (dari Rp35.000/kg menjadi Rp45.000/kg)<sup>31</sup>.

Peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok ini tertahan oleh meredanya tekanan inflasi subkelompok Makanan sejalan dengan terjaganya pasokan komoditas hortikultura. Komoditas cabai merah tercatat kembali mengalami deflasi sebesar 11,38% (yoy) pada triwulan I 2023, tidak lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 27,37% (yoy). Meskipun sedikit meningkat, cabai merah masih menjadi penyumbang deflasi tahunan utama dari subkelompok Makanan pada triwulan I 2023 dengan andil sebesar 0,017%. Masih terkendalinya harga cabai merah tidak terlepas dari terjaganya pasokan cabai merah di tengah permintaan masyarakat yang juga mulai meningkat pada periode Ramadan menjelang HBKN Idul Fitri.

Grafik 3.11 Perkembangan Inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan data prognosa Dinas Pertanian Jawa Timur, produksi cabai merah di Jawa Timur pada triwulan I 2023 diprakirakan mencapai 28,53 ribu ton, lebih tinggi dibandingkan prakiraan kebutuhan konsumsi pada triwulan yang sama sebesar 17,08 ribu ton. Lebih lanjut, meredanya tekanan inflasi subkelompok Makanan juga disumbang oleh komoditas bayam dan tomat yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 9,73% (yoy) (andil 0,013%) dan 10,88% (yoy) (andil 0,011%), lebih dalam dari triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 3,17% (yoy) untuk bayam dan inflasi 58,08% (yoy) untuk tomat. Perkembangan tersebut ditopang oleh panen raya secara bersamaan di beberapa sentra produksi yang menyebabkan melimpahnya pasokan. Berdasarkan SISKAPERBAPO, rata-rata harga tomat di Jawa Timur pada triwulan I 2023 sebesar Rp7.744/kg, lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar Rp9.948/kg (Grafik 3.12)<sup>32</sup>.

### Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya

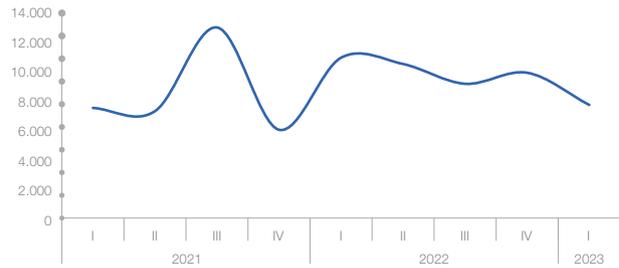
Tingkat inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya terpantau meningkat. Pada triwulan I 2023, inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 2,69% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,37% (yoy) (Grafik 3.13). Peningkatan tekanan inflasi terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada subkelompok Penyediaan Air sejalan dengan peningkatan tarif air minum PAM yang mengalami inflasi mencapai 11,14% (yoy), lebih tinggi dari triwulan IV 2022 sebesar 1,72% (yoy). Adapun kenaikan tarif air minum PAM yang menjadi

Grafik 3.13 Perkembangan Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Harga Tomat



Sumber: SISKAPERBAPO, diolah

kewenangan Pemerintah Daerah terjadi di Kota Surabaya dengan kenaikan harga rata-rata sebesar 22% yang berlaku mulai Januari 2023<sup>33</sup>. Selain itu, inflasi pada kelompok ini juga didorong oleh kenaikan harga komoditas sewa rumah (subkelompok Sewa Rumah) sebesar 2,12% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 1,79% (yoy). Menguatnya harga sewa rumah sejalan dengan pola musiman awal tahun.

Peningkatan inflasi lebih tinggi tertahan oleh subkelompok Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal; serta subkelompok Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya. Semakin terkendalnya subkelompok Pemeliharaan, Perbaikan, dan Keamanan Tempat Tinggal, terindikasi sejalan dengan melandainya harga berbagai komoditas pemeliharaan dan perbaikan rumah, diantaranya besi beton, kaso, batu bata, dan cat tembok (Grafik 3.14). Kondisi ini diindikasikan terjadi akibat curah hujan yang tinggi sehingga menahan kegiatan kontraktor dan menyebabkan penurunan permintaan di tengah pasokan yang terjaga. Lebih lanjut, subkelompok Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya juga tercatat mengalami tingkat inflasi yang melandai terutama disebabkan oleh *base effect* sebagai dampak dari penyesuaian harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) nonsubsidi pada Februari 2022.

### 3.3. ANALISIS INFLASI SPASIAL JAWA TIMUR

Pada triwulan I 2023, dari 8 kota IHK di Jawa Timur, hampir seluruh wilayah mengalami tingkat inflasi tahunan yang melandai. Secara tahunan, tingkat inflasi tertinggi terjadi di Kota Jember sebesar 6,48% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur (6,13%, yoy), namun melandai dibandingkan tingkat inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,08% (yoy). Lebih tingginya tingkat inflasi tahunan di Kota Jember tidak terlepas dari kenaikan tarif PDAM Kota Jember pada bulan November 2022 sebesar 32% di tengah tarif PDAM kab/kota lain yang relatif sama. Sementara itu, inflasi tahunan terendah terjadi di Kabupaten Probolinggo dengan capaian inflasi pada triwulan I 2023 sebesar 5,04% (yoy) terutama dipengaruhi oleh tingkat inflasi kelompok Transportasi yang lebih

32. SISKAPERBAPO atau Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok merupakan aplikasi yang memberikan informasi perkembangan harga dan pasokan bahan pokok di Jawa Timur berdasarkan survei yang dilakukan pada 116 pasar di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur terhadap 69 komoditas (43 komoditas pangan dan 26 komoditas non pangan).

33. Harmonisasi tarif baru sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No. 123 tahun 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

rendah dibandingkan dengan Kota IHK lainnya seiring pilihan jenis transportasi yang relatif lebih terbatas dan tingkat mobilitas yang lebih rendah.

**Di sisi lain, tekanan inflasi Kota Sumenep meningkat di tengah melandainya inflasi kota IHK lainnya.** Peningkatan tersebut terutama didorong oleh tingkat inflasi cabai rawit, beras, telur ayam ras dan bawang putih yang lebih tinggi dibandingkan mayoritas Kota lainnya. Pada triwulan I 2023, komoditas cabai rawit di Kota Sumenep tercatat mengalami inflasi sebesar 49,22% (yoy) (andil 0,20%), meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi 47,78% (yoy). Perkembangan tersebut didorong oleh masih terbatasnya pasokan di tengah tingginya permintaan pada momen Ramadan menjelang HBKN Idul Fitri dan turunnya produktivitas akibat curah hujan yang tinggi di berbagai sentra produksi. Berdasarkan data prognosa Dinas Pertanian Jawa Timur, neraca komoditas cabai rawit di Sumenep pada triwulan I 2023 diperkirakan negatif, yaitu dengan prakiraan produksi hanya sekitar 313 ton dan prakiraan kebutuhan konsumsi mencapai 505 ton. Kelangkaan pasokan juga tercermin pada harga cabai rawit yang meningkat. SISKAPERBAPO mencatat rata-rata harga cabai rawit di Sumenep pada triwulan I 2023 sebesar Rp64.344/kg, lebih tinggi dari harga rata-rata seluruh Kab/Kota di Jawa Timur sebesar Rp58.897/kg dan harga rata-rata cabai rawit di Sumenep pada triwulan sebelumnya sebesar Rp36.659/kg.

**Berdasarkan kelompoknya, inflasi kelompok Transportasi terpantau persisten tinggi di seluruh Kota pantauan IHK, dan tertinggi terjadi di Kota Malang (Tabel 3.5).** Masih tingginya tingkat inflasi kelompok Transportasi di Kota Malang tidak terlepas dari

tingginya tingkat permintaan terhadap moda transportasi pasca pelonggaran mobilitas masyarakat, mengingat Kota Malang merupakan salah satu destinasi wisata utama di Jawa Timur. Selain itu, masih terbatasnya jumlah maskapai dan frekuensi penerbangan juga diindikasikan berkontribusi dalam menyumbang inflasi pada kelompok Transportasi di beberapa Kota IHK yang memiliki layanan moda transportasi udara. Namun demikian, tingkat inflasi kelompok Transportasi pada seluruh Kota IHK terpantau melandai dibandingkan capaian tahun 2022, sejalan dengan penurunan harga BBM, dan penurunan permintaan terhadap pembelian kendaraan. Lebih lanjut, tingkat inflasi kelompok Transportasi diperkirakan semakin terkendali seiring dengan ketersediaan moda transportasi yang diperkirakan terus bertambah dan melandainya dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar yang terjadi pada triwulan III 2022.

### 3.4. KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

**Dalam menghadapi berbagai risiko inflasi ke depan, TPID Provinsi Jawa Timur telah menyusun *roadmap* pengendalian inflasi gabungan kota IHK Jawa Timur tahun 2022-2024 yang mengacu pada pilar 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif).**

Sampai dengan Maret 2023, hal-hal yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Jawa Timur meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan optimalisasi bibit unggul, seperti bibit genjah;
2. Pelaksanaan peningkatan Indeks Pertanaman (IP) padi IP 400 yang telah diimplementasikan di lahan 6.000 Ha tahun 2022 dan akan dilanjutkan di tahun 2023;

Tabel 3.3 Capaian Inflasi 8 Kota IHK di Jawa Timur (%yoy)

	WILAYAH								
	Jawa Timur	Surabaya	Malang	Kediri	Jember	Sumenep	Probolinggo	Madiun	Banyuwangi
Inflasi YOY Tw IV 2022	6,52	6,59	6,45	5,76	7,39	6,32	5,45	5,80	6,06
Tw I 2023	6,13	6,30	5,74	5,36	6,48	6,43	5,04	5,15	5,71

Sumber: BPS (dialah)

■ Lebih Tinggi dari Inflasi Jawa Timur

Tabel 3.4 Inflasi Spasial per Kelompok Barang dan Jasa pada Triwulan I 2023 (%yoy)

KELOMPOK BARANG	WILAYAH								
	Jawa Timur	Surabaya	Malang	Kediri	Jember	Sumenep	Probolinggo	Madiun	Banyuwangi
UMUM	6,52	6,59	6,45	5,76	7,39	6,32	5,45	5,80	6,06
Makanan, Minuman Dan Tembakau	6,98	6,91	6,76	5,28	8,27	7,65	6,84	6,41	8,87
Pakaian Dan Alas Kaki	3,71	4,12	2,90	1,07	5,26	4,74	1,45	3,46	1,55
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar RT	2,37	2,39	1,26	1,93	7,40	1,89	1,41	2,71	3,13
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin RT	5,26	4,97	1,03	5,87	7,14	7,38	3,26	3,06	4,87
Kesehatan	3,93	4,46	1,94	2,91	0,21	5,37	2,18	9,87	1,16
Transportasi	16,43	16,41	21,11	14,71	13,90	12,67	10,51	16,17	12,17
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-0,19	(0,13)	0,26	0,28	(0,66)	(0,38)	(0,07)	(1,73)	(2,05)
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	2,50	2,28	3,02	0,33	5,22	2,51	3,72	3,00	3,80
Pendidikan	5,07	5,47	3,62	4,69	2,71	2,45	7,90	0,70	4,07
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	8,99	10,03	5,78	9,20	7,45	10,15	4,80	4,32	3,76
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	6,57	5,95	8,55	10,26	6,89	6,11	9,22	7,72	7,32

Sumber: BPS (dialah)

■ Lebih Tinggi dari Inflasi Jawa Timur

3. Gerakan Percepatan Tanam Padi di wilayah sentra produksi;
4. Penyaluran bantuan dan pendampingan penguatan *digital farming* Klaster Padi Brenjok;
5. Realisasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui penyerapan di beberapa sentra produksi Jawa Timur saat periode panen raya maupun panen gadu;
6. Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai operasi pasar beras medium di 169 titik setiap hari, baik di pasar tradisional maupun melalui rumah/toko pangan kita.
7. Operasi pasar beras Pemerintah Provinsi Jawa Timur (penungasan BUMD JGU via BTT untuk bulan Februari – April 2023);
8. Pelaksanaan Operasi Pasar mandiri oleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Sampai dengan April 2023, tercatat sebanyak 452 titik lokasi/kegiatan OP dengan total realisasi penjualan komoditas mencapai 756 ton yang mayoritas terdiri dari komoditas beras, minyak goreng, dan gula pasir.
9. Pasar Murah HBKN Disperindag Jawa Timur pada 10-14 April 2023 yang serentak dilaksanakan di beberapa titik UPT lingkup Disperindag Jatim;
10. Gelar Pangan Mandiri di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur dan sedang dijajaki kolaborasi fasilitasi distribusi pangan
11. Gerakan Budidaya Pangan Mandiri, terutama untuk hortikultura, berupa bantuan bibit dan sarana pendukung
12. Edukasi dan pelatihan teknis pengolahan produk/hilirisasi komoditas pangan *pasca* panen
13. Perluasan pemanfaatan pupuk organik oleh poktan/gapoktan
14. Peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan
15. Pengawasan dan pendampingan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan Kampung Hortikultura
16. Replikasi *best practice* klaster cabai rawit Tuban dan bawang merah Pamekasan
17. *Monitoring* dan pengawasan terhadap perusahaan perunggasan dan peternak yang menghasilkan produksi daging sapi potong;
18. Peningkatan *monitoring* perkembangan cuaca/iklim melalui koordinasi dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dan mensosialisasikan kepada para petani setempat.
19. Peningkatan kewaspadaan dengan pengamatan secara periodik terhadap keberadaan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan bencana banjir serta melakukan upaya gerakan pengendaliannya.
20. Optimalisasi kegiatan *Good Handling Practices* (GHP) dalam melaksanakan pasca panen secara baik dan benar sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat ditekan seminimal mungkin untuk menghasilkan produk yang bermutu dan diterima pasar.
21. Pemanfaatan *Early Warning System* (EWS-Data Statistik Pertanian, Data Harga, Data Ketersediaan Stok) komoditi pangan terutama hortikultura sebagai dasar untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi risiko.

22. Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) intra Jawa Timur untuk meminimalkan disparitas harga komoditas di Jawa Timur. Pada tahun 2022 terdapat 21 KAD yang diinisiasi dan didampingi oleh TPID Kab/Kota/Provinsi di Jawa Timur, dengan rincian terdiri dari 7 intra Jawa Timur dan 14 dengan wilayah di luar Jatim. Komoditas yang diperdagangkan adalah Telur Ayam Ras, Beras, Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Bawang Merah, dan Jagung, dengan rentang komitmen KAD berupa pengiriman komoditas sebanyak 2-500 ton untuk setiap transaksi KAD. Sementara itu, sampai dengan April 2023, KAD inisiatif TPID telah dilaksanakan untuk 2 (dua) komoditas, yaitu Beras dan Daging Ayam Ras antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Utara.
23. *Progress* implementasi kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui peningkatan intensitas operasi pasar yang lebih *targeted*; penyaluran bantuan *digital farming* serta alsintan/saprotan lainnya, perluasan penggunaan pupuk organik dan agens hayati, penguatan gerakan budidaya pangan mandiri melalui *urban farming*, optimalisasi KAD, fasilitasi distribusi pangan, replikasi *best practice*, hilirisasi produk pertanian klaster pangan, penguatan kapasitas TPID melalui *capacity building*, serta penguatan komunikasi pengendalian ekspektasi masyarakat.

### 3.5. TRACKING INFLASI TRIWULAN II 2023

**Inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur triwulan II 2023 (realisasi hingga April 2023) tercatat masih berada di atas kisaran target inflasi, namun melandai dibandingkan triwulan sebelumnya.**

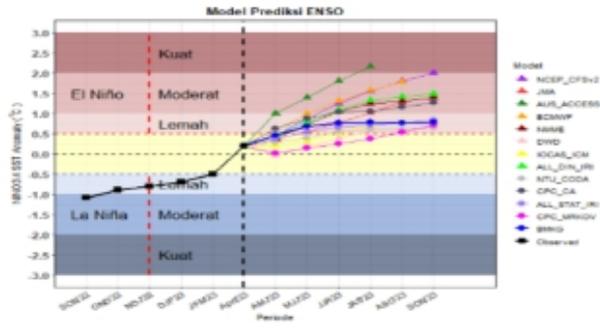
Inflasi tahunan gabungan kota IHK Jawa Timur pada April 2023 tercatat sebesar 5,35% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi inflasi triwulan I 2023 sebesar 6,13% (yoy). Lebih rendahnya tekanan inflasi disebabkan oleh penurunan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi<sup>34</sup>. Pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, penurunan terutama didorong oleh penurunan tekanan inflasi komoditas minyak goreng yang merupakan dampak positif dari upaya Pemerintah, antara lain (1) peningkatan rasio alokasi *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng dalam bentuk Minyakita, (2) peningkatan target realisasi DMO *Crude Palm Oil* (CPO) untuk minyak goreng sebesar 50% dari target sebelumnya yaitu menjadi sebesar 450 ribu ton terhitung dari Februari 2023 hingga April 2023; (3) penyesuaian rasio DMO terhadap izin ekspor menjadi 1:6 dari sebelumnya 1:8; (4) pembatasan kuantitas pembelian Minyakita dan pelarangan penjualan minyak goreng *bundling* dengan produk lain, serta (5) pelarangan penjualan Minyakita di *marketplace*. Di samping itu, upaya pengendalian inflasi pangan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur, baik melalui optimalisasi operasi pasar maupun penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) turut mendorong penurunan inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau pada April 2023. Lebih lanjut, penurunan tekanan inflasi kelompok Transportasi didorong oleh penyesuaian harga solar dan bensin nonsubsidi yang terkoreksi ke

bawah. Perkembangan tersebut mendorong inflasi tahun kalender pada April 2023 sebesar 0,86% (ytd).

Dengan perkembangan tersebut dan beberapa indikator terkini, maka inflasi gabungan kota IHK tahunan Jawa Timur pada triwulan II 2023 diprakirakan lebih rendah dibandingkan triwulan I 2023, namun masih berada di atas kisaran target inflasi 3,0±1,0% (yoy). Lebih rendahnya inflasi gabungan kota IHK tahunan Jawa Timur pada triwulan II 2023 diprakirakan didorong oleh meningkatnya pasokan bahan pangan berkenaan dengan masih berlangsungnya masa panen komoditas beras dan hortikultura. Selain itu, tingkat produktivitas juga diprakirakan membaik didukung oleh cuaca yang lebih mendukung. Berdasarkan analisis dan prediksi dari BMKG, kondisi ENSO pada triwulan II 2023 diprediksi akan mengalami kondisi netral dan terdapat peluang El-Nino lemah (Gambar 3.1). Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara aktif bersinergi untuk mengantisipasi dampak negatif El Nino diantaranya melalui pemantauan kondisi iklim harian, optimalisasi lahan tadah hujan, penanaman varietas toleran kekeringan, dan optimalisasi sumber pengairan. Peningkatan pasokan hortikultura sudah mulai tercermin pada survei pemantauan harga SISKAPERBAPO yang menunjukkan adanya penurunan harga berbagai komoditas hortikultura di minggu pertama Mei 2023, diantaranya harga cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Lebih lanjut, penyesuaian kembali harga BBM non subsidi per 1 Mei 2023 dipastikan turut menyumbang penurunan tekanan inflasi pada triwulan II 2023. Di sisi lain, berakhirnya kebijakan peningkatan target realisasi DMO CPO pada April 2023 di tengah tren peningkatan harga CPO dunia berpotensi untuk meningkatkan harga minyak goreng. Selain itu, terdapat potensi penurunan pasokan komoditas minyak goreng di pasaran, seiring adanya opsi penghentian penyediaan stok minyak goreng di ritel modern akibat program rafaksi satu harga<sup>35</sup>. Lebih lanjut, pasokan beras, telur ayam ras, dan daging ayam ras, juga berisiko mengalami keterbatasan berkenaan dengan kebutuhan penyaluran beras program Bansos hingga akhir Mei 2023.

Intensifikasi kegiatan forum pengendalian inflasi daerah, serta implementasi program strategis Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Jawa Timur diperkirakan turut menjadi faktor penahan tekanan inflasi pada triwulan II 2023. Kegiatan *High Level Meeting* (HLM) GNPIP Jawa Timur 2023 bertujuan untuk mengatasi permasalahan inflasi pangan. Untuk itu telah disusun tiga program strategis, yaitu: (1) **DIGDAYA** melalui upaya peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis melalui optimalisasi inovasi teknologi digital, (2) **AMUKTI** dengan memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan strategis untuk mengurangi disparitas harga antar waktu dan antar wilayah serta efisiensi rantai distribusi pangan, serta (3) **PALAPA** melalui peningkatan pembiayaan inklusif kepada pelaku usaha komoditas pangan untuk mendukung terlaksananya kerjasama antar daerah. Ketiga strategi ini dioperasionalisasikan melalui sinergi TPID – TPAKD – TP2DD dan inisiasi *linkage* BUMN Pangan – BUMD – BUMDes dan Koperasi.

Grafik 3.14 Model Prediksi ENSO



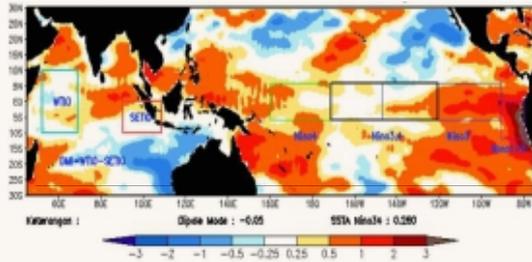
Sumber : BMKG, Februari 2023

35. Program rafaksi satu harga merupakan kesepakatan antara pelaku usaha minyak goreng dengan Pemerintah, dimana pelaku usaha minyak goreng akan menjalankan kebijakan satu harga dan Pemerintah akan membayarkan selisih harga kepada pelaku usaha.

BOKS 4

## Jawa Timur Sebagai Lumbung Beras Nasional Dihadapkan pada Tantangan Fenomena El Nino

Gambar 1. Perkembangan Indeks Nino 3.4, Mei 2023



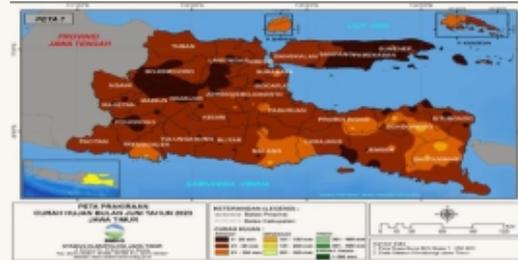
Sumber: BMKG, (2023)

Jawa Timur sebagai lumbung beras nasional berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan. Berdasarkan data BPS (2022), Jawa Timur merupakan provinsi penghasil padi terbesar nasional. Dalam satu tahun, Jawa Timur menghasilkan lebih dari 9,5 juta ton padi atau berkontribusi sebesar 17,40% terhadap produksi padi nasional. Dalam waktu dekat, peran Jawa Timur sebagai *buffer* stok ketahanan pangan nasional dihadapkan pada risiko fenomena El-Nino.

**Fenomena El Nino dengan intensitas lemah diprediksi terjadi pada paruh kedua tahun 2023.** Lembaga klimatologi Amerika Serikat dan (CPC NOAA) dan Indonesia (BMKG) memprediksi terjadinya El Nino dengan intensitas lemah. Prakiraan ENSO tahun 2023 menunjukkan kemungkinan terjadinya El Nino pada Mei-Juli 2023, dengan pemanasan yang umumnya lebih kuat pada model dinamis. El Nino ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut Samudra Pasifik Tengah dan Timur. Selama El Nino, terjadi perubahan aliran angin dan distribusi suhu atmosfer yang memicu iklim ekstrem di seluruh dunia. Dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah kekeringan panjang.

**Fenomena El Nino berpotensi menyebabkan kekeringan akibat intensitas curah hujan yang rendah.** Dari 38 kota/kabupaten di Jawa Timur, BMKG memprakirakan seluruh kota/kabupaten mengalami intensitas curah hujan rendah dengan kisaran 0-100 mm. Rendahnya intensitas curah hujan ini menyebabkan menurunnya produktivitas tanaman padi yang membutuhkan curah hujan ideal di kisaran 200 mm/bulan atau lebih dan dengan distribusi selama 4 bulan. Lebih lanjut, beberapa wilayah dengan produksi beras tertinggi seperti Kabupaten Lamongan (pangsa 9% dari produksi Jawa Timur), Kabupaten Ngawi (8%) dan Kabupaten Bojonegoro (7%) turut mengalami intensitas curah hujan rendah <200 mm/bulan.

Gambar 2. Perkiraan Curah Hujan Jawa Timur

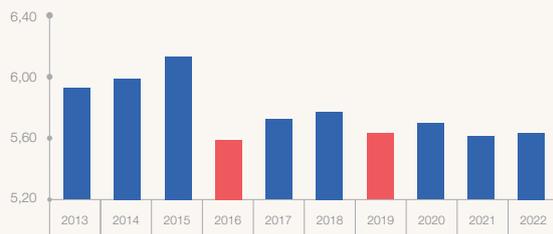


Sumber: BMKG, (2023)

Berdasarkan historisnya, fenomena El Nino menyebabkan penurunan produksi padi di Jawa Timur. Fenomena El Nino intensitas kuat yang terjadi pada triwulan IV 2015 hingga triwulan I 2016 menyebabkan menurunnya produktivitas padi (ton/ha) di Jawa Timur sebesar 8,6% pada tahun 2016 (Grafik 1). Selain itu, El Nino intensitas lemah yang terjadi pada triwulan III 2018 hingga triwulan II 2019 turut menyebabkan menurunnya produktivitas padi sebesar 2,3% pada tahun 2019. Hal ini terjadi seiring menurunnya curah hujan yang menyebabkan menurunnya produktivitas padi. Lebih lanjut, produktivitas yang menurun berpotensi menyebabkan peningkatan harga beras akibat menurunnya pasokan.

**Perkiraan El Nino pada bulan Mei-Juli 2023 jatuh pada musim tanam gadu.** Musim tanam gadu adalah musim tanam yang minim pengairan terpadu dan mengandalkan air hujan atau tadah hujan. Akibat rendahnya curah hujan saat terjadi El Nino, penanaman padi pada periode tanam gadu berisiko mengalami penurunan produktivitas hingga gagal panen karena suplai air yang kurang mencukupi. Walaupun luas sawah irigasi di Jawa Timur sudah cukup tinggi hingga 78,1%, namun potensi penurunan produksi masih dapat terjadi terutama pada lahan non irigasi yang ada.

Grafik 1. Produktivitas Padi (ton/ha), 2013-2022



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2023)

**BOKS 4**

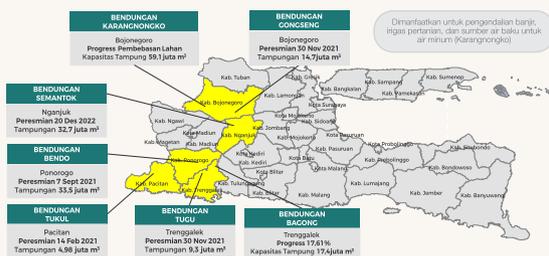
Studi kasus anomali iklim Kementerian Pertanian (2007) menyarankan kebijakan teknis untuk menyelamatkan produksi padi pada masa kekeringan antara lain: (1) pembentukan Tim Pencukupan Kebutuhan Air di semua level; (2) perbaikan prasarana irigasi; dan (3) pengamanan alokasi air irigasi secara adil dan merata.

Periode Tanam	Kode	Bulan Tanam	Periode Panen	Kode	Bulan Panen
1. Tanam Utama	T1	Nopember	Panen Raya	P1	Februari
	T2	Desember		P2	Maret
	T3	Januari		P3	April
	T4	Februari		P4	Mei
	T5	Maret		P5	Juni
2. Tanam Gadu	T6	April	Panen Gadu	P6	Juli
	T7	Mei		P7	Agustus
	T8	Juni		P8	September
3. Tanam Kemarau	T9	Juli		P9	Oktober
	T10	Agustus	Panen Kecil	P10	Nopember
	T11	September		P11	Desember
	T12	Oktober		P12	Januari

Sumber: BPS, diolah

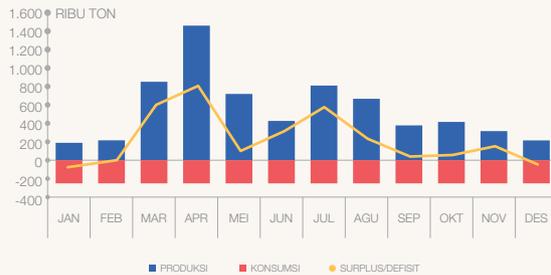
Pemerintah melalui **Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur** juga telah melakukan langkah pengendalian melalui pencaanangan pembangunan 7 bendungan di wilayah Jawa Timur. Total tampungan air untuk pembangunan ketujuh waduk tersebut mencapai 172 juta meter kubik, dengan pertambahan daerah irigasi baru mencapai 25.361 ha. Saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 5 waduk diantaranya Bendungan Gongseng di Kab. Bojonegoro, Bendungan Bendo di Kab. Ponorogo, Bendungan Semantok di Kab. Nganjuk, Bendungan Tugu di Kab. Trenggalek, dan Bendungan Tukul di Kab. Pacitan. Saat ini, pemerintah juga sedang dalam progress pembangunan dua bendungan lainnya yaitu Bendungan Karangnongko di Kab. Bojonegoro, dan Bendungan Bagong di Kab. Trenggalek.

Gambar 3. Progres Pembangunan Bendungan pada Proyek Strategis Nasional Prov. Jawa Timur



Sumber: FGD Bappeda dan Dinas PU Provinsi Jawa Timur, diolah (2023)

Grafik 2. Prognosa Neraca Produksi Padi tahun 2023



Sumber: Dinas Pertanian Jawa Timur, diolah (2023)

Di tengah perkiraan terjadinya El Nino, cadangan beras di Jawa Timur diperkirakan masih terjaga. Data prognosa neraca beras menunjukkan pada posisi Maret 2023, neraca produksi menunjukkan surplus 607 ribu ton, dengan prognosa surplus hingga akhir tahun sebanyak 2,8 juta ton. TPID Provinsi Jawa Timur juga secara intensif terus memantau ketersediaan stok beras Jawa Timur untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi di tengah perkiraan terjadinya El Nino.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan berbagai pemangku kebijakan secara aktif bersinergi untuk menekan dampak negatif El Nino terhadap produksi dan harga komoditas pangan strategis, terutama komoditas beras di Jawa Timur. Dari sisi hulu, pemetaan daerah rawan kekeringan dan pemantauan kondisi iklim harian terhadap produksi tanaman pangan di Jawa Timur secara intensif terus dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Kabupaten/ Kota. Upaya lain yang dapat dilakukan antara lain mengoptimalkan lahan tadah hujan, penanaman varietas toleran kekeringan serta optimalisasi sumber pengairan (sumur, pompa, biopori, embung). Dari sisi hilir, perkembangan ketersediaan pasokan dan harga komoditas pangan strategis secara kontinyu dimonitor sebagai salah satu bentuk *Early Warning System* (EWS). Untuk komoditas beras sendiri, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan terus melakukan operasi pasar sebagai bentuk pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menguyur 1,2 juta ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang tahun 2023. Lebih lanjut, sinergi pengendalian inflasi oleh TPID Provinsi Jawa Timur dengan berbagai *stakeholder* daerah dalam kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) diharapkan dapat menekan potensi risiko inflasi yang berasal dari komoditas terdampak El Nino.

**BOKS 5**

## Tantangan Produksi Telur Ayam Ras dalam Pengendalian Inflasi di Jawa Timur

Telur ayam ras sepanjang tahun 2022 mencatat kenaikan harga tertinggi setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Puncak kenaikan harga terjadi pada bulan September 2022 dengan kenaikan hingga 39,5% (yoy) dan berangsur menurun menjadi 21,9% (yoy) pada akhir tahun 2022, dan pada bulan April 2023 turun menjadi 13,5% (yoy). Dengan bobot komoditas yang cukup tinggi, kenaikan harga telur ayam ras menyumbang hingga sebesar 0.14% terhadap total inflasi di Jawa Timur tahun 2022. Berdasarkan historis, kenaikan harga telur ayam ras dapat disebabkan faktor lonjakan permintaan (*demand pull*) maupun dari sisi penawaran. Lonjakan permintaan biasanya terjadi pada saat menjelang perayaan hari raya maupun pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah. Di sisi lain, kenaikan harga juga bisa terjadi karena faktor tekanan biaya produksi (*cost push*) seperti kenaikan harga *day old chick* (DOC), konsentrat, dan jagung maupun berkurangnya jumlah produksi.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah sentra produksi Utama telur ayam ras dengan produksi mencapai 1,3 juta ton atau berkontribusi 23% pada produksi nasional di tahun 2022. Namun demikian, jumlah produksi ini menurun dibanding sebelum pandemi yang mencapai 1,6 juta ton. Produksi telur dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan produksi walaupun secara nasional masih mampu bertumbuh.

Penurunan produksi telur ayam ras pasca COVID-19 sejalan dengan penurunan jumlah peternak rakyat di daerah sentra. Berkurangnya peternak rakyat terutama disebabkan oleh penurunan permintaan telur ayam ras di masyarakat pada saat pandemi yang mengakibatkan kejatuhan harga telur. Di saat bersamaan, biaya produksi juga mengalami kenaikan cukup besar. Kondisi ini mengakibatkan peternak telur ayam ras menanggung kerugian operasional yang cukup besar

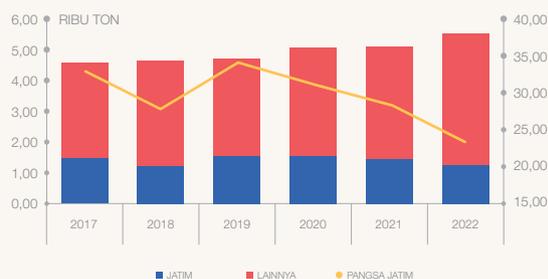
dan dalam waktu yang cukup lama berdampak pada banyaknya peternak rakyat yang menutup usahanya.

Kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah produsen telur ayam ras terbesar di Jawa Timur juga mencatatkan penurunan jumlah peternak rakyat pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar saat ini terdapat 3.286 peternak rakyat ayam petelur di Kabupaten Blitar atau mengalami penurunan 23% dibandingkan posisi sebelum terjadi pandemi COVID-19. Hal inilah yang mengakibatkan adanya penurunan pangsa pasar telur ayam rasa Jawa Timur, dari 34,3% di tahun 2019 menjadi hanya 23,6% di tahun 2022. Turunnya produksi tersebut, secara langsung berdampak pada peningkatan harga telur ayam ras yang cukup signifikan di tahun 2022.

Margin usaha ayam petelur sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga pakan. Berdasarkan struktur biaya, produksi telur ayam ras mayoritas didominasi oleh biaya pakan yang mencapai lebih dari 80% dari total biaya. Biaya pakan terbagi menjadi pakan jagung (50-55%), bekatul (15-20%), dan konsentrat (30-35%). Dari sisi ketersediaan bahan baku pakan, Provinsi Jawa Timur tercatat menjadi penghasil jagung terbesar di Indonesia dengan menyumbang 23,16% produksi jagung nasional pada tahun 2020. Namun sebagai daerah sentra, provinsi Jawa Timur juga sering mengalami kenaikan harga jagung yang cukup signifikan karena lonjakan permintaan jagung dari berbagai daerah dan faktor musim panen.

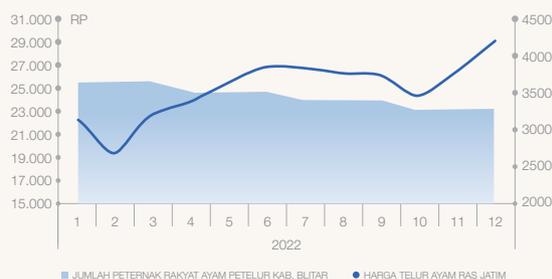
Ketegantungan impor konsentrat juga masih menjadi tantangan dalam mengontrol biaya produksi. Pemenuhan konsentrat seperti *Soy Bean Meal* (SBM) dan *Meat Bone Meal* (MBM) di Indonesia saat ini masih bergantung pada

Grafik 1. Produksi Telur Ayam Ras Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2023)

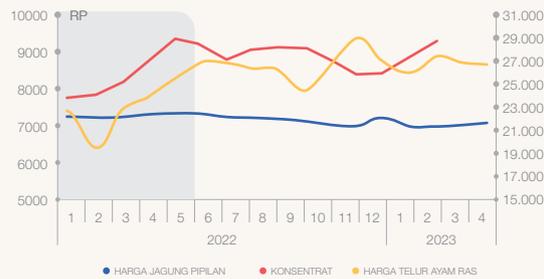
Grafik 2. Produksi Telur Ayam Ras Provinsi Jawa Timur



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2023)

**BOKS 5**

Grafik 3. Produksi Telur Ayam Ras Provinsi Jawa Timur



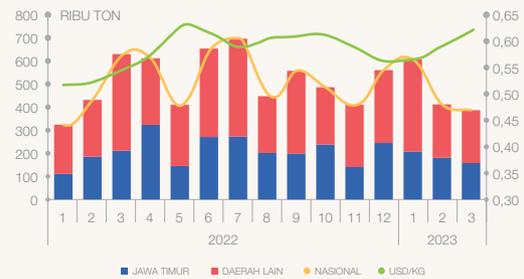
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2023)

impor. Mayoritas impor SBM berasal dari negara Amerika Selatan seperti Brazil dan Argentina yang merupakan negara sentra produksi kedelai dunia. Harga SBM juga sangat bergantung pada kondisi produksi negara-negara tersebut. Beberapa kendala yang memengaruhi harga SBM diantaranya terjadi fenomena cuaca seperti *heatwave* dan proteksionisme negara produsen. Berdasarkan data impor Bea Cukai, harga SBM menunjukkan kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2022. Tingginya kenaikan SBM dan MBM akan diikuti kenaikan harga telur ayam ras.

**Data impor konsentrat menunjukkan adanya penurunan nilai impor di tahun 2019, namun demikian, selama pandemi, impor konsentrat justru cenderung mengalami peningkatan.** Dengan produksi nasional yang masih terus bertumbuh, dan di sisi lain adanya permintaan yang mengalami pelemahan, maka harga telur cenderung rendah dan mencapai puncak penurunan pada tahun 2021. Hal inilah yang membuat banyak peternak rakyat di Blitar gulung tikar, dikarenakan harga jual telur tidak dapat menutupi ongkos produksi yang telah mereka keluarkan. Ketika jumlah pasokan mulai tidak dapat mencukupi permintaan seiring dengan perbaikan ekonomi, maka kenaikan harga konsentrat turut memicu kenaikan harga telur seiring dengan rendahnya pasokan di pasar.

**Dari sisi permintaan, terlihat bahwa harga telur ayam ras menunjukkan pola meningkat terutama di setiap akhir tahun.** Hal ini diindikasikan karena adanya peningkatan permintaan seiring adanya HBKN setelah pada bulan September-Oktober cenderung turun karena permintaan yang lemah. Peningkatan produksi menjadi kurang efisien dikarenakan proses pembesaran DOC yang membutuhkan waktu minimal 6 bulan untuk dapat efektif bertelur. Setelah produksi meningkat, hasil produksi tersebut harus terserap sepenuhnya agar harga jual dapat terjaga. Oleh karena itu,

Grafik 4. Jumlah Impor SBM Indonesia dan Harga Beli



Sumber: Trademap, Nasdaq (2023), diolah

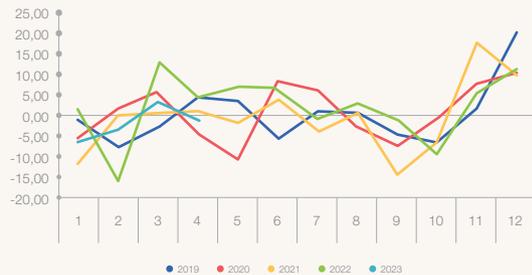
memperpanjang masa simpan telur pada periode permintaan rendah sangat diperlukan, agar harga tidak meningkat tinggi pada saat permintaan meningkat.

**Peternak yang lebih efisien mampu bertahan di tengah pelambatan permintaan.** Namun demikian, banyaknya peternak rakyat yang gulung tikar, menyisakan permasalahan struktural yang memerlukan pembenahan. Di sisi peternak, selain harga pasokan bahan baku dan benih yang terjaga, masalah produktivitas ayam, skala ekonomi, kemampuan SDM dan kondisi lingkungan kandang juga menjadi faktor Utama dalam meningkatkan produksi telur. Peternak yang bertahan menunjukkan tingkat produktivitas stabil di atas 90%. Peternak rakyat juga mampu mendapatkan produktivitas di atas 90% namun tidak bertahan dikarenakan harga pokok produksi yang lebih tinggi. Dengan skala usaha yang relatif kecil, maka biaya tetap produksi seperti biaya karyawan dan pemeliharaan menjadi relatif lebih mahal dibandingkan peternak dengan skala usaha lebih besar. Ketika harga jual telur di tingkat produsen lebih rendah dari HPP peternak rakyat, maka otomatis peternak mengalami kerugian dan setelah beberapa saat, menutup usahanya. Faktor lainnya adalah ketidakseragaman tingkat pemahaman dan ketrampilan dalam beternak. Perbedaan kualitas pakan juga memengaruhi produktivitas dikarenakan karakter peternak yang lebih banyak menggunakan pakan campuran sendiri (*self-mixed*) dibanding pakan jadi. Pemilihan lokasi dan Teknik beternak juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas terutama dalam menjaga tingkat stress ayam di kandang.

**Untuk mengatasi permasalahan struktural tersebut, diperlukan penguatan ketahanan peternak rakyat melalui salah satunya penguatan koperasi peternak.** Koperasi peternak memiliki legalitas untuk melakukan kerjasama dengan produsen di daerah sentra sehingga pembelian

BOKS 5

Grafik 5. Perubahan Harga Telur Ayam Ras (%mtm)



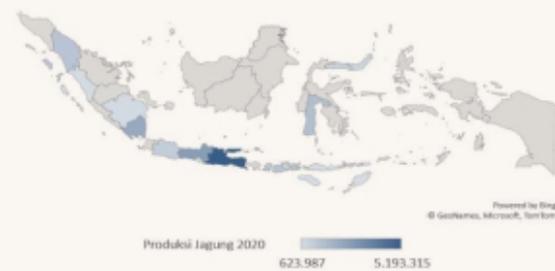
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2023)

pakan secara kolektif akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Selain itu peternak dapat terhubung dengan program pemerintah seperti bantuan subsidi pakan yang disalurkan melalui koperasi peternak telur ayam ras. Koperasi peternak juga merupakan mitra pemerintah dalam penyaluran program bantuan sosial sehingga membantu peternak rakyat dalam melakukan penjualan/pemasaran telur ayam ras. Koperasi Peternak juga dapat menyediakan akses pembiayaan bagi anggotanya sehingga dapat membantu operasional peternak dan meningkatkan ketahanan jika terjadi *shock*/ kerugian. Koperasi peternak juga dapat memfasilitasi kegiatan pemeliharaan peternak secara kolektif (*coop-farming*), sehingga biaya SDM dapat ditekan lebih rendah. Dalam wadah koperasi, peternak juga dapat saling bertukar masukan dalam perawatan ternak, serta koperasi dapat menyediakan jasa dokter hewan dan penyuluh ternak Bersama, sehingga ketrampilan beternak dan produktivitas antar sesama anggota dapat ditingkatkan. Selain itu, koperasi peternak juga dapat meningkatkan daya tawar produk dalam memasarkan produk seiring dengan kapasitas produksi gabungan peternak yang besar.

**Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) mendorong efisiensi produksi telur ayam ras dan stabilitas harga.**

Inisiasi perluasan kerjasama antardaerah oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah merupakan salah satu strategi menjaga stabilitas harga telur ayam ras dengan mendorong efisiensi jaringan rantai pasok produksi dan pemasaran. Hal ini dikarenakan, selain sebagai daerah sentra produksi jagung, Provinsi Jawa Timur juga sekaligus sebagai salah satu konsumen jagung terbesar, terutama untuk mencukupi kebutuhan pembuatan pakan ternak baik oleh produsen maupun peternak. Kebutuhan jagung yang sama juga diperlukan oleh Provinsi lain di Jawa, sehingga dengan adanya KAD, harga jual jagung dapat dijaga lebih stabil

Gambar 1. Provinsi Sentra Produksi Jagung



Sumber: Trademap, Nasdaq (2023), diolah

dengan mendatangkan jagung dari provinsi yang sedang panen pada saat tertentu. KAD dengan provinsi produsen lainnya seperti NTB dan Sulawesi Selatan juga membantu meningkatkan baik harga jual petani di daerah produsen, maupun menjaga harga beli jagung tetap rendah di Jawa Timur. Dengan demikian, melalui jalinan KAD biaya produksi akan menjadi lebih murah dan efisien. Fungsi dari KAD juga memperluas akses pemasaran ke daerah-daerah yang memiliki konsumsi telur ayam ras cukup tinggi sehingga ketersediaan stok dan stabilitas harga dapat terjaga.

**BOKS 6**

**Pengaruh Harga Komoditas Bahan Pangan Strategis Terhadap Inflasi Jawa Timur**

**Inflasi Jawa Timur Triwulan I 2023 mencatat nilai tertinggi secara tahunan di wilayah Jawa maupun dibandingkan inflasi nasional.** Inflasi Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat 6,13%, menurun dari triwulan IV 2022 terhadap triwulan I 2023 senilai 0,39%. Meskipun demikian, nilai tersebut lebih tinggi 1,16% dari inflasi nasional dan juga melebihi 1,35% dari rata-rata inflasi di wilayah Jawa. Salah satu sektor yang perlu diperhatikan adalah sektor pertanian, dimana beberapa komoditas hortikultura memiliki volatilitas yang cukup tinggi. Komoditas aneka bawang, cabai, dan beras seringkali menjadi penyumbang utama inflasi akibat penurunan produktivitas, anomali cuaca, persaingan harga, daya simpan yang pendek, penanganan paska panen yang buruk, serta inefisiensi alur distribusi. Berdasarkan data BPS, komoditas utama pangan penyumbang inflasi secara persisten mulai tahun 2018 hingga 2023 diantaranya adalah komoditas bawang putih, minyak goreng, bawang merah, beras telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit dan cabai merah.

**Jawa Timur sebagai lumbung pangan nusantara berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan.** Jawa Timur memiliki pangsa produksi komoditas pangan yang masuk dalam lima besar produsen utama bahan pangan untuk beberapa beberapa komoditas, yaitu beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, dan telur ayam ras.

Berdasarkan realisasi produksi tahun 2022 oleh BPS, Jawa Timur menjadi peringkat pertama produsen komoditas beras, cabai rawit dan telur ayam ras. Pada komoditas bawang merah, Jawa Timur menjadi produsen terbesar kedua setelah Jawa Tengah. Kemudian, untuk komoditas cabai merah, Jawa Timur menduduki peringkat kelima, serta pada komoditas daging ayam ras, Jawa Timur menjadi peringkat ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

**Komoditas hortikultura Jawa Timur memiliki tingkat harga yang jauh lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya.** Harga enam komoditas pangan strategis di Jawa Timur memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan harga rata-rata 34 provinsi, terutama pada komoditas cabai merah dan cabai rawit. Bahkan untuk komoditas cabai merah, Jawa Timur memiliki selisih harga yang cukup kecil dibandingkan Sumatera Utara sebagai provinsi dengan harga terendah (Grafik 1).

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, Jawa Timur menjadi provinsi dengan indeks harga terendah pada enam komoditas terkait, terutama pada komoditas cabai rawit dan cabai merah. Hal ini menunjukkan, tingkat harga 6 komoditas penyumbang utama inflasi tersebut menjadi yang terendah dibanding 5 provinsi lainnya di Jawa, maupun dibanding rata-rata nasional.

Grafik 1. Disparitas Harga Bahan Pangan Strategis di Indonesia



Sumber: PIHPS, diolah

**BOKS 5**

Grafik 2. Perbandingan Indeks Harga Komoditas Pertanian



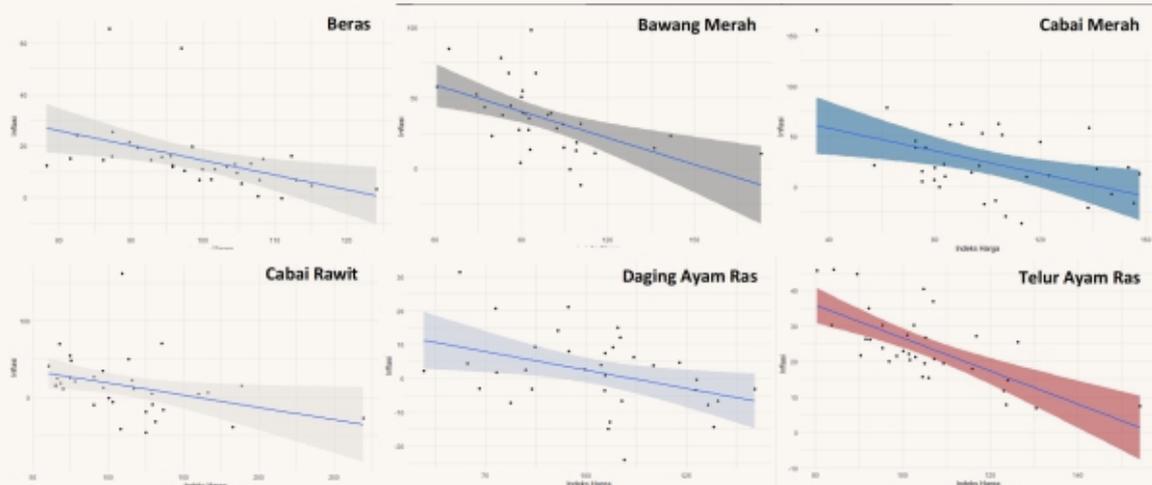
Sumber: PHPS, 2023 (diolah)

**Ekspor komoditas ke luar Jawa Timur mendorong harga lebih tinggi dan peningkatan inflasi.** Indeks harga komoditas pertanian yang rendah di Jawa Timur secara natural menyebabkan produsen komoditas tersebut menjualnya ke daerah lain dengan harga yang lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Di sisi lain, ekspor antar daerah yang cukup masif berpotensi mengganggu pasokan di Provinsi Jawa Timur pada kondisi tertentu. Hal ini terlihat dari hasil korelasi inflasi dan indeks harga komoditas bahan pangan strategis yang memiliki arah negatif (Grafik 3). Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan daerah dengan harga komoditas yang lebih rendah memiliki rata-rata inflasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain, walaupun sebaran di luar interval menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi inflasi. Sementara itu, daerah dengan komoditas yang memiliki indeks harga tinggi cenderung memiliki nilai inflasi yang relatif rendah.

Pergerakan inflasi secara relatif dapat ditunjukkan menggunakan perbandingan indeks harga sekarang menggunakan perbandingan indeks harga terhadap indeks harga di tahun dasar. Perbandingan indeks harga terhadap indeks harga tahun dasar di setiap daerah pada komoditas beras menunjukkan arah positif yang berarti terdapat inflasi (Grafik 4). Namun jika nilai perbandingan tersebut secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap nilai satu, menandakan bahwa terjadi pergerakan inflasi yang cenderung sama antar daerah.

Sebaran nilai perbandingan indeks harga terhadap tahun dasar untuk komoditas bahan pangan strategis di Indonesia secara keseluruhan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap nilai satu (Grafik 5). Sekalipun Jawa Timur cenderung memiliki inflasi yang tinggi, namun pergerakan inflasi komoditas pangan strategis dibandingkan daerah lain cenderung sama. Pergerakan inflasi antar daerah menunjukkan kecenderungan yang sama dan persisten terutama pada komoditas beras dan bawang merah. Perbaikan kinerja inflasi terlihat pada komoditas daging ayam ras dan cabai rawit karena sebarannya melebar pada range kurang dari satu. Namun, terdiversifikasinya nilai indeks menunjukkan tingginya perbedaan kenaikan harga antar daerah. Dengan demikian, inflasi dalam suatu daerah sangat tergantung dari level harga, dengan kondisi yang cenderung sulit untuk mempertahankan harga rendah dibandingkan harga tinggi akibat adanya ekspor antar daerah. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang terukur baik dari sisi komoditas maupun kuantitas dan harga dapat dilakukan

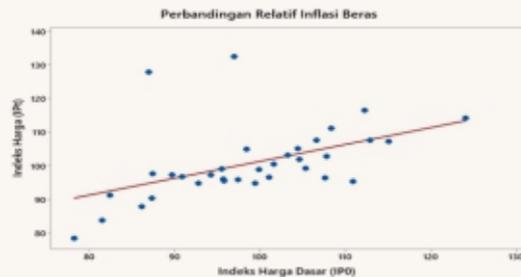
Grafik 3. Korelasi Inflasi dan Indeks Harga Komoditas Pangan Strategis Provinsi di Indonesia



Sumber: PHPS, diolah

**BOKS 6**

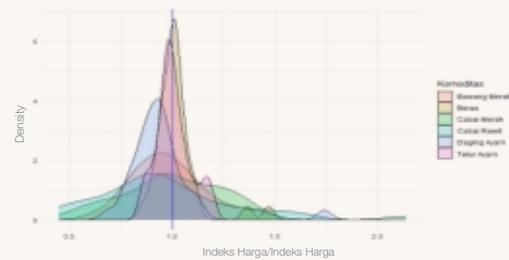
Grafik 4. Perbandingan Indeks Harga Relatif Komoditas Beras



Sumber: PI-HPS, 2023 (diolah)

agar keuntungan yang didapatkan dari perdagangan antardaerah tidak berdampak signifikan terhadap penurunan pasokan di Jawa Timur yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Monitoring pasokan juga menjadi hal esensial yang perlu dilakukan untuk memastikan pemenuhan permintaan di Jawa Timur. Beberapa upaya pengendalian inflasi tersebut telah dirumuskan menjadi suatu strategi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Grafik 5. Persistensi Kenaikan Harga Antar Provinsi di Indonesia



Sumber: PI-HPS, 2023 (diolah)

Provinsi Jawa Timur tahun 2023, yang dalam implementasinya diperlukan sinergi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) – Tim Percepatan Pengembangan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan kolaborasi BUMN Pangan-BUMD-BUMDes, untuk membentuk ekosistem yang mendukung efisiensi tata niaga pangan strategis melalui digitalisasi rantai pasok pangan.



## BAB IV

# Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



## 4.1. KONDISI UMUM

Kinerja intermediasi perbankan terpantau terjaga, kendati tertahan khususnya pada sektor korporasi. Hal ini terindikasi sejalan dengan perkembangan suku bunga kredit sebagai dampak adanya transmisi suku bunga kebijakan moneter. Kinerja penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) masih tercatat tumbuh kuat ditopang oleh perbaikan daya beli masyarakat dan peningkatan optimisme RT terhadap kondisi perekonomian saat ini. Sektor RT juga mencatat peningkatan DPK yang diindikasikan sebagai respons dari eskalasi ketidakpastian global dan masih tingginya tingkat inflasi. Lebih lanjut, peningkatan DPK RT juga sejalan dengan kebijakan peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia yang telah ditransmisikan dengan baik. Di sisi lain, kinerja penghimpunan DPK dan penyaluran kredit kepada korporasi tercatat menurun pada triwulan I 2023 sejalan dengan tertahannya kinerja beberapa LU utama Jawa Timur di tengah perlambatan permintaan global.

**Ketahanan korporasi dan RT di Jawa Timur masih terjaga terindikasi dari risiko kredit dan risiko likuiditas perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2023 yang masih berada dalam batas aman.** Secara agregat, risiko kredit di Jawa Timur tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 3,41%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27%. Lebih lanjut, risiko likuiditas terpantau cenderung rendah yang tercermin dari tingkat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 90,77% atau masih dalam kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

## 4.2. PEMBIAYAAN DAERAH DI JAWA TIMUR

Kinerja bank umum di Jawa Timur pada triwulan I 2023 menunjukkan penurunan. Likuiditas perbankan tercatat menurun seiring dengan penurunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Perkembangan tersebut juga mendorong penurunan kinerja penyaluran kredit/pembiayaan ke masyarakat. Seiring dengan penurunan fungsi intermediasi, total aset bank juga mengalami penurunan hingga pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp837,33 dengan pertumbuhan sebesar 1,03% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan kondisi pada triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 4,49% (yoy) (Grafik 4.1). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar dimiliki oleh kelompok Bank Umum Swasta Nasional sebesar 44,49% dari total aset, diikuti oleh Bank Persero (Bank Umum Milik Negara/BUMN) sebesar 39,57%, Bank Pemerintah Daerah (BPD) sebesar 13,72%, dan Bank Asing sebesar 2,22% (Grafik 4.2).

### 4.2.1. Dana Pihak Ketiga

Kinerja penghimpunan DPK Bank Umum terpantau mengalami penurunan. Pada triwulan I 2023, kinerja penghimpunan DPK tercatat tumbuh 2,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh lebih tinggi sebesar 3,59% (yoy) (Grafik 4.3). Berdasarkan jenisnya, penurunan kinerja penghimpunan DPK disebabkan oleh penurunan giro dan tabungan, yaitu dari yang sebelumnya masing-masing tumbuh 11,60% (yoy) dan 3,35% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi

kontraksi 0,49% (yoy) untuk giro dan tumbuh 0,88% (yoy) untuk tabungan. Perlambatan pertumbuhan diperkirakan didorong adanya peralihan portofolio investasi ke jenis aset lainnya seperti deposito yang memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi, mengingat suku bunga penyimpanan giro dan tabungan masih cenderung rendah<sup>36</sup>. Kelompok deposito tercatat tumbuh 6,67% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 0,35% (yoy). Adapun perbaikan pertumbuhan deposito didorong oleh peningkatan suku bunga acuan yang lebih atraktif<sup>37</sup>.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok nilai, perlambatan kinerja penghimpunan DPK pada triwulan I 2023 terutama terjadi pada hampir semua kelompok DPK, yaitu DPK kelompok besar (>Rp15 miliar - Rp20 miliar dan >Rp20 miliar)<sup>38</sup>, kelompok menengah (>Rp5 miliar - Rp10 miliar) serta DPK kelompok kecil (>Rp10 juta)<sup>39</sup> dibandingkan triwulan sebelumnya. Selain adanya indikasi peralihan portofolio investasi, penurunan DPK juga disebabkan oleh peningkatan kebutuhan konsumsi dalam rangka bulan Ramadhan dan menyambut HBKN Idul Fitri bulan April 2023, ataupun digunakan untuk dana talangan operasional perusahaan atau rumah tangga. Hal ini sejalan dengan masih kuatnya kinerja konsumsi dan investasi Jawa Timur di tengah menurunnya pendapatan ekspor<sup>40</sup> maupun seiring dengan suku bunga pinjaman yang juga naik signifikan.

**Rasio dana murah atau *current account saving account* (CASA) perbankan di Jawa Timur menurun.** Rasio CASA perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 63,09%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 65,45%, namun masih berada di atas rata-rata rasio CASA dalam 5 tahun terakhir sebesar 61,04% (Grafik 4.4). Rasio CASA yang cenderung tetap tinggi antara lain dipengaruhi oleh strategi bank untuk membatasi porsi dana mahal dalam rangka efisiensi. Namun demikian, ke depan terdapat risiko berlanjutnya tren penurunan rasio CASA seiring peningkatan suku bunga deposito. Penurunan CASA menggambarkan adanya peningkatan *cost of fund*, sejalan dengan kenaikan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang saat ini sedang berada dalam posisi yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 5,75%. Hal ini sejalan dengan peralihan simpanan masyarakat ke deposito yang menawarkan suku bunga lebih tinggi.

36. Suku bunga giro Bank Umum pada triwulan I 2023 sebesar 1,34%, menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 1,44%. Sementara itu, suku bunga tabungan Bank Umum cenderung stabil yaitu sebesar 0,63% pada triwulan I 2023, sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 0,61%.

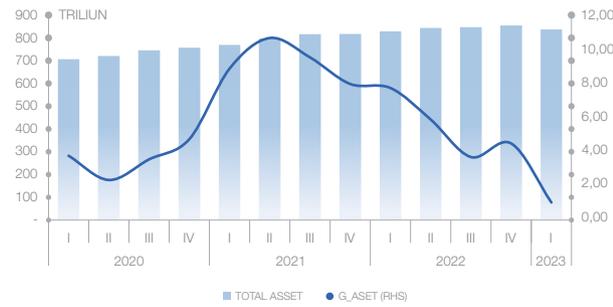
37. Suku bunga deposito Bank Umum pada triwulan I 2023 sebesar 4,11%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 3,76%.

38. DPK kelompok > Rp15 miliar - Rp20 miliar melambat dari 17,92% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 13,56% (yoy) pada triwulan I 2023, dan DPK kelompok > Rp20 miliar melambat dari 20,20% (yoy) menjadi 13,95% (yoy).

39. DPK kelompok <10 juta melambat dari 16,01% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi terkontraksi 48,08% (yoy) pada triwulan I 2023.

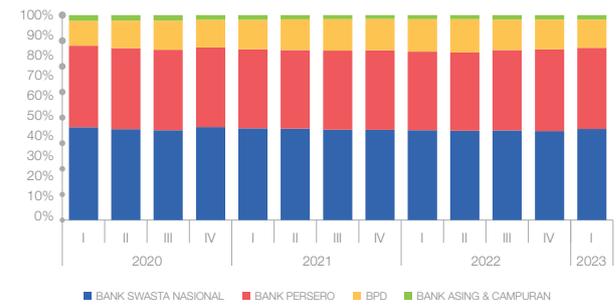
40. Kinerja Konsumsi dari 5,05% (yoy) pada triwulan IV 2022 meningkat menjadi 5,43% (yoy) pada triwulan I 2023, Kinerja Investasi dari 6,10% (yoy) meningkat menjadi 5,11% (yoy) pada triwulan I 2023, serta Kinerja Ekspor dari 3,21% (yoy) menurun menjadi 0,88% (yoy) pada triwulan I 2023.

Grafik 4.1 Perkembangan Aset Perbankan



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.2 Perkembangan Pangsa Kepemilikan Aset



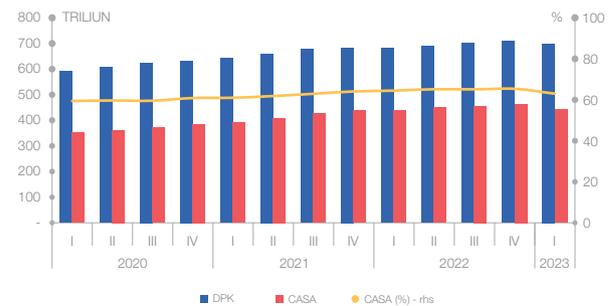
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.3 Perkembangan Pertumbuhan DPK Bank Umum



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.4 Perkembangan Rasio CASA Bank Umum



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur, diolah

Kenaikan harga komoditas internasional berpotensi memberi tekanan lebih dalam kepada kinerja korporasi (Tabel 4.1). Berdasarkan data *World Bank* (posisi Desember 2022), harga komoditas impor bahan baku industri utama Jawa Timur, yaitu gandum dan produk gandum, serta harga energi terpantau meningkat signifikan pada triwulan laporan. Hal ini dapat memicu terjadinya penurunan impor bahan baku industri. Selain itu, peningkatan harga bahan baku dan energi dapat memicu terjadinya

peningkatan biaya produksi yang berpotensi mengurangi daya saing produk ekspor dan mengurangi *margin* korporasi. Namun demikian, potensi perlambatan kinerja korporasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga komoditas ekspor unggulan Jawa Timur, yakni minyak sawit dan emas.

Tabel 4.1 Pertumbuhan DPK Perbankan Jatim berdasarkan Kelompok Nilai

KLASIFIKASI	KELOMPOK NILAI	IV - 2022		I - 2022	
		Rp (Miliar)	%yoy	Rp (Miliar)	%yoy
KECIL					
	<10 JT	31.171	16,01	30,647	(48,08)
	>10JT-100JT	108.370	0,07	104,853	42,60
	>100JT-500JT	134.009	(8,77)	132,073	(7,25)
MENENGAH					
	>500JT-1M	65.576	24,85	64,802	31,10
	>1M-2M	54.190	12,71	53,962	17,46
	>2M-5M	72.098	(19,05)	72,910	(16,02)
	>5M-10M	49.046	7,14	48,697	(7,72)
BESAR					
	>10M-15M	19.513	(6,44)	21,121	(3,27)
	>15M-20M	16.668	17,92	15,831	13,56
	>20M	157.185	20,20	154,842	13,95

Sumber : Laporan Bea Cukai, 2023

#### 4.2.2. Penyaluran Kredit

Pada triwulan I 2023, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Jawa Timur tercatat tumbuh 7,88% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8,45% (yoy) (Grafik 4.5). Berdasarkan jenis penggunaannya, perlambatan kinerja penyaluran kredit terjadi pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi, sedangkan kredit investasi masih menunjukkan peningkatan. Kredit modal kerja dan kredit konsumsi masing-masing tercatat tumbuh 6,70% (yoy) dan 7,67% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,20% (yoy) dan 8,14% (yoy). Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga dan korporasi cenderung menahan konsumsi seiring dengan tingginya suku bunga. Di sisi lain, kredit investasi tercatat meningkat dari sebelumnya tumbuh 9,62% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 11,43% (yoy) pada triwulan laporan. Hal ini sejalan dengan perkembangan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor pertambangan dan industri logam, serta nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor industri logam serta kimia dan farmasi pada triwulan laporan<sup>41</sup>.

41. PMA pada LU Pertambangan dan Industri Logam tercatat tumbuh 118,45% (yoy) dan 81,49% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 28,57% (yoy) dan -8,98% (yoy). Sementara itu, PMDN pada LU Industri Logam dan Industri Kimia tumbuh sebesar 1.540% (yoy) dan 82,39% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 5,13% (yoy) dan 72,33% (yoy).

Perkembangan tersebut tercermin pada peningkatan kredit investasi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan yang masing-masing tercatat tumbuh 62,83% (yoy) dan 18,81% (yoy) pada triwulan I 2023, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 16,53% (yoy) dan 16,31% (yoy).

**Penyaluran kredit di Jawa Timur yang melambat terindikasi sejalan dengan kenaikan suku bunga kredit sebagai dampak adanya transmisi suku bunga kebijakan moneter.** Namun demikian, respon perbankan terhadap kenaikan suku bunga kebijakan terpantau tidak simetris, tercermin dari kenaikan suku bunga kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan suku bunga DPK. Hal ini mendorong *spread* suku bunga perbankan yang semakin melebar. Pada triwulan I 2023, perbankan lebih agresif menaikkan suku bunga kredit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022<sup>42</sup> sejalan dengan kondisi pemulihan ekonomi yang diprakirakan lebih baik dan adanya target yang diindikasikan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. *Spread* suku bunga pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 7,21%, meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 yang sebesar 7,08%. Hal ini didorong oleh peningkatan suku bunga kredit yang lebih besar dari peningkatan suku bunga DPK. Suku bunga kredit meningkat dari triwulan IV 2022 sebesar 9,15% menjadi 9,50% pada triwulan I 2023. Sementara itu, suku bunga DPK meningkat dari 2,07% di triwulan IV 2022 menjadi 2,29% pada triwulan I 2023 (Grafik 4.9). Hal ini juga sejalan dengan kenaikan *Net Interest Margin* (NIM)<sup>43</sup> perbankan di Jawa Timur yang menggambarkan adanya kenaikan margin bunga yang diberikan kepada nasabah.

**Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan di Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat menunjukkan peningkatan<sup>44</sup> yang terindikasi karena adanya tekanan pada pendapatan bunga akibat restrukturisasi kredit yang semakin meningkat<sup>45</sup>.** Adanya peningkatan restrukturisasi kredit ini berpotensi meningkatkan kolektabilitas 2, yaitu nasabah dalam perhatian khusus. Hal ini tentunya berpotensi meningkatkan risiko kredit yaitu *Loan at Risk* (LAR) yang memperhitungkan debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran selama 30-90 hari. LAR perbankan di Jawa Timur tercatat meningkat dari 6,35% pada triwulan IV 2022 menjadi 7,63% pada triwulan I 2023 (Grafik 4.7).

**Kualitas kredit di Jawa Timur pada triwulan I 2023 yang tercermin dari rasio *Non Performing Loan* (NPL) masih berada di bawah *threshold* 5%.** NPL *gross* Jawa Timur pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,41%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,27% (Grafik 4.6). Berdasarkan penggunaannya, peningkatan rasio NPL disumbang oleh kenaikan NPL pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi, sedangkan kredit investasi menunjukkan perbaikan kualitas penyaluran kredit. Secara umum, kualitas kredit yang terjaga didukung oleh implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Pemerintah dan otoritas terkait berupa pemberian subsidi suku bunga UMKM, risk *sharing* penjaminan kredit korporasi, serta relaksasi restrukturisasi

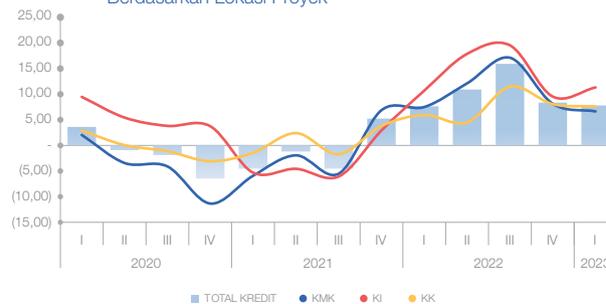
kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi secara *targeted* sampai dengan 31 Maret 2024 untuk segmen UMKM, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki, guna meminimalisir risiko perbankan<sup>46</sup>. Lebih lanjut, peningkatan NPL juga turut mendorong peningkatan rasio kredit berisiko atau *Loan at Risk* (LaR) perbankan Jawa Timur.

**Lebih lanjut, peningkatan risiko kredit juga berbanding lurus dengan peningkatan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang berpotensi menekan sisi biaya dan pada akhirnya memengaruhi besaran *Net Profit Margin* (NPM) perbankan.** Pada triwulan I 2023, NPM<sup>47</sup> perbankan di Jawa Timur tercatat masih mengalami peningkatan, yang mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan perbankan dalam beroperasi secara efisien, di tengah kenaikan restrukturisasi kredit dan risiko kredit. Kenaikan NPM ini sejalan dengan peningkatan besaran *value added* kinerja sektor Jasa Keuangan secara nominal yang meningkat sebesar 0,45% pada triwulan I 2023.

### 4.2.3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

**Tingkat intermediasi perbankan di Jawa Timur optimal.** Pada triwulan I 2023, tingkat LDR bank umum di Jawa Timur berada pada level 90,77% atau masih dalam rentang ideal LDR perbankan<sup>48</sup> (Grafik 4.8). Rasio tersebut tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 89,07%. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penghimpunan DPK pada triwulan laporan.

Grafik 4.5 Perkembangan Pertumbuhan Penyaluran Kredit Bank Umum Berdasarkan Lokasi Proyek



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

43. Rasio NIM Bank Umum di Jawa Timur meningkat dari 4,88% pada triwulan IV 2022 menjadi 4,91% pada triwulan I 2023

44. Rasio BOPO meningkat dari 74,91% pada triwulan IV 2022 menjadi 84,10% pada triwulan I 2023

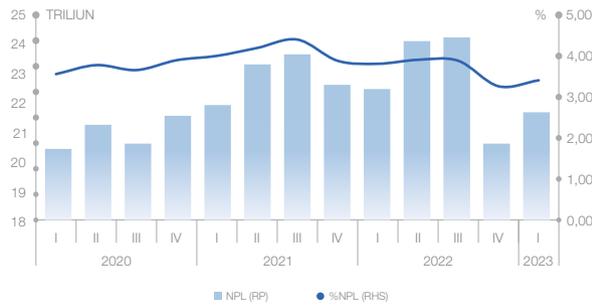
45. Kredit Restrukturisasi meningkat dari kontraksi 35,01% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi kontraksi 31,91% (yoy) pada triwulan I 2023

46. Berdasarkan Slaran Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor 01/KSSK/Pers/2023.

47. Rasio NPM Bank Umum di Jawa Timur meningkat dari 10,36% pada triwulan IV 2022 menjadi 22,21% pada triwulan I 2023

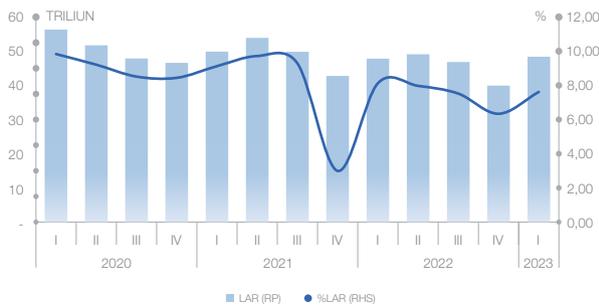
48. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018, batas Rasio Intermediasi Makprudensial (RIM) adalah 80%-92%.

Grafik 4.6 Perkembangan Rasio NPL Bank Umum



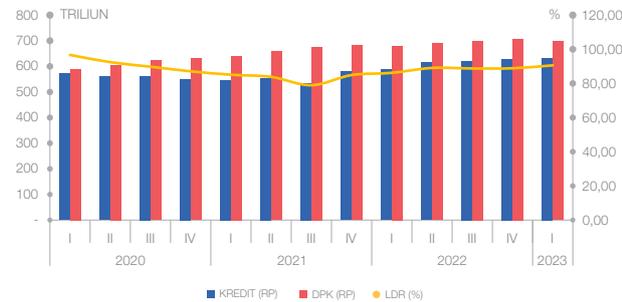
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.7 Perkembangan Loan at Risk (LAR) Bank Umum



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.8 Perkembangan Loan to Deposit (LDR) Bank Umum



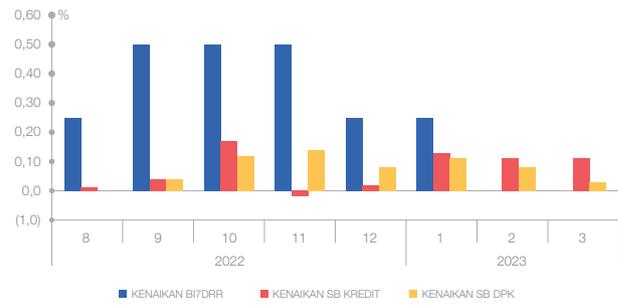
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.9 Perkembangan BI7DRR dan Suku Bunga Bank Tertimbang



Sumber: Laporan Bank Umum & Website Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.10 Kenaikan BI7DRR dan Suku Bunga Bank Tertimbang



Sumber: Laporan Bank Umum & Website Bank Indonesia, diolah

## 4.3. PERKEMBANGAN KINERJA KORPORASI

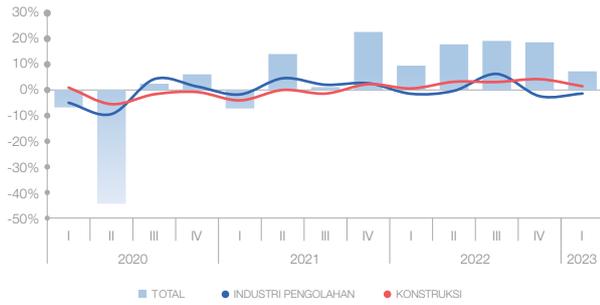
### 4.3.1. Kinerja Umum Korporasi

Kinerja korporasi pada triwulan I 2023 terpantau melambat terindikasi dari hasil SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur yang mencatatkan adanya penurunan kegiatan usaha dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan hasil SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, nilai SBT kegiatan usaha pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 7,32%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,72%. Penurunan kinerja tersebut tercermin pada beberapa LU utama, terutama LU Industri Pengolahan yang masih dalam level pesimis (SBT -1,41%) dan LU Konstruksi yang mengalami penurunan SBT dari 4,23% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,46% (Grafik 4.11). Hasil survei tersebut juga terkonfirmasi melalui realisasi penurunan kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi pada triwulan I 2023<sup>49</sup>.

Perlambatan kinerja korporasi seiring dengan perlambatan permintaan global. Masih berlanjutnya konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan Tiongkok-Taiwan berdampak pada disrupsi rantai pasokan global yang berimplikasi pada kebijakan proteksionisme global. Lebih lanjut, gejolak perbankan global di Amerika Serikat dan Eropa pada akhir triwulan I 2023 turut berdampak pada peningkatan ketidakpastian global. Hal tersebut menyebabkan penurunan perdagangan global yang turut menekan kinerja ekspor LN Jawa Timur. Berdasarkan data BPS, kinerja ekspor LN Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat tumbuh 0,88% (yoy) atau menurun dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,55% (yoy). Perlambatan tersebut juga seiring dengan perlambatan kinerja ekonomi beberapa mitra dagang utama Jawa Timur pada triwulan laporan, khususnya wilayah Eropa (Grafik 4.12).

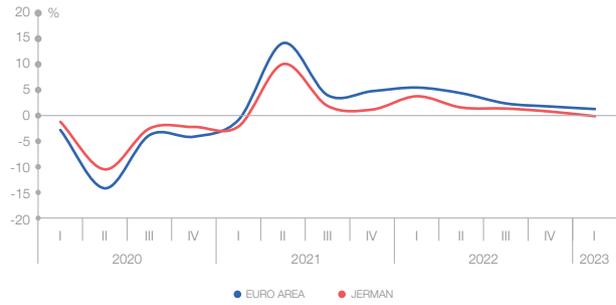
Perlambatan kinerja korporasi juga tercermin pada kondisi rentabilitas dan likuiditas korporasi yang menurun. Berdasarkan hasil SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur, sebanyak 9,83% korporasi menyatakan bahwa kondisi rentabilitas (kemampuan menghasilkan laba) pada triwulan I 2023 lebih buruk dibandingkan triwulan sebelumnya. Pangsa ini lebih banyak dari trwulan sebelumnya sebesar 8,22%. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah korporasi yang menyatakan adanya penurunan kondisi likuiditas juga meningkat, yaitu dari 6,16% pada triwulan IV 2022 menjadi 6,83% pada triwulan laporan (Grafik 4.13 dan Grafik 4.14).

Grafik 4.11 Perkembangan SBT Kegiatan Usaha



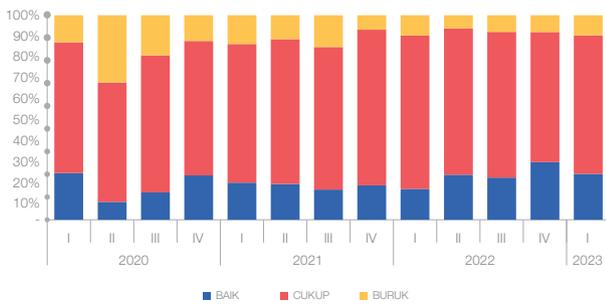
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama



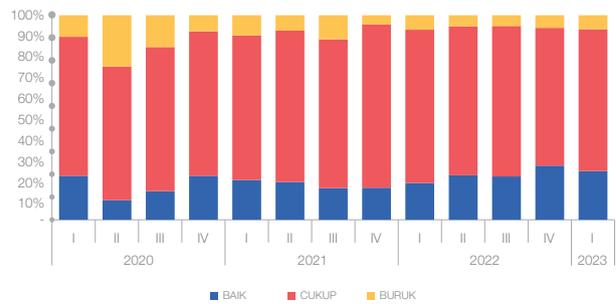
Sumber: tradingeconomics, diolah

Grafik 4.13 Perkembangan Kondisi Rentabilitas Korporasi



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan Kondisi Likuiditas Korporasi



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, diolah

## 4.3.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

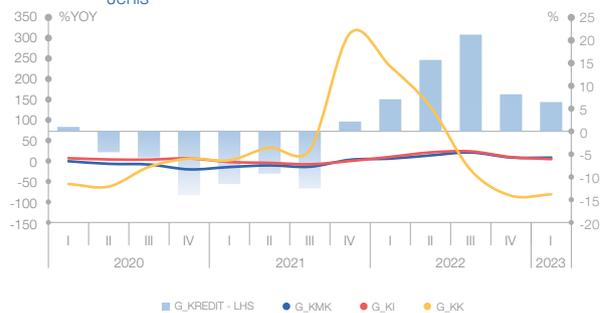
### 4.3.2.1 Penyaluran Kredit Korporasi

Kinerja penyaluran kredit korporasi di Jawa Timur pada triwulan I 2023 tercatat melambat dari sebelumnya tumbuh 8,19% (yoy) menjadi 6,46% (yoy) (Grafik 4.15). Perlambatan kinerja kredit korporasi terutama didorong oleh penurunan kinerja penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi. Pertumbuhan penyaluran kredit modal kerja dan kredit investasi tercatat menurun dari sebelumnya masing-masing tumbuh sebesar 8,33% (yoy) dan 9,27% (yoy) pada triwulan IV 2022, menjadi 7,90% (yoy) dan 4,31% (yoy) pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut mengindikasikan belum adanya kebutuhan peningkatan kapasitas operasional produksi dan ekspansi korporasi di Jawa Timur. Lebih lanjut, penyaluran kredit konsumsi korporasi tercatat masih mengalami kontraksi yang dalam sebesar 82,01% (yoy), sedikit lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi 85,19% (yoy). Masih terkontraksinya kinerja penyaluran kredit konsumsi tidak terlepas dari peningkatan suku bunga acuan Bank Indonesia<sup>50</sup> yang memengaruhi perilaku korporasi untuk cenderung menahan konsumsi.

Penurunan kinerja penyaluran kredit korporasi didorong oleh melambatnya penyaluran kredit ke beberapa LU sektor utama<sup>51</sup> Jawa Timur, yaitu LU Industri Pengolahan, LU Pertanian, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Grafik 4.16). Kinerja penyaluran kredit perbankan kepada LU Industri Pengolahan

tercatat menurun dari sebelumnya tumbuh 15,95% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi tumbuh 12,34% (yoy) pada triwulan laporan. Penurunan ini sejalan dengan penurunan kinerja LU Industri Pengolahan akibat perlambatan kinerja mitra dagang utama yang berdampak pada lebih rendahnya kinerja ekspor dari produk industri pengolahan, khususnya perhiasan, lemak dan minyak hewan, tembaga, serta kayu dan barang dari kayu. Lebih lanjut, penurunan kinerja penyaluran kredit juga terjadi pada LU Pertanian dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang masing-masing tercatat mengalami kontraksi 36,01% (yoy) dan

Grafik 4.15 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Jenis

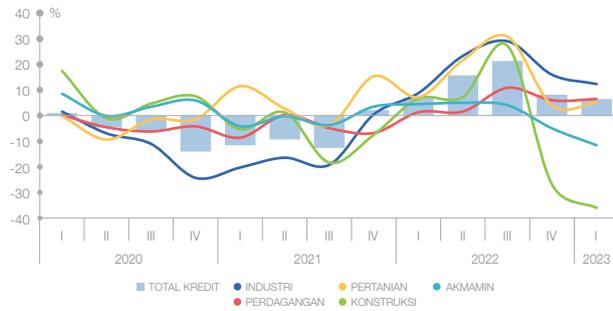


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

50. Selama triwulan I 2023 terhitung sejak 19 Januari 2023, BI7DRR tercatat sebesar 5,75%, meningkat dibandingkan posisi BI7DRR pada triwulan III 2022 (posisi 22 Desember 2022) yang sebesar 5,50%.

51. Sektor utama dilihat dari pangsa nilai ADHB LU terhadap perekonomian Jawa Timur.

Grafik 4.16 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Korporasi Sektor Utama Jawa Timur



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

11,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 26,91% (yoy) dan 4,98% (yoy). Namun demikian, secara nominal penyaluran kredit pada LU Pertanian mengalami peningkatan sebesar 1,69% dibandingkan triwulan sebelumnya.

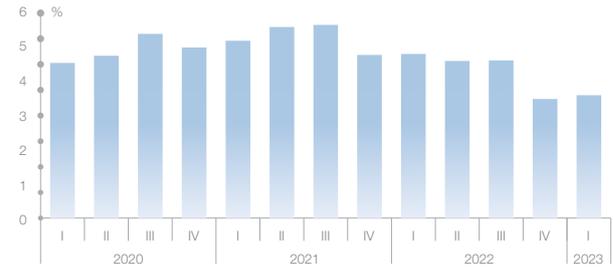
Risiko kredit korporasi terjaga. Pada triwulan I 2023, rasio NPL kredit korporasi di Jawa Timur tercatat masih berada di bawah *threshold* 5%, meskipun mengalami sedikit peningkatan dari 3,61% pada triwulan IV 2022 menjadi 3,64% pada triwulan laporan (Grafik 4.17). Terjaganya risiko kredit korporasi di Jawa Timur tidak terlepas dari adanya perpanjangan keringanan restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak COVID-19 secara *targeted* hingga 31 Maret 2024<sup>52</sup>.

### Kredit Modal Kerja Korporasi

Perlambatan kinerja penyaluran kredit modal kerja terutama didorong oleh melambatnya penyaluran kredit ke LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Grafik 4.18). Pada triwulan I 2023, kinerja penyaluran kredit modal kerja pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat tumbuh 23,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 29,31% (yoy). Kondisi tersebut seiring dengan periode *low season* untuk sektor pariwisata (pasca Tahun Baru dan sebelum HBKN Idul Fitri) sehingga pelaku usaha cenderung tidak melakukan peningkatan kapasitas operasional produksi. Sementara itu, penyaluran kredit modal kerja pada LU Pertanian tercatat terkontraksi 42,59% (yoy), menurun dibandingkan triwulan IV 2022 yang terkontraksi sebesar 39,31% (yoy). Penurunan tersebut ditengarai oleh masih berlanjutnya fenomena La Nina hingga awal tahun 2023 yang cenderung mengganggu produktivitas sektor pertanian. Kondisi tersebut juga terkonfirmasi pada hasil SKDU Bank Indonesia di Jawa Timur yang menunjukkan adanya penurunan kapasitas produksi terpakai pada LU Pertanian<sup>53</sup>. Namun demikian, secara nominal penyaluran kredit modal kerja pada LU Pertanian mengalami peningkatan sebesar 1,79% dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara agregat, rasio NPL kredit modal kerja korporasi di Jawa Timur terpantau masih terjaga di bawah *threshold* 5%, meskipun terpantau mengalami sedikit peningkatan (Grafik 4.19).

52. Berdasarkan Siaran Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nomor 01/KSSK/Pers/2023.  
53. SBT kapasitas produksi terpakai LU Pertanian di Jawa Timur tercatat menurun dari 68,78% pada triwulan IV 2022 menjadi 63,75% pada triwulan laporan.  
54. Kinerja investasi pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,11% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 61,0% (yoy).

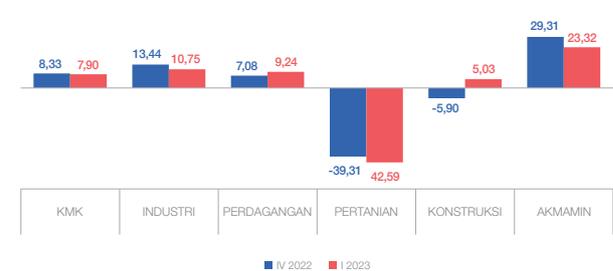
Grafik 4.17 Perkembangan Rasio NPL Kredit Korporasi



### Kredit Investasi (KI) Korporasi

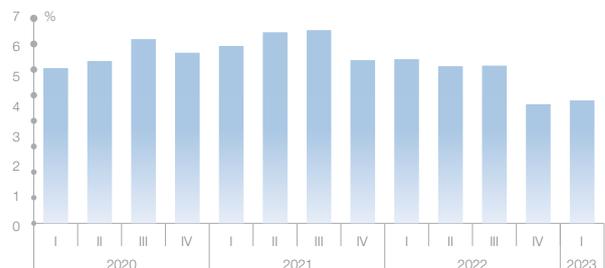
Penurunan kinerja penyaluran kredit investasi korporasi terjadi pada seluruh LU utama (Grafik 4.20). Secara umum, perkembangan tersebut sejalan dengan realisasi penurunan kinerja investasi di Jawa Timur pada triwulan I 2023<sup>54</sup>. Adapun penurunan kinerja penyaluran kredit investasi terdalem terjadi pada LU Pertanian yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 29,49% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 12,53% (yoy). Kinerja penyaluran kredit investasi juga tercatat tumbuh melambat pada LU Perdagangan, LU Industri Pengolahan, dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Grafik 4.18 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Modal Kerja Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.19 Perkembangan Rasio NPL Kredit Modal Kerja Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.20 Perkembangan Pertumbuhan Kredit Investasi Korporasi



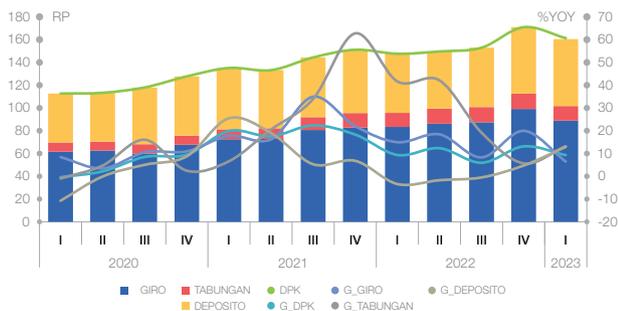
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Pergeseran model bisnis dari transaksi *offline* ke transaksi digital, perlambatan ekspor dan impor komoditas bahan baku, serta kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang relatif stabil dan cenderung lebih sepi di awal tahun menyebabkan korporasi menahan kebutuhan investasi di periode ini. Lebih lanjut, penyaluran kredit pada LU Konstruksi juga terpantau menurun seiring dengan penurunan jumlah proyek konstruksi baru di awal tahun serta mundurnya penyelesaian pembangunan beberapa jalan tol, terutama Tol Probowangi, Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, dan tol Gresik-Lamongan-Tuban. Secara agregat, rasio NPL kredit investasi korporasi di Jawa Timur terpantau membaik, yaitu dari 2,59% pada triwulan IV 2022 menjadi 2,41% pada triwulan laporan (Grafik 4.7).

#### 4.3.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Korporasi

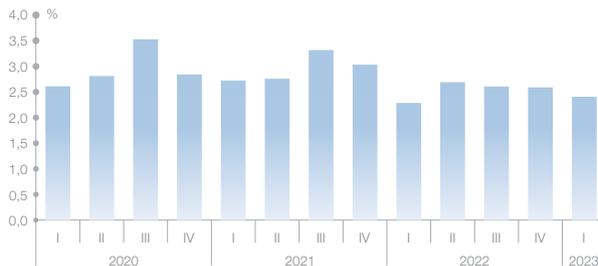
Kinerja penghimpunan DPK korporasi di perbankan menurun pada triwulan I 2023 (Grafik 4.22). DPK korporasi di perbankan tercatat tumbuh 9,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,13% (yoy). Berdasarkan komponennya, DPK korporasi masih didominasi oleh giro dan deposito dengan pangsa masing-masing sebesar 55,11% dan 36,43% dari total DPK di perbankan, sementara tabungan hanya sebesar 7,97%. Pada triwulan I 2023, perlambatan kinerja penghimpunan DPK korporasi disumbang oleh penurunan komponen giro yang tercatat tumbuh melambat sebesar 6,45% (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian pada triwulan sebelumnya

Grafik 4.22 Pertumbuhan DPK Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.21 Perkembangan Rasio NPL Kredit Investasi Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

yang tumbuh impresif sebesar 19,95% (yoy). Di sisi lain, penurunan kinerja penghimpunan DPK yang lebih dalam tertahan oleh komponen tabungan dan deposito yang masing-masing tercatat tumbuh 13,22% (yoy) dan 12,91% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,66% (yoy) dan 4,72% (yoy).

#### Suku bunga tertimbang DPK korporasi tercatat meningkat dibandingkan periode sebelumnya (Grafik 4.23).

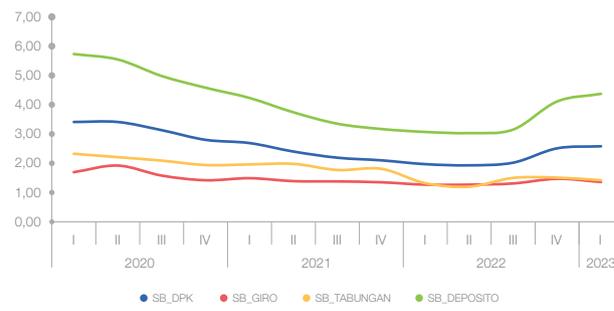
Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia telah ditransmisikan pada suku bunga Perbankan. Berdasarkan komponennya, peningkatan suku bunga terjadi pada komponen deposito yang tercatat sebesar 4,37% pada triwulan I 2023, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,11%. Di sisi lain, suku bunga tertimbang giro dan tabungan tercatat menurun, yaitu dari sebelumnya masing-masing tercatat sebesar 1,47% dan 1,51%, menjadi 1,36% dan 1,42% pada triwulan laporan.

### 4.4. PERKEMBANGAN KINERJA RUMAH TANGGA

#### 4.4.1. Kinerja Umum Rumah Tangga

Kinerja Rumah Tangga (RT) di Jawa Timur terpantau membaik seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan PPKM. Perbaikan kinerja RT antara lain tercermin dari realisasi peningkatan konsumsi RT pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 5,36% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,00% (yoy). Optimisme RT juga terlihat dari

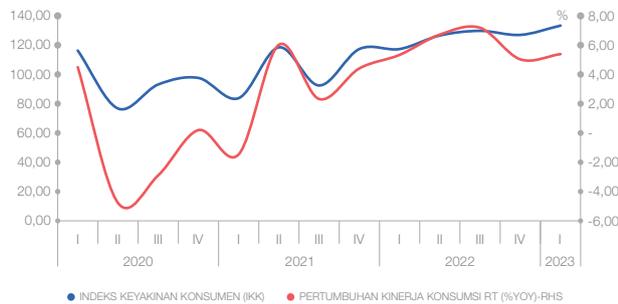
Grafik 4.23 Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK Korporasi



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

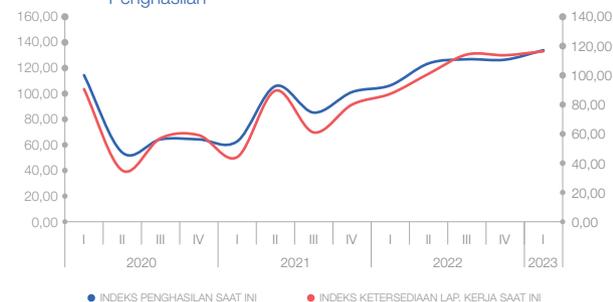
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 126,70 menjadi 133,02 pada triwulan laporan (Grafik 4.24). Peningkatan keyakinan konsumen tidak terlepas dari penguatan daya beli masyarakat, tercermin dari peningkatan indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks penghasilan saat ini (Grafik 4.25). Selain itu, kenaikan UMK dan berlanjutnya insentif Pemerintah melalui program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga diprakirakan menopang kinerja RT pada triwulan laporan. Kinerja Rumah Tangga (RT) di Jawa Timur terpantau membaik seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan PPKM. Perbaikan kinerja RT antara lain tercermin dari realisasi peningkatan konsumsi RT pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 5,36% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 5,00% (yoy). Optimisme RT juga terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 126,70 menjadi 133,02 pada triwulan laporan (Grafik 4.24). Peningkatan keyakinan konsumen tidak terlepas dari penguatan daya beli masyarakat, tercermin dari peningkatan indeks ketersediaan lapangan kerja dan indeks penghasilan saat ini (Grafik 4.25). Selain itu, kenaikan UMK dan berlanjutnya insentif Pemerintah melalui program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga diprakirakan menopang kinerja RT pada triwulan laporan.

Grafik 4.24 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.25 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja dan Penghasilan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

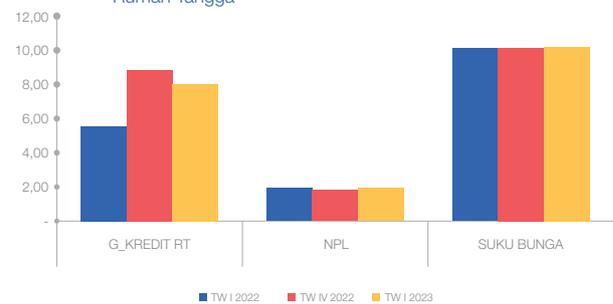
## 4.4.2. Eksposur Perbankan pada Rumah Tangga

### 4.4.2.1 Penyaluran Kredit Rumah Tangga

Kinerja penyaluran kredit RT mencatat pertumbuhan yang positif meskipun melambat (Grafik 4.26). Pada triwulan I 2023, kinerja penyaluran kredit RT tercatat tumbuh positif 8,13% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,97% (yoy). Adapun penurunan kinerja penyaluran kredit RT terutama bersumber dari penurunan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan KP Ruko/Rukan maupun melambatnya kredit multiguna, dan kredit lainnya. Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, kredit RT di Jawa Timur pada triwulan I 2023 masih didominasi oleh Kredit Multiguna (43,81%) dan Kredit Pemilikan Rumah/KPR (34,71%) (Grafik 4.27).

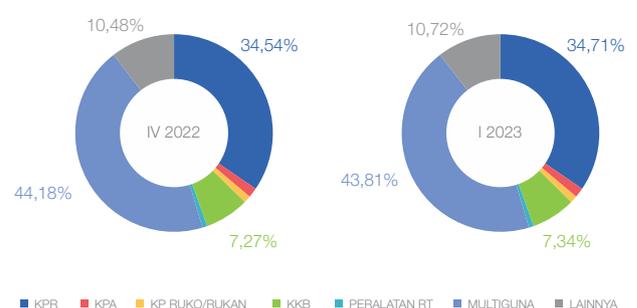
Risiko kredit RT terjaga (Grafik 4.26). Pada triwulan I 2023, risiko kredit RT terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL yang rendah meskipun sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Rasio NPL pada triwulan laporan tercatat sebesar 1,96%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,84%, namun masih jauh di bawah *threshold* 5%. Rendahnya rasio NPL kredit RT mengindikasikan bahwa daya beli dan kemampuan membayar RT tetap terjaga di tengah tingkat inflasi tahunan yang masih relatif tinggi pada triwulan I 2023. Kondisi tersebut tidak terlepas dari geliat ekonomi yang terjadi seiring dengan terkendalinya COVID-19 serta dukungan berbagai stimulus dan

Grafik 4.26 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Rumah Tangga



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.27 Pangsa Kredit RT Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kredit



Sumber: Laporan Bank Umum (diolah)

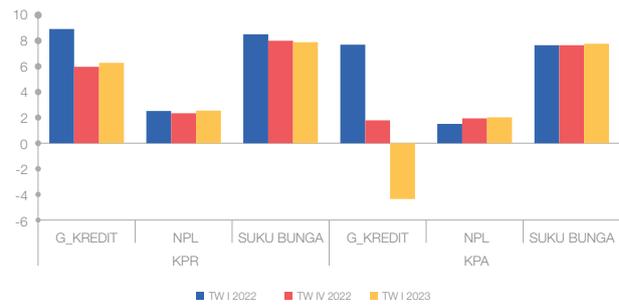
subsidi yang diberikan oleh Pemerintah dan otoritas terkait. Di sisi lain, terdapat beberapa risiko yang berpotensi meningkatkan rasio NPL, diantaranya (1) peningkatan kembali inflasi IHK sehingga alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhan sehari-hari mengalami peningkatan dan mengurangi alokasi untuk pembayaran cicilan; serta (2) tren kenaikan suku bunga kredit yang akan meningkatkan beban cicilan debitur.

### Kredit Pemilikan Apartemen dan Kredit Pemilikan Rumah (KPA dan KPR)

**Penyaluran KPR tercatat meningkat, sedangkan penyaluran KPA turun signifikan (Grafik 4.28).** Penyaluran KPR pada triwulan I 2023 tumbuh 6,27% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,97% (yoy). Peningkatan tersebut terindikasi tidak terlepas dari dampak perpanjangan kebijakan pelonggaran rasio *Loan to Value* (LTV) dan *Financing to Value* (FV) untuk KPR yang sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi 31 Desember 2023<sup>55</sup>. Selain itu, kebijakan penyaluran kredit yang diprakirakan lebih longgar dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama pada aspek jangka waktu, dan biaya persetujuan kredit, juga diyakini mendorong peningkatan penyaluran KPR pada triwulan laporan. Hal tersebut tercermin pada indeks *lending* standard KPR/KPA yang berada pada level -0,5 pada triwulan I 2023<sup>56</sup>. Di sisi lain, kinerja penyaluran KPA tercatat mengalami kontraksi 4,36% (yoy), turun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,78% (yoy). Perlambatan lebih dikarenakan *supply* apartemen yang berkurang sejalan dengan minimnya proyek pembangunan baru selama tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2023 direncanakan terdapat 405 unit tambahan apartemen baru di Kota Surabaya<sup>57</sup> yang diharapkan dapat menjadi faktor pendorong peningkatan penyaluran KPA.

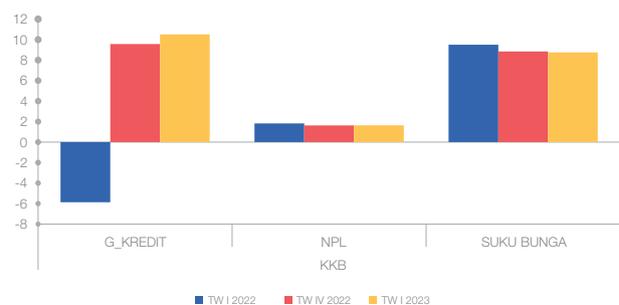
**NPL KPR dan KPA mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 4.28).** Pada triwulan I 2023, rasio NPL KPR meningkat dari 2,34% pada triwulan IV 2022 menjadi 2,54%. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan rasio NPL untuk rumah dengan luas di atas 21 m<sup>2</sup>, sementara untuk rumah dengan luas di bawah 21 m<sup>2</sup> terpantau mengalami perbaikan rasio NPL. Penurunan NPL pada KPR untuk rumah dengan luas di bawah 21 m<sup>2</sup> seiring dengan tidak adanya penyaluran kredit baru untuk kategori rumah dimaksud. Kondisi ini dapat mengindikasikan turunnya minat masyarakat terhadap rumah dengan luas di bawah 21 m<sup>2</sup> atau semakin terbatasnya pembangunan rumah dengan luas di bawah 21 m<sup>2</sup>. Lebih lanjut, NPL pada KPA juga tercatat meningkat dari 1,94% pada triwulan IV 2022 menjadi 2,02% pada triwulan laporan, terutama didorong oleh peningkatan NPL pada KPA apartemen tipe 22-70 m<sup>2</sup>.

Grafik 4.28 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KPR-KPA



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grafik 4.29 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga KKB



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

### Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

**Penyaluran KKB pada triwulan I 2023 tercatat meningkat dengan tingkat risiko yang terjaga (Grafik 4.29).** Kinerja penyaluran KKB tumbuh 10,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,57% (yoy). Peningkatan tersebut turut ditopang oleh perpanjangan kebijakan pelonggaran ketentuan uang muka kredit untuk kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% yang sebelumnya berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi 31 Desember 2023<sup>58</sup>. Adapun berdasarkan jenisnya, peningkatan penyaluran KKB terutama terjadi pada tipe kendaraan mobil roda empat. Lebih lanjut, risiko penyaluran KKB terjaga (Grafik 4.29). Pada triwulan I 2023, rasio NPL KKB tercatat sebesar 1,64%, cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,63%. Namun, jika dilihat lebih detail berdasarkan jenis kendaraan, terjadi peningkatan rasio NPL untuk penyaluran kredit tipe kendaraan mobil roda empat.

### Kredit Multiguna

**Pertumbuhan kredit multiguna tercatat melambat dengan risiko kredit yang terjaga (Grafik 4.30).** Kredit multiguna tumbuh melambat pada triwulan I 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,40% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,44% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, rasio NPL kredit multiguna juga tercatat masih berada di bawah threshold 5%, meskipun mengalami sedikit peningkatan dari 1,53% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,63% pada triwulan laporan.

55. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/16/PADG/2022 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

56. Berdasarkan hasil Survei Perbankan Bank Indonesia periode triwulan IV 2022. Adapun indeks *lending standard* di atas 0 menunjukkan standar penyaluran kredit yang lebih ketat, sedangkan indeks di bawah 0 atau angka negatif menunjukkan standar yang lebih longgar.

57. Sumber: <https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/08/053000021/harga-apartemen-di-surabaya-diprediksi-tak-naik-segini-kisaran-nya>

58. Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/16/PADG/2022 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Grifik 4.30 Perkembangan Kinerja Kredit, NPL, dan Suku Bunga Kredit Multiguna



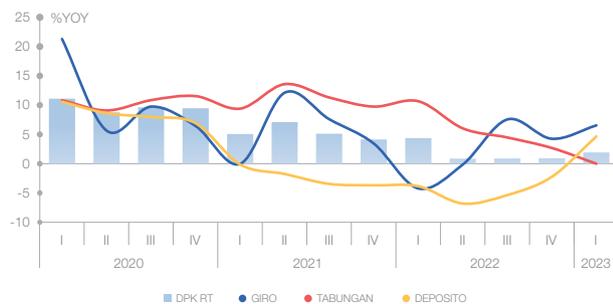
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

#### 4.4.2.2 Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Rumah Tangga

**DPK RT di Jawa Timur terpantau meningkat pada triwulan I 2023.** Kinerja penghimpunan DPK RT terakselerasi pada triwulan laporan dengan pertumbuhan sebesar 1,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,92% (yoy) (Grifik 4.31). Peningkatan DPK RT di tengah perlambatan penyaluran kredit RT mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung menyimpan uang di perbankan dan menahan konsumsi. Adanya kenaikan suku bunga simpanan membuat masyarakat memilih untuk menunda konsumsi di tengah ketidakpastian global. Berdasarkan jenisnya, akselerasi kinerja penghimpunan DPK terutama bersumber dari membaiknya pertumbuhan deposito dan giro seiring peningkatan suku bunga acuan yang lebih atraktif.

**Penyesuaian suku bunga acuan Bank Indonesia terpantau sudah tertransmisi pada suku bunga DPK RT.** Suku bunga tertimbang DPK RT mengalami peningkatan dari 1,89% pada triwulan IV 2022 menjadi 2,13% pada triwulan laporan. Peningkatan juga terjadi pada seluruh komponen DPK (Grifik 4.32). Hal ini mengindikasikan bahwa transmisi suku bunga acuan Bank Indonesia terhadap suku bunga pasar telah berjalan dengan baik.

Grifik 4.31 Perkembangan Pertumbuhan DPK RT



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

## 4.5. PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

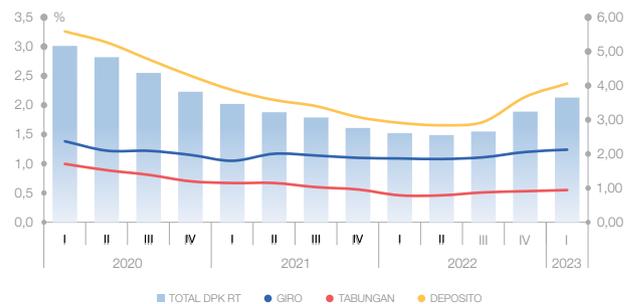
### 4.5.1. Eksposur Perbankan pada UMKM

**Eksposur perbankan terhadap UMKM terkonfirmasi cukup baik dan stabil.** Pada triwulan I 2023, pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran kredit di Jawa Timur tercatat sebesar 31,93%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 31,64% (Grifik 4.31). Peningkatan pangsa kredit UMKM juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan perbankan untuk bersinergi mendorong peran UMKM dalam perekonomian Jawa Timur mengingat UMKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Timur.

**Sementara itu, pertumbuhan penyaluran kredit kepada UMKM tercatat melambat pada triwulan I 2023.** Kredit UMKM tumbuh sebesar 9,13% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,72% (yoy) (Grifik 4.33). Perlambatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM di Provinsi Jawa Timur tersebut disebabkan oleh perlambatan penyaluran kredit investasi dan kredit modal kerja. Kinerja penyaluran kredit investasi pada UMKM di Jawa Timur tercatat menurun dari 19,34% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 16,21% (yoy) pada triwulan I 2023. Sementara itu, kinerja penyaluran kredit modal kerja pada UMKM juga mengalami perlambatan dari 8,79% (yoy) pada triwulan IV 2022 menjadi 7,43% (yoy) pada triwulan laporan.

**Mayoritas penyaluran kredit UMKM terjadi pada LU Perdagangan, LU Pertanian, dan LU Industri Pengolahan yang merupakan tiga sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur.** Pangsa tersebut cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (Grifik 4.35). Secara pertumbuhan, kinerja penyaluran kredit UMKM mengalami perlambatan pada LU Pertanian dan LU Perdagangan, sementara LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan (Grifik 4.36).

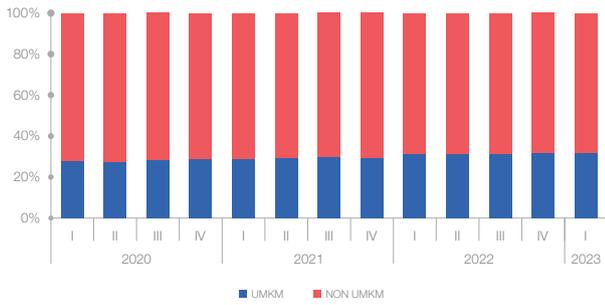
Grifik 4.32 Perkembangan Suku Bunga Tertimbang DPK RT



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

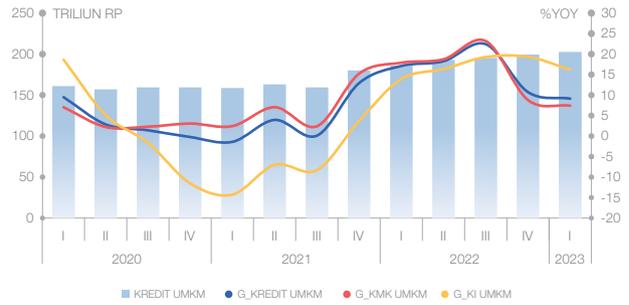
59. Suku bunga tertimbang DPK RT pada komponen deposito, giro, dan tabungan meningkat dari masing-masing sebesar 3,67%, 1,20%, dan 0,53% menjadi masing-masing sebesar 4,06%, 1,24%, dan 0,55% pada triwulan I 2023.

Grifik 4.33 Share Kredit UMKM Terhadap Total Kredit di Jawa Timur



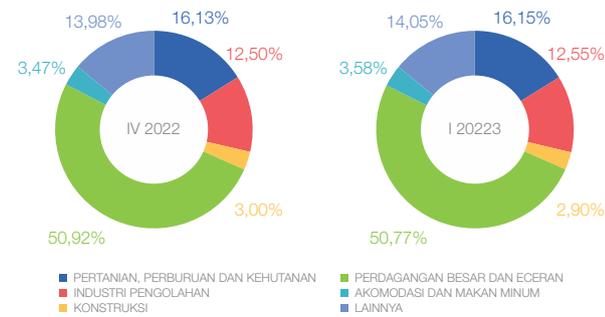
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grifik 4.34 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM Perbankan di Jawa Timur



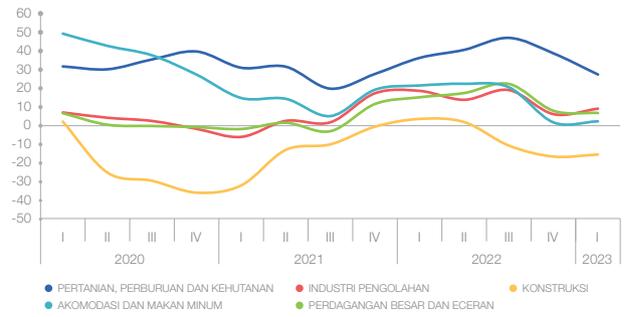
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grifik 4.35 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral



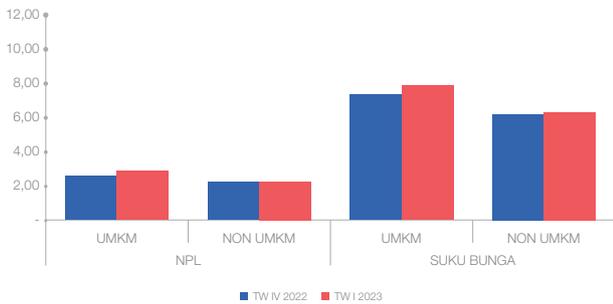
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grifik 4.36 Pertumbuhan Kredit UMKM Sektoral



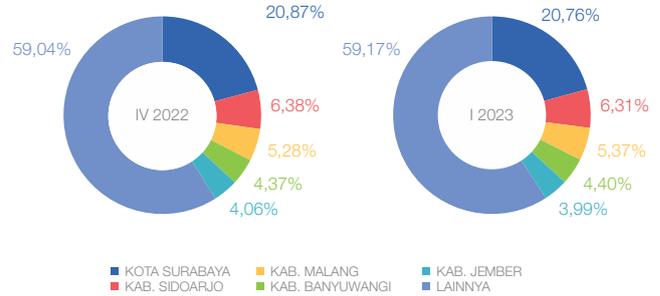
Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grifik 4.37 Perkembangan NPL dan Suku Bunga Tertimbang Kredit UMKM



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

Grifik 4.38 Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Terbesar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

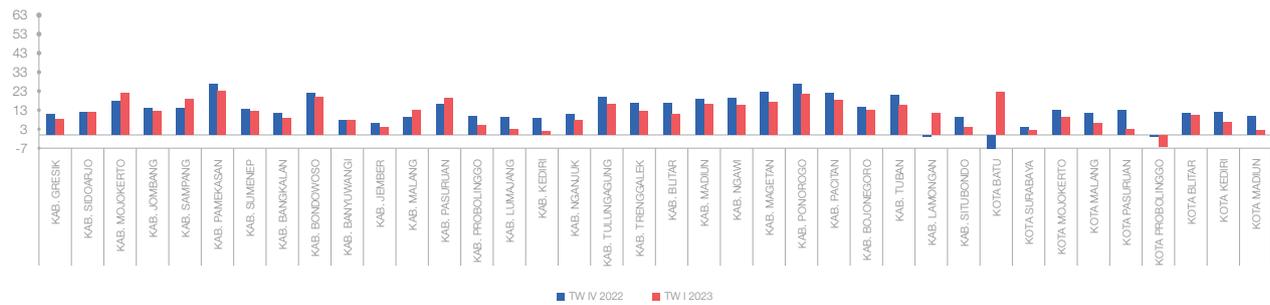
Rasio NPL kredit UMKM masih terjaga di bawah *threshold*, namun mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 4,01%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,60% (Grifik 4.37). Peningkatan NPL sejalan dengan perlambatan kredit dan kenaikan suku bunga pada periode berjalan. Di sisi lain, masih terjeganya risiko kredit UMKM tidak terlepas dari dukungan perpanjangan kebijakan restrukturisasi UMKM yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19.

Suku bunga tertimbang untuk kredit UMKM terpantau lebih tinggi dibandingkan untuk non UMKM. Kondisi tersebut mengindikasikan potensi risiko kredit UMKM yang lebih tinggi. Apabila dibandingkan

dengan triwulan IV 2022, suku bunga tertimbang UMKM dan non UMKM pada triwulan laporan terpantau meningkat seiring dengan masih tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia (Grifik 4.37).

Secara spasial, kredit UMKM terbesar masih terkonsentrasi di Kota Surabaya. Penyaluran kredit terutama dilakukan di 3 kabupaten/kota, yaitu Kota Surabaya dengan pangsa 20,76%, Kabupaten Sidoarjo dengan pangsa 6,13%, dan Kabupaten Malang dengan pangsa 5,37% (Grifik 4.38). Tingginya penyaluran kredit pada daerah tersebut sejalan dengan banyaknya jumlah UMKM di Ibukota dan pusat pariwisata Jawa Timur yang berlokasi di 3 daerah tersebut. Adapun kinerja penyaluran kredit UMKM di seluruh kabupaten/kota mayoritas mengalami perlambatan (Grifik 4.39).

Grafik 4.39 Pertumbuhan Penyaluran Kredit UMKM Spasial Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Sumber : Laporan Bank Umum (diolah)

## 4.5.2. Perkembangan Program Akses Keuangan dan UMKM

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Timur secara konsisten terus mendorong peningkatan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas serta peningkatan akses keuangan UMKM untuk mendukung optimalisasi pembiayaan daerah dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Beberapa program yang telah dilakukan adalah:

### 1. Pengembangan Kluster *Volatile Food*

#### Pembentukan Kluster Baru

KPw BI Provinsi Jawa Timur aktif melakukan kajian pembentukan kluster ketahanan pangan baru di Jawa Timur sejak tahun 2022 khususnya untuk komoditas penyumbang inflasi. Pelaksanaan kajian ini bertujuan untuk menentukan target pengembangan kluster baru dalam rangka peningkatan produksi dan stabilisasi pasokan di daerah sentra. Kajian telah dilakukan pada tahun 2022 di daerah sentra yang memiliki modal sosial dan akseptansi terhadap teknologi yang baik untuk komoditas cabai, bawang merah dan ayam ras pedaging. Rekomendasi dari kajian kluster ini ditindaklanjuti dengan pembukaan 2 (dua) kluster baru komoditas ketahanan pangan (bawang merah dan cabai) yaitu Kluster Bawang Merah Pamekasan yang melibatkan 2 (dua) poktan yaitu Poktan Padi Mas dan Poktan Andalan, serta Kluster Cabai Rawit Tuban yang juga melibatkan 2 (dua) poktan yaitu Poktan Harum Tani dan Poktan Ngandong Jaya II. Di tahun 2023, kajian kluster kembali dilakukan bekerjasama dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB khusus untuk 5 (lima) komoditas unggul yaitu padi, jagung, kedelai, sapi potong dan ayam ras petelur sebagai dasar pembentukan kluster baru di tahun 2024.

#### Kluster Padi Organik Kabupaten Mojokerto

Kpw BI Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan program *digital farming* hulu dan hilir bagi kluster padi organik Kabupaten Mojokerto. Di sisi hulu, untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi, diimplementasikan program *digital farming* menggunakan teknologi *drone* untuk menggantikan

peran tenaga kerja pemupukan di lahan seluas 1 ha sehingga mampu meningkatkan efisiensi biaya produksi sebesar 8%. Sedangkan dari sisi hilir, saat ini kluster padi organik Brenjonk telah memiliki akun *di e-commerce* untuk memperluas akses pemasaran *online*.

#### Kluster Kopi Wonosalam Kabupaten Jombang

Selain penguatan di sisi kelembagaan yang telah berbentuk koperasi. Pada tahun 2023, pengembangan kluster berfokus pada pembenihan kopi yang bertujuan agar kluster dapat memproduksi bibit kopi secara mandiri dan peningkatan kapasitas kluster dalam melakukan manajemen organisasi melalui koperasi bekerjasama dengan Nabata Consulting.

#### Kluster Jagung Madura

Kluster jagung Madura telah berhasil diimplementasikan di seluruh wilayah Madura dengan pencapaian peningkatan produktivitas jagung sebesar 16,4% dari yang sebelumnya 6,1 ton/ha menjadi 7,1 ton/ha. Pengembangan difokuskan pada teknik budidaya jagung modern yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas jagung secara merata di seluruh wilayah Madura. Dengan demikian harapannya petani dapat memenuhi kebutuhan jagung di Jawa Timur melalui swasembada pangan jagung.

#### Kluster Sapi Kabupaten Tuban

Kluster Sapi Tuban telah berhasil menerapkan teknik budidaya sapi potong yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Untuk mendukung pertanian yang maju dan mandiri, pengembangan kluster diarahkan kepada implementasi *integrated farming* melalui pengolahan pakan dan pupuk secara mandiri oleh petani dan peternak. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas sapi potong akibat imbas PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), KPw BI Prov. Jawa Timur juga bekerjasama dengan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dalam meningkatkan kesuburan reproduksi ternak.

## 2. *Capacity Building* dan *Business Coaching*

### a) **Onboarding UMKM**

Pada tahun 2023, KPw BI Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan onboarding tidak hanya bagi UMKM potensial, tetapi juga UMKM unggulan dalam rangka mendukung UMKM bertransformasi digital.

### b) **Kegiatan *Bootcamp* Wastra**

Kegiatan *Bootcamp* Wastra bekerjasama dengan desainer nasional dan melibatkan UMKM Fesyen Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan pelaku industri fesyen yang kreatif, inovatif, bernilai jual tinggi, serta menguatkan eksistensi industri fesyen di Jawa Timur. Sebagai tindak lanjut program tahun 2022, KPw BI Prov. Jawa Timur menginisiasi program BI Fashionpreneur 2023 sebagai ruang pengembangan pelaku industri fesyen di Jawa Timur yang diawali dengan pelaksanaan *capacity building* dan *competition* desain wastra Nusantara. Hasil karya peserta yang telah lolos kurasi nasional dan ditampilkan dalam kegiatan *Muslim Fashion Festival* (MUFFEST) 2023. Melalui kegiatan ini, UMKM diajarkan untuk mengimplementasikan inovasi dan diversifikasi produk.

## 3. Pelatihan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK)

Kpw BI Provinsi Jawa Timur melaksanakan pelatihan dan sosialisasi SIAPIK kepada UMKM mitra di Kab. Mojokerto. Kegiatan Pelatihan SIAPIK ini bertujuan agar UMKM dapat melakukan pencatatan keuangan sesuai standar lembaga keuangan formal. Melalui pencatatan keuangan yang sesuai standar, UMKM diharapkan mampu mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, KPw BI Prov. Jawa Timur juga bekerjasama dengan LPM UNAIR dalam melaksanakan survei UMKM potensial dibiayai sehingga dapat mengakselerasi realisasi kredit pembiayaan bagi UMKM.

## 4. Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

KPwBI Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan OPOP Jawa Timur melaksanakan bimbingan teknis terkait sertifikasi halal kepada ±300 UMKM dan/atau pelaku usaha pesantren. Hingga Maret 2023, 195 UMKM telah tersertifikasi halal dan 100 UMKM lainnya dalam proses pengurusan sertifikasi halal dengan didampingi oleh Lembaga Penyelia halal (LPH) LPPOM MUI dan Sucofindo. KPw BI Provinsi Jawa Timur melalui program pengembangan UMKM akan terus melakukan transformasi melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM agar dapat “naik kelas” melalui akses pembiayaan, digitalisasi, dan inklusi keuangan.





BAB V

# Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



## 5.1. KONDISI UMUM

Pada triwulan I 2023, transaksi pembayaran baik tunai maupun non tunai mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh normalisasi aktivitas ekonomi pasca HBKN Natal dan Tahun Baru serta periode libur sekolah pada akhir tahun. Transaksi tunai di Jawa Timur pada triwulan I 2023 mencatatkan *net-inflow* yang terkonfirmasi dengan kenaikan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) RT pada triwulan laporan. Aktivitas belanja pemerintah di triwulan I 2023 juga lebih rendah jika dibandingkan triwulan IV 2022 dimana pada periode akhir tahun pemerintah cenderung mengoptimalkan realisasi belanja pada tahun anggaran tersebut. Demikian pula dengan transaksi non-tunai SKNBI, RTGS, APMK, dan Uang Elektronik yang juga mengalami penurunan transaksi. Adapun penurunan instrumen pembayaran ritel melalui APMK dan Uang Elektronik sejalan dengan bertambahnya instrumen pembayaran lainnya, baik melalui QRIS maupun BI-FAST, yang menawarkan kemudahan transaksi lintas operator.

**Transaksi tunai di Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.** Pada triwulan I 2023, KPw Jawa Timur mencatatkan *net-inflow* sebesar Rp 9,82 triliun, setelah sebelumnya mengalami *net-outflow* pada triwulan IV 2022 sebesar Rp8,78 triliun. Peningkatan *inflow* dan penurunan *outflow* sebagaimana pola historisnya dipengaruhi oleh penurunan konsumsi masyarakat pasca HBKN Natal dan Tahun Baru 2023, serta periode libur sekolah pada akhir tahun. Masyarakat cenderung untuk menyimpan uangnya di bank, yang terkonfirmasi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) RT yang mengalami peningkatan dari 0,92% (yoy) menjadi 1,92% (yoy) pada triwulan laporan, terutama pada komponen Giro yang mengalami peningkatan dari 4,26% (yoy) menjadi 6,54%(yoy) pada triwulan laporan, serta komponen Deposito yang mengalami peningkatan dari -2,23% (yoy) menjadi 4,66% (yoy) pada triwulan laporan.

**Transaksi nontunai melalui Bank Indonesia pada triwulan I 2023 tercatat menurun.** Transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada triwulan I 2023 tercatat menurun masing-masing sebesar 13,47% (qtq) dan 12,01% (qtq) dipengaruhi oleh penurunan kebutuhan untuk bertransaksi dalam jumlah besar. Sementara itu, transaksi nontunai retail juga terpantau menurun. Hal tersebut tercermin dari penurunan nominal transaksi melalui APMK dan Uang Elektronik yang masing-masing turun sebesar 1,81% (qtq) dan 13,20% (qtq). Kondisi ini sejalan dengan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat pasca peningkatan aktivitas ekonomi di periode Natal dan Tahun Baru.

**Upaya perluasan digitalisasi melalui kanal pembayaran QRIS terus berlanjut.** Jumlah merchant QRIS pada triwulan I 2023 di Jawa Timur telah mencapai 2,82 juta, diiringi oleh peningkatan jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 4,53 juta. Peningkatan tersebut mendorong nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang tercatat meningkat 16,85% (qtq) pada triwulan I 2023.

## 5.2. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI JAWA TIMUR

### 5.2.1. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran tunai di Bank Indonesia dipengaruhi oleh aliran uang masuk atau keluar sistem perbankan, serta pengelolaan uang rupiah termasuk kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dan uang palsu. Di Jawa Timur, pengelolaan uang Rupiah dilaksanakan di empat (4) Kantor Perwakilan Bank Indonesia.<sup>60</sup>

#### 5.2.1.1. Aliran Uang Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Pada triwulan I 2023, aliran uang di Jawa Timur tercatat dalam posisi *net-inflow*. Jawa Timur mengalami *net-inflow* sebesar Rp 9,82 triliun, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami *net-outflow* sebesar Rp8,78 triliun (Grafik 5.1). Hal ini merupakan dampak dari penurunan kebutuhan uang tunai di masyarakat di tengah kenaikan aliran uang masuk ke perbankan. Bank Indonesia mencatat nominal *outflow* menurun sebesar 40,05% (qtq) dari Rp24,83 triliun menjadi Rp14,89 triliun, sementara nominal *inflow* tercatat meningkat sebesar 53,91% (qtq) dari Rp16,05 triliun menjadi Rp24,70 triliun. Penurunan *outflow* sejalan dengan pola historis yang didorong oleh penurunan konsumsi masyarakat pasca HBKN Natal, Tahun Baru 2023, dan periode libur sekolah akhir tahun. Realisasi belanja Pemerintah pada triwulan I 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan IV 2022. Pada triwulan I 2023, nominal realisasi APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp2,78 triliun atau menurun sebesar 78,28% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp12,81 triliun. Lebih lanjut, peningkatan nominal *inflow* sejalan dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga (RT) yang mengalami peningkatan dari 0,92% (yoy) menjadi 1,92% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan terutama pada komponen Giro yang meningkat dari 4,26% (yoy) menjadi 6,54%(yoy) pada triwulan laporan, serta komponen Deposito yang meningkat dari -2,23% (yoy) menjadi 4,66% (yoy) pada triwulan laporan. Secara spasial, *net inflow* tertinggi pada triwulan I 2023 terjadi di wilayah kerja KPw BI Provinsi Jawa Timur sebesar Rp4,39 triliun, disusul oleh KPw BI Malang sebesar Rp2,25 triliun, KPw BI Kediri sebesar Rp1,89 triliun, dan KPw BI Jember sebesar Rp1,29 triliun (Tabel 5.1).

60. Empat (4) KPw BI di Jawa Timur adalah KPw BI Provinsi Jawa Timur, KPw BI Malang, KPw BI Kediri dan KPw BI Jember dengan cakupan wilayah kerja dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 5.1 Perkembangan *Inflow* – *Outflow* Jawa Timur (Rp Miliar)

KETERANGAN	2021				2022				2023
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
SURABAYA									
<i>OUTFLOW</i>	5.143	11.586	4.848	10.640	6.149	11.700	7.430	12.342	7.031
<i>INFLOW</i>	11.637	10.003	4.914	5.541	8.636	11.724	7.827	7.288	11.419
<i>NETFLOW</i>	6.494	(1.583)	65	(5.099)	2.488	24	397	(5.055)	4.388
MALANG									
<i>OUTFLOW</i>	1.528	4.558	2.791	3.849	2.166	3.842	2.356	4.354	2.406
<i>INFLOW</i>	5.305	4.672	2.862	3.206	4.162	4.554	3.230	3.071	4.652
<i>NETFLOW</i>	3.776	114	71	(643)	1.997	712	874	(1.283)	2.247
KEDIRI									
<i>OUTFLOW</i>	2.842	6.007	2.811	2.838	2.747	5.367	3.943	4.948	3.160
<i>INFLOW</i>	5.903	4.345	2.160	1.559	3.605	4.682	3.477	3.126	5.052
<i>NETFLOW</i>	3.061	(1.662)	(650)	(1.279)	858	(684)	(466)	(1.821)	1.893
JEMBER									
<i>OUTFLOW</i>	1.674	3.263	2.628	2.139	1.561	3.005	2.236	3.190	2.290
<i>INFLOW</i>	4.688	3.807	2.749	2.210	3.512	3.743	2.360	2.567	3.582
<i>NETFLOW</i>	3.014	544	120	71	1.951	738	124	(623)	1.292
JAWA TIMUR									
<i>OUTFLOW</i>	11.188	25.414	13.078	19.466	12.622	23.914	15.965	24.833	14.886
<i>INFLOW</i>	27.532	22.827	12.685	12.515	19.915	24.704	16.894	16.052	24.706
<i>NETFLOW</i>	16.344	(2.587)	(393)	(6.951)	7.293	790	929	(8.781)	9.820
Konsumsi Swasta (QTQ)	(1,72)	2,39	(1,21)	5,01	(0,87)	3,78	(0,78)	2,92	-
Konsumsi Pemerintah (QTQ)	(32,78)	29,80	5,38	9,87	(30,91)	19,95	9,76	11,47	-

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

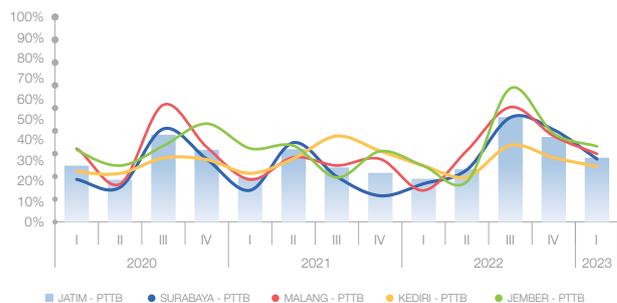
### 5.2.1.2. Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

Dalam rangka menjaga kualitas uang yang diedarkan, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) secara rutin. Pada triwulan I 2023, Bank Indonesia melakukan pemusnahan UTLE sebesar Rp7,74 triliun atau meningkat 16,34% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar Rp6,65 triliun. Secara spasial, peningkatan jumlah UTLE yang dimusnahkan terjadi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Jawa Timur dengan peningkatan tertinggi di KPw BI Kediri, disusul KPw BI Malang, KPw BI Jember, dan KPw BI Provinsi Jawa Timur yang masing-masing naik sebesar 39,51% (qtq), 20,09% (qtq), 19,31% (qtq) dan 6,93% (qtq).

**Rasio UTLE terhadap *inflow* menurun.** Pada triwulan I 2023, rasio UTLE terhadap *inflow* tercatat sebesar 31,32%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 41,43% (Grafik 5.1). Penurunan rasio UTLE terhadap *inflow* terutama dipengaruhi oleh penurunan nominal *inflow* uang tidak layak edar ke Bank Indonesia, dan di sisi lain total nominal *inflow* mengalami peningkatan, sehingga rasio UTLE menurun dibanding triwulan sebelumnya.

Selain melalui kegiatan pemusnahan UTLE, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga kualitas uang yang beredar di

masyarakat melalui layanan penukaran uang. Pada triwulan I 2023, total layanan penukaran di Jawa Timur mencapai Rp116,68 miliar atau meningkat sebesar 5,70% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp110,39 miliar. Lebih lanjut, untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam menjaga kelayakan uang Rupiah, Bank Indonesia secara kontinu memberikan Edukasi Cinta, Bangga dan Paham (CBP) Rupiah, salah satunya melalui kegiatan CBP Goes to Komunitas PKK dan Millennial Surabaya.

Grafik 5.1 Rasio UTLE terhadap *Inflow* Jawa Timur

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

### 5.2.1.3. Temuan Uang Palsu

Jumlah bilyet uang palsu mengalami penurunan pada triwulan I 2023. Berdasarkan laporan perbankan dan laporan masyarakat, penemuan uang palsu di wilayah Jawa Timur pada triwulan I 2023 adalah sebanyak 4.849 lembar, menurun 20,74% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 6.118 lembar (Grafik 5.2).

Secara spasial, temuan uang palsu terbanyak terjadi di KPw BI Jawa Timur sebanyak 2.400 lembar (49,49% dari total temuan), diikuti oleh KPw BI Malang sebanyak 1.110 lembar (22,89% dari total temuan), KPw BI Kediri sebanyak 957 lembar (19,74% dari total temuan), dan KPw BI Jember sebanyak 382 lembar (7,88% dari total temuan) (Grafik 5.3). Adapun dalam rangka meningkatkan layanan deteksi uang palsu, KPw BI di wilayah Jawa Timur telah dilengkapi dengan BI-Counterfit Analysis Center (BI-CAC).

Berdasarkan proporsinya, temuan uang palsu pada triwulan I 2023 didominasi oleh Uang Pecahan Besar (UPB), yaitu pecahan Rp100.000 (64,23%) dan pecahan Rp50.000 (25,66) (Grafik 5.4). Sampai dengan saat ini, KPw BI di wilayah Jawa Timur secara rutin melaksanakan edukasi dan sosialisasi mengenai pengenalan ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) kepada masyarakat yang dikemas dalam agenda sosialisasi Cinta Bangsa Paham (CBP) Rupiah secara rutin agar mampu mengenali ciri-ciri uang yang diduga palsu dan dapat dilaporkan kepada Kantor Bank Indonesia terdekat atau kepolisian untuk pengecekan lebih lanjut.

Grafik 5.2 Statistik Uang Palsu yang Ditemukan



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

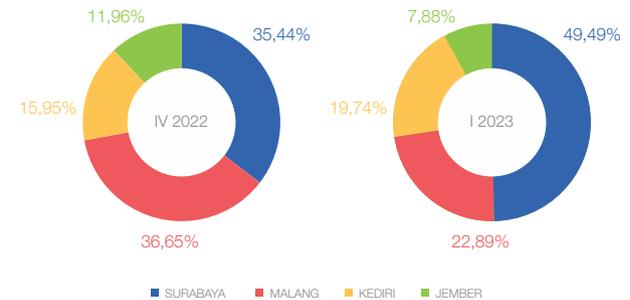
### 5.2.2. Transaksi Sistem Pembayaran

#### 5.2.2.1 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada triwulan I 2023, nominal kliring di wilayah Jawa Timur mengalami penurunan. Nominal kliring di Jawa Timur pada triwulan I 2023 mencapai Rp56,79 triliun, menurun 13,47% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 seiring dengan normalisasi aktivitas ekonomi masyarakat pasca tumbuh di akhir tahun (Grafik 5.5). Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, nominal kliring pada triwulan I 2023 tercatat menurun sebesar 17,69% (yoy). Penurunan ini sejalan dengan optimalisasi penerapan Bank Indonesia *Fast Payment* (BI-FAST) sejak 21 Desember 2021 yang menjadi pilihan masyarakat dengan biaya per transaksi lebih murah serta bersifat real time dibandingkan dengan kliring. Lebih lanjut, secara spasial mayoritas transaksi kliring dilaksanakan di Kota Surabaya dan sekitarnya dengan nominal sebesar Rp44,46 triliun atau sebesar 78,29% dari total nominal kliring di Jawa Timur (Grafik 5.6).

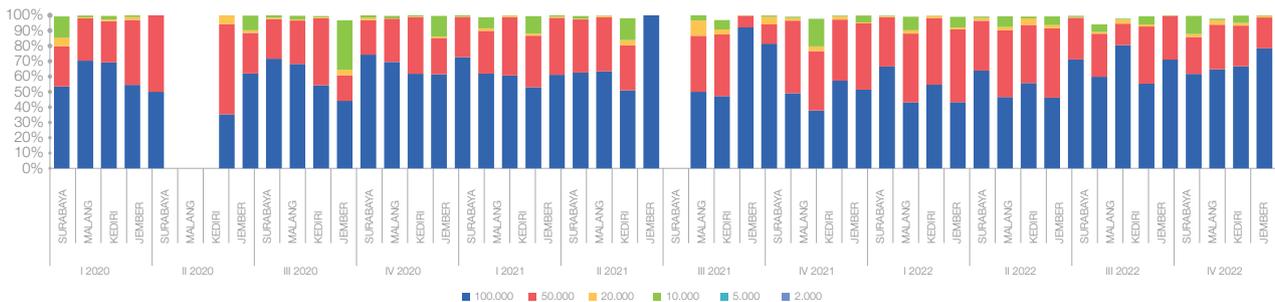
Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat kebijakan sistem pembayaran melalui dilanjutkannya masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah dari yang semula 31 Desember 2022 menjadi 30 Juni 2023<sup>61</sup>. Penyesuaian ini juga merupakan upaya Bank Indonesia untuk memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas. Lebih lanjut, Bank

Grafik 5.3 Pangsa Temuan Uang Palsu berdasarkan Wilayah Kerja Bank Indonesia



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

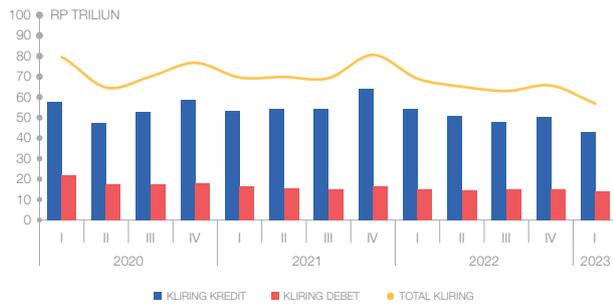
Grafik 5.4 Temuan Uang Palsu Per Pecahan



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

61. Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21-22 Desember 2022

Grafik 5.5 Perkembangan Kliring Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

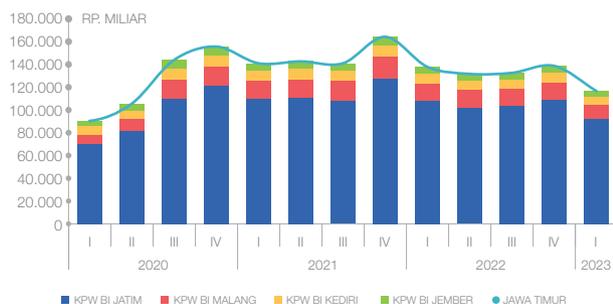
Indonesia akan terus memperluas secara bertahap layanan BI-FAST. Hingga Maret 2023, total peserta BI-FAST telah mencapai 122 peserta dan telah mewakili 94% dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional.

### 5.2.2.2 Transaksi Melalui Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Pada triwulan I 2023, nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Timur mengalami penurunan. Nominal transaksi BI-RTGS di wilayah Jawa Timur sebesar Rp392,29 triliun, menurun 12,01% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar Rp445,83 triliun (Grafik 5.7). Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan I 2023 yang sebesar Rp392,29 triliun tercatat menurun 29,97% (yoy) jika dibandingkan nominal transaksi BI-RTGS pada triwulan I 2022 sebesar Rp560,13 triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari implementasi BI-FAST yang menjadi pilihan alternatif untuk transaksi dengan nominal maksimal mencapai Rp250 juta, mengingat biaya per transaksi pada layanan BI-FAST lebih murah dan bersifat *real time*. Lebih lanjut, secara spasial nominal transaksi RTGS Nasabah di Kota Surabaya dan sekitarnya yang merupakan pusat bisnis dan Pemerintahan Jawa Timur masih sangat mendominasi dengan pangsa 89,23% (Grafik 5.8).

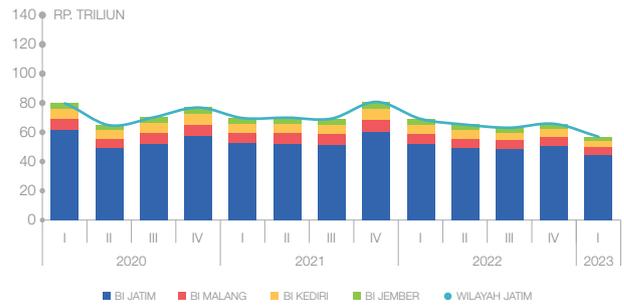
Volume transaksi RTGS pada triwulan I 2023 di wilayah Jawa Timur tercatat sebanyak 116.578 transaksi, menurun 15,95% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 dengan 138.703 transaksi.

Grafik 5.7 Perkembangan RTGS Provinsi Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.6 Transaksi Kliring Spasial Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia

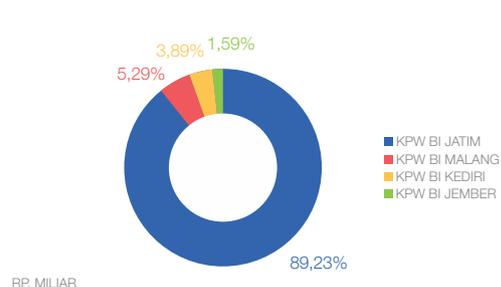
Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, volume RTGS tercatat menurun 15,42% (yoy) sejalan dengan penurunan nominal secara tahunan.

### 5.2.2.3 Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Secara agregat, transaksi melalui APMK (ATM/Debit dan kartu kredit) pada triwulan I 2023 tercatat menurun (Grafik 5.9). Pada triwulan I 2023, total nominal transaksi melalui APMK tercatat sebesar Rp243,18 triliun atau menurun 1,81% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp247,65 triliun. Secara nominal, transaksi melalui APMK didominasi oleh kartu ATM/Debit dengan transaksi sebesar Rp235,09 triliun atau mencapai 96,67% dari total transaksi melalui APMK. Sementara itu, transaksi melalui Kartu Kredit tercatat sebesar Rp8,09 triliun atau hanya 3,33% dari total transaksi. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, transaksi melalui APMK secara agregat juga tercatat menurun sebesar 1,20% (yoy).

Jumlah instrumen pembayaran non tunai di Jawa Timur tercatat meningkat (Grafik 5.10). Jumlah Kartu ATM/Debit yang aktif di masyarakat tercatat sejumlah 33,63 juta kartu atau menurun 5,83% (qtq) secara triwulanan dan menurun 3,16% (yoy) secara tahunan. Sementara itu, jumlah kartu kredit meningkat secara triwulanan sebesar 10,48% (qtq) dari semula sejumlah 1,83 juta kartu menjadi 2,02 juta kartu. Adapun, secara tahunan jumlah kartu kredit juga tercatat meningkat 7,06% (yoy). Lebih lanjut, peningkatan jumlah

Grafik 5.8 Perkembangan RTGS Spasial



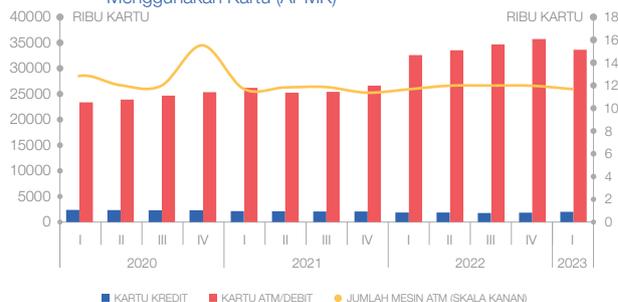
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Perkembangan Transaksi Melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



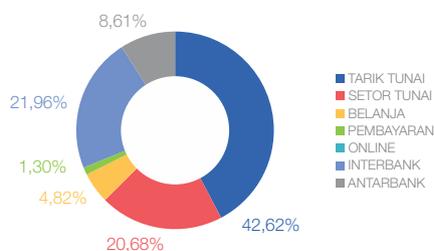
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.10 Perkembangan Jumlah Instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)



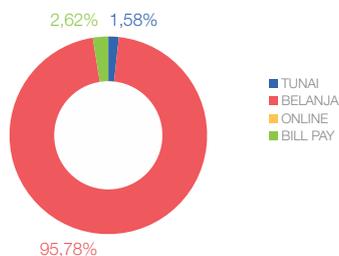
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.11 Penggunaan Kartu ATM/Debit



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.12 Penggunaan Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

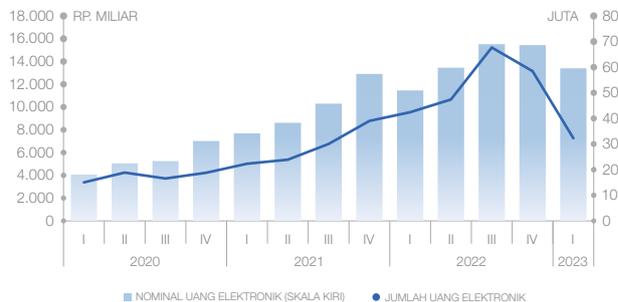
kartu APMK didukung dengan ketersediaan mesin ATM yang memadai. Sampai dengan triwulan I 2023, jumlah mesin ATM di Jawa Timur mencapai 11.669 mesin atau jika dibandingkan dengan luas wilayah memiliki rasio 1:4,12 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan penggunaannya, mayoritas kartu ATM/Debit di Jawa Timur digunakan untuk penarikan tunai melalui ATM. Pada triwulan I 2023, penarikan tunai yang dilakukan mencapai Rp100,20 triliun atau sebesar 42,62% dari total transaksi ATM/Debit (Grafik 5.11). Fenomena ini mengindikasikan bahwa utilisasi kartu ATM/Debit belum dilakukan secara optimal atau hanya dilakukan sebagai perantara untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, penggunaan kartu kredit di Jawa Timur mayoritas sudah dimanfaatkan untuk belanja, yaitu mencapai 95,78% dari total transaksi Kartu Kredit atau sebesar Rp7,75 triliun (Grafik 5.12).

#### 5.2.2.4 Transaksi Uang Elektronik (UE)

Pada triwulan I 2023, transaksi UE tercatat menurun. Nominal transaksi UE pada triwulan I 2023 sebesar Rp13,40 triliun atau menurun 13,20% (qtq) dari capaian triwulan sebelumnya yang sebesar Rp15,43 triliun. Penurunan ini seiring dengan penurunan jumlah UE yang dimiliki masyarakat. Jumlah UE pada triwulan I 2023 tercatat sejumlah 32,27 juta, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sejumlah 58,46 juta. Meskipun demikian, nominal UE pada triwulan I 2023 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Grafik 5.13 Transaksi dan Jumlah Uang Elektronik



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

### 5.3. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

#### 5.3.1. Penanganan Uang Palsu

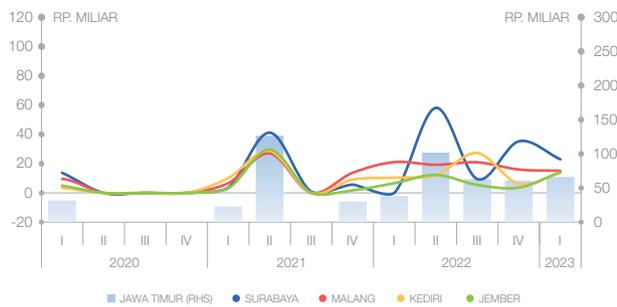
KPwBI Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan instansi terkait terus melakukan berbagai upaya penanganan, langkah preventif, dan represif dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Selama triwulan I 2023, tindakan preventif terus dilakukan dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah, baik secara langsung maupun melalui iklan dan publikasi di media massa. Upaya preventif dilakukan melalui peningkatan kerja sama dengan instansi terkait di Jawa Timur. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui koordinasi

dengan pihak Kepolisian untuk menangkap dan menindak pembuat maupun pengedar uang palsu. Kerja sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur telah dituangkan dalam Pokok-Pokok Kesepahaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, serta Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah.

### 5.3.2. Penyediaan Uang Rupiah

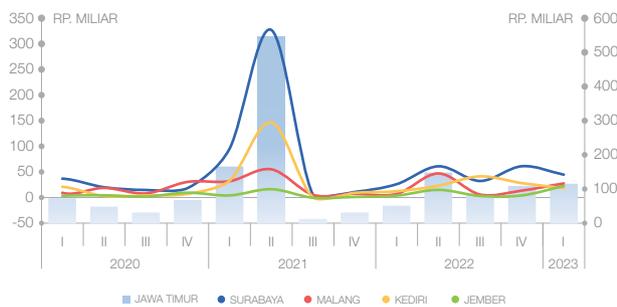
Dalam rangka menjamin ketersediaan ULE di masyarakat, KPwBI Provinsi Jawa Timur terus mengintensifkan mekanisme penyediaan Uang Rupiah melalui layanan kas keliling, penukaran, dan kas titipan. Pada triwulan I 2023, kegiatan kas keliling di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari Rp60,87 miliar pada triwulan IV 2022 menjadi Rp66,14 miliar atau naik 8,66% (qtq) (Grafik 5.14). Sementara itu, kegiatan penukaran di Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan pada triwulan I 2023, yaitu dari semula Rp110,39 miliar pada triwulan IV 2022 menjadi Rp116,68 miliar atau naik 5,70% (qtq). Peningkatan layanan penukaran berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah dalam pecahan tertentu menjelang HBKN Idul Fitri 2023 (Grafik 5.15). Secara spasial, peningkatan kegiatan penukaran yang signifikan terjadi di KPw BI Malang, diikuti oleh KPw BI Jember, sedangkan kegiatan penukaran di KPw BI Provinsi Jawa Timur dan KPw BI Kediri mengalami penurunan.

Grafik 5.14 Nominal Transaksi Kas Keliling



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.15 Nominal Transaksi Penukaran



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.16 Aktivitas Kas Titipan Jawa Timur



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Pada triwulan I 2023, jumlah lokasi kas titipan di Provinsi Jawa Timur sebanyak enam (6) kas titipan berada di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan kas titipan dilakukan melalui kerja sama antara Bank Indonesia dengan perbankan setempat.

Jumlah nominal *dropping* ULE ke kas titipan pada triwulan I 2023 mencapai Rp473,11 miliar, meningkat sebesar 102,30% (qtq) dibandingkan dengan triwulan IV 2022 (Grafik 5.16). Peningkatan tersebut mengindikasikan cukup tingginya penggunaan uang kartal pada periode laporan. Ke depan, KPw BI Provinsi Jawa Timur akan senantiasa meningkatkan kerja sama dengan perbankan maupun dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) untuk memberikan layanan perkasian pada masyarakat.

### 5.3.3. Pengembangan Layanan Keuangan Nontunai

Dalam rangka merespons perubahan preferensi masyarakat ke arah digital, Bank Indonesia terus melakukan upaya perluasan SP nontunai berbasis QRIS yang bersifat *nirsentuh/contactless*. Pada bulan Agustus 2019, Bank Indonesia telah meluncurkan standar *Quick Response* (QR) Code sebagai metode pembayaran nirsentuh melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran, serta untuk memperluas akseptasi pembayaran nasional secara lebih efisien, mengingat dengan satu QR Code, penyedia barang dan jasa (*merchant*) sudah dapat menerima pembayaran dari berbagai sumber. Penggunaan QRIS di Jawa Timur terus meningkat, terutama setelah perubahan pola transaksi masyarakat selama masa pandemi COVID-19 yang lebih memilih bertransaksi secara non tunai atau *less-contact*.

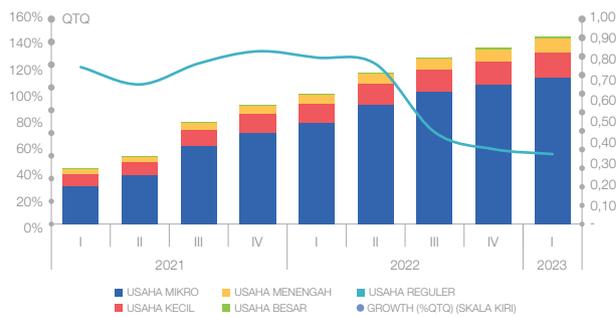
Jumlah *merchant* QRIS di Jawa Timur terus meningkat. Pada triwulan I 2023 (posisi 10 Maret 2023), jumlah *merchant* QRIS di Jawa Timur meningkat 8,53% (qtq) dari semula sebanyak 2,60 juta *merchant* pada triwulan IV 2022 menjadi 2,82 juta *merchant* (Grafik 5.17). Capaian tersebut berhasil membawa Jawa Timur sebagai

Provinsi dengan jumlah merchant QRIS terbesar ke-3 di tingkat nasional. Namun demikian, dari segi skala usaha, pelaku usaha yang menyediakan QRIS di Jawa Timur masih didominasi oleh Usaha Mikro (pangsa 67,55%) dan Usaha Kecil (pangsa 25,35%). Kondisi ini diindikasikan tidak terlepas dari limit per transaksi melalui kanal pembayaran QRIS yang hanya Rp10 juta. Lebih lanjut, mayoritas merchant QRIS di Jawa Timur masih terkonsentrasi di wilayah Kota Surabaya (pangsa 31,95%), Kota Malang (pangsa 11,90%) dan Kabupaten Sidoarjo (8,33%).

**Jumlah transaksi melalui kanal pembayaran QRIS meningkat seiring peningkatan jumlah pengguna/ user QRIS<sup>62</sup>.** Sampai dengan Maret 2023, jumlah pengguna QRIS di Jawa Timur tercatat sejumlah 4,53 juta pengguna atau setara 13,99% dari total pengguna QRIS secara nasional. Peningkatan jumlah pengguna juga diikuti oleh peningkatan nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS di Jawa Timur. Nominal transaksi melalui kanal pembayaran QRIS pada triwulan I 2023 tercatat sebesar Rp2,54 triliun atau meningkat 16,85% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp2,17 triliun. Adapun, volume transaksi QRIS mengalami penurunan 12,66% (qtq) dari semula sebanyak 26,59 juta transaksi pada triwulan IV 2022 menjadi 23,23 juta transaksi pada triwulan laporan (Grafik 5.19). Lebih lanjut, rata-rata transaksi per pengguna pada triwulan I 2023 tercatat meningkat, yaitu sebesar Rp109.414, lebih tinggi dari rata-rata transaksi per pengguna pada triwulan sebelumnya sebesar Rp81.785.

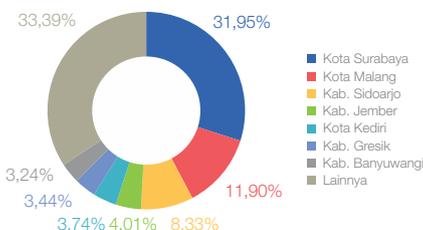
Upaya perluasan implementasi QRIS di Jawa Timur juga telah dilakukan di berbagai sektor, baik dari segi penerimaan Pemerintah maupun sektor ritel. Sebagai upaya akselerasi penerimaan pemerintah, QRIS telah diimplementasikan untuk pembayaran Uji Kelayakan Kendaraan Niaga (KIR) dan Pajak Daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, implementasi QRIS juga dilakukan melalui kerja sama dengan komunitas lokal, salah satunya pada komunitas Golf yang meliputi pembayaran *green fee* hingga pembayaran kepada caddy. Lebih lanjut, beberapa implementasi QRIS lainnya yang menjadi terobosan adalah penerapan QRIS pada Becak Wisata Tuban dan Kampung Inggris Kediri, serta penerapan QRIS pada daerah 3T (terdepan, terluar, terpencil) di Pulau Bawean. QRIS juga bisa digunakan pada lingkungan Aparat Penegak Hukum seperti penggunaan QRIS pada tilang manual sebagai komplemen *e-tilang* yang sudah mulai diterapkan. Kepolisian juga tidak membutuhkan peralatan khusus, hanya kode QRIS pembayaran saja, sehingga selain mudah diterapkan dalam penerapan tilang manual, proses penghimpunan dana juga menjadi lebih terbuka dan transparan. Ke depan, pembayaran transaksi *e-commerce* dengan cara COD yang biasanya dilakukan secara tunai, dapat pula dilakukan secara non-tunai melalui scan QRIS. Upaya-upaya tersebut untuk mendorong transaksi non tunai semakin tinggi di masyarakat.

Grafik 5.17 Perkembangan Merchant QRIS per Skala Usaha



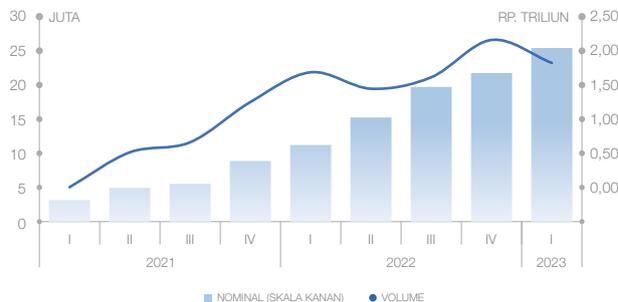
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.18 Pangsa Jumlah Merchant QRIS per Kabupaten/Kota



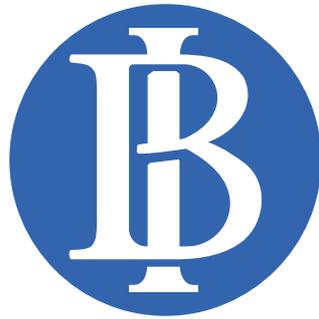
Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Grafik 5.19 Perkembangan Volume dan Nominal Transaksi QRIS



Sumber : Bank Indonesia (diolah)

62. Pengguna/user QRIS merupakan pihak yang memiliki aplikasi untuk mendukung pembayaran dengan cara memindai QRIS





BAB VI

# Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



## 6.1. GAMBARAN UMUM

**Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2023 menunjukkan perbaikan dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022.** Lebih tingginya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022 tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang diiringi dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode terkait. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh adanya musim tanam tanaman pangan dan terkonfirmasi oleh adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada sektor tersebut. Peningkatan tenaga kerja pertanian juga terlihat dari meningkatnya tenaga kerja informal, maupun tenaga kerja tidak terampil seperti meningkatnya pekerja bebas, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga/tidak dibayar, maupun tenaga kerja dengan pendidikan rendah. Namun demikian, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut relatif minim terjadi pada tenaga kerja formal dan terampil yang terindikasi dari menurunnya penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan dan konstruksi seiring dengan melambatnya investasi dan kinerja industri pengolahan. Minimnya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas tersebut menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat juga relatif terbatas.

**Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau lebih baik dibandingkan September 2021, kendati sedikit menurun dibandingkan Maret 2022.** Hal tersebut tercermin dari lebih rendahnya jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Perluasan pembukaan sektor ekonomi produktif pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang ditopang oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 mendorong semakin tingginya penyerapan tenaga kerja yang berimplikasi pada penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September. Meskipun demikian, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit menurun dibandingkan Maret 2022. Perlambatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang berdampak pada peningkatan tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi sehingga menekan pendapatan dan pengeluaran sekelompok masyarakat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022.

**Kesejahteraan masyarakat pedesaan yang direpresentasikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan pada triwulan I 2023, sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat menurun.** NTP meningkat menjadi 106,82 pada triwulan I 2023 dari 105,13 pada triwulan IV 2022. Hal tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan petani di sektor tanaman pangan dan tanaman

hortikultura sejalan dengan peningkatan harga komoditas beras, jagung, aneka cabai, dan aneka buah/sayuran. Sementara itu, kesejahteraan kelompok nelayan terpantau menurun pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan konsumsi dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan penerimaan nelayan, terutama untuk perikanan laut. Hal ini tercermin dari penurunan NTN menjadi 101,71 pada triwulan I 2023, dari 102,51 pada triwulan IV 2022.

## 6.2. KETENAGAKERJAAN

### 6.2.1. Perkembangan Ketenagakerjaan Jawa Timur

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2023 menurun dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022.** TPT Jawa Timur pada Februari 2023 tercatat sebesar 4,33%, lebih rendah dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 5,49% dan 4,81% (Tabel 6.1). Perkembangan tersebut ditopang oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendukung pencabutan kebijakan PPKM serta adanya momen HBKN (Imlek dan persiapan Ramadhan) yang mendorong semakin luasnya penciptaan lapangan kerja di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022. Kondisi cuaca yang mendukung produksi pertanian tanaman pangan juga menopang peningkatan kinerja ketenagakerjaan Jawa Timur pada triwulan I 2023.

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Timur pada Februari 2023 meningkat dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022.** TPAK Jawa Timur pada Februari 2023 tercatat sebesar 71,50%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022 yang masing-masing sebesar 71,23% dan 70,99% (Tabel 6.1). Secara umum, peningkatan TPAK mengindikasikan kenaikan angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas atau penduduk berusia produktif. Kenaikan TPAK menunjukkan peningkatan tenaga kerja produktif yang siap bekerja di Jawa Timur. Peningkatan TPAK di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Februari 2022 dan Agustus 2021 terutama didukung oleh lebih tingginya jumlah angkatan kerja di Jawa Timur yang bekerja penuh. Kondisi tersebut mengindikasikan perbaikan kinerja ekonomi Jawa Timur pada Februari 2023 diiringi dengan perbaikan di sektor ketenagakerjaan.

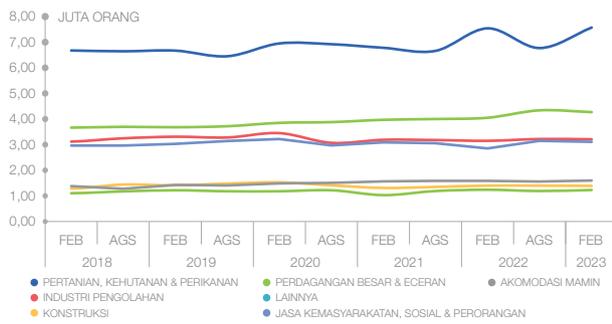
**Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) Jawa Timur menunjukkan tren perbaikan kecuali untuk tahun 2020 yang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.** *Dependency ratio* terpantau berada pada kisaran 43% - 44%, artinya setiap 100 orang penduduk usia kerja (16 - 64 tahun, dianggap produktif) di Jawa Timur mempunyai tanggungan sebanyak 43 - 44 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan tersebut mengindikasikan ukuran beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum dan/atau tidak produktif (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur (juta orang)

KEGIATAN	2019		2020		2021		2022		2023
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
Angkatan Kerja	21,59	21,50	22,52	22,27	22,19	22,32	23,04	22,87	23,42
Bekerja Penuh	14,00	14,42	14,46	13,23	13,07	13,27	13,68	14,31	14,54
Bekerja Paruh Waktu	5,33	5,14	6,16	5,85	6,17	6,20	6,52	6,06	6,44
Bekerja Setengah Pengangguran	1,44	1,09	1,09	1,89	1,80	1,57	1,73	1,25	1,43
Penganggur	0,83	0,84	0,81	1,30	1,15	1,28	1,11	1,26	1,01
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,02%	69,43%	71,37%	70,33%	69,76%	70,00%	70,98%	71,23%	71,50%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,84%	3,91%	3,64%	5,84%	5,18%	5,74%	4,82%	5,49%	4,33%
Rasio Ketergantungan	43,68%		42,33%		42,59%		42,21%		

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

Grafik 6.1 Jumlah Tenaga Kerja LU Utama



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pada Februari 2023, LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Timur. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Pertanian di Jawa Timur pada Februari 2023 tercatat sebesar 33,82%, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2022 (31,30%), namun sedikit lebih rendah dibandingkan Februari 2022 (34,56%). Peningkatan pangsa tenaga kerja LU Pertanian di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022 ditopang oleh berlangsungnya masa tanam dan panen komoditas padi pada Februari 2023. Kondisi ini berbeda dengan periode Agustus 2022 di mana panen raya padi telah berakhir sehingga penyerapan tenaga kerja di LU Pertanian lebih rendah. Sementara itu, penurunan pangsa tenaga kerja LU Pertanian di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Februari 2022 lebih dipengaruhi oleh adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor lainnya, sehingga pangsa kebutuhan tenaga kerja terkesan menurun (Grafik 6.2).

LU Perdagangan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar kedua di Jawa Timur pada Februari 2023. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Perdagangan di Jawa Timur pada Februari 2023 tercatat sebesar 19,08%, sedikit lebih rendah dibandingkan Agustus 2022 (20,06%), namun lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 (18,56%). Peningkatan pangsa tenaga kerja dibanding tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat<sup>63</sup>. Adapun penurunan

63. Pertumbuhan kinerja LU Perdagangan di Jawa Timur triwulan I 2023 mengalami peningkatan dari 5,83% (yoy) menjadi 6,53% (yoy).

Grafik 6.2 Pangsa Tenaga Kerja Sektoral



Sumber : BPS Jatim (diolah)

penyerapan tenaga kerja di LU Perdagangan di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022 dipengaruhi oleh lebih rendahnya kinerja sub Perdagangan Besar di Jawa Timur di awal tahun dibandingkan posisi tengah tahun yang cenderung lebih besar. Perlambatan kinerja mitra dagang eksternal, yakni Amerika Serikat dan Eropa juga turut menurunkan kebutuhan tenaga kerja di bulan Februari 2023.

LU Industri Pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar ketiga di Jawa Timur pada Februari 2023. LU Industri Pengolahan merupakan LU terbesar dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi ketiga di Jawa Timur. Pangsa penyerapan tenaga kerja LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada Februari 2023 tercatat sebesar 14,34%. Pencapaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Agustus 2022 (14,89%) dan Februari 2022 (14,44%). Penurunan penyerapan tenaga kerja di LU Industri Pengolahan di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022 terutama dipengaruhi oleh perlambatan permintaan eksternal akibat lebih rendahnya kinerja mitra dagang eksternal utama, yakni Amerika Serikat dan Eropa. Hal tersebut direspons dengan penurunan penyerapan tenaga kerja di LU Industri Pengolahan, khususnya industri yang berorientasi ekspor. Selain itu, penggunaan teknologi yang mendorong efisiensi penggunaan tenaga kerja LU Industri Pengolahan turut memengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja pada LU tersebut.

Grafik 6.3 Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal



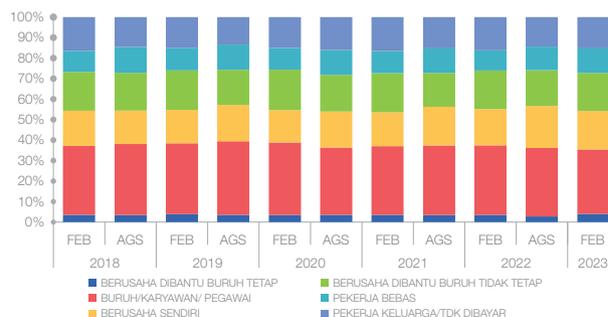
Sumber : BPS Jatim (diolah)

Kondisi tenaga kerja di Jawa Timur pada Februari 2023 berdasarkan Status Pekerjaan Utama masih didominasi oleh sektor informal. Pada Februari 2023, jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal sebesar 14,46 juta atau 64,55% dari total tenaga kerja sekitar 22,40 juta, meningkat dibandingkan Agustus 2022 (63,88%). Pangsa tersebut juga meningkat dibandingkan Februari 2022 (62,26%) dengan jumlah tenaga kerja yang meningkat dibandingkan Agustus 2022 (13,81 juta) dan Februari 2022 (13,71 juta) (Grafik 6.3). Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal tercatat mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022, namun menurun dibandingkan Februari 2022 (Grafik 6.3 – 6.4). Berdasarkan status pekerjaannya, kenaikan jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal terutama didorong oleh peningkatan angkatan kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas, masing – masing dari 3,88 juta dan 2,16 juta pada Februari 2022 menjadi 4,21 juta dan 2,68 juta pada Februari 2023 (Grafik 6.5). Sementara itu, penurunan penduduk yang bekerja di sektor formal terutama disebabkan oleh penurunan penduduk yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai dari 7,44 juta pada Februari 2022 menjadi 7,05 juta pada Februari 2023 (Grafik 6.5). Peningkatan tenaga kerja informal yang diiringi dengan lebih rendahnya tenaga kerja formal di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Februari 2022 mencerminkan penurunan kualitas kinerja di sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan oleh relatif lebih rendahnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja informal dibandingkan lapangan kerja formal.

Secara umum, peningkatan konsumsi juga berdampak pada peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dibandingkan bulan Agustus 2022 dan Februari 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat pasca pencabutan PPKM. Namun demikian, melambatnya investasi dan konstruksi juga menurunkan kebutuhan tenaga kerja pada sektor konstruksi dan jasa kemasyarakatan. Penurunan tenaga kerja konstruksi dibandingkan 2 semester sebelumnya lebih disebabkan oleh adanya perlambatan pembangunan konstruksi dan investasi yang tampak pada perlambatan PDRB kedua LU tersebut.

64. Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Universitas pada Februari 2023 tercatat 1,82 juta (pangsa 8,11% terhadap total tenaga kerja), stabil dibandingkan Agustus 2022 (1,82 juta atau pangsa 8,42% terhadap total tenaga kerja) dan lebih rendah dibandingkan Februari 2022 (2,01 juta atau 9,17% terhadap total tenaga kerja).

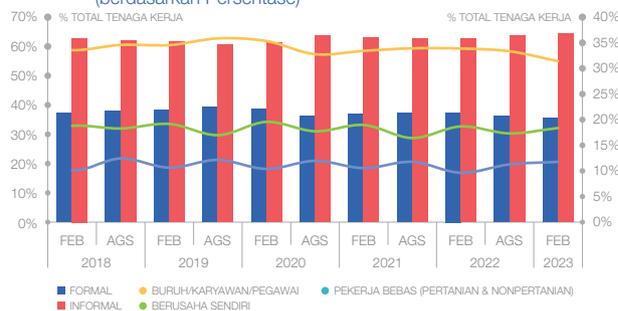
Grafik 6.4 Komposisi Tenaga Kerja Formal-Informal



Sumber : BPS Jatim (diolah)

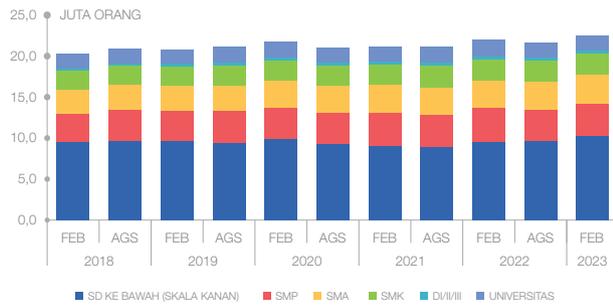
Pada Februari 2023, profil angkatan kerja berdasarkan jenis pendidikan belum mengalami perbaikan dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022. Hal tersebut tercermin pada lulusan SD ke bawah yang masih mendominasi tenaga kerja, dengan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022. Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah pada Februari 2023 sebanyak 10,26 juta atau 45,72% dari total tenaga kerja Jawa Timur. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2022 (9,64 juta atau 44,6% dari total tenaga kerja Jawa Timur) dan Februari 2022 (9,54 juta atau 43,5% dari total tenaga kerja Jawa Timur). Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Universitas pada Februari 2023 cenderung stabil dibandingkan Agustus 2022, namun mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022<sup>64</sup>. Jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP menunjukkan peningkatan pada periode Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022, namun lebih rendah dibandingkan Februari 2022. Sementara itu, jumlah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA meningkat pada periode Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022 dan Februari 2022 (Grafik 6.6 – 6.7). Peningkatan tenaga kerja dengan Pendidikan lebih rendah ini lebih disebabkan oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada sektor dengan kebutuhan tenaga kerja terampil yang relatif lebih sedikit seperti pada LU Pertanian dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sedangkan LU dengan kebutuhan tenaga kerja terampil lebih banyak justru menunjukkan adanya penurunan.

Grafik 6.5 Penyerapan Tenaga Kerja Formal-Informal secara sektor (berdasarkan Persentase)



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grifik 6.6 Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Adapun tingginya pangsa tenaga kerja dengan Pendidikan lebih rendah juga menunjukkan besarnya ruang yang perlu dilakukan untuk pengembangan SDM dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja di Jawa Timur.

**Terdapat dinamika komposisi TPT berdasarkan tingkat pendidikan di Jawa Timur pada Februari 2023 dibandingkan Agustus 2022.**

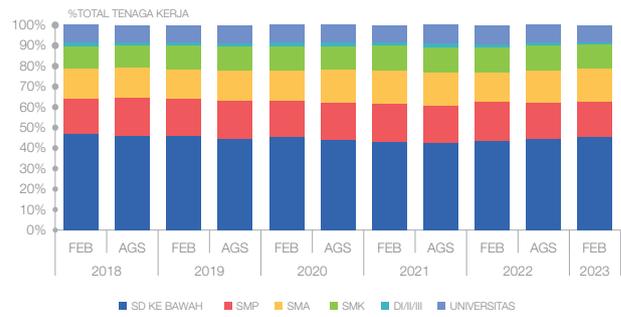
TPT pada lulusan tingkat SD ke bawah, SMP, SMA, dan Diploma di Jawa Timur pada Februari 2023 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2022. Sementara itu, TPT pada lulusan tingkat SMK dan Universitas di Jawa Timur pada Februari 2023 mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2022. Penurunan TPT pada lulusan kelompok SD ke bawah dan SMP ditengarai turut didorong oleh peningkatan tenaga kerja pada LU Pertanian sejalan dengan berlangsungnya masa panen komoditas padi, sedang kenaikan TPT pada lulusan SMK dan Universitas lebih didorong oleh perlambatan kinerja sektor industri pengolahan yang banyak membutuhkan tenaga terampil pada tingkat Pendidikan tersebut. Kondisi ini berbeda dengan periode Agustus 2022 di mana panen padi telah selesai. Penurunan TPT pada lulusan kelompok SMA dan diploma pada Februari 2023 ditengarai dipengaruhi oleh lulusan kelompok SMA pada tahun ajar sebelumnya (Juli – Agustus 2022) yang telah mendapatkan pekerjaan atau meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Grifik 6.8 Komposisi TPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grifik 6.7 Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : BPS Jatim (diolah)

TPT pada lulusan SMA, SMK, dan Diploma baik pada periode Februari 2023, Agustus 2022, maupun Februari 2022, masih terpantau tinggi sehingga dibutuhkan kebijakan spesifik untuk menekan tingginya TPT tersebut. Tingginya TPT pada lulusan SMA, SMK, dan Diploma disebabkan oleh ketimpangan antara kualifikasi kebutuhan tenaga kerja (*skilled employees*) dengan angkatan kerja SMA dan SMK (khususnya bersifat *unskilled employees*), serta Diploma (Grifik 6.8). Untuk itu, perlu dilakukan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja sehingga dapat menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan spesifik dunia usaha. Beberapa program Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meminimalkan *gap* tersebut, antara lain :

1. Memberdayakan para ahli di bidang tertentu dengan sertifikasi nasional dan internasional sebagai pendamping tenaga pengajar SMA maupun SMK.
2. Sertifikasi kompetensi khususnya bagi lulusan SMK agar mempunyai kredibilitas dan daya saing dengan tenaga kerja asing, serta mampu memenuhi standar kebutuhan industri.
3. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja dengan melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat pusat hingga daerah, serta program Kartu Prakerja.
4. Kerja sama antara Institusi Pendidikan bersama Perusahaan/BUMN berupa program magang dan beasiswa, seperti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang diinisiasi *Forum Human Capital Indonesia* (FHCI) dan Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek.

Nilai tambah penyerapan tenaga kerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB relatif terbatas dikarenakan oleh produktivitas terhadap PDRB yang relatif rendah. Rendahnya produktivitas LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi penyerap tenaga kerja tertinggi berdampak pada rendahnya pendapatan per pekerja di LU tersebut. Sebaliknya, LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, LU Real Estat, dan LU Informasi dan Komunikasi yang menyerap 14,90%, 0,50%, 0,17%

Tabel 6.2 Perbandingan Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Lapangan Usaha

Lapangan Pekerjaan Utama Main Industry	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan/Educational Attainment				Jumlah Total	PDRB Jatim ADHB (2022)	Nilai Tambah PDRB per tenaga kerja (Juta)
	≤ SD ≤ Primary School	SMP Junior High School	SMA Senior High School	Perguruan Tinggi College			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,053,367	1,007,283	636,351	69,439	6,766,440	303,292	45
Pertambangan	55,897	27,525	18,048	6,803	108,273	118,992	1,099
Industri Pengolahan	1,039,047	639,888	1,336,156	206,150	3,221,241	835,711	259
Pengadaan Listrik dan Ga	995	5,361	21,696	15,049	43,101	8,043	187
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah	37,334	12,680	16,725	2,612	69,351	2,443	35
Konstruksi	616,200	387,485	344,298	48,833	1,396,816	246,876	177
Perdagangan Besar dan Eceran	1,596,068	823,291	1,606,439	314,646	4,340,444	509,939	117
Transportasi dan Pergudangan	170,791	136,293	326,315	72,456	705,855	96,490	137
Akomodasi dan makan minum	565,075	360,499	544,089	87,213	1,556,876	154,142	99
Informasi dan Komunikasi	8,308	17,934	63,740	36,872	126,854	135,660	1,069
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,229	8,617	92,230	100,063	204,139	72,593	356
Real Estate	3,691	8,087	12,898	12,692	37,368	44,748	1,198
Jasa Perusahaan	46,236	38,254	130,167	71,145	285,802	21,397	75
Administrasi Pemerintahan	10,257	15,566	255,882	180,423	462,128	58,449	126
Jasa Pendidikan	21,997	58,628	220,043	697,459	998,127	67,705	68
Jasa Kesehatan	24,746	47,735	79,885	161,564	313,930	18,875	60
Jasa Lainnya	384,959	234,861	302,694	54,034	976,548	35,552	36
<b>Jumlah/Total</b>	<b>9,638,197</b>	<b>3,829,987</b>	<b>6,007,656</b>	<b>2,137,453</b>	<b>21,613,293</b>	<b>2,730,907</b>	<b>126</b>

Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)

dan 3,27% tenaga kerja berkontribusi 41,56% terhadap PDRB Jawa Timur. Penggunaan teknologi dan kualitas tenaga kerja yang lebih tinggi pada LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan, dan LU Transportasi dan Informasi ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong produktivitas pada LU tersebut (Tabel 6.2). Sebaliknya, rendahnya Pendidikan pada LU pertanian, Kehutanan dan Perikanan; LU Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah, serta pada LU Jasa Lainnya juga menunjukkan produktivitas yang relatif rendah.

Pada triwulan I 2023, berdasarkan SK Bank Indonesia di Jawa Timur, penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur terindikasi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi oleh semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif di Jawa Timur pada periode laporan. Peningkatan penyerapan tenaga kerja

di Jawa Timur tercermin dari kenaikan indeks Lapangan Usaha dari 113,88 pada triwulan IV 2022 menjadi 116,57 pada triwulan I 2023. Hal tersebut ditopang oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong pencabutan kebijakan PPKM pada akhir tahun 2022. Pencabutan kebijakan PPKM tersebut berimplikasi pada semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif yang mendorong peningkatan lapangan usaha.

**Peningkatan serapan tenaga kerja pada triwulan laporan menyebabkan kenaikan keyakinan konsumen dan penghasilan RT pada triwulan laporan.** Lebih tingginya keyakinan konsumen pada triwulan I 2023 dibandingkan triwulan sebelumnya tercermin dari kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen SK Bank Indonesia Jawa Timur dari 126,70 pada triwulan IV 2022 menjadi 133,02 pada triwulan I 2023. Lebih lanjut, peningkatan penghasilan RT tercermin dari kenaikan Indeks Penghasilan Rumah Tangga SK Bank Indonesia Jawa Timur dari 126,67 di triwulan IV 2022 menjadi 134,07 pada triwulan I 2023 (Grafik 6.9).

Grafik 6.9 Keyakinan Konsumen, Penghasilan RT, dan Lapangan Usaha Saat Ini

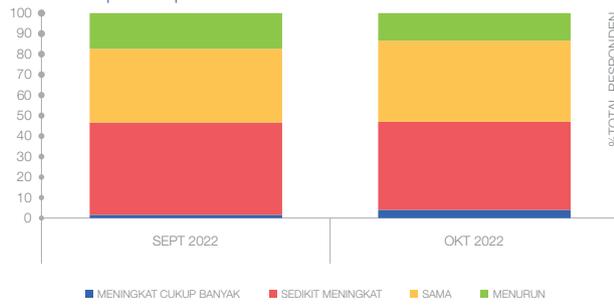


Sumber : Survei Konsumen BI

### 6.3. KESEJAHTERAAN

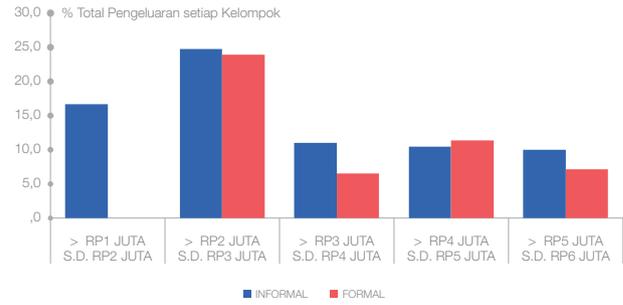
Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya tercermin dari penurunan jumlah penduduk pra-sejahtera, yakni dari 4,26 juta jiwa (10,59% dari total penduduk) pada September 2022 menjadi 4,24 juta jiwa (10,49% dari total penduduk) pada September 2023. (Grafik 6.10-6.11).

Grifik 6.10 Perubahan Pendapatan Bulanan Masyarakat di Jawa Timur pada September 2022 dan Oktober 2022



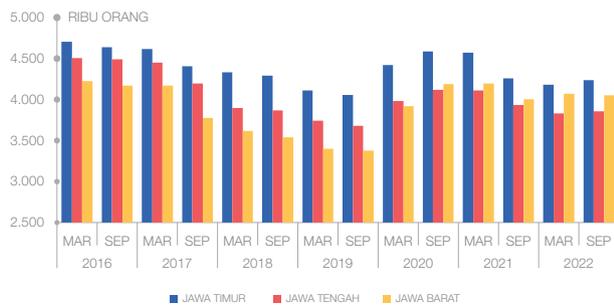
Sumber : SK Bank Indonesia di Jawa Timur (diolah)

Grifik 6.11 Persentase Penurunan Pengeluaran Masyarakat di Jawa Timur Berdasarkan Kelompok Pengeluaran, Oktober 2022 dibandingkan September 2022



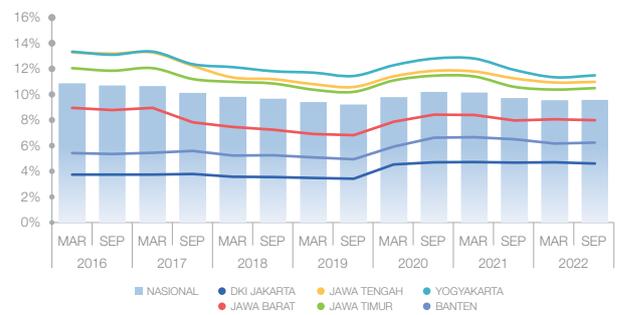
Sumber : SK Bank Indonesia di Jawa Timur (diolah)

Grifik 6.12 Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grifik 6.13 Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Provinsi di Wilayah Jawa



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif mendukung perbaikan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan September 2021.

Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur pada September 2022 terpantau sedikit lebih rendah dibandingkan Maret 2022. Sedikit tertekannya tingkat kesejahteraan masyarakat pada September 2022 tercermin dari kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera dari 4,18 juta jiwa (10,38% dari total penduduk) pada Maret 2022 menjadi 4,24 juta jiwa (10,49% dari total penduduk) pada September 2022. Peningkatan harga BBM oleh pemerintah pada 3 September 2022 sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia ditengarai berpengaruh terhadap sedikit tertekannya tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Pada 3 September 2022, pemerintah menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar masing-masing sebesar 30,72% dan 32,04% serta BBM nonsubsidi jenis Pertalite sebesar 16,00%. Penyesuaian harga BBM tersebut turut berdampak pada kenaikan berbagai tarif transportasi. Hal ini tercermin dari peningkatan inflasi IHK gabungan 8 kota di Jawa Timur kelompok Transportasi dari 6,09% (%yoy) pada Juni (triwulan II) 2022 menjadi 17,16% (yoy) pada September (triwulan III) 2022. Lebih lanjut, penyesuaian harga BBM turut berdampak pada penyesuaian harga sejumlah barang konsumsi tercermin dari Inflasi IHK gabungan 8 kota di Jawa Timur yang meningkat dari 4,92% (yoy) pada Juni (triwulan II) 2022 menjadi 6,80% (yoy) pada September (triwulan III) 2022. Peningkatan harga BBM dan dampak rambatannya terhadap tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi lainnya tersebut

berimplikasi pada penurunan pendapatan sekelompok masyarakat. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia di Jawa Timur, responden mengalami penurunan pendapatan dan pengeluaran konsumsi pada periode September 2022 dan Oktober 2022, khususnya untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal (Grifik 6.12 – 6.13). Hal tersebut ditengarai berdampak tertekannya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur yang tercermin dari kenaikan penduduk pra sejahtera Jawa Timur pada September 2022 dibandingkan Maret 2022.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di wilayah pedesaan dan perkotaan pada September 2022 mengalami perbaikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada September 2022, sebanyak 2,48 juta jiwa (58,63%) penduduk pra-sejahtera tinggal di pedesaan dan 1,75 juta jiwa penduduk pra-sejahtera (41,37%) berdomisili di perkotaan. Pertumbuhan penduduk pra-sejahtera di pedesaan dan perkotaan dibandingkan September 2021 terpantau sedikit menurun masing-masing sebesar -0,27% (yoy) dan -0,93% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan percepatan vaksinasi dosis 2 serta booster pada tahun 2022 yang mendukung semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi produktif.

Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur di wilayah pedesaan dan perkotaan pada September 2022 mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode Maret 2022. Pada September 2022, sebanyak 2,48 juta jiwa penduduk pra-

Grafik 6.14 Jumlah Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota



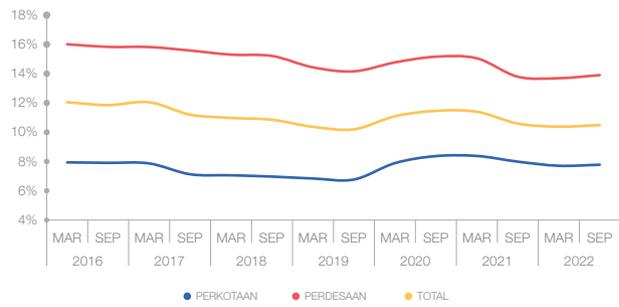
Sumber : BPS Jatim (diolah)

sejahtera tinggal di pedesaan (13,90% dari total penduduk di pedesaan), meningkat dibandingkan Maret 2022 yang sebanyak 2,46 juta jiwa (13,69% dari total penduduk di pedesaan). Demikian pula jumlah penduduk pra-sejahtera yang tinggal di perkotaan pada September 2022 sebanyak 1,75 juta jiwa (7,78% dari total penduduk di perkotaan), lebih tinggi dibandingkan Maret 2022 sebanyak 1,72 juta jiwa (7,71% dari total penduduk di perkotaan). Kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera di Jawa Timur, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan tersebut turut dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM pada 3 September 2022 yang turut berdampak pada peningkatan tarif transportasi dan berbagai komoditas konsumsi sehingga menekan pendapatan masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor informal.

**Pada semester I 2023 (Maret 2023), tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur diperkirakan mengalami perbaikan dibandingkan semester II 2022 (September 2022) sejalan dengan potensi perbaikan ekonomi domestik, investasi proyek strategis pemerintah dan swasta di Jawa Timur, serta adanya panen raya padi.** Hal tersebut terindikasi dari peningkatan Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Usaha pada Triwulan I 2023, serta optimisme Indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja 6 bulan yang akan datang berdasarkan survei konsumen (SK) Bank Indonesia di Jawa Timur<sup>65</sup>. Sejalan dengan perbaikan indikator tersebut, tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur pada semester I 2023 diperkirakan menurun sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Membaiknya cuaca dan mulai dilakukannya panen padi dan tanaman pertanian lainnya, khususnya tanaman Hortikultura diperkirakan akan meningkatkan nilai tukar petani yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani di semester I 2023.

**Tingginya komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok pra sejahtera, ditengarai turut menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat.** Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan Jawa Timur, upaya untuk menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi krusial. Hingga saat ini pemerintah melakukan tiga intervensi untuk mengatasi tekanan pada kesejahteraan masyarakat, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat, sekaligus untuk

Grafik 6.15 Persentase Penduduk Pra-Sejahtera Desa dan Kota

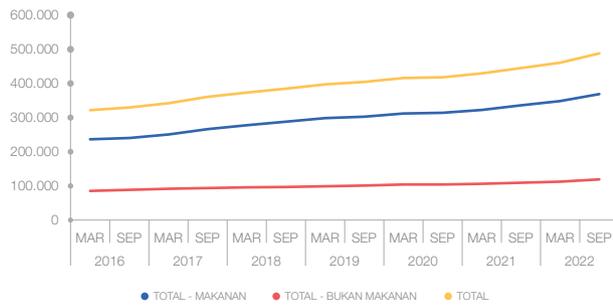


Sumber : BPS Jatim (diolah)

menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan. Intervensi yang dilakukan antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas. Meskipun Pemerintah telah menyatakan program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah usai pada akhir tahun 2022, Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program *social safety net* antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai, dan Kartu Prakerja. Program pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilaksanakan pada tahun 2022 ditargetkan datanya selesai pada pertengahan tahun 2023. Regsosek diharapkan dapat menyediakan Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta dapat menciptakan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Di samping program peningkatan kesejahteraan dari Pemerintah Pusat, terdapat berbagai program dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk turut mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Program-program tersebut antara lain meliputi; (i) Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA/SMK negeri dan swasta di Jawa Timur serta pembangunan *Millenial Job Center* untuk mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja terampil dan terdidik sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja di Jawa Timur sehingga menekan TPT ; (ii) program Pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas (Tantistas) bagi masyarakat kurang mampu untuk mendukung kesehatan masyarakat kelompok pra-sejahtera yang berkualitas sehingga mendukung peningkatan kesempatan berkarya dengan baik sehingga menekan angka kemiskinan dan TPT; (iii) program Desa Berdaya untuk menekan TPT dan meningkatkan kesejahteraan secara komunal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai masyarakat setempat; (v) program pemberdayaan perempuan (Jatim Puspa) untuk menekan TPT dan peningkatan kesejahteraan untuk wanita; dan (vi) Program Keluarga Harapan (PKH) Plus yang menyasar kelompok lanjut usia yang kurang mampu untuk menjaga daya beli kelompok lanjut usia sehingga kesejahteraan terjaga.

65. Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Usaha pada triwulan I 2023 masing-masing tercatat 134,07 dan 116,57, meningkat dibandingkan triwulan IV 2022 (126,67 dan 113,88). Sementara, indeks Ekspektasi Penghasilan 6 bulan yang akan datang dan indeks Ketersediaan Lapangan Usaha 6 bulan yang akan datang di Jawa Timur optimis melanjutkan perbaikan (prakiraan angka Juni 2023) masing-masing tercatat sebesar 140,42 dan 132,48 (>100).

Grafik 6.16 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terindikasi sedikit tertekan tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) yang diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera pada periode September 2022 dibandingkan Maret 2022<sup>66</sup>. GK meningkat dari Rp460.909 pada Maret 2022 menjadi Rp487.908 perkapita/bulan pada September 2022 (Grafik 6.17 – 6.18). Di tengah peningkatan GK, jumlah penduduk pra-sejahtera Jawa Timur mengalami peningkatan, dari 4,18 juta (10,38% dari total penduduk) pada Maret 2022 menjadi 4,24 juta (10,49% dari total penduduk) pada September 2022. Peningkatan GK yang diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera mengindikasikan adanya kenaikan inflasi komoditas tidak dapat sepenuhnya direspon dengan peningkatan daya beli, sehingga tingkat kesejahteraan mengalami penurunan.

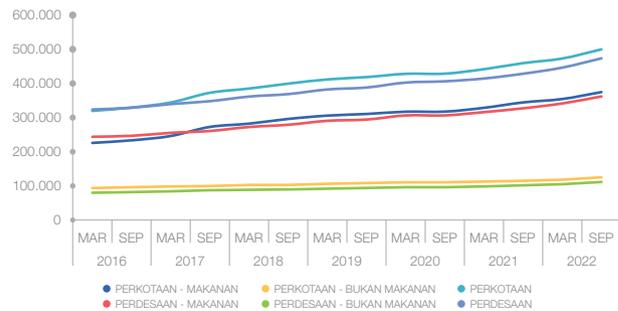
Tabel 6.3 Rasio Gini Jawa Timur

TAHUN	Gini Ratio		
	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
Maret 2016	0,423	0,333	0,402
Sept 2016	0,433	0,313	0,402
Maret 2017	0,418	0,326	0,396
Sept 2017	0,442	0,317	0,415
Maret 2018	0,387	0,327	0,379
Sept 2018	0,375	0,322	0,371
Maret 2019	0,379	0,318	0,370
Sept 2019	0,374	0,314	0,364
Maret 2020	0,377	0,316	0,366
Sept 2020	0,373	0,318	0,364
Maret 2021	0,387	0,324	0,374
Sept 2021	0,379	0,319	0,364
Maret 2022	0,388	0,323	0,371
Sept 2022	0,381	0,322	0,365

Sumber : BPS Jatim (diolah)

66. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan non-pangan esensial, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya. Proporsi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencapai 75,59% dari total Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai komoditas pembentuk GK berimplikasi pada tekanan inflasi yang semakin tinggi yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Grafik 6.17 Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Desa dan Kota



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Meskipun demikian, dibandingkan dengan September 2021, kesejahteraan masyarakat Jawa Timur terpantau meningkat tercermin dari peningkatan GK yang tidak diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk pra-sejahtera. GK meningkat dari Rp445.139 pada September 2021 menjadi Rp487.908 perkapita/bulan pada September 2022 (Grafik 6.17 – 6.18). Di tengah peningkatan GK, jumlah penduduk pra-sejahtera Jawa Timur mengalami penurunan, dari 4,26 juta (10,59% dari total penduduk) pada September 2021 menjadi 4,23 juta (10,49% dari total penduduk). Peningkatan GK yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk pra-sejahtera mengindikasikan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk di Jawa Timur yang mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan meski dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Di tengah masa pemulihan pandemi COVID-19 dan ketidakpastian global, berbagai program untuk mendukung kesejahteraan masyarakat terindikasi mampu menahan tekanan yang lebih tinggi. Rasio Gini terpantau terkendali dari 0,364 pada September 2021 menjadi 0,365 pada September 2022, terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan (Tabel 6.4). Terjaganya Rasio Gini serta tekanan lain pada kesejahteraan masyarakat didukung oleh (1) program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); (2) pemberian bantuan sosial; (3) pengamanan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian; (4) restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak; (5) program padat karya tunai (*cash for work*) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak; dan (6) jaring pengaman sosial (*social safety net*).

## 6.4. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN

### 6.4.1. Kesejahteraan Petani

Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan I 2023 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya ditopang oleh kenaikan harga dan permintaan komoditas beras dan komoditas hortikultura. Tingkat kesejahteraan petani di Jawa Timur pada triwulan I 2023 yang direpresentasikan oleh Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 106,82, lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022 sebesar 105,13. NTP Jawa Timur pada triwulan ini berada pada posisi ketiga tertinggi di Jawa setelah Jawa Tengah (107,52) dan DKI Jakarta (107,09) (Grafik 6.18).

Grafik 6.18 Perbandingan Nilai Tukar Petani Provinsi di Jawa



Sumber : BPS (diolah)

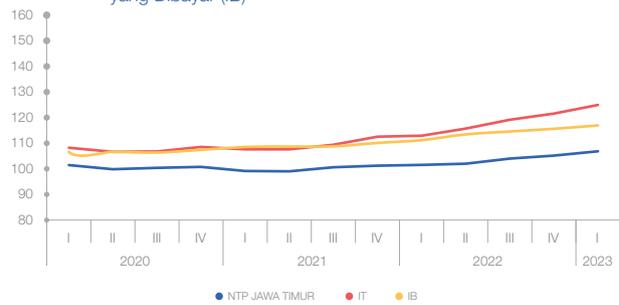
Peningkatan NTP di Jawa Timur didukung oleh peningkatan indeks harga yang diterima (It) oleh petani yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan indeks harga yang dibayar (Ib) petani. Indeks harga yang diterima (It) petani sebesar 141,92 meningkat sebesar 2,76% (qtq) sedangkan (Ib) petani sebesar 116,95 meningkat 1,14% (qtq) (Grafik 6.19). Peningkatan It petani utamanya ditopang oleh peningkatan harga produsen padi, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, jagung, ketela pohon, sayuran (nangka muda, kentang), dan buah-buahan (melon, mangga, jeruk). Peningkatan (It) petani didorong oleh beberapa faktor: (i) kenaikan harga komoditas padi gabah dan beras sebagai dampak dari kenaikan HPP gabah/beras serta peningkatan permintaan pada periode HBKN (Imlek, Ramadhan, dan persiapan Idul Fitri); (ii) peningkatan harga aneka cabai dipengaruhi oleh peningkatan permintaan masyarakat dan adanya cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas cabai; (iii) peningkatan harga bawang putih akibat penurunan pasokan; (iv) peningkatan harga jagung akibat kenaikan harga jagung dunia; serta (v) dampak rambatan kenaikan harga BBM yang masih berlanjut menyebabkan kenaikan biaya produksi dan distribusi yang berimplikasi pada kenaikan harga komoditas. Sementara itu, peningkatan Ib petani terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas beras, bensin, rokok

Tabel 6.4 NTP Subsektor Pertanian Jawa Timur

KETERANGAN	IV 2022	I 2023	PERUBAHAN (%)
TANAMAN PANGAN			
IT	122,09	126,18	3,35%
IB	116,26	117,76	1,29%
NTP - P	105,02	107,15	2,03%
HORTIKULTURA			
IT	127,05	142,19	11,92%
IB	114,38	116,12	1,52%
NTP - H	111,86	122,45	9,47%
TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT			
IT	119,12	117,18	-1,63%
IB	114,41	115,44	0,90%
NTP - Pr	104,12	101,50	-2,52%

Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.19 NTP Jawa Timur, Indeks yang Diterima (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar (IB)



Sumber : BPS Jatim (diolah)

kretek filter, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bibit bawang merah, jagung pipilan, dan sayuran (tomat, nangka muda). Petani yang juga merupakan konsumen komoditas-komoditas tersebut (beras, BBM, aneka cabai, bawang putih, rokok, dan sayuran) turut terdampak kenaikan harga komoditas – komoditas tersebut. Secara umum, indeks harga yang diterima (It) petani mampu mengompensasi kenaikan harga-harga komoditas yang dikonsumsi.

Berdasarkan sub sektornya, peningkatan NTP di Jawa Timur ditopang oleh sub sektor Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura (Tabel 6.4). NTP sub sektor Tanaman Pangan meningkat sebesar 2,03% (qtq). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan HPP gabah/beras di tingkat petani sebesar 18%– 20% serta kenaikan biaya operasional dan distribusi akibat dampak rambatan peningkatan harga BBM di tengah peningkatan permintaan masyarakat pada momen HBKN (Imlek, Ramadhan, dan persiapan Idul Fitri). Peningkatan NTP sub sektor Tanaman Pangan juga ditopang kenaikan harga jagung seiring tren peningkatan harga global. NTP sub sektor Tanaman Hortikultura meningkat sebesar 9,47% (qtq) dipengaruhi oleh peningkatan harga cabai rawit dan cabai merah seiring peningkatan permintaan

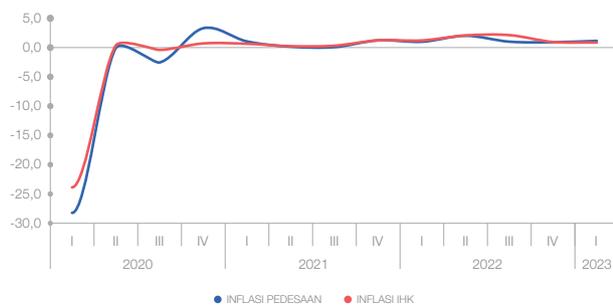
KETERANGAN	IV 2022	I 2023	PERUBAHAN (%)
PETERNAKAN			
IT	118,81	117,73	-0,91%
IB	115,39	116,20	0,70%
NTP - Pt	102,96	101,32	-1,59%
PERIKANAN			
IT	115,87	115,32	-0,47%
IB	113,65	115,03	1,21%
NTP - Pi	101,96	100,25	-1,68%
GABUNGAN/ JAWA TIMUR			
IT	121,56	124,92	2,76%
IB	115,63	116,95	1,14%
NTP - JT	105,13	106,82	1,61%

Grafik 6.20 NTP Sub Sektor Pertanian Jawa Timur



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.21 Inflasi Pedesaan Jawa Timur



Sumber : BPS Jatim (diolah)

masyarakat dan adanya cuaca ekstrem yang berdampak pada penurunan produktivitas cabai. Sementara itu, NTP sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan NTP sub sektor Tanaman Perkebunan Rakyat disebabkan oleh penurunan harga global beberapa komoditas perkebunan, seperti karet, kelapa sawit, dan teh di tengah peningkatan harga-harga komoditas konsumsi petani. Lebih lanjut, NTP sub sektor Peternakan menurun dipengaruhi oleh masih adanya Penyakit Mulut Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyerang sejumlah ternak sapi di Jawa Timur sehingga berdampak pada tertahannya permintaan daging sapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, lebih rendahnya NTP sub sektor Perikanan dipengaruhi oleh lebih tingginya indeks yang dibayarkan petani dibandingkan indeks yang diterima petani seiring kenaikan harga konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga komoditas ikan, khususnya pada komoditas ikan budidaya (Grafik 6.20).

Nilai konsumsi petani pada triwulan I 2023 mengalami peningkatan (inflasi), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2022. Hal tersebut tercermin dari inflasi pedesaan pada triwulan I 2023 yang mencapai 1,14% (qtq), mengalami inflasi dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,92% (qtq). Peningkatan indeks harga yang diterima petani terutama terjadi pada komoditas tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Hal tersebut ditengarai mampu membantu menjaga daya beli petani dalam melakukan

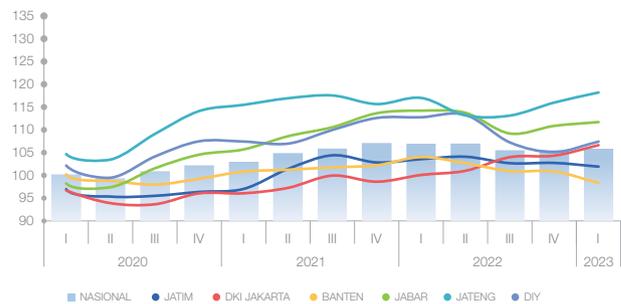
konsumsi di tengah tekanan inflasi komoditas pangan yang masih tinggi dan dampak rambatan kenaikan harga BBM terhadap biaya distribusi dan berbagai komoditas konsumsi.

### 6.4.2 Kesejahteraan Nelayan

Tingkat kesejahteraan nelayan di Jawa Timur pada triwulan I 2023 menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2022, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Jawa Timur sebesar 101,71 menurun sebesar -0,78% (qtq) dibandingkan triwulan IV 2022 yang sebesar 102,51. Di kawasan Jawa, NTN Jawa Timur berada pada posisi terendah kedua setelah Banten (98,19) (Grafik 6.22).

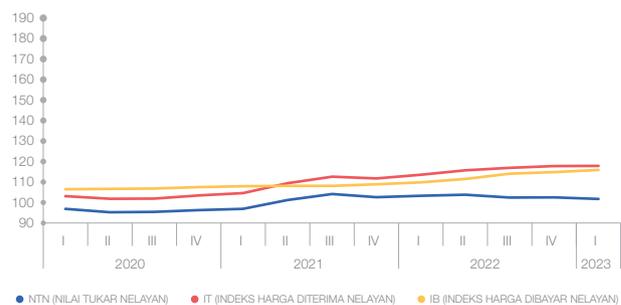
Berdasarkan komponennya, penurunan NTN di Jawa Timur dipengaruhi oleh peningkatan indeks harga yang diterima nelayan (It) yang lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar (Ib) nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (It) mengalami peningkatan sebesar 0,10% (qtq) dari triwulan sebelumnya (Grafik 6.23). Peningkatan tersebut (It) ditopang oleh peningkatan harga pada komoditas udang laut, ikan lemuru, ikan belanak, ikan kembung, ikan bawal, lobster, ikan gabus, ikan kakap, ikan ekor kuning, dan ikan nila. Sementara itu, indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) mengalami peningkatan dari 114,89 pada triwulan IV 2022 menjadi 115,91 pada triwulan I 2023 atau naik sebesar 0,89% (qtq) (Grafik 6.23). Peningkatan Ib tersebut didorong oleh peningkatan biaya produksi dan operasional sebagai dampak rambatan kenaikan harga bahan bakar (BBM). Di samping itu, kenaikan Ib juga disebabkan oleh peningkatan harga komoditas

Grafik 6.22 Perbandingan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Provinsi di Jawa



Sumber : BPS Jatim (diolah)

Grafik 6.23 NTN, IT dan IB Nelayan Jawa Timur



Sumber : BPS Jatim (diolah)

bahan kebutuhan pokok seperti beras, bensin, rokok kretek filter, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, *coolbox*, dan buah/sayuran. Peningkatan harga berbagai komoditas tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dan belum optimalnya produktivitas ditengah tingginya permintaan, peningkatan harga distribusi seiring dampak lanjutan kenaikan tarif BBM, serta kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2023.





BAB VII

# Prospek Perekonomian Daerah



## 7.1. Prospek Ekonomi Jawa Timur Tahun 2023

### 7.1.1. Sisi Permintaan

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun termoderasi dibandingkan tahun 2022, terutama disebabkan oleh faktor global. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 4,6% - 5,4% (yoy), cenderung bias bawah, termoderasi dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,3%(yoy). Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 terutama dipengaruhi oleh kinerja ekonomi global pada tahun 2023 yang diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Perlambatan ekonomi global tersebut dipengaruhi oleh fragmentasi ekonomi, perdagangan, dan investasi akibat konflik geopolitik Rusia – Ukraina dan Tiongkok – Taiwan yang berlanjut serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Lebih lanjut, potensi krisis perbankan global akibat kesulitan likuiditas di perbankan Amerika Serikat dan Eropa menyebabkan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal tersebut diperkirakan menahan kinerja ekspor LN dan investasi nonbangunan di Jawa Timur pada tahun 2023. Tekanan kinerja global yang lebih tinggi tertahan oleh pembukaan kembali ekonomi Tiongkok yang berpotensi mendorong peningkatan permintaan batu bara dan minyak kelapa sawit dari Kawasan Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera yang merupakan mitra dagang domestik Jawa Timur. Potensi peningkatan kinerja ekonomi kawasan tersebut berpotensi mendorong kinerja perdagangan antar daerah Jawa Timur. Lebih lanjut, pembukaan kembali ekonomi Tiongkok berpotensi mendorong kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke Jawa Timur walaupun dampaknya relatif terbatas seiring dengan minimnya wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Jawa Timur.

**Moderasi kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan turut dipengaruhi oleh konsolidasi fiskal pemerintah sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik.** Seiring dengan perbaikan ekonomi yang terjadi, pemerintah berupaya mengembalikan kebijakan anggaran untuk tidak lebih dari 3%, sebagaimana capaian defisit anggaran tahun 2022 yang hanya sebesar 2,4%, jauh lebih rendah dibanding saat penerapan Perpu No. 1 Tahun 2020 tahun 2021 yang mengalami defisit 4,6% dari PDB, ataupun defisit tahun 2020 yang sebesar 6,1% dari PDB. Pada tahun 2023, Pemerintah berkomitmen untuk kembali menerapkan defisit fiskal di bawah 3% dari APBN sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan tren perbaikan ekonomi domestik. Konsolidasi fiskal tersebut diperkirakan berdampak pada pengurangan sejumlah insentif fiskal serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023. Hal tersebut diperkirakan menahan laju pertumbuhan konsumsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dan berdampak pada tertahannya percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Di tengah potensi tertahannya kinerja eksternal dan belanja pemerintah, berlanjutnya tren perbaikan konsumsi RT dan investasi diperkirakan mendorong masih positifnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023. Tren penurunan kasus COVID-19 di tingkat global dan nasional, termasuk Jawa Timur, mendorong pemerintah mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember 2022 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 50 dan 51 Tahun 2022. Hal tersebut diperkirakan berimplikasi pada peningkatan keyakinan masyarakat dan dunia usaha sehingga mendorong semakin luasnya pembukaan sektor ekonomi dan investasi. Pembukaan sektor ekonomi diperkirakan mendorong peningkatan mobilitas dan pendapatan masyarakat yang berdampak pada kenaikan konsumsi RT. Implementasi dari pencabutan PPKM diperkirakan berimplikasi positif terhadap kepercayaan dunia usaha sehingga mendorong optimalisasi investasi pemerintah dan swasta walaupun sedikit tertahan oleh perilaku wait and see menjelang pemilu, maupun kenaikan suku bunga kredit. Berlanjutnya pembangunan infrastruktur yang sempat terhambat sejalan dengan realokasi anggaran Proyek Strategis Nasional dan proyek-proyek dalam Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019 diperkirakan akan mendukung akselerasi investasi pada tahun 2023 walaupun diperkirakan tidak akan sebesar tahun 2022 dikarenakan adanya penyesuaian pengerjaan proyek yang memungkinkan untuk diselesaikan hingga tahun 2024<sup>67</sup>. Di samping itu, proyek – proyek swasta dan kerja sama swasta – nasional, terutama pembangunan smelter tembaga di Kabupaten Gresik dan pembangunan kilang minyak Tuban diperkirakan semakin mendorong perbaikan investasi di Jawa Timur pada tahun 2023.

**Momen persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak diperkirakan mendukung pertumbuhan positif konsumsi LNPRRT di Jawa Timur pada tahun 2023.** Persiapan kegiatan pemilu legislatif, pilpres, dan pilkada serentak pada tahun 2024 diperkirakan akan berlangsung sepanjang tahun 2023. Terkendalnya kasus COVID-19 yang berimplikasi pada pelanggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi memengaruhi persiapan pemilu yang diperkirakan mengikuti pola normal sebelum pandemi COVID-19. Hal tersebut diperkirakan mendukung pertumbuhan positif kinerja konsumsi LNPRRT pada tahun 2023.

### 7.1.1. Sisi Permintaan

**Dari sisi penawaran, sejalan dengan potensi perlambatan ekonomi global, kinerja LU utama yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan di Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.** Berdasarkan WEO April 2023, IMF

67. *Proyek Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 serta proyek – proyek yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.*

Tabel 7.1 Prospek Perekonomian Dunia – World Economic Outlook

	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Proyeksi IMF			
		2020	2021	2022	Januari 2023		April 2023	
					2023p	2024p	2023p	2024p
Dunia	%yoy	-3,3	6,1	3,4	2,9	3,1	2,8	3,0
Negara Maju	%yoy	-4,7	5,2	2,7	1,2	1,4	1,3	1,4
Amerika Serikat	%yoy	-3,5	5,7	2,1	1,4	1,0	1,6	1,1
Kawasan Eropa	%yoy	-6,6	5,4	3,5	0,7	1,6	0,8	1,4
Jepang	%yoy	-4,8	1,7	1,1	1,8	0,9	1,3	1,0
Negara Berkembang	%yoy	-2,2	6,8	3,9	4,0	4,2	3,9	4,2
Russia	%yoy	-3,1	4,7	-2,1	0,3	2,1	0,7	1,3
Tiongkok	%yoy	2,3	8,1	3,0	5,2	4,5	5,2	4,5
India	%yoy	-8,0	8,7	6,8	6,1	6,8	5,9	6,3
Brazil	%yoy	-4,1	4,6	2,9	1,2	1,5	0,9	1,5
ASEAN-5	%yoy	-3,4	3,4	5,5	4,3	4,7	4,5	4,6
Volume Perdagangan Dunia	%yoy	-8,5	10,1	5,1	2,4	3,4	2,4	3,6

Sumber : World Economic Outlook (WEO) April 2023

■ Lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya ■ Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya ■ Sama dibandingkan tahun sebelumnya

memprakirakan ekonomi global pada tahun 2023 tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dengan potensi resesi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dan kawasan Eropa yang merupakan mitra dagang eksternal utama Jawa Timur (Tabel 7.1). Hal tersebut diprakirakan menahan kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2023 yang berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan, khususnya sub Perdagangan Besar. Sejalan dengan perlambatan kinerja perdagangan luar negeri Jawa Timur pada tahun 2023, kinerja LU Transportasi dan Pergudangan pada periode yang sama diprakirakan lebih rendah. Kebutuhan transportasi dan pergudangan untuk logistik perdagangan luar negeri di Jawa Timur diprakirakan lebih rendah sejalan dengan potensi tertahannya kinerja ekspor-impor LN Jawa Timur pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, selain juga kondisi usaha yang sudah kembali normal seperti sebelum pandemi.

**Kinerja LU Konstruksi pada tahun 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya proyek infrastruktur strategis pemerintah dan swasta, namun sedikit tertahan akibat eskalasi ketidakpastian global.** LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2023 diprakirakan tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek-proyek infrastruktur dalam Peraturan Presiden No.80/ 2019, serta proyek-proyek swasta korporasi dan rumah tangga sejalan dengan potensi perbaikan permintaan domestik. Pembangunan Proyek Strategis Nasional dan proyek – proyek berdasarkan Peraturan Presiden No.80/2019 terutama akan difokuskan pada : (1) Pembangunan RSUD Kota Probolinggo; (2) Pembangunan Limbah B3 di Kabupaten Mojokerto; (3) Pembangunan Pasar Induk Kota Batu; (4) Peningkatan kapasitas tampungan floodway di Lamongan; (5) Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Kalianget; (6) Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Jeroan; (7) Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan; (8) Pembangunan *Frontage Road* (FR) Waru – Gedangan; (9) Pembangunan drainase Jalan

Nasional Arteri Primer (Widang Bts. Kota Lamongan, Bts. Kabupaten Gresik); dan (10) Jalan Akses Langsung (Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)). Berlanjutnya pembangunan *smelter* tembaga di KEK Gresik dengan nilai investasi 3 miliar dolar AS di Gresik, pembangunan kilang minyak di Tuban (pengilangan minyak dan kimia organik), serta berlanjutnya pembangunan Bandara Kediri, diprakirakan turut mendorong tetap positifnya kinerja LU Konstruksi di Jawa Timur pada tahun 2023. Kendati demikian, sejalan dengan WEO April 2023, perlambatan ekonomi global yang lebih dalam dibandingkan dengan estimasi sebelumnya diprakirakan menahan kinerja LU Konstruksi yang lebih tinggi. Investor domestik dan asing diprakirakan bersikap *wait and see* dalam melakukan investasi termasuk di bidang konstruksi akibat eskalasi ketidakpastian global yang berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi global yang lebih dalam. Lebih lanjut, perlambatan kinerja ekonomi global yang berdampak pada penurunan permintaan eskternal berimplikasi pada penurunan pendapatan industri berorientasi ekspor yang diprakirakan turut menahan rencana konstruksi korporasi.

**Sejalan dengan semakin terkendalnya kasus COVID-19 di Jawa Timur dan konsolidasi fiskal pemerintah, kinerja LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2023 diprakirakan mengalami perlambatan.** Kasus positif COVID-19 di Jawa Timur pada tahun 2022 tercatat sebesar 236.611 kasus, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebanyak 315.956 kasus. Pada tahun 2023, kasus COVID-19 diprakirakan semakin terkendali dan terus menurun dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan akselerasi vaksinasi COVID-19 yang mendukung terbentuknya *herd immunity* di Jawa Timur. Hingga minggu kedua April 2023, vaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 di Jawa Timur masing-masing mencapai 85,57%; 74,69%; dan 33,19% dari kelompok sasaran. Potensi lebih rendahnya jumlah masyarakat yang terinfeksi COVID-19 berimplikasi pada moderasi kinerja pusat kesehatan di Jawa Timur yang berdampak pada lebih rendahnya kinerja LU Jasa

Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Lebih lanjut, potensi semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan konsolidasi fiskal pada tahun 2023 diperkirakan turut berdampak pada efisiensi dana sejumlah bantuan sosial dalam rangka penanganan COVID-19. Hal tersebut diperkirakan semakin menahan kinerja LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada tahun 2023.

**Moderasi ekonomi Jawa Timur yang lebih dalam diperkirakan tertahan oleh perbaikan kinerja LU utama, yakni LU Pertanian.**

Kinerja LU Pertanian pada tahun 2023 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan berlanjutnya kebijakan strategis pemulihan ekonomi nasional serta prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan. Program pemulihan ekonomi di bidang pertanian diantaranya meliputi optimalisasi Jawa Timur Agro dan Ketahanan Pangan seperti penguatan *Cooperative Farming*, pertanian berbasis korporasi, pengolahan hortikultura terpadu, optimalisasi program petik olah kemas jual, pengembangan produk pangan berbasis agro, dan adanya asuransi petani nelayan dan ternak sapi. Lebih lanjut, program *smart farming* turut didorong oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan. Di samping itu, berdasarkan berbagai badan klimatologi dunia, cuaca di kawasan Samudera Pasifik, termasuk Jawa Timur, sepanjang Januari – Mei 2023 berada dalam kondisi normal sehingga dapat mendukung produksi tanaman pangan utama di Jawa Timur. Hal tersebut berbeda dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu dimana terjadi gangguan cuaca La Nina dengan intensitas lemah hingga moderat yang mengganggu produksi tanaman pangan di Jawa Timur. Lebih lanjut, hama antraknosa pada tanaman hortikultura dan Penyakit Mulut Kuku (PMK) pada ternak sapi yang menjadi tantangan utama sektor pertanian pada tahun 2022 diperkirakan akan terkendali pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memitigasi hal tersebut. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait mitigasi hama antraknosa dan PMK tercermin dari optimalisasi pestisida serta vaksinasi PMK. Hingga minggu ketiga Mei 2023, berdasarkan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, vaksinasi PMK telah dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dengan presentase mencapai 80% dari alokasi vaksinasi. Meskipun demikian, perbaikan kinerja LU Pertanian yang lebih tinggi berpotensi tertahan oleh masih berlangsungnya konflik geopolitik Rusia – Ukraina serta potensi gangguan cuaca El Nino pada semester II 2023. Berlanjutnya konflik geopolitik Rusia – Ukraina berimplikasi pada peningkatan kebijakan proteksionisme global. Hal tersebut ditengarai berpotensi berdampak pada tertahannya ekspor LN produk pertanian Jawa Timur. Sementara itu, berbagai badan klimatologi dunia, termasuk Badan Klimatologi Indonesia (BMKG) dan Australia memprakirakan terjadinya gangguan cuaca El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II 2023. Kendati demikian, hal ini telah diantisipasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur terutama melalui budidaya bibit tahan kering, percepatan tanam, serta optimalisasi irigasi serta waduk.

Tabel 7.2 Perkiraan Arah Pertumbuhan PDRB Sisi Penawaran (LU Utama) Tahun 2023 (%yoy)

SEKTOR	2019	2020	2021	2022	2023*
Industri Pengolahan	6,82	-2,08	3,37	6,28	↓
Perdagangan	5,96	-5,78	7,77	6,87	↓
Pertanian	1,31	1,01	1,77	1,79	↑
Konstruksi	5,89	-3,28	2,53	6,30	↓
PDRB	5,53	-2,33	3,56	5,34	↓

\* dibandingkan tahun sebelumnya  
Sumber: BPS, proyeksi Bank Indonesia, diolah (2023)

**7.2 Prospek Inflasi Jawa Timur Tahun 2023**

**Inflasi IHK Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan kembali di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).** Tingginya tekanan inflasi dari sisi penawaran pada tahun 2022 terutama akibat peningkatan harga hortikultura serta penyesuaian harga energi berdampak pada tingkat inflasi IHK di Jawa Timur pada tahun 2022 yang lebih tinggi dibandingkan batas atas sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy). Pada tahun 2023, tekanan inflasi dari sisi penawaran diperkirakan mereda sejalan dengan prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan dan harga komoditas energi global yang lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIIP dan TPID serta upaya eksta sinergi pengendalian inflasi pangan berbagai lembaga didukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah diperkirakan turut menjaga tingkat inflasi IHK Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy).

**Prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan hingga awal triwulan II 2023 dan mitigasi serangan hama tanaman dan ternak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TPID Provinsi Jawa Timur diperkirakan mendukung terkendalinya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2023.**

Badan Klimatologi Australia (*Bureau of Meteorology*) memprakirakan cuaca di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, termasuk Jawa Timur, sepanjang Januari – April 2023 dalam kondisi normal, tidak mengalami anomali cuaca baik El Nino maupun La Nina<sup>68</sup>. Hal tersebut berpotensi mendukung produksi tanaman pangan utama di Jawa Timur, yakni padi dan hortikultura di Jawa Timur sehingga mendorong terkendalinya inflasi pangan di Jawa Timur pada tahun 2023. Lebih lanjut, berdasarkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, risiko gangguan cuaca El Nino pada semester II 2023 telah diantisipasi terutama dengan: (1) optimalisasi seluruh lahan pertanian di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk meningkatkan produksi pangan dengan melakukan percepatan tanam bagi lahan-lahan yang sudah selesai panen dengan memanfaatkan kondisi air yang ada; (2) Melakukan budidaya tanaman dengan varietas benih tahan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta varietas yang toleran kekeringan; (3) Melakukan antisipasi kekeringan dengan mengoptimalkan pemanfaatan pompa air, Rehabilitasi Jaringan

68. Hal tersebut berbeda dibandingkan tahun 2022 di mana pada periode Januari – Mei 2022 terjadi La Nina dengan intensitas lemah hingga moderat.

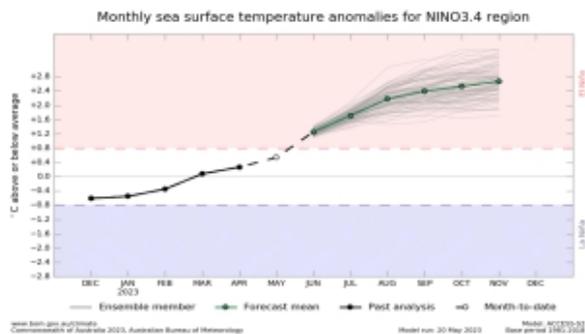
Irigasi Tersier (RJIT), pembangunan embung, pembangunan perpompaan besar dan menengah, serta perpipaan jaringan irigasi, serta; (4) melakukan panen air hujan dan mengisi waduk/embung/danau untuk mengantisipasi dampak musim kemarau serta antisipatif terhadap pergeseran awal masa tanam. Lebih lanjut, hama antraknosa pada tanaman hortikultura dan Penyakit Mulut Kuku (PMK) pada ternak sapi yang menjadi tantangan utama sektor pertanian pada tahun 2022 diperkirakan akan terkendali pada tahun 2023 sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memitigasi hal tersebut. Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait mitigasi hama antraknosa tercermin dari upaya mitigasi hama melalui optimalisasi pestisida. Sementara itu, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pengendalian PMK tercermin dari realisasi penyelesaian vaksinasi PMK yang telah mencapai 80% dari alokasi vaksinasi dan tingkat kesembuhan wabah PMK mencapai 95,39% pada minggu ketiga Mei 2023<sup>69</sup>. Hal – hal tersebut diperkirakan menopang terkendalnya inflasi pangan di Jawa Timur pada tahun 2023, khususnya untuk kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Tembakau. Potensi terkendalnya harga bahan pangan di Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan turut mendorong terkendalnya inflasi di kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada periode yang sama. Meskipun demikian, prakiraan rendahnya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau diperkirakan sedikit tertahan oleh peningkatan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar rata-rata 12% pada Januari 2023 yang mendorong peningkatan harga rokok. Sebagaimana historisnya, pelaku usaha rokok diperkirakan melakukan penyesuaian harga rokok secara bertahap sebagai respon atas peningkatan tarif CHT.

**Tren penurunan harga energi global diperkirakan mendukung terkendalnya inflasi Kelompok Transportasi serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar.** Berdasarkan *World Bank Commodity Price* April 2023, harga minyak dunia jenis *Brent* pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 84 Dollar Amerika Serikat per barel, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 99,8 Dollar Amerika Serikat per barel. Hal tersebut diperkirakan mendukung terkendalnya harga BBM domestik yang berimplikasi

pada terkendalnya inflasi Kelompok Transportasi. Lebih lanjut, berdasarkan publikasi yang sama, harga gas dunia pada tahun 2023 diperkirakan turun sebesar 6,1% (yoy) dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut diperkirakan mendukung terkendalnya harga LPG domestik sehingga mendukung prakiraan tingkat inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar yang stabil. Meskipun demikian, prakiraan rendahnya tekanan inflasi pada kelompok ini diperkirakan sedikit tertahan oleh peningkatan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Surabaya dengan rata-rata peningkatan sebesar 22% pada Januari 2023.<sup>70</sup> Penyesuaian tarif PDAM tersebut sebagai bentuk subsidi silang kepada masyarakat di Kota Surabaya. Penyesuaian tarif berlaku proporsional mempertimbangkan lebar jalan di depan persil pelanggan, luas bangunan, penggunaan persil, pemakaian listrik (daya listrik terpasang) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tarif PDAM gratis akan diberikan kepada pelanggan dengan kriteria: (i) lebar jalan ≤ 3 m; (ii) daya listrik terpasang ≤ 900 VA; (iii) luas bangunan ≤ 45 m<sup>2</sup>; (iv) NJOP < 100 juta; dan (v) pemakaian 0-30 meter kubik.

**Berbagai upaya pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan stakeholder terkait diperkirakan turut mendukung pencapaian inflasi IHK Jawa Timur kembali ke sasaran inflasi 3,0%±1% (yoy) pada tahun 2023.** Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui sinergi TPIP dan TPID. Koordinasi kebijakan tersebut terutama ditujukan sebagai upaya mitigasi risiko inflasi yang bersifat volatile dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat pengaruh harga komoditas pangan global dan ketergantungan produksi terhadap faktor cuaca, serta mitigasi dampak penetapan tarif dan berbagai kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar dan Transportasi. Upaya ekstra pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Bank Indonesia dan berbagai stakeholder terkait diperkirakan semakin mendukung terkendalnya inflasi pangan yang mendukung pencapaian inflasi IHK Jawa Timur sesuai sasaran inflasi

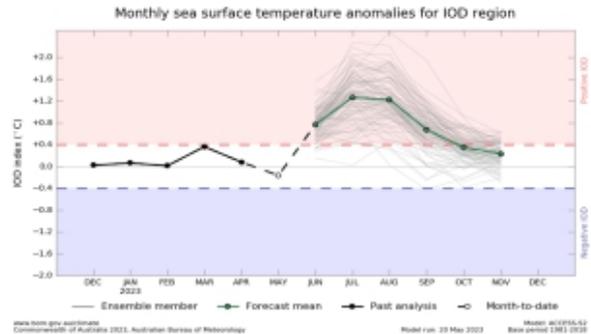
Grafik 7.1 Proyeksi Indeks Nino



Sumber: Badan Klimatologi Australia (BOM), Mei 2023

69. Berdasarkan informasi Posko Terpadu Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 17 Mei 2023.

Grafik 7.2 Proyeksi Indeks Indian Ocean Dipole (IOD)



Sumber: Badan Klimatologi Australia (BOM), Mei 2023

70. Peningkatan tarif PDAM di Kota Surabaya sebesar rata-rata 22% pada Januari 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/775/KPTS/013/2021 Tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum bagi BUMD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 123 Tahun 2022. Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

3,0%±1% (yoy) pada tahun 2023. Upaya-upaya ekstra tersebut meliputi penguatan KAD, peningkatan intensitas dukungan operasi pasar, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian dari hulu hingga hilir, serta peningkatan *urban farming*.

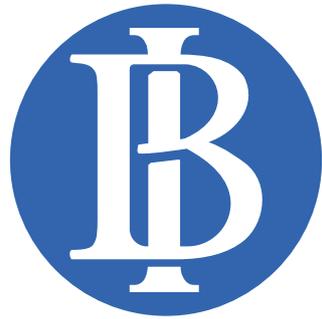
Faktor-faktor yang dapat memengaruhi inflasi di tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7.3 Faktor Pendorong dan Penahan Inflasi Jawa Timur Tahun 2023

Faktor Pendorong Inflasi Tahun 2023
Akselerasi vaksin COVID-19 diperkirakan akan meningkatkan pembukaan sektor produktif yang berimplikasi pada peningkatan permintaan masyarakat.
Peningkatan harga impor bahan baku dan bahan penolong yang disebabkan oleh masih adanya disrupsi logistik perdagangan global.
Risiko gangguan cuaca El Nino pada semester II 2023 yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan.

Faktor Penahan Inflasi Tahun 2023
Estimasi lebih rendahnya harga komoditas energi global pasca tumbuh tinggi pada tahun 2022.
Peran aktif TPID dalam upaya pengendalian harga dan menjaga ekspektasi masyarakat.
Proyeksi cuaca yang berada di tingkat normal (tidak terdapat El Nino dan La Nina) sepanjang Januari – April 2023 yang mendukung produksi tanaman pangan.
Nilai tukar rupiah yang masih terjaga.



# Daftar Istilah

## **Administered price**

Harga barang yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

## **APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **BI 7 Days Reverse Repo Rate**

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

## **BI-RTGS**

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara on-line atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

## **Bobot Inflasi**

Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.

## **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito).

## **Ekspor dan Impor**

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

## **Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)**

Rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

## **Imported inflation**

Salah satu disgregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal).

## **Indeks Ekspektasi Konsumen**

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

## **Indeks Kondisi Ekonomi**

Salah satu pembentuk IKK, indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dengan skala 1 – 100.

## **Indeks Keyakinan Konsumen (Consumer Confidence)**

Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang dengan skala 1 – 100.

## **Inflasi IHK**

Kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

## **Inflasi Inti**

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

## **Inflow**

Uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

## **Investasi**

Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi.

## **Kredit**

Penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- Pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan note purchase agreement (NPA)
- Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

## **Loan to Deposit Ratio (LDR) atau Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

## **Loan to Funding Ratio (LFR)**

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga dan surat berharga yang diterbitkan bank.

## **Liaison**

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

## **mtm**

*Month to month*. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

## **Net Inflow**

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

## **Non Performing Financing (NPF) atau Non Performing Loan (NPL)**

Rasio pembiayaan atau kredit macet terhadap total penyaluran pembiayaan atau kredit oleh bank, baik dalam rupiah dan valas, Terminologi NPF dan pembiayaan untuk bank syariah, sedangkan NPL dan kredit untuk bank konvensional. Kriteria NPF atau NPL adalah (1) kurang lancar, (2) diragukan dan (3) macet.

## **Omset**

Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.

## **Outflow**

Aliran keluar uang kartal dari Bank Indonesia.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, redistribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

**qtq**

*Quarter to quarter*. Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.

**Real Time Gross Settlement (RTGS)**

Sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.

**Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)**

Sistem pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

**Volatile Food**

Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu khususnya komoditas bahan makanan.

**yoy**

*Year on year*. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.

# DAFTAR SINGKATAN

<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>BBM</b>	Bahan Bakar Minyak
<b>BBNKB</b>	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
<b>BKPM</b>	Badan Koordinasi Penanaman Modal
<b>BLUD</b>	Badan Layanan Umum Daerah
<b>BPS</b>	Badan Pusat Statistik
<b>BUKU</b>	Bank Umum Kelompok Usaha
<b>CIF</b>	Cost, Insurance and Freight
<b>DAU</b>	Dana Alokasi Umum
<b>DAK</b>	Dana Alokasi Khusus
<b>DER</b>	Debt Equity Ratio
<b>DOF</b>	Derajat Otonomi Fiskal
<b>DPK</b>	Dana Pihak Ketiga
<b>DSR</b>	Debt Service Ratio
<b>FGD</b>	Focus Group Discussion
<b>FOB</b>	Free on Board
<b>FTV</b>	Financing to Value
<b>IHK</b>	Indeks Harga Konsumen
<b>IKK</b>	Indeks Keyakinan Konsumen
<b>IPR</b>	Indeks Penjualan Riil
<b>JISDOR</b>	Jakarta Interbank Spot Dollar Rate
<b>KI</b>	Kredit Investasi
<b>KK</b>	Kredit Konsumsi
<b>KKB</b>	Kredit Kendaraan Bermotor
<b>KMK</b>	Kredit Modal Kerja
<b>KPA</b>	Kredit Pemilikan Apartemen
<b>KPR</b>	Kredit Pemilikan Rumah
<b>LDR</b>	Loan to Deposit Ratio
<b>LFR</b>	Loan to Funding Ratio
<b>LNPRT</b>	Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga
<b>LTV</b>	Loan to Value

<b>MTM</b>	Month to month
<b>NPF</b>	Non Performing Financing
<b>NPL</b>	Non Performing Loan
<b>NTN</b>	Nilai Tukar Nelayan
<b>NTP</b>	Nilai Tukar Petani
<b>PAD</b>	Pendapatan Asli Daerah
<b>PDRB</b>	Produk Domestik Regional Bruto
<b>PLN</b>	Perusahaan Listrik Negara
<b>PMA</b>	Penanaman Modal Asing
<b>PMDN</b>	Penanaman Modal Dalam Negeri
<b>PMTB</b>	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto
<b>PPBKB</b>	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
<b>QTQ</b>	Quarter to quarter
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RTGS</b>	Real Time Gross Settlement
<b>SBT</b>	Saldo Bersih Tertimbang
<b>SISKAPE</b>	Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan
<b>RBAPO</b>	Harga Bahan Pokok
<b>SITC</b>	Standard International Trade Classification
<b>SKDU</b>	Survei Kegiatan Dunia Usaha
<b>SKNBI</b>	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
<b>SPE</b>	Survei Penjualan Eceran
<b>TPAK</b>	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
<b>TPID</b>	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
<b>TPK</b>	Tingkat Penghunian Kamar
<b>TPT</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka
<b>TTL</b>	Tarif Tenaga Listrik
<b>UMKM</b>	Usaha Mikro Kecil Menengah
<b>UTLE</b>	Uang Tidak Layak Edar
<b>YOY</b>	Year on year

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Pahlawan No. 105 Surabaya Jawa Timur  
Telp. +6231 3520011, Fax. +6231 3520025  
[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

